



SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV

**SUB TEMA
STUDI BANDINGAN**

rektorat
dayaan



SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV

**SUB TEMA
STUDI BANDINGAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985**

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud, sesuai program kerja tahun 1985/86 telah menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional IV dari tanggal 16 – 19 Desember 1985, bertempat di Hotel Garuda Yogyakarta, dengan tema "Sumbangan Penelitian dan Penulisan Sejarah terhadap Pembangunan".

Dalam hal ini penelitian dan penulisan sejarah hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "pemerintah memajukan Kebudayaan nasional Indonesia", itu mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudaya-

an nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam lingkup ruang dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejarahan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional IV itu dapat ditemukan para sejarawan dan berbagai fihak yang menaruh minat dalam kesejarahan, Forum Seminar itulah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudah penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Dalam Seminar Sejarah Nasional IV ini dibahas enam masalah pokok, yang terdiri atas : 1) Dinamika politik, 2) Dinamika ekonomi, 3) Dinamika Sosial Budaya, 4) Historiografi, 5) Kajian Bandingan dan 6) Pendidikan Sejarah.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, D.I. Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin, Palembang, Bima,

Ujungpandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional IV ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, Desember 1985
PROYEK INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

**SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV DI
YOGYAKARTA TANGGAL 16 DESEMBER 1985**

Pada kesempatan ini saya merasa berpeluang untuk menyampaikan beberapa butir pemikiran yang kiranya bisa merupakan sekedar sumbangan bagi Saudara-saudara para peserta Seminar Sejarah yang berlangsung sekarang ini. Belum lama berselang kita dihadapkan pada permasalahan penulisan sejarah, dan segera saya secara pribadi maupun sebagai petugas yang terlibat menyadari benar betapa perlunya kaum sejarawan kita menangani permasalahan penulisan sejarah pada khususnya.

Sejarah adalah manifestasi yang khas manusiawi; pengenalan sejarah merupakan kenyataan manusiawi yang dapat kita telusuri sejak perkembangan kemanusiaan yang paling dini, sejauh masa itu meninggalkan jejak-jejaknya melalui fakta-fakta tertentu.

Dari goresan berupa lukisan atau tulisan sampai dengan jejak yang berupa dokumen dan monumen, manusia seperti ini ingin merekam kehadirannya dalam sesuatu masa, dan rekaman yang ditinggalkannya itu kelak akan menjadi petunjuk tentang kehadirannya itu. Tidak jarang rekaman itu dibuat oleh orang lain. Seperti halnya dalam masa Firaun rekaman

fakta dan peristiwa itu ditugaskan kepada tokoh "the Scribe" yang kerjanya tidak lain dari menulis catatan harian mengenai berbagai fakta dan peristiwa. Dan banyak contoh lainnya yang menunjukkan bahwa ikhtiar untuk merekam serupa itu cukup dikenal oleh setiap sejarawan.

Akan tetapi jelas pula bahwa tidak semua fakta dan peristiwa direkam dan tidak untuk semua orang dibangun cerita atau tugu; tentunya ada sesuatu makna, mengapa sesuatu realitas diinginkan untuk bertahan dan dikenali.

Sejarah memang berusaha mengungkapkan sesuatu realitas di masa lalu, akan tetapi tidak semua realitas di masa lalu punya alasan untuk bertahan dan dikenali kembali sebagai kenyataan historis.

Maka di sinilah letak tantangan pertama bagi para sejarawan; ia harus bertaut dengan kenyataan-kenyataan masa lalu, dan untuk ini ia harus dijembatani oleh jejak-jejak yang merekam masa lalu, apapun bentuk jejak-jejak itu. Ia seolah-olah harus menepi pada masa lalu melalui konfrontasinya dengan realitas fisik dan material di masa kini. Realitas termaksud pada hakikatnya tidak lebih dari sekeping kenyataan yang pada sendirinya bisu belaka; sejauh mana kenyataan tersebut bisa diterobos kebisuannya dan selanjutnya berperan memberikan kesaksian pada suatu fragmen di masa lalu, sangat tergantung dari kemahiran sang sejarawan untuk menemuinya sebagai representasi dari masa yang sudah silam. Melalui kenyataan yang ditemuinya itu sang sejarawan seolah-olah harus membuat perjalanan *retrogresif*. Akan tetapi dalam menelusuri jalan mundur itu ia harus sangat berhati-hati dalam membuat evaluasi dan interpretasinya tentang segala temuannya. Sebab pasti bukanlah hal yang mudah untuk menilai dan menafsirkan temuan-temuan dari masa lalu dari sudut pandang masa kini. Seorang sejarawan diharapkan bisa menyajikan kembali masa lalu secara objektif; akan tetapi mungkin perlu dipertanyakan, bagaimana objektivisme historis itu harus dipenuhi. Berbeda dengan seorang ilmuwan lain yang melakukan observasi terhadap kenyataan objek-

tif "kini & di sini", seorang sejarawan melalui pertemuannya dengan sesuatu yang ada "kini & disini" harus menjelajah ke kenyataan yang sudah sirna dan tidak mungkin diungkapkan kembali dalam kesejatan wujudnya.

Dalam penjelajahannya yang retrogresif itu tidak segala temuannya dinilai signifikan: di antara banyak pepohonan mungkin ada satu pohon yang dinilainya bersejarah, di antara sekian banyak manusia satu nama menonjol dan punya makna, di antara banyak reruntuhan dan puing-puing bangunan ada satu-dua yang segera menarik perhatiannya; pendeknya, dalam perjalanannya yang mundur itu, sang sejarawan mengungkapkan berbagai kenyataan yang bermakna di masa lalu.

Maka mengandung kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh Friedrich Schlegel, bahwa sejarawan itu ibarat "*eine ruckwärts gekehrten Propheten*". Demikianlah seharusnya; tidak ringanlah tanggungjawab yang terbebankan pada seorang sejarawan untuk menyajikan kembali masa lalu sebagaimana ditemuinya, bukan sebagaimana masa lalu dibangunnya kembali sesuai selera dan subjektivitas persepsi atau emosinya. *Minat dan keterkaitan seorang sejarawan dengan sesuatu fakta atau peristiwa di masa lalu seharusnya terkendali secara intelektual dan bukannya emosional. Disiplin inilah yang terasa berat manakala sejarawan itu dihadapkan dengan tugas untuk merekam fakta dan peristiwa dari zamannya sendiri.*

Makin jauh suatu zaman dari posisi seorang sejarawan dalam ruang dan waktu, makin rumit pula tugasnya untuk menghimpun fragmen-fragmen yang ditemuinya guna dibangun kembali secara koheren. Tidak jarang kenyataan masa lalu itu ditemui oleh sang sejarawan sebagai "disiecta membra" yang menuntut perakitan kembali secermat-cermatnya untuk kemudian dimantapkan sebagai fakta sejarah. Menarik sekali misalnya, betapa akhir-akhir ini orang mempersoalkan masalah "mana" sesungguhnya makam Diponegoro? Sampai sekarang pun belum disepakati penuh, di mana sebenarnya Adolf Hitler berakhir ri-

wayatnya dan di mana kemudian ia dikubur? Apakah ceritera tentang Anastasia sekedar dongeng yang berkembang dalam masa pasca-revolusi Rusia, atautkah ceritera yang benar-benar terjadi menyangkut seorang keturunan Tsar yang berhasil meloloskan diri dan kemudian mengembara di luar Rusia?

Jelaslah bahwa dalam hubungan dengan contoh-contoh di atas ini, tugas untuk "*merakit sejarah*" berbeda dengan upaya "*meramu dongeng*". Keduanya punya gaya tersendiri untuk memukau, keduanya punya cara tersendiri untuk memikat kita; namun demikian yang satu tetap harus diperbedakan dari lainnya. "*Dichtung und Wahrheit*" sama-sama punya fungsi, tapi fungsi itu bukannya sama satu dengan lainnya. Dalam sejarah bangsa-bangsa pun terdapat cukup banyak petunjuk bahwa "*Dichtung*" maupun "*Wahrheit*" itu ada jasanya dalam pembinaan identitas bangsa.

Pembinaan identitas bangsa tidak mungkin dilepaskan dari kesadaran bangsa itu sebagai kesejarahan (*historicity*); sejarah (*history*) saja mungkin ditampilkan kembali sebagai suatu kronologi peristiwa, suatu proses yang berlangsung dalam waktu dan mustahil dihindari atau dihentikan. *Kesejarahan adalah kesadaran keterkaitan pada masa lalu yang bermakna dan ikut membentuk "status praesens"*. Dalam arti inilah maka kesejarahan itu sangat penting artinya dalam pembentukan identitas — (sebagai pribadi ataupun sebagai kolektivitas).

Kenyataan manusiawi mustahil difahami sekedar melalui ontologi yang Eleatik belaka. "Esensi daripada kenyataan manusiawi adalah eksistensi", demikianlah formula para filsuf eksistensialis. Manusia bukan sekedar "ada", melainkan lebih dari itu manusia adalah "ada-dalam-perkembangan-senantiasa" (*more than just a "being" man is a continuum of becoming*). Sejiwa dengan rumus ini, filsuf Spanyol J. Ortega y Gasset menegaskan rumusnya: "*Man has no nature, what he has is... history*".

Apa yang diutarakan di atas kiranya bisa menjadi petunjuk betapa pentingnya arti sejarah sebagai fenomena manusiawi.

Sejarah adalah sumber orientasi (masa lalu) yang dikenali kembali dari suatu pusat orientasi lain (masa kini). Upaya pengenalan itu nampaknya didorong oleh keinginan kita untuk menemukan sambungan antara masa lalu dan masa kini. Maka tidak sepenuhnya keliru untuk menyimpulkan, bahwa pengenalan sejarah itu antara lain berfungsi untuk merentangkan kesinambungan antara dua kutub yang bertentangan, yaitu kutub kenyataan yang sudah silam dan sirna dengan kutub yang masih nyata dan kentara.

Dalam membahas masalah-masalah sejarah nasional Indonesia, hendaknya para sejarawan kita bukan sekedar menuntaskan ikhtiar untuk memantapkan penulisannya sebagai serangkai-an peristiwa, akan tetapi juga mampu menyajikannya sebagai sumber andalan kesadaran kesejarahan eksistensial bagi kehidupan kebangsaan Indonesia dengan identitasnya yang mantap.

Dengan ketekunan Saudara-saudara menjelajahi masa lalu, dengan kecermatan Saudara-saudara untuk merakit segala temuan dalam penjelajahan itu, dengan kecermatan Saudara-saudara untuk memilih antara "Dichtung" dengan "Wahrheit", maka kita boleh berharap bahwa dari Seminar ini akan dikristalisasi hasil-hasil pemikiran yang segar dan mendasar perihal studi sejarah pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan sejarah nasional Indonesia.

Tugas Saudara-saudara memang berat, akan tetapi mulia; dan mudah-mudahan terwujudlah melalui Saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Schlegel, bahwa sejarawan adalah "*eine ruckwärts gekehrten Propheten*".

Saya mohon kelapangan dada Saudara-saudara untuk memaafkan saya bila dalam kata-kata sambutan saya ini terdapat kekeliruan dan kekurangan faham; bukan keahlian dalam seja-

rah, melainkan hanya itikad baiklah yang hendak saya sumbangkan pada Seminar Sejarah kali ini.

Demikianlah, maka sepersetujuan segenap hadirin, bersama ini Seminar Sejarah Nasional IV saya nyatakan dengan resmi dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuad Hassan', with a stylized flourish at the end.

Fuad Hassan

DIMENSI BIOGRAFIS DALAM HISTORIOGRAFI INDONESIA: UNGKAPAN KISAH PERJALANAN INTELEKTUAL

(Oleh Sartono Kartodirdjo)

I

Pada tempatnya kiranya kita berkumpul sekarang ini sekedar mengenangkan Seminar Sejarah Nasional (SSN) Pertama yang diselenggarakan tepat 28 tahun yang lalu sebagai batu tonggak sejarah, penting dalam rangka mengembangkan historiografi Indonesia. Pada saat itulah kita menemukan momentum baik untuk menyatakan kesadaran sejarah bangsa Indonesia yang telah memasuki pertengahan abad ke-20 sebagai nasion yang berdaulat. Peningkaran-peningkaran yang menjiwai historiografi kolonial menimbulkan rangsangan untuk membangkitkan kesadaran sejarah sebagai resonansi kesadaran kehidupan politik merdeka di satu pihak, dan pada pihak lain sebagai ekspresi aspirasi nasional untuk menemukan kembali identitasnya. Apabila cakrawala pemikiran sejarah dinyatakan berpusat pada indonesiasentrisme, suatu visi yang secara dialektis merupakan sintesa dari Neerlandosentrisme dan etnosentrisme, strukturalisasi penulisan sejarah berdasarkan periodisasinya berlandaskan prinsip integrasi.

Adapun penjabaran gagasan-gagasan dasar untuk penulisan buku pelajaran sejarah secara ideal dicita-citakan segera dapat terwujud, pada waktu ini kita ada dalam posisi lebih baik untuk menilai kompleksitas permasalahan serta pelaksanaannya daripada masyarakat waktu itu. Pada hemat saya, terlepas dari segala keterbatasannya, SSN I cukup meninggalkan dampak sebagai "mercu suar" yang menunjukkan jalur pelayaran mana yang perlu ditempuh untuk mengarah kepada historiografi nasional, suatu sejarah yang dari dalam mengungkapkan seluruh pengalaman bersama bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya serta merealisasikan dirinya sepenuhnya.

Sudah berkali-kali dibuat neraca perkembangan historiografi Indonesia tidak hanya untuk mengukur kemajuannya, akan tetapi juga untuk menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol. Selaku orang yang turut berperan dalam proses perkembangan itu sejak sebelum SSN I diselenggarakan, kali ini pembicara akan mengungkapkan pengalaman pribadi sebagai pencerminan proses umum strukturasi kesadaran sejarah atau dengan perkataan lain kristalisasi proses rekonstruksi sejarah seperti yang dihayati selama tiga setengah dasawarsa terakhir ini.

Kalau ada suatu tindak lanjut yang merupakan konsekuensi logis dari problematik yang dibahas dalam SSN I tak boleh tidak rekonstruksionisme adalah prioritas utama dalam agenda penulisan sejarah. Peningkaran-peningkaran yang *inherent* ada dalam Neerlandosentrisme menuntut rekonstruksi sejarah Indonesia sebagai konstruk yang otonom, dengan unit geopolitis yang dengan kekuatan endogen menyelenggarakan eksistensinya penuh dengan kejadian-kejadian yang secara presesual dan struktural mewujudkan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Per definisi sejarah nasional itu memberi legitimasi kepada nasional Indonesia dan sekaligus menunjukkan acara dari penulisan sejarah nasional.

Secara kebetulan pada titik pertumbuhan itu bidang studi Sejarah kritis mulai mengadakan pembibitan keahlian sebagai

proses wajar ke arah Institusionalisasi keahlian sejarah sebagai profesi. Tidak mengherankan apabila waktu memasuki tahun enam puluhan Rekonstruksionisme menjadi dominant dalam perkembangan historiografi Indonesia. Pada hemat pembicara, baik pada waktu itu maupun ditinjau kembali dari masa kini, jawaban yang tetap dalam menghadapi tantangan yang terkandung dalam problematik SSN I tak lain tak bukan ialah melakukan rekonstruksi sejarah dengan visi dan pendekatan baru. Apakah implikasi teoretis dan metodologinya hanya prosedur kerja dalam perbengkelan akan mampu memberikan gambaran yang memadai, lagi pula dapat mengungkapkan tidak hanya ke-trampilan teknis, melainkan juga bagaimana keahlian, tercampur dengan inspirasi imajinasi serta seni-seni penulisan, kesemuanya dituntut dari rekonstruksionis untuk dihayati sepenuhnya.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa wetiap rekonstruksi tidak terjadi *'in vacuo'* (dalam kekosongan) namun perlu ditempatkan dalam konteks tertentu. Untuk dapat memahami karya seorang sejarawan sepenuhnya, maka perlu diketahui "cakrawala intelektualnya" yang mencakup tidak hanya kerangka kosneptualnya dan metodologinya tetapi juga latar belakang hidupnya, *lebensweltnya* (lingkungan hidupnya sehari-hari), *welt anschauung*-nya (pandangan hidup), *zeitgeist*-nya (jiwa zaman), dan lain sebagainya, pendeknya seluruh pengalamannya. Justru pengalaman rekonstruksionis itulah yang senantiasa berfungsi sebagai medium interpretasi peristiwa-peristiwa dan dengan demikian menjadi determinan dalam proses strukturasi kesadaran sejarah. Dipandang dalam perspektif itu makna suatu teks sejarah tidak hanya terletak pada apa yang intrinsik ada pada teks itu tetapi lebih-lebih pada hal-hal yang ekstrinsik, maka pendekatan secara kontekstual akan lebih mampu mengungkapkan maknanya. Tidak dengan sendiri suatu naskah mengungkapkan maksud apakah yang ada di belakang penulisannya, sebab apakah pilihan jatuh pada tema atau topik tulisan itu, ciri-ciri apakah yang sebenarnya mencerminkan jiwa

zaman, bagaimanakah mendudukan teks itu dalam fase perkembangan historiografi nasional, dan seterusnya.

II

Pandangan retrospektif dan sekaligus introspektif tentang karya pribadi sekali-kali tidak dimaksud sebagai ekspresi egologis namun untuk memproyeksikan diri serta mengobyektifikasikan diri sehingga dapat dipakai sebagai bahan komunikasi intersubjektif. Dengan demikian pemikiran pada bidang pribadi dapat dipindahkan ke bidang umum sebagai bagian dari proses universalisasi.

Di sini tidak ada anggapan mengenai autentisitas pembicara dari pelbagai konstruk yang dipakainya. Seluruh uraian mengungkapkan adanya dari fase awal secara terus-menerus adanya proses dialektik antara problematik, pandangan serta teori ataupun aliran pemikiran yang sedang menonjol dengan pemikiran pembicara yang lewat internalisasi mencoba menyintesa-kan kesemuanya itu ke dalam perbendaharaan pengetahuannya. Apabila setiap pengakuan (*confession*) menimbulkan "penjernihan" atau "pemurnian" realitas subyektif, artinya menjadi dekat atau *conform* dengan realitas obyektif, maka pemikiran reflektif diharapkan mendistansiasikan diri dari subyektivitas. Kalau setiap verbalisasi pikiran memudahkan komunikasi intersubjektif maka diharapkan perumusan pengalaman pribadi berfungsi sebagai katalisator dalam menemukan realita intersubjektif atau obyektivitas.

Dengan demikian terjadi pengkristalisasi konstruk atau struktur-struktur kesadaran sejarah pribadi menjadi konstruk pengalaman kolektif. Proses yang terus-menerus terjadi tetapi tidak tampak hanya dapat diungkapkan lewat dimensi pribadi. Sama sekali tidak dikandung maksud di sini menepuk dada ataupun membanggakan diri. Pemikiran reflektif menjadi cara mengeksternalisasikan dan mengintersubjektivitasikan hal-hal yang subyektif sehingga dapat ditransandensikannya. Proses itu

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KE- BUDAYAAN	v
DAFTAR ISI	xi
SUB TEMA UMUM	
1. Sebuah Biografi dan Historiografi Indonesia (oleh Sartono Kartodirdjo)	1
2. Fakta dalam Penulisan Sejarah Indonesia (oleh Harsja W. Bachtiar)	22
3. Pengalaman yang berlaku, Tantangan yang men- datang : Ilmu Sejarah & Tahun 1970-an dan 1980- an (oleh Taufik Abdullah)	43
SUB TEMA STUDI BANDINGAN	
1. Hubungan Lampung dengan Kesultanan Banten dan Palembang dalam Perspektif Sejarah, 1500 – 1900 (oleh Husin Sayuti)	74
2. Makna Hubungan Bali dan Jawa dalam Revolusi Fisik di Bali 1945 – 1950 (oleh Ida Bagus Rama).	90

3. Masalah Pendidikan Sejarah di Sekolah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jepang (oleh I Ktut Surajaya)	109
4. Perekonomian Masa Kediri : Bandingan Data dan Teori (oleh Edi Sedyawati)	134
5. Proses Modernisasi Abad Sembilan dan Abad dua puluh (oleh Noerhadi Magestari)	147
6. Historiografi Daerah : Sebuah Kajian Bandingan (oleh Ayatrohaedi)	161
7. Gerakan Andi Abdul Azis dan Abdul Kahar Muzakar Nuansa Pembrontakan Terhadap Negara (oleh Mukhlis P.)	171
DAFTAR PEMBAWA MAKALAH	188
LAMPIRAN	195

DIMENSI BIOGRAFIS DALAM HISTORIOGRAFI INDONESIA: UNGKAPAN KISAH PERJALANAN INTELEKTUAL

(Oleh Sartono Kartodirdjo)

I

Pada tempatnya kiranya kita berkumpul sekarang ini sekedar mengenangkan Seminar Sejarah Nasional (SSN) Pertama yang diselenggarakan tepat 28 tahun yang lalu sebagai batu tonggak sejarah, penting dalam rangka mengembangkan historiografi Indonesia. Pada saat itulah kita menemukan momentum baik untuk menyatakan kesadaran sejarah bangsa Indonesia yang telah memasuki pertengahan abad ke-20 sebagai nasion yang berdaulat. Pengingkaran-pengingkaran yang menjiwai historiografi kolonial menimbulkan rangsangan untuk membangkitkan kesadaran sejarah sebagai resonansi kesadaran kehidupan politik merdeka di satu pihak, dan pada pihak lain sebagai ekspresi aspirasi nasional untuk menemukan kembali identitasnya. Apabila cakrawala pemikiran sejarah dinyatakan berpusat pada indonesiasentrisme, suatu visi yang secara dialektis merupakan sintesa dari Neerlandosentrisme dan etnosentrisme, strukturalisasi penulisan sejarah berdasarkan periodisasinya berlandaskan prinsip integrasi.

Adapun penjabaran gagasan-gagasan dasar untuk penulisan buku pelajaran sejarah secara ideal dicita-citakan segera dapat terwujud, pada waktu ini kita ada dalam posisi lebih baik untuk menilai kompleksitas permasalahan serta pelaksanaannya daripada masyarakat waktu itu. Pada hemat saya, terlepas dari segala keterbatasannya, SSN I cukup meninggalkan dampak sebagai "mercu suar" yang menunjukkan jalur pelayaran mana yang perlu ditempuh untuk mengarah kepada historiografi nasional, suatu sejarah yang dari dalam mengungkapkan seluruh pengalaman bersama bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya serta merealisasikan dirinya sepenuhnya.

Sudah berkali-kali dibuat neraca perkembangan historiografi Indonesia tidak hanya untuk mengukur kemajuannya, akan tetapi juga untuk menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol. Selaku orang yang turut berperan dalam proses perkembangan itu sejak sebelum SSN I diselenggarakan, kali ini pembicara akan mengungkapkan pengalaman pribadi sebagai pencerminan proses umum strukturasi kesadaran sejarah atau dengan perkataan lain kristalisasi proses rekonstruksi sejarah seperti yang dihayati selama tiga setengah dasawarsa terakhir ini.

Kalau ada suatu tindak lanjut yang merupakan konsekuensi logis dari problematik yang dibahas dalam SSN I tak boleh tidak rekonstruksionisme adalah prioritas utama dalam agenda penulisan sejarah. Peningkaran-peningkaran yang *inherent* ada dalam Neerlandosentrisme menuntut rekonstruksi sejarah Indonesia sebagai konstruk yang otonom, dengan unit geopolitis yang dengan kekuatan endogen menyelenggarakan eksistensinya penuh dengan kejadian-kejadian yang secara presesual dan struktural mewujudkan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Per definisi sejarah nasional itu memberi legitimasi kepada nasional Indonesia dan sekaligus menunjukkan acara dari penulisan sejarah nasional.

Secara kebetulan pada titik pertumbuhan itu bidang studi Sejarah kritis mulai mengadakan pembibitan keahlian sebagai

proses wajar ke arah Institusionalisasi keahlian sejarah sebagai profesi. Tidak mengherankan apabila waktu memasuki tahun enampuluhan Rekonstruksionisme menjadi dominan dalam perkembangan historiografi Indonesia. Pada hemat pembicara, baik pada waktu itu maupun ditinjau kembali dari masa kini, jawaban yang tetap dalam menghadapi tantangan yang terkandung dalam problematik SSN I tak lain tak bukan ialah melakukan rekonstruksi sejarah dengan visi dan pendekatan baru. Apakah implikasi teoretis dan metodologinya hanya prosedur kerja dalam perbengkelan akan mampu memberikan gambaran yang memadai, lagi pula dapat mengungkapkan tidak hanya ke-trampilan teknis, melainkan juga bagaimana keahlian, tercampur dengan inspirasi imajinasi serta seni-seni penulisan, kesemuanya dituntut dari rekonstruksionis untuk dihayati sepenuhnya.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa wetiap rekonstruksi tidak terjadi "*in vacuo*" (dalam kekosongan) namun perlu ditempatkan dalam konteks tertentu. Untuk dapat memahami karya seorang sejarawan sepenuhnya, maka perlu diketahui "cakrawala intelektualnya" yang mencakup tidak hanya kerangka kosneptualnya dan metodologinya tetapi juga latar belakang hidupnya, *lebensweltnya* (lingkungan hidupnya sehari-hari), *welt anschauung*-nya (pandangan hidup), *zeitgeist*-nya (jiwa zaman), dan lain sebagainya, pendeknya seluruh pengalamannya. Justru pengalaman rekonstruksionis itulah yang senantiasa berfungsi sebagai medium interpretasi peristiwa-peristiwa dan dengan demikian menjadi determinan dalam proses strukturasi kesadaran sejarah. Dipandang dalam perspektif itu makna suatu teks sejarah tidak hanya terletak pada apa yang intrinsik ada pada teks itu tetapi lebih-lebih pada hal-hal yang ekstrinsik, maka pendekatan secara kontekstual akan lebih mampu mengungkapkan maknanya. Tidak dengan sendiri suatu naskah mengungkapkan maksud apakah yang ada di belakang penulisannya, sebab apakah pilihan jatuh pada tema atau topik tulisan itu, ciri-ciri apakah yang sebenarnya mencerminkan jiwa

zaman, bagaimanakah mendudukan teks itu dalam fase perkembangan historiografi nasional, dan seterusnya.

II

Pandangan retrospektif dan sekaligus introspektif tentang karya pribadi sekali-kali tidak dimaksud sebagai ekspresi egologis namun untuk memproyeksikan diri serta mengobyektifikasikan diri sehingga dapat dipakai sebagai bahan komunikasi intersubjektif. Dengan demikian pemikiran pada bidang pribadi dapat dipindahkan ke bidang umum sebagai bagian dari proses universalisasi.

Di sini tidak ada anggapan mengenai autentisitas pembicara dari pelbagai konstruk yang dipakainya. Seluruh uraian mengungkapkan adanya dari fase awal secara terus-menerus adanya proses dialektik antara problematik, pandangan serta teori ataupun aliran pemikiran yang sedang menonjol dengan pemikiran pembicara yang lewat internalisasi mencoba menyintesaikan kesemuanya itu ke dalam perbendaharaan pengetahuannya. Apabila setiap pengakuan (*confession*) menimbulkan "penjernihan" atau "pemurnian" realitas subyektif, artinya menjadi dekat atau *conform* dengan realitas obyektif, maka pemikiran reflektif diharapkan mendistansiasikan diri dari subyektivitas. Kalau setiap verbalisasi pikiran memudahkan komunikasi intersubjektif maka diharapkan perumusan pengalaman pribadi berfungsi sebagai katalisator dalam menemukan realita intersubjektif atau obyektivitas.

Dengan demikian terjadi pengkristalisasi konstruk atau struktur-struktur kesadaran sejarah pribadi menjadi konstruk pengalaman kolektif. Proses yang terus-menerus terjadi tetapi tidak tampak hanya dapat diungkapkan lewat dimensi pribadi. Sama sekali tidak dikandung maksud di sini menepuk dada ataupun membanggakan diri. Pemikiran reflektif menjadi cara mengeksternalisasikan dan mengintersubyektivitaskan hal-hal yang subyektif sehingga dapat ditransandensikannya. Proses itu

merupakan bagian esensial dari transformasi hal-hal subyektif menjadi realitas obyektif.

Pendekatan biografis ini sebenarnya hanya merupakan suatu cara membuat eksplisit hal-hal yang biasanya terkandung dalam setiap kelakuan ekspresif memuatnya secara implisit.

Pengalaman di bawah kesadaran akan berubah menjadi pengalaman penuh kesadaran yang lewat transendensi diri itu menjadi pengalaman kolektif. Apabila sejarah sebagai konstruk dapat dianggap sebagai pengalaman kolektif itu maka pemikiran reflektif sejarawan mengenai biografi historiografinya akan mempertinggi derajat kesadaran kolektif itu. Kalau pengalaman individual merupakan medium utama dalam menginterpretasi fakta sejarah dan situasi kontemporer maka pengalaman kolektif itu menjadi kerangka referensi umum dalam memahami situasi kita baik di masa lampau maupun masa kini.

Lagi pula pemikiran reflektif akan memperkuat kemampuan memahami situasi orang lain atau tokoh sejarah tidak lain karena ada truisme yang mengatakan bahwa untuk dapat memahami orang lain kita terlebih dulu memahami diri sendiri.

Untuk dapat memahami metodologi serta teori yang mendukungnya dari seorang sejarawan diperlukan pengetahuan seluruh latar belakang hidupnya sebagai totalitas, lebih-lebih lokasi sosiohistorisnya. Metodologi itu tidak hanya disusun dalam menghadapi fakta-fakta beserta permasalahannya, tetapi lebih-lebih berhubungan erat dengan pengalaman pribadi dan realitas sosial yang dihadapi sejarawan.

Tidak jarang metodologi itu tersusun sebagai "jawaban" terhadap negasi atau pengingkaran-pengingkaran, terutama justru untuk membantah negasi itu. Bukankah prinsip Indonesia-sentrisme dikonseptualisasikan justru untuk membantah negasi dari eksistensi sejarah Indonesia yang otonom dan autentik, d.p.l. suatu negasi terhadap identitas bangsa Indonesia yang dilambangkan oleh sejarah Indonesia itu.

Metodologi semacam itulah yang disusun oleh Gadamer dalam bukunya *Wahrheit und Methode*, yang memaparkan suatu hermeneutika baru sebagai prosedur untuk menginterpretasikan gejala dengan pendekatan yang mencakup totalitas dari pengalamannya.

III

Dalam rangka rekonstruksi sejarah nasional amat penting untuk memahami makna karya-karya sejarah serta menentukan identitasnya terutama untuk memperlihatkan bahwa proses rekonstruksi sebagai proses strukturasi kesadaran sejarah. Senantiasa merupakan proses dialektis antara pengalaman negatif adanya pengingkaran-pengingkaran dengan totalitas pengalaman pribadi pada satu pihak, dan pada pihak lain proses interpretif dari orang lain oleh diri sendiri. Yang terakhir ini berarti bahwa untuk dapat memahami orang lain sebagai aktor historis terlebih dulu orang harus mengenal diri-sendiri.

Menurut garis pemikiran ini pengenalan diri serta penyadaran diri menjadi pangkal tolak proses rekonstruksi maka suatu biografi dari penulisan sejarah pembicara akan mengungkapkan makna karya-karyanya, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan historiografi nasional. Sikap refleksif terhadap historiografi yang kita susun akan mampu menonjolkan unsur-unsur legitimasi dan apologi mengenai *status quo*, perhatian atau kepentingan non-akademica atau ekstra-teoretis, lagi pula segala macam distorsi yang berakar dari subyektivitas. Mengetahui diri sendiri secara terus-menerus akan mempermudah proses distansiasi dari segala macam subyektivitas itu.

Sehubungan dengan hal di atas perlu di sini ditegaskan bahwa kompleksitas latar belakang karya sejarah jarang atau hampir tak pernah dinyatakan secara eksplisit, oleh karena si pengarang menganggapnya hal yang biasa, namun sebenarnya bagi suatu identifikasi karya itu sangatlah penting untuk melakukan anatomi terhadap kompleksitas itu. Dengan demikian

pelbagai komponen yang tercakup dalam suatu pengambilan keputusan mengenai pemilihan obyek pengkajian akan terungkapkan. Biasanya pemilihan merupakan titik konvergensi pelbagai alasan.

Sebagai ilustrasi dapatlah diambil studi kasus Pembrontakan Petani Banten pada 1888, mengapa tema itu dipilihnya? Suatu perbengkalan sejarah memang memerlukan alat-alat konseptual dan analitis seperti yang umum kenal dari studi formal teori dan metodologi sejarah. Akan tetapi di samping itu banyak prosedur kerja suatu proses pembuatan yang tidak termuat dalam studi formal itu. Untuk memperoleh *expertise* serta pengalaman dalam profesi sejarah tidak berlebih-lebihan kalau ada tuntutan latihan kerja yang intensif agar ada kesempatan leluasa menjadi akrab dengan metode kerja yang praktis. Tanpa pengalaman itu rasanya canggung untuk mulai suatu pengkajian secara sungguh-sungguh.

Pembicara teringat waktu sedang mengurus macam-macam dokumen untuk belajar ke luar negeri berjumpa dengan seorang kenalan yang memberi komentar tentang rencana studi itu dengan pertanyaan "mengapa belajar sejarah Indonesia justru di luar negeri?". Dalam konteks politik waktu itu (Agustus 1962) ucapan itu sungguh dapat dipahami. Selebihnya mengingat situasi akademiknya sebenarnya wajar sekali, lebih-lebih kalau diperhatikan kesempatan latihan dan penelitian sangat minimal. Tradisi studi sejarah kritis belum ada atau masih lemah sekali. Yang sangat diperlukan ialah keahlian plus ketrampilan penulisan sejarah berdasarkan teori dan metodologi yang lazim dipakai dalam studi sejarah kritis. Rekonstruksionisme tanpa hal itu akan mengarah ke deviasi seperti penulisan sejarah nasionalis, sejarah "mistisistik" dan bentuk-bentuk metahistoris lainnya.

Di manakah letak sejarah suatu kasus dalam historiografi Indonesia? Pertanyaan ini mengandung jawaban rangkap, yaitu (1) kedudukannya dalam hubungannya dengan gejala-

gejala historis sejenis; (2) hubungannya dengan sejarah nasional. Apakah eksplanasi dalam studi kasus itu digarap dengan sendiri akan bermunculan pelbagai faktor determinan atau kausal dari kejadian-kejadian yang dideskripsikan.

Hal semacam itu tidak dengan sendiri tampak apabila digarap secara deskriptif-naratif belaka. Yang lebih menarik lagi ialah bahwa faktor-faktor determinan itu mengundang eksplorasi permasalahan luar yang menyangkut gejala-gejala sejenis, dengan perkataan lain, ada semacam tuntutan membuat perbandingan serta generalisasi.

Persoalan seperti ini mau tidak mau muncul dalam kesimpulan studi kasus, mengingat bahwa ciri-ciri yang dapat diidentifikasi baru berlaku bagi kasus tersebut. Secara logis suatu kategorisasi berjenis-jenis gejala itu memerlukan studi perbandingan yang mampu mengekstrapolasikan determinan-determinan serta ciri-cirinya. Apabila generalisasi dan kategorisasi sudah berhasil dibuat untuk sebagian besar kasus-kasus di Indonesia terbuka kemungkinan menyusun karakteristik umum untuk Indonesia sebagai unsur dalam kebudayaan atau identitas nasional.

Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan apa yang telah dinyatakan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* nya, ialah bahwa di samping pengungkapan kejadian-kejadian yang menjadi gejala zaman, sejarawan perlu memperhatikan gejala-gejala umum dan membuat generalisasi.

Perlu ditambahkan bahwa di dalam teorinya Ibn Khaldun memang menguraikan pembentukan negara tidak terlepas dari kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya sistem pemasaran dan kerajinan, tapi sebaiknya konsentrasi permukiman sekitar istana, birokrasi dan militernya, akan mendorong pertumbuhan kota dalam pelbagai dimensinya.

Tidak berlebih-lebihan bila Ibn Khaldun dapat dipandang tidak hanya sebagai sejarawan tetapi juga sebagai pelopor ilmu sosial, lengkap dengan ungkapan pola-pola, dan kecenderungan

merupakan bagian esensial dari transformasi hal-hal subyektif menjadi realitas obyektif.

Pendekatan biografis ini sebenarnya hanya merupakan suatu cara membuat eksplisit hal-hal yang biasanya terkandung dalam setiap kelakuan ekspresif memuatnya secara implisit.

Pengalaman di bawah kesadaran akan berubah menjadi pengalaman penuh kesadaran yang lewat transendensi diri itu menjadi pengalaman kolektif. Apabila sejarah sebagai konstruk dapat dianggap sebagai pengalaman kolektif itu maka pemikiran refleksif sejarawan mengenai biografi historiografinya akan mempertinggi derajat kesadaran kolektif itu. Kalau pengalaman individual merupakan medium utama dalam menginterpretasi fakta sejarah dan situasi kontemporer maka pengalaman kolektif itu menjadi kerangka referensi umum dalam memahami situasi kita baik di masa lampau maupun masa kini.

Lagi pula pemikiran refleksif akan memperkuat kemampuan memahami situasi orang lain atau tokoh sejarah tidak lain karena ada truisme yang mengatakan bahwa untuk dapat memahami orang lain kita terlebih dulu memahami diri sendiri.

Untuk dapat memahami metodologi serta teori yang mendukungnya dari seorang sejarawan diperlukan pengetahuan seluruh latar belakang hidupnya sebagai totalitas, lebih-lebih lokasi sosiohistorisnya. Metodologi itu tidak hanya disusun dalam menghadapi fakta-fakta beserta permasalahannya, tetapi lebih-lebih berhubungan erat dengan pengalaman pribadi dan realitas sosial yang dihadapi sejarawan.

Tidak jarang metodologi itu tersusun sebagai "jawaban" terhadap negasi atau pengingkaran-pengingkaran, terutama justru untuk membantah negasi itu. Bukankah prinsip Indonesia-sentrisme dikonseptualisasikan justru untuk membantah negasi dari eksistensi sejarah Indonesia yang otonom dan autentik, d.p.l. suatu negasi terhadap identitas bangsa Indonesia yang dilambangkan oleh sejarah Indonesia itu.

Metodologi semacam itulah yang disusun oleh Gadamer dalam bukunya *Wahrheit und Methode*, yang memaparkan suatu hermeneutika baru sebagai prosedur untuk menginterpretasikan gejala dengan pendekatan yang mencakup totalitas dari pengalamannya.

III

Dalam rangka rekonstruksi sejarah nasional amat penting untuk memahami makna karya-karya sejarah serta menentukan identitasnya terutama untuk memperlihatkan bahwa proses rekonstruksi sebagai proses strukturasi kesadaran sejarah. Senantiasa merupakan proses dialektis antara pengalaman negatif adanya pengingkaran-pengingkaran dengan totalitas pengalaman pribadi pada satu pihak, dan pada pihak lain proses interpretif dari orang lain oleh diri sendiri. Yang terakhir ini berarti bahwa untuk dapat memahami orang lain sebagai aktor historis terlebih dulu orang harus mengenal diri-sendiri.

Menurut garis pemikiran ini pengenalan diri serta penyadaran diri menjadi pangkal tolak proses rekonstruksi maka suatu biografi dari penulisan sejarah pembicara akan mengungkapkan makna karya-karyanya, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan historiografi nasional. Sikap refleksif terhadap historiografi yang kita susun akan mampu menonjolkan unsur-unsur legitimasi dan apologi mengenai *status quo*, perhatian atau kepentingan non-akademika atau ekstra-teoretis, lagi pula segala macam distorsi yang berakar dari subyektivitas. Mengetahui diri sendiri secara terus-menerus akan mempermudah proses distansiasi dari segala macam subyektivitas itu.

Sehubungan dengan hal di atas perlu di sini ditegaskan bahwa kompleksitas latar belakang karya sejarah jarang atau hampir tak pernah dinyatakan secara eksplisit, oleh karena si pengarang menganggapnya hal yang biasa, namun sebenarnya bagi suatu identifikasi karya itu sangatlah penting untuk melakukan anatomi terhadap kompleksitas itu. Dengan demikian

pelbagai komponen yang tercakup dalam suatu pengambilan keputusan mengenai pemilihan obyek pengkajian akan terungkapkan. Biasanya pemilihan merupakan titik konvergensi pelbagai alasan.

Sebagai ilustrasi dapatlah diambil studi kasus Pembrontakan Petani Banten pada 1888, mengapa tema itu dipilihnya? Suatu perbengkelan sejarah memang memerlukan alat-alat konseptual dan analitis seperti yang umum kenal dari studi formal teori dan metodologi sejarah. Akan tetapi di samping itu banyak prosedur kerja suatu proses pembuatan yang tidak termuat dalam studi formal itu. Untuk memperoleh *expertise* serta pengalaman dalam profesi sejarah tidak berlebih-lebihan kalau ada tuntutan latihan kerja yang intensif agar ada kesempatan leluasa menjadi akrab dengan metode kerja yang praktis. Tanpa pengalaman itu rasanya canggung untuk mulai suatu pengkajian secara sungguh-sungguh.

Pembicara teringat waktu sedang mengurus macam-macam dokumen untuk belajar ke luar negeri berjumpa dengan seorang kenalan yang memberi komentar tentang rencana studi itu dengan pertanyaan "mengapa belajar sejarah Indonesia justru di luar negeri?". Dalam konteks politik waktu itu (Agustus 1962) ucapan itu sungguh dapat dipahami. Selebihnya mengingat situasi akademiknya sebenarnya wajar sekali, lebih-lebih kalau diperhatikan kesempatan latihan dan penelitian sangat minimal. Tradisi studi sejarah kritis belum ada atau masih lemah sekali. Yang sangat diperlukan ialah keahlian plus ketrampilan penulisan sejarah berdasarkan teori dan metodologi yang lazim dipakai dalam studi sejarah kritis. Rekonstruksionisme tanpa hal itu akan mengarah ke deviasi seperti penulisan sejarah nasionalis, sejarah "mistisistik" dan bentuk-bentuk metahistoris lainnya.

Di manakah letak sejarah suatu kasus dalam historiografi Indonesia? Pertanyaan ini mengandung jawaban rangkap, yaitu (1) kedudukannya dalam hubungannya dengan gejala-

gejala historis sejenis; (2) hubungannya dengan sejarah nasional. Apakah eksplanasi dalam studi kasus itu digarap dengan sendiri akan bermunculan pelbagai faktor determinan atau kausal dari kejadian-kejadian yang dideskripsikan.

Hal semacam itu tidak dengan sendiri tampak apabila digarap secara deskriptif-naratif belaka. Yang lebih menarik lagi ialah bahwa faktor-faktor determinan itu mengundang eksplorasi permasalahan luar yang menyangkut gejala-gejala sejenis, dengan perkataan lain, ada semacam tuntutan membuat perbandingan serta generalisasi.

Persoalan seperti ini mau tidak mau muncul dalam kesimpulan studi kasus, mengingat bahwa ciri-ciri yang dapat diidentifikasi baru berlaku bagi kasus tersebut. Secara logis suatu kategorisasi berjenis-jenis gejala itu memerlukan studi perbandingan yang mampu mengekstrapolasikan determinan-determinan serta ciri-cirinya. Apabila generalisasi dan kategorisasi sudah berhasil dibuat untuk sebagian besar kasus-kasus di Indonesia terbuka kemungkinan menyusun karakteristik umum untuk Indonesia sebagai unsur dalam kebudayaan atau identitas nasional.

Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan apa yang telah dinyatakan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* nya, ialah bahwa di samping pengungkapan kejadian-kejadian yang menjadi gejala zaman, sejarawan perlu memperhatikan gejala-gejala umum dan membuat generalisasi.

Perlu ditambahkan bahwa di dalam teorinya Ibn Khaldun memang menguraikan pembentukan negara tidak terlepas dari kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya sistem pemasaran dan kerajinan, tapi sebaiknya konsentrasi permukiman sekitar istana, birokrasi dan militernya, akan mendorong pertumbuhan kota dalam pelbagai dimensinya.

Tidak berlebih-lebihan bila Ibn Khaldun dapat dipandang tidak hanya sebagai sejarawan tetapi juga sebagai pelopor ilmu sosial, lengkap dengan ungkapan pola-pola, dan kecenderungan

pada pelbagai bidang, maka dapatlah pula dibuatnya generalisasi. Jadi kira-kira lima abad sebelum ada proses "*reproachman*" antara bidang sejarah dengan ilmu-ilmu sosial ternyata kerangka teoretis yang diajukan oleh Ibn Khaldun telah menonjolkan kecenderungan/proses itu.

Sayang sekali Mohammad Yamin dalam prasarannya pada SSN I tidak menaruh perhatian pada masalah ini. Pada hemat pembicara sesungguhnya di sinilah terletak segi yang sangat menentukan bagi penjabaran pandangan "Indonesiasentris", untuk penulisan sejarah nasional.

Di sini kita sampai pada masalah mengenai titik temu atau konvergensi antara sejarah lokal dan sejarah nasional. Di sini pula sering dipertanyakan derajat relevansi sejarah lokal terhadap sejarah nasional.

Seberapa jauh gambaran umum mengenai keadaan transisional sebagai dampak proses modernisasi atau westernisasi yang mengikuti penetrasi kolonial dapat "diberlakukan" bagi masyarakat lokal atau regional? Justru karangan Wertheim dengan pendekatan sosiologis historis merupakan tantangan untuk mengkaji sejarah lokal dengan tujuan menyocokkan apakah proses di tingkat nasional serta berskala makro juga terwujud pada tingkat lokal dan berskala mikro atau makro.

Skenario lokal yang diungkapkan dalam sejarah mikro dengan pendekatan multidimensional atau "*social scientific*" (ilmu-ilmu sosial) ternyata tidak hanya kaya raya akan data historis baru akan tetapi juga mampu mengungkapkan manifestasi kompleksitas dari konflik sosial sebagai akibat proses inovasi dalam bidang sosial ekonomi, politik dan kultural. Penggeseran struktur kekuasaan tradisional ke yang modern dengan beralihnya pusat otoritas kharismatis dan tradisional ke yang legal rasional mempengaruhi struktur sosial bersamaan dengan munculnya nilai-nilai baru yang tercakup dalam sistem birokrasi kolonial dedukasi, komersialisasi dan komunikasi modern.

Variant-variant lokal akan tampil, setting lokal dengan faktor-faktor sosio-kulturalnya memberi karakteristik khusus kepada gejala-gejala sejarah yang jelas-jelas tidak akan tampak bila dideskripsikan secara makro pada tingkat nasional secara umum sekali. Pola dan kecenderungan umum dalam prosks perubahan sosial yang dikristalisasikan sebagai struktur atau lembaga-lembaga baru ditonjolkan dalam studi historis sosiologis. Perspektif itu dapat pula dipakai dalam mengkaji sejarah lokal, terutama dengan tujuan mengungkapkan hal-hal yang sama sehingga kejadian-kejadian lokal dan mikro dapat dipahami maknanya, antara lain bila dipandang sebagai manifestasi kecenderungan umum dalam skop nasional. Di sini perlu ditegaskan bahwa penggarapan deskriptif-naratif memang bagian esensial setiap historiografi namun narativisme tidak mampu memberi eksplanasi seperti diuraikan di atas.

Dalam pada itu penggarapan sejarah mikro yang analitis atau stkruktural mempunyai implikasi metodologis yang berat, yaitu menuntut agar disiapkan alat-alat analitis dan konseptional sedemikian sehingga proses mikro dapat diuraikan untuk mengekstrapolasikan pelbagai faktor kausal secara eksplisit. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa pendekatan yang di-trapkan selayaknya adalah pendekatan "*social scientific*".

Ditinjau dari kerangka referensi sejarah nasional maka sejarah lokal naratif dapat dianggap kurang relevansinya, sedang sejarah struktural-analitis lebih relevant. Lagi pula optik historis yang analitis-struktural itu akan memandang peristiwa-peristiwa sebagai letupan permukaan dari suatu aliran bawah yang berupa proses jangka menengah dan panjang. Peristiwa yang dipandang secara demikian itu merupakan indikator atau manifestasi dari gejala-gejala umum, seperti kecenderungan struktural, konjungtur ekonomis, sosial atau politik, dan lain sebagainya. Optik historis yang demikian akan mampu tidak hanya melihat aspek-aspek unik dari peristiwa, tetapi lebih-lebih pola-pola umum yang terkandung di dalamnya.

Pembrontakan petani dipandang demikian tidak lain merupakan bentrokan (*clash*) antara kekuatan-kekuatan sosial yang terlibat dalam konflik sosial, karena dalam situasi konflik yang diciptakan oleh perubahan sosial, unsur-unsur sosial mempunyai lokasi sosiokultural yang berbeda-beda dalam menghadapi nilai-nilai baru, maka meledaklah bentrokan kepentingan elite religius dan elite tradisional berhdapan dengan elite birokrasi yang cenderung beradaptasi serta mengakomodasikan diri terhadap struktur kekuasaan baru. Di sini proses umum modernisasi sebagai pembawaan regim kolonial didramatisasikan oleh pelaku-pelaku tokoh lokal.

Historama nasional akan lebih menampilkan *haute relief* apabila variant lokal dapat ditonjolkan; sebaliknya membaca sejarah lokal sebagai tekst akan dapat dipahami maknanya apabila dipandangny secara kontekstual yaitu dengan menebarkannya pada latar belakang sejarah nasional. Sifat unik secara implisit mencakup aspek umum, jelaslah bahwa di sini kedua segi dari peristiwa dapat dibedakan secara analitis tetapi tidak dapat dipisahkan.

Generalisasi pada skala nasional mencakup perubahan struktur sosial, konflik sosial, integrasi dan desintegrasi, konsentrasi dan proliferasi, institusionalisasi dan disorganisasi, asimilasi, adaptasi, dan penolakan, dan seterusnya. Dalam pelbagai proses itu senantiasa ada konfrontasi antara kekuatan endogen dengan faktor eksogen, maka pandangan dari dalam benar-benar dapat direalisasikan, dan sekaligus pandangan Indonesiasentris. Kalau pembicara pada akhir limapuluhan dan awal enampuluhan memakai istilah "pendekatan multi-dimensional" yang dipikirkan tidak lain ialah sebagai antithese terhadap sejarah politik dalam arti konvensional, lagipula sebagai konsep kontra segala macam determinisme.

Penulisan Pembrontakan Petani sebagai Gerakan Protes sebenarnya didorong oleh hasrat melancarkan protes terhadap penulisan sejarah Indonesia yang konvensional dan Neerlan-

dosentris itu, jadi dengan memakai pendekatan "*sosial scientific*" itu sekaligus untuk meminjam diktum Van Leur, mengubah perspektif 180 derajat dan mengungkapkan wajah "dari dalam". Kalau secara inherant pendekatan itu mengungkapkan segi-segi struktural masyarakat pribumi, pembicara senantiasa menyadari bahwa penonjolan strukturalisme dapat menyederhanakan proses sejarah menjadi kerangka yang telah kehilangan "darah dan daging" yaitu rentetan aksi dan interaksi para pelaku atau obyek-obyek sendiri, yang dalam totalitasnya mewujudkan peristiwa-peristiwa itu.

Penggarapan sejarah lokal sebagai sejarah sosial seperti teruraikan di atas memuat faktor-faktor positif, antara lain:

- (1) menambah ilustrasi mengenai proses umum pada skala nasional, dan dengan demikian meningkatkan generalisasi dalam sejarah nasional;
- (2) mempertinggi kemampuan mengeksplanasi pelbagai gejala historis pada tingkat lokal dengan mengungkapkan pelbagai faktor dan dimensinya, sesuatu yang dalam narativisme dalam sejarah konvensional tak mungkin dilaksanakan.

Dengan demikian penulisan sejarah Indonesiasentris akan lebih mudah dilaksanakan. Disadari atau tidak angkatan enam-puluhan dengan tepat dapat mengidentifikasikan jenis sejarah apa yang perlu dan layak ditulis, lagi pula melihat bahwa tugas historiografi yang mampu mereka laksanakan dan secara efektif dapat diselenggarakan.

IV

Dalam kebanyakan kehidupan kesarjanaan masa pembuatan disertai merupakan episode sentral bagi perkembangan intelektual pribadi, bagi pembicara demikian pula halnya. Dengan demikian masa sebelumnya dapat dipandang sebagai masa persiapan, dan masa sesudahnya sebagai periode perluasan serta pengembangan lebih lanjut. Metafora "pohon pisang yang

hanya berbunga sekali” bagi pembicara merupakan pedoman yang potensial untuk merangsang stamina intelektual dalam berkarya seterusnya.

Kurikulum jurusan sejarah pada Fakultas Sastra UI dalam awal tahun limapuluhan mencakup ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sosial ekonomi, ilmu negara dan antropologi tidak sedikit mengarahkan dan merangsang perhatian kepada dimensi-dimensi itu dalam studi sejarah, sedang filologi tidak lagi berperan. Kecenderungan teoritis semacam itulah menentukan pula corak kertas kerja pertama dalam konferensi internasional di Singapura pada tahun 1961 yang berjudul *"The Genesis of Indonesian Nationalism"* Pendekatannya struktural-analitis, maka tidak mengherankan kalau kemudian dimuat bersama dengan karangan Harry Y. Benda. Berkat rekomendasi beliau pembicara pada tahun akademis 1962 diterima di Yale dalam *department of Southeast Asia Studies*. Selama dua tahun secara agak eklektis diikuti seminar-seminar dalam bidang-bidang ilmu sosial, di samping bidang sejarah. Ramuan itu ternyata produktif juga dalam membentuk kerangka konseptual bagi penulisan disertasi, meskipun program setiap tahun disusun secara fragmentaris tanpa ada pengarahan kepada orientasi tujuan yang konkrit. Rupanya benda sudah dikuasai oleh stereotipe mahasiswa Indonesia-mungkin prasangka belaka-pergi belajar ke luar negeri (AS) barang setahun dan kemudian kembali membawa mobil (Sic). Penilaian semacam ini bagi pembicara diterimanya sebagai tantangan atau cambuk untuk membuktikan hal-hal sebaliknya.

Pembicara tidak akan sampai di Yale apabila mengikuti nasehat kepala sekolahnya pada saat akan masuk UI. Baginya cukup menempuh kursus B1 saja. Disadarinya bahwa pernyataan seperti itu dalam bahasa Jawa "di-pal", justru baginya merupakan dorongan kuat untuk dengan meminjam peristilahan wayang "mantak aji" (menunjukkan kekuatannya). Rupanya Benda Wertheim sehingga jalan untuk promosi di *Universiteit*

van Amsterdam terbuka baginya. Dengan pengalaman studi di AS rasanya penyusunan disertasi menjadi kelanjutan atau perpanjangan saja dari prosedur kerja yang telah dibiasakannya selama dua tahun ikut program Asia Tenggara itu. Kalau perpindahan menyeberang Atlantik dari Dunia Baru ke Negeri Senja membawa perubahan-perubahan gaya hidup serta pelbagai frustrasi, namun bagi pembicara beserta isteri banyak hal dirasakan tidak terlalu asing. Lebih-lebih setelah mapan dan pola kerja mantap, kesibukan penulisan membuat waktu lalu dengan cepatnya. Iklim Belanda dan non status pembicara memberi keleluasan berhari-hari kerja dietape ketiga di Valerius strat 22. Periode 2 tahun plus 3 bulan di Nederland betul-betul produktif secara maksimal, sehingga 1 Nopember 1966 promosi terlaksana. Dari penyusunan kerangka konseptual sampai pembuatan indeks perlu dihayati asketisme terus-menerus: ketekunan, ketelitian, ketuntasan serta kesempurnaan teknis perlu dihayati oleh peneliti, memang ia memrakyekkan apa yang dalam Wedatama disebut "*mesubudi*". Bau kertas arsip atau buku kuno akan merangsang semangat itu. Mohon dimaafkan apabila di sini ada nada mistik atau romantis. Menengok ke belakang setelah duapuluh tahun lampau pengalaman itu menggembleng kita seperti kita telah keluar dari "kawah Condrodimuko" menjadi "manusia baru".

Memang identitas sebagai seorang profesional memuat secara inherent suatu expertise (keahlian), ketrampilan dan pengetahuan teknis tinggi, otonom dan memiliki integritas tinggi. Sudah diketahui umum bahwa profesionalisme derajat tinggi itu merupakan tuntutan atau kondisi pokok bagi terselenggaranya suatu masyarakat modern-industrial yang mencakup derajat ilmu dan teknologi yang tinggi pula.

Berbicara tentang perbengkelan sejarawan sebagai bagian esensial dari profesinya, pendekatan arkhivistik membawa beberapa "bahaya", antara lain perfeksionisme dan antikuarianisme. Perfeksionisme akan menyita waktu banyak dalam menelaah dokumen-dokumen karena berkali-kali dibacanya sebe-

lum berani menginterpretasikannya. Antikuarianisme menjerumuskan peneliti dalam suatu hasrat mengumpulkan bahan tanpa batasan yang jelas, antara lain tidak mempertimbangkan relevansinya dengan persoalan yang digarap.

Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa penelitian arsip yang dilakukan tanpa konseptualisasi lebih dahulu akan mudah menyesatkan dan pengumpulan data yang kehilangan arah akhirnya menjadi tujuan tersendiri. Di sini perlu disisipkan mitos klasik Barat yang menceritakan perjalanan Persius penuh rintangan untuk mencari kepala Medusa yang mempunyai kekuatan magis menghancurkan bangunan-bangunan. Setelah kepala Medusa diperoleh hanya dengan berkendaraan pegasus (kuda sembrani) Persius pada waktunya mencapai tempat di mana calon isterinya. Andromeda akan dikorbankan kepada raksasa. Pada saat terakhir sang putri dapat diselamatkan oleh karena raksasa dapat dihancurkan dengan menghadapkan kepala Medusa ke arahnya. Tidak terlalu sulit kiranya kita melihat persamaan fungsi antara Pegasus dan Medusa di satu pihak, da teori serta metodologi di pihak lain, keduanya merupakan alat-alat "analitis" untuk memecahkan permasalahan atau sebagai kiasan menghancurkan raksasa. Adapun pengetrapan teori dan metodologi menyerupai perjalanan yang penuh rintangan dan kesulitan. Sekali lagi sikap asketis menjadi esensi dari *expertise* seorang profesional.

Pada hemat pembicara di sini kita menyentuh soal yang sangat esensial bagi pengembangan kebudayaan akademis, tanpa hal mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu memproduksi hasil kreativitas sendiri. Sudah barang tentu ini membawa implikasi didaktis di jurusan sejarah, yaitu mahasiswa sejarah tidak hanya memperoleh informasi komprehensif dari fakta-fakta historis tetapi perlu dilatih dalam melakukan pemikiran diskursif, deskriptif naratif, analitis dan kritis.

Dalam periode pasca - promosi pembicara semakin menyadar bahwa dia telah memasuki wilayah permasalahan yang da-

lam deseniun berikutnya berkembang menjadi suatu bidang spesialisasi tersendiri, apa yang disebut *Peasant* atau *Rural Studies*, suatu bidang yang cukup interdisipliner. Sebagai langkah yang merupakan konsekuensi logis dari studi kasus tentang Banten, serta sebagai tindak lanjut kesimpulan studi itu, maka pembicara mulai melakukan studi komparatif antara pelbagai gerakan petani dengan maksud agar sampai pada generalisasi dan kategorisasi jenis fenomena itu. Baik menurut ideologinya, maupun berdasarkan kausalitasnya gerakan petani ternyata menunjukkan pelbagai tipe. Sejarah komparatiflah yang mampu menentukan tipologinya, maka dengan demikian pembicara mau tak mau memasuki daerah "frontier" bagi sejarah yang memang memerlukan perintisan juga kalau dilihat dari kerangka referensi sejarah nasional sejarah komparatif memang sangat relevant, antara lain karena skala nasional menuntut tingkat generalisasi tertentu. Secara konsisten pendekatan ilmu sosial dengan sendiri menjadi suatu kemudahan. Mengeksplorasi seluruh Jawa dalam abad ke-19 dan ke-20 mengungkapkan lima varian atau tipe gerakan petani: (1) anti pemerasan; (2) milenaristik; (3) mesianistik; (4) revivalistik; (5) Sarekat Islam lokal.

Disadari sepenuhnya bahwa konstruk seperti yang disajikan di atas rasanya menyimpang dari penulisan sejarah konvensional. Waktu pembicara menyajikannya di depan forum sejarawan Leiden, ternyata ada yang menyangsikan apakah konstruk seperti itu termasuk sejarah. Pernyataan semacam itu lebih meyakinkan pembicara bahwa dia memang dengan penuh kesadaran dan kesengajaan bertindak secara inkonvensional tidak lain karena itulah jalan yang efektif dapat menjabarkan prinsip Indonesiasentrisme dalam historiografi. Bahwasanya dia dianggap sebagai *rara avis in terris* (sebangsa burung aneh di dunia) lagi pula identitasnya memang menggeser ke arah sejarah sosial terbukti pula pernyataan sejarawan Belanda, Brugmaus dalam promosinya ialah bahwa "Sejarah Pembrontakan Petani Banten" bukan sejarah seperti yang dikenal umum.

Impetus intelektual yang kuat memberi dukungan kepada kecenderungan itu sewaktu bersama dengan para ketua seksi Panitia Penulisan Sejarah Nasional pada akhir tahun 1971 dan awal 1972 pembicara melakukan riset kepustakaan di Berkeley. Dipilihnya lokasi itu ternyata sangat menggairahkan selera ke arah Sejarah Sosial oleh karena banyak memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi dengan sejarawan sosial seperti Lipidus, Wakeman, Ben Bellah, P. Smith, dan masih banyak lagi. Dampak dari pengkajian di Berkeley itu mungkin tidak tampak dalam struktur Sejarah Nasional, akan tetapi tidak sedikit pengaruhnya dalam karya-karya pembicara dalam tahun tujuh puluhan. Di samping penggeseran tema ke golongan sosial lain, ada pula suatu proses diferensiasi yang mencakup tidak hanya sejarah gerakan, juga sejarah struktural, intelektual dan mentalitas. Kategori-kategori sejarah itu memang sangat relevant untuk dibahas dalam hubungannya dengan proses perubahan sosial yang mengakibatkan transformasi masyarakat tradisional ke yang modern, seperti yang dimanifestasikan dalam pelbagai dimensinya.

Tema-tema baru seperti stratifikasi sosial, struktur kekuasaan, kepribadian elite modern, kesadaran petani, pola pikiran mitologis, identitas religius, dan lain sebagainya, menuntut pendekatan yang semakin bercorak "social scientific" sebagai implikasi teoretis dan metodologis dari substansi dan problematik tema-tema itu. Rasanya perbengkelan sejarah kita yang masih baru itu memberi keleluasaan untuk memasukkan metodologi baru yang sesuai dengan tugas nasional merekonstruksi sejarah nasional kita. Tanpa adanya "*vested interest*" Sikap keterbukaan sejati sebagai tuntutan ilmiah tidak sedikit akan memperkuat stimulus, intelektual para sejarawan.

Penggeseran fokus perhatian dari sejarah sosial ke sejarah intelektual memang wajar oleh karena keduanya itu sifatnya komplementer. Dalam mengembangkan kebudayaan *expertise* dalam profesionalisme sejarah momentum kreatif perlu dipelihara dengan kesadaran bahwa historiografi sebagai sejarah intelektual tidak kecil peranannya dalam formasi negara nasional

kita serta pembentukan kepribadian nasional ataupun identitas bangsa. Untuk sekian kalinya kita perlu diingatkan bahwa bila seseorang yang kehilangan memorinya (ingatannya-sejarahnya) dengan sendiri tidak lagi memiliki kepribadian, maka demikianlah pula halnya dengan suatu bangsa. Tanpa mengenal sejarahnya, bangsa itu akan kehilangan identitasnya.

Dengan memahami sepenuhnya realitas ini sejarawan perlu memenuhi tuntutan profesinya dengan expertisennya sebaik-baiknya, agar rekonstruksi sejarah nasional dapat mengungkapkan realitas pengalaman kolektif bangsa Indonesia, hal-mana tidak hanya memantapkan lambang persatuan bangsa tetapi juga meningkatkan kesadaran nasional. Dalam rangka pembangunan bangsa sejarah sebagai suatu tubuh pengetahuan seyogyanya tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi data historis sebagai pengetahuan faktual tetapi lebih-lebih sebagai suatu proses penyadaran terutama mengenai eksistensi bangsa Indonesia dalam masa lampau dan sekarang di tengah-tengah ziarahnya ke masa depan dengan tujuan menemukan dan merealisasikan diri.

V

Uraian ini bertolak dari suatu pandangan bahwa berbeda dengan seminar-seminar sejarah yang terselenggara lebih dulu kali ini dirasakan mendesaknya keperluan peningkatan keahlian sebagai unsur fundamental dari profesionalisme dalam bidang sejarah. Gagasan itu tumbuh dari permasalahan yang selama tiga dasa warsa lebih terus-menerus kita hadapi ialah merekonstruksi sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional. Baik dalam konteks pembangunan bangsa maupun dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu sejarah, tugas sejarawan Indonesia cukup kompleks. Menyadari peranan strategis historiografi Indonesia di satu pihak dan menyadari pula tuntutan yang semakin berat metodologi sejarah kritis dewasa ini, di pihak lain komunitas sejarawan diharapkan terus-menerus berkarr-

ya dengan penuh tanggung jawab sosial, kewajaran ilmiah serta gairah intelektual, sehingga sambil menyempurnakan profesionalismenya membuat sumbangan yang berharga bagi pembentukan dan pemantapan identitas nasional kita.

Suatu biografi sering ditulis dengan perasaan kagum bercampur rasa heran, ataupun kejengkelan terhadap obyeknya namun lazim pula perasaan-perasaan seperti itu dapat diatasi oleh keinginan kuat untuk memproyeksikan diri sebagai bentuk ekspresif untuk membenarkan diri atau mempertanggungjawabkan kegiatannya. Dengan suatu paksaan dari dalam yang kuat segala perasaan enggan, "rikuh", takut ataupun malu, dapat diatasi dan hal itu dapat dipermudah lagi dengan kesadaran bahwa suatu pengungkapan diri bertujuan tidak lain ialah sebagai "penemuan diri".

Dengan demikian pengalaman pribadi dapat diobyektifikasikan untuk dapat diasimilasikan dengan pengalaman kolektif. Di sini proses per-realisan diri terlaksana karena suatu unsur pribadi telah tercakup dalam realitas sosial. Sekaligus kesadaran diri dipertingkat dengan proses proyeksi diri itu suatu faktor yang merupakan esensi dari pribadi sejarawan yang berusaha memahami tokoh sejarah atau orang lain.

Uraian yang telah dipaparkan kiranya perlu diidentifikasi sebagai suatu aspek dari historiografi yang mencakup pikiran-pikiran reflektif, yaitu suatu bentuk pengungkapan diri sebagai dimensi kesadaran sejarah. Di sini gejala gejala mental yang disebut sebagai *mantifact* dengan perspektif eksistensial fenomenologis dapat diinterpretasikan sebagai struktur-struktur kesadaran. Ternyata struktur kesadaran itu sebagai kompleksitas konstruk-konstruk berfungsi sebagai kerangka pemikiran sejarawan. Yang jelas dari uraian di atas ialah bahwa kerangka itu berkembang dan mencakup seluruh pengalaman sejarawan, jadi bukan semata-mata terbentuk oleh pemikiran murni teoretis-empiris belaka. Sebaliknya, ternyata merupakan proses dialektik dengan permasalahan dari dunia praxis, maka kontekstualisme sangat relevant untuk menganalisa sebuah historiog-

rafi. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pemikiran reflektif itu tidak hanya mempertinggi kritisisme sejarawan tetapi lebih-lebih meningkatkan sofistikasi metodologinya dan dengan demikian menambah produktivitas serta memperbaiki kualitas karyanya.

Dimaksud sejak awal agar lewat apa yang disebut "*Communicative Sharing*" (kebersamaan komunikatif) pengalaman individual dan untuk dapat diobyektivisasikan dan dengan demikian di universalisasikan. Dalam perbengkelan sejarah dengan prosedur seperti itu ada akumulasi pengalaman bersama yang dalam proses pemupukan kultur akademis kita di Indonesia akan memperkuat pertumbuhan ilmu sejarah yang otonom, autentik dan penuh integritas.

VI

Catatan

Pemilihan tema uraian ini dilakukan kecuali sesuai dengan kerangka referensi panitia pengarah, juga berdasarkan anggapan bahwa dewasa ini profesionalisme di kalangan sejarawan merupakan masalah sentral. Di samping segi praxiologis yang mencakup tuntutan agar historiografi mampu menyumbangkan hasilnya bagi konseptualisasi identitas nasional yang bulat, permasalahan metodologi sudah barang tentu fundamental. Pendekatan yang dipakai dalam menghadapi permasalahan itu ialah dapat diidentifikasi sebagai suatu perspektifisme yang mencakup aspek fenomenologis, eksistensialistis dan strukturalistis. Sintese itu dapat dibenarkan karena hal itu merupakan implikasi metodologi dari konsep historiografi sebagai model yang dipakainya.

- (1) Historiografi sebagai suatu jenis *l'historiementalite* menuntut pendekatan fenomenologis yang didasarkan atas pengalaman dan pemahaman pelaku sendiri;
- (2) ada tuntutan agar pengungkapan bersifat reflektif, sehingga tetap ada kesadaran akan subyektivitas diri sendiri,

seperti kepentingan perhatian, logika, metode serta latar belakang historisnya;

- (3) sifatnya harus komprehensif sehingga mempunyai relevansi terhadap pelbagai realitas sosial dari pelbagai tingkat dan ruang lingkup;
- (4) perlu pula mempunyai relevansi terhadap kehidupan praktis.

Antara SSN I dan SSN IV sesungguhnya dalam historiografi telah dilaksanakan strukturasi visi yang secara filosofis digariskan pada SSN I. Proses strukturasi itu membawa implikasi teoretis-metodologis maka dewasa ini kecenderungan kuat ke arah sejarah *social scientific* atau sejarah analitis dapat dipandang sebagai garis perkembangan yang wajar, yang sejak awal sebenarnya secara immanent terdapat dalam konsep Indonesiasentrisme. Dalam pada itu perkembangan historiografi modern terjadi dalam kontek pertumbuhan studi sejarah kritis umum tidak lain karena cukup besar pengaruhnya dalam masa formasinya di Indonesia. Pendekatan secara biografis atau lebih tepat otobiografis dipandang dalam kerangka pemikiran itu rasanya cukup sesuai, sekedar sebagai sumbangan pemikiran mengenai kedudukan studi sejarah Indonesia dewasa ini. Meskipun pembicaraan terutama berkisar sekitar masalah teoretis-metodologis, namun pembicara menganggap perlu untuk menunjukkan secara sederhana dasar falsafah yang menjadi kerangka pemikirannya.

**FAKTA DALAM PENULISAN SEJARAH INDONESIA
SUATU PRASARAN UNTUK SEMINAR
SEJARAH NASIONAL KE-IV**

(Oleh Harsja W. Bachtiar)

Kemajuan dalam pengkajian Sejarah Indonesia sangat tergantung pada cara kita, terutama para sejarawan, bekerja dengan fakta-fakta sejarah. Jelas tidak mungkin ada Sejarah Indonesia, atau tulisan mengenai masa lampau di wilayah negara kita, tanpa menampilkan fakta sejarah. Tulisan tanpa fakta sejarah mungkin merupakan tulisan agama, tulisan filsafah, tulisan sastra ataupun tulisan jenis lain, tetapi jelas bukan tulisan sejarah. Bahkan sejarawan cenderung menjadikan fakta-fakta sejarah tertentu dasar dari karya tulisannya. Lagi pula, tulisan-tulisan agama, filsafah dan sastra, yang menguraikan masalah-masalah kehidupan manusia, sering juga mengandung fakta-fakta sejarah, sebagai contoh ataupun bukti kebenaran uraian yang disajikan.

Akan tetapi cara kita bekerja dengan fakta sejarah, cara kita memperlakukan fakta sejarah, banyak pengaruhnya pada seberapa banyak pengetahuan tentang Sejarah Indonesia bertambah berkembang, bertambah maju, atau, bisa juga sebaliknya, menjadi mundur. Perlakuan fakta sejarah secara kurang

"baik" bisa menghambat kemajuan pengetahuan sejarah karena perhatian banyak sejarawan, dan anggauta-anggauta masyarakat yang berminat pada sejarah, bisa tepusatkan pada permasalahan yang ditampilkan sebagai masalah sejarah akan tetapi sesungguhnya bukan permasalahan sejarah melainkan permasalahan yang dicipta oleh penulis atas dasar pemikiran yang kurang benar. Perhatian, pemikiran, dan sering juga tulisan menjadi terpusat pada permasalahan yang semu, permasalahan yang bukan permasalahan bilamana penulis yang bersangkutan tidak membuat kesalahan dalam memperlakukan fakta sejarah dalam karya tulisannya.

Oleh sebab itu, fakta sejarah, yang merupakan penggambaran kenyataan yang terdapat atau terjadi di tanah air kita dalam masa lampau, adalah sedemikian penting sehingga ada baiknya dijadikan sasaran perhatian khusus dalam uraian sederhana ini yang disajikan kepada para sesama peserta Seminar Sejarah Nasional IV yang terhormat. Apa yang hendak dikemukakan ini mudah-mudahan mengingatkan kita kembali pada berbagai permasalahan yang perlu kita perhatikan bilamana hendak mengkaji fakta sejarah dan menggunakannya dalam karya tulisan kita sebagai orang-orang yang bekerja dalam bidang pengetahuan sejarah.

Kita semua tahu bahwa sumber fakta sejarah yang digunakan oleh para sejarawan adalah terutama dokumen-dokumen tertulis, seperti laporan-laporan pejabat dan surat-surat pribadi, ataupun bahan-bahan tercetak, seperti surat kabar, majalah, dan buku. Kita juga mengetahui bahwa fakta-fakta yang terkandung dalam dokumen-dokumen tertulis atau bahan-bahan tercetak, meskipun amat banyak - koleksi dokumen tertulis yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan gudang fakta yang tidak terhingga banyaknya, sesungguhnya hanya merupakan rekaman dari sebagian kecil kenyataan yang terwujud atau terjadi di masa lampau di wilayah negara kita. Kebanyakan peristiwa terjadi tanpa meninggalkan bekas dalam bentuk fakta yang dapat dikaji oleh para sejarawan atau

siapa saja yang berminat. Di antara amat banyak peristiwa yang terjadi di pedesaan-pedesaan di tanah air kita pada suatu hari tertentu hanya sebagian yang amat kecil terrekam sebagai fakta yang kemudian dapat dijadikan sasaran pengkajian. Bahkan, kebanyakan peristiwa yang terjadi di kota-kota besar di tanah air kita pada suatu hari tertentu, misalnya tanggal 1 Oktober 1940, juga tidak terrekam sebagai fakta yang kemudian dapat dikaji. Kenyataan ini mengakibatkan para sejarawan tidak mungkin dapat mengkaji segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, melainkan hanya mengkaji kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang meninggalkan bekas dalam bentuk fakta.

Sekarang semakin banyak sejarawan menyadari bahwa fakta juga dapat diperoleh dalam bentuk keterangan lisan. Amat banyak fakta sejarah juga terrekam sebagai ingatan pada otak seseorang, sehingga, melalui wawancara dengan orang-orang yang memiliki fakta-fakta tertentu sebagai rekaman dalam ingatan mereka, pengkaji atau peneliti sejarah juga bisa memperoleh berbagai fakta sejarah yang malah tidak ada terrekam dalam bentuk tulisan melainkan hanya sebagai ingatan orang-orang tertentu. Dalam mengadakan wawancara, pengkaji atau peneliti sejarah masih dihadapkan dengan kewajiban untuk memeriksa apakah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh pemberi keterangan sebagai fakta adalah memang fakta dan bukan semata-mata hasil daya cipta pemikiran orang yang diwawancara, atau fakta yang telah dirubah agar lebih sesuai dengan kepentingan pemberi keterangan.

Beberapa permasalahan

Dalam banyak tulisan tentang Sejarah Indonesia terdapat masalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat kehendak untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Tidak sedikit tulisan sejarah menampilkan kisah tentang masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan bilamana dalam kenyataan yang ditampilkan adalah kisah tentang masyarakat di Jawa saja, atau, bahkan

lebih terbatas, kisah tentang masyarakat Jakarta saja. Adanya penduduk Indonesia yang lain di kepulauan kita, masing-masing dengan riwayat sejarah yang mungkin berbeda daripada yang ditampilkan atas nama mereka, tidak dihiraukan. Penu-lisan sejarah Indonesia dalam masa jajahan Hindia Belanda se-ring kali diselenggarakan dengan cara yang sama. Gambaran tentang masyarakat jajahan Hindia Belanda yang ditampilkan sering kali dalam kenyataan adalah hanya gambaran masyarakat jajahan Belanda di pulau Jawa saja.

Demikian pun halnya dengan penampilan riwayat kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Indonesia sebagai kekuatan yang mengatur riwayat perkembangan keseluruhan penduduk di kepulauan kita. Penggambaran kebudayaan ini seringkali bukanlah penggambaran kebudayaan Indonesia, melainkan kebudayaan penduduk di daerah-daerah yang lebih terbatas, biasanya kebudayaan Jawa atau kebudayaan Melayu.

Karena penggunaan pengertian masyarakat Indonesia dan kebudayaan Indonesia dalam karya-karya tulisan sejarah tertentu tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang bersangkutan, maka kisah masyarakat Indonesia dan kisah kebudayaan Indonesia yang bersangkutan tidak merupakan fakta sejarah, melainkan fakta yang diubah sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan fakta. Tentu saja bilamana karya tulisan yang bersangkutan ditulis oleh awam, atau bilamana sejarawan yang menulis tulisan demikian sebagai tulisan populer, tulisan untuk memenuhi kebutuhan politik, penulis berhak membuat apa yang di sini ditanggapi sebagai kesalahan. Akan tetapi, bilamana penulis yang bersangkutan sebenarnya hendak menghasilkan suatu karya ilmiah, ia membuat kesalahan ilmiah.

Dalam penulisan sejarah ada sejarawan-sejarawan yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu, terlebih lagi suatu bangsa, negara, angkatan atau generasi, kebudayaan, zaman, dan bahkan riwayat sejarah sendiri sebagai satu keseluruhan, mengandung hakekat tertentu, suatu inti dasar dari kenyataan atau gejala

yang bersangkutan. Fakta-fakta yang didasarkan atas kenyataan atau gejala yang bersangkutan, seperti peristiwa-peristiwa tertentu, ditanggapi dan ditampilkan sebagai perwujudan hakekat yang tersembunyi itu. Hakekat suatu kenyataan atau gejala tertentu tentu saja sukar dibuktikan, atau mungkin malah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga menampilkan suatu peristiwa sebagai perwujudan hakekat suatu hal ikhwal tertentu pun bukanlah cara berpikir ilmiah.

Sejarawan-sejarawan tertentu, terutama yang menulis karya-karya tulisan populer yang diharapkan akan dibaca oleh banyak orang, cenderung terpukau pada fakta-fakta yang menonjol, yang aneh, yang kelihatannya luar biasa, atau yang gemilang, dan dengan penuh semangat fakta-fakta ini ditampilkan pada pembaca yang mungkin tidak tertarik pada karya-karya tulisan sejarah yang berusaha memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan tetapi yang dapat menghargai kita tokoh-tokoh, atau peristiwa-peristiwa, yang ditampilkan sebagai tokoh-tokoh, atau peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh istimewa, luar biasa. Pemilihan fakta semata-mata atas dasar sifat kegemerlapan fakta-fakta yang bersangkutan tentu tidak memungkinkan penggambaran sejarah yang cukup seimbang.

Sebaliknya, masalah berkenaan dengan pemilihan fakta sejarah juga terjadi karena ada berbagai sejarawan yang terpukau pada adanya perilaku pelaku-pelaku sejarah yang rupanya senantiasa bertindak atas dasar kecurigaan. Para sejarawan demikian cenderung beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa yang berakibat banyak dan oleh sebab itu banyak berpengaruh pada perkembangan politik, ekonomi, masyarakat, atau sektor lain dari kehidupan manusia disebabkan justru oleh tokoh-tokoh yang senantiasa melakukan perbuatan yang terselubung, tindakan-tindakan yang tidak dapat dianggap wajar dan oleh sebab itu senantiasa dirahasiakan. Fakta-fakta yang mengungkapkan apa yang tadinya terselubung, tidak diketahui oleh umum, dianggap amat penting sehingga dijadikan sasaran perhatian utama, sedangkan fakta-fakta yang memperlihatkan kenyataan yang da-

pat dilihat, diamati dengan mudah oleh banyak orang, dianggap tidak ada nilainya, karena dianggap hanya merupakan selubung belaka yang diadakan untuk menutupi kelicikan-kelicikan tertentu. Apa yang mudah terlihat, apa lagi bilamana memberi kesan yang baik, dianggap pasti tidak benar, hanya dibuat-buat saja, meskipun kelihatan jelas sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada daam kenyataan, karena kebenaran dianggap terdiri atas hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang senantiasa disembunyikan oleh orang-orang yang bersangkutan.

Para sejarawan, terutama ahli-ahli sejarah yang menganggap diri sebagai pekerja-pekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan, diharapkan mengungkapkan apa yang terjadi di masa lampau sebagaimana adanya dengan menyajikan uraian yang seimbang. Akan tetapi, sejarawan-sejarawan tertentu cenderung lebih mengutamakan peranan sebagai semacam ulama, atau pendeta, yang mengangkat diri sendiri sebagai wakil moralitas daripada peranan sebagai ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, ilmu sejarah. Mereka cenderung berusaha dengan gigih, dengan penuh semangat, untuk menampilkan hanya fakta-fakta sejarah yang dapat dibenarkan atas dasar moralitas. Tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa tertentu dipilih untuk ditampilkan sebagai contoh pola-pola prilaku yang baik dan oleh sebab itu perlu dijadikan suri teladan, sedangkan fakta-fakta sejarah yang tidak dapat dibenarkan atas dasar moralitas disembunyikan atau ditampilkan dengan disertai kutukan, atau peringatan agar pola-pola prilaku yang bersangkutan jangan ditiru.

Suatu cara pemilihan fakta yang cukup menarik tapi sering juga tidak dapat dibenarkan atas dasar cara-cara bekerja yang lazim di kalangan pekerja-pekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan ialah pemilihan fakta atas dasar kegunaan fakta-fakta yang bersangkutan untuk membenarkan suatu pendapat atau keinginan tertentu. Cara pemilihan fakta demikian, yang dapat disebut pemilihan fakta atas dasar tuntutan pragmatik, didahului dengan apa yang harus ditanggapi sebagai hasil penelitian, atau kesimpulan pengkajian, yang telah ditetapkan sebelum pengkaji-

an atau penelitian diselenggarakan. Pemilihan fakta sejarah kemudian dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, hal mana tentu adalah cara bekerja yang berbeda sekali dari cara penyelenggaraan pengkajian ilmiah. Cara pemilihan fakta atas dasar tuntutan pragmatik banyak terlihat pada proyek-proyek penelitian pesanan. Pemesan menentukan kesimpulan yang harus ditampilkan dalam laporan hasil penelitian yang akan dibuat, sedangkan sejarawan yang bersangkutan mencari fakta-fakta sejarah yang dapat mendukung kesimpulan yang telah ditentukan. Fakta-fakta sejarah yang tidak mendukung, malah tidak membenarkan kesimpulan yang telah ditetapkan itu, diabaikan, disisihkan, atau, malah kalau bisa, dihapus dari permukaan bumi kita ini tanpa meninggalkan jejak.

Kita lihat bahwa ada berbagai pertimbangan yang digunakan oleh sejarawan dalam memilih fakta yang akan ditampilkan dalam karya tulisannya. Sengaja di sini dikemukakan cara-cara pemilihan fakta sejarah yang mengandung kelemahan bilamana kita hendak mengkaji sejarah dan menulis karya tulisan sejarah sebagai upaya ilmiah. Kelemahan-kelemahan ini ditampilkan dengan harapan agar ada di antara para ahli sejarah kita yang sungguh-sungguh berusaha menghasilkan karya tulisan sejarah yang mengutamakan pedoman-pedoman bekerja yang lazim digunakan oleh pekerja-pekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan.

Dan, ada juga sejarawan yang tidak merasa perlu menentukan terlebih dahulu fakta-fakta apa yang ia perlukan buat pengkajiannya, bahkan mungkin tidak merasa perlu menentukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran perhatiannya, sehingga fakta-fakta yang kemudian menjadi sasaran perhatiannya adalah semata-mata fakta-fakta yang secara kebetulan dijumpainya. Fakta-fakta yang ditemui secara kebetulan ini ditampilkan saja tanpa pengetahuan tentang makna fakta-fakta yang bersangkutan serta kaitan fakta-fakta ini dengan fakta-fakta lain yang kebetulan tidak ditemukannya karena memang tidak ada upaya untuk menemukannya. Biasanya atas dasar fakta-fakta demikian dikembangkan uraian yang lebih didasarkan atas imajinasi dari-

pada upaya serius untuk menampilkan kembali keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam masa lampau dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut cara-cara yang lazim dalam bidang pengetahuan sejarah. Banyak tulisan-tulisan sejarah yang bersifat populer dan ditulis oleh awam memperlihatkan pola ini.

Apakah fakta sejarah itu?

Tetapi, apakah yang harus diartikan dengan fakta sejarah? Banyak orang mengartikan fakta sebagai apa yang juga dinamakan kenyataan. Fakta adalah kenyataan, kata mereka. Pemberian arti demikian sudah merupakan kelemahan dasar dalam pengkajian, karena fakta tidak sama dengan apa yang dinamakan kenyataan empirik, sesuatu yang dapat dialami, yang dapat diamati oleh manusia.

Seorang ilmuwan mengemukakan bahwa fakta adalah suatu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empirik tentang suatu gejala yang ditanggapi dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran (konseptual) tertentu. Dalam pengkajian sejarah tidak mungkin gejala yang menjadi sasaran perhatian diamati untuk menguji fakta yang bersangkutan secara empirik. Gejala, atau kenyataan, yang bersangkutan sudah terjadi sehingga tidak dapat dilihat lagi. Meskipun begitu, pengkaji atau peneliti sejarah tetap diharapkan mempermasalahkan kebenaran pernyataan yang dihadapinya dan berusaha, dengan berbagai cara, memeriksa apakah pernyataan yang dihadapi sungguh-sungguh dapat dianggap menggambarkan gejala, atau kenyataan, yang bersangkutan. Memang sering kali sejarawan yang mengadakan pengkajian menghadapi pernyataan-pernyataan tertulis, ataupun lisan, yang sukar sekali diuji kebenarannya sehingga terpaksa menerima saja pernyataan yang bersangkutan sebagai fakta, tetapi dengan mempertahankan sikap terbuka, menerima kemungkinan bahwa pada suatu waktu terbukti bahwa pernyataan yang bersangkutan sebenarnya bukan fakta.

Setiap fakta, termasuk fakta sejarah, dibuat dengan penggunaan kerangka pemikiran tertentu. Pengamatan kenyataan atau peristiwa yang bersangkutan dengan penggunaan kerangka pemikiran yang lain bisa menghasilkan fakta-fakta yang berlainan sama sekali dan mungkin malah bertentangan dengan fakta-fakta yang dibuat dengan kerangka pemikiran yang pertama. Dalam masa revolusi kita, misalnya, seseorang tertentu bisa digambarkan sebagai sahabat lama bila menggunakan kerangka pemikiran tertentu tetapi bisa juga digambarkan sebagai musuh, orang Nica, bila menggunakan kerangka pemikiran yang lain. "Sahabat lama" dan "musuh" adalah dua pengertian yang bertentangan, akan tetapi dalam hal orang yang bersangkutan kedua-duanya adalah sesuai dengan kenyataan, keduanya adalah fakta. Orang yang sama bisa ditanggapi dengan berbagai kerangka pemikiran yang lain, yang masing-masing menghasilkan fakta tersendiri yang berbeda bila mana dibanding satu dengan yang lain. Itulah sebabnya pengkaji atau peneliti sejarah harus senantiasa sadar bahwa suatu fakta dalam dokumen tertentu dibuat dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran tertentu dan tidak merupakan kemungkinan satu-satunya untuk menggambarkan kenyataan atau peristiwa yang bersangkutan.

Kerangka pemikiran

Dalam pengkajian atau penelitian dan penulisan sejarah dapat diadakan pilihan berkenaan dengan kerangka pemikiran yang hendak digunakan. Pada umumnya, sejarawan hendak menyajikan kisah, riwayat, atau cerita sejarah yang menarik dengan mengikuti pengalaman orang, atau orang-orang, yang ditokohkan, dengan mengisahkan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, dengan menggambarkan suka-duka yang menyertai riwayat mereka.

Kerangka pemikiran yang digunakan dapat juga memberi banyak perhatian pada apa yang menggerakkan para pelaku yang dijadikan sasaran perhatian untuk berbuat. Kerangka pemikiran demikian senantiasa mengarahkan perhatian pembaca

pada pengerak atau motivasi pelaku. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para pelaku sejarah yang bersangkutan dianggap tidak begitu penting dibanding dengan apa yang menggerakkan mereka untuk berbuat, apa yang mengakibatkan mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Kerangka pemikiran lain mengutamakan upaya menggambarkan, menganalisa dan menjelaskan hubungan sebab-akibat dari peristiwa-peristiwa yang menjadi sasaran perhatian, sedangkan ada juga kerangka pemikiran yang memusatkan perhatian pada upaya menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kesatuan sosial yang menjadi sasaran perhatian. Fakta-fakta yang dijadikan sasaran perhatian dalam pengkajian sejarah banyak tergantung pada kerangka pemikiran yang dipilih untuk digunakan.

Di samping kerangka-kerangka pemikiran yang sudah disebut, masih terdapat kerangka pemikiran yang memusatkan perhatian pada upaya membuat generalisasi, atau analisa, atau analogi, atau perbandingan.

Pemanfaatan teori ilmu-ilmu sosial

Pengkaji atau peneliti sejarah bisa memperoleh banyak manfaat dari pengetahuan teori yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu ekonomi. Teori dalam ilmu-ilmu sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui secara lebih tepat batas-batas pengetahuan yang kita miliki dan pengetahuan yang belum dimiliki. Pengetahuan teori memungkinkan pengkaji atau peneliti mengadakan pilihan permasalahan yang hendak dijadikan sasaran perhatian dengan cara yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada membuat pilihan permasalahan tanpa dasar tertentu. Dengan penggunaan kerangka teori tertentu kerangka pemikiran yang digunakan dalam pengkajian atau penelitian sejarah pun menjadi lebih jelas. Setiap teori dalam ilmu-ilmu sosial mengandung kekuatan-kekuatan tertentu tapi juga kelemahan-kelemahan tertentu. Penggunaan kerangka teori tertentu dalam pengkajian sejarah me-

mungkinkan sekalian yang berkepentingan, termasuk pengkaji atau peneliti sendiri, mengetahui kekuatan maupun kekurangan atau kelemahan yang terkandung dalam pengkajian yang bersangkutan. Tanpa penggunaan kerangka teori tertentu kemungkinan membuat kesalahan atau menghasilkan hasil pengkajian yang mengandung kekurangan dan kelemahan tanpa diketahui oleh pengkaji atau peneliti sendiri cenderung adalah lebih besar.

Teori ilmu-ilmu sosial didasarkan atas kenyataan-kenyataan sosial dan dianggap berlaku di dalam ruang dan waktu mana pun, termasuk masa lampau yang menjadi sasaran perhatian para sejarawan, di mana gejala-gejala sosial yang bersangkutan berada. Integrasi sosial, misalnya, terdapat sedikit banyaknya di setiap masyarakat. Tanpa integrasi sosial masyarakat yang bersangkutan tidak mungkin dapat bertahan. Integrasi sosial juga terdapat, sedikit banyaknya, pada setiap kesatuan sosial, seperti keluarga, perguruan, organisasi politik, perusahaan, ataupun angkatan bersenjata. Teori integrasi memusatkan perhatian pada kenyataan-kenyataan sosial yang merupakan perwujudan segala integrasi ini dan berusaha menjelaskan apa yang menyebabkan adanya integrasi di kesatuan sosial yang bersangkutan. Sebaliknya, pertentangan juga terdapat sedikit banyaknya dalam hampir setiap masyarakat. Biasanya ada pertentangan antar generasi, pertentangan antara yang memerintah dan yang diperintah, sering juga terdapat pertentangan kelas atas dasar kepentingan ekonomi yang berbeda, dan terutama dalam masyarakat modern juga terdapat pertentangan ideologi, sehingga, ada teori-teori ilmu-ilmu sosial yang memusatkan perhatian pada gejala pertentangan sosial dan upaya untuk menjelaskan apa yang menyebabkan adanya pertentangan dalam kesatuan sosial jenis tertentu.

Penggunaan teori ilmu-ilmu sosial sebagai kerangka berpikir dalam pengkajian sejarah memungkinkan pemanfaatan konsep-konsep ilmiah yang telah dikembangkan khusus untuk menggambarkan dan menganalisa gejala-gejala sosial tertentu, ter-

masuk gejala-gejala sosial yang terdapat dalam masa lampau. Banyak di antara konsep-konsep demikian, seperti negara, pelapisan sosial, pranata, patrimonialisme dan elite kekuasaan, telah menjadi bagian dari peralatan ilmiah para ahli sejarah. Konsep-konsep yang digunakan dalam pengkajian atau penelitian sejarah menentukan kenyataan apa yang akan diperhatikan dan fakta-fakta apa yang akan dibuat.

Berbagai kerangka teori ilmu-ilmu sosial pun telah digunakan untuk mengkaji hubungan antar faktor, atau hubungan antara jenis gejala yang satu dengan jenis gejala yang lain, dalam pengkajian sejarah sehingga teori-teori yang bersangkutan telah juga menjadi bagian dari pengetahuan sejarah. Berbagai ahli sejarah, terutama di negara-negara sosialis (komunis), berpedoman pada teori K. Marx dalam mengkaji hubungan antara sistem ekonomi dan pertentangan kelas di suatu masyarakat tertentu dalam masa tertentu. Ada ahli-ahli sejarah yang terpengaruh oleh teori analisa-psiko S. Freud dalam upaya menjelaskan pola perilaku tokoh-tokoh tertentu, seperti M.K. Gandhi dan A. Hitler, dengan menampilkan kaitan antara pengalaman dalam masa anak-anak dengan kecenderungan perilaku mereka. Ada ahli-ahli sejarah yang sangat terpengaruh oleh teori integrasi yang dikembangkan oleh E. Durkheim; dan hubungan antara etika keagamaan dengan perilaku ekonomi sebagaimana ditampilkan oleh M. Weber dalam pengkajiannya tentang etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, serta pengkajiannya tentang agama Cina, Tao, Hindu, Buddha, dan Yahudi Kuno. Agak lebih baru adalah pengaruh teori umum yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang mengadakan pembedaan antara sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, sistem perilaku serta menjelaskan hubungan antara keempat sistem ini satu dengan yang lain.

Meskipun ahli sejarah memanfaatkan pengetahuan teori ilmu sosial, ahli sejarah tetap mempunyai tugas khusus dalam ilmu pengetahuan karena sasaran perhatiannya adalah tetap upaya untuk menggambarkan, mengerti dan menjelaskan keadaan-keadaan, proses-proses, ataupun peristiwa-peristiwa yang

terjadi dalam masa lampau. Apa pun teori atau metoda yang digunakannya dalam pengkajian atau penelitiannya, ia tidak dibenarkan menyimpang dari fakta sejarah yang menjadi dasar uraiannya dan bukti kebenaran pernyataan-pernyataan yang ditampilkan dalam karya-karya tulisan sejarahnya.

Tulisan sejarah buat siapa?

Buat siapakah suatu tulisan sejarah ditulis? Buat siapakah seorang sejarawan menulis karya tulisannya? Mungkin tak ada sejarawan yang menulis sekedar untuk memberi sumbangan pada apa yang dinamakan ilmu pengetahuan. Secara sadar ataupun tidak sadar, sejarawan menulis dengan harapan agar tulisannya dibaca oleh orang lain, tidak untuk diabadikan sebagai suatu karya terbitan yang tidak dibaca oleh siapa pun. Secara sadar ataupun tidak sadar, pada waktu menulis karya tulisannya, sejarawan yang bersangkutan berkeinginan agar orang-orang tertentu akan membaca karya tulisannya. Dan lagi, secara sadar ataupun tidak sadar, sejarawan yang bersangkutan berusaha agar tulisannya dapat mempengaruhi pemikiran para pembaca tulisannya, sehingga ia berusaha menulis sedemikian rupa agar pembaca yang menjadi sasaran perhatiannya memang memperhatikan apa yang ditulisnya.

Tentu saja, tidak semua sejarawan berhasil memikat pembaca dengan tulisan mereka, karena antara lain, penulisan suatu karya tulisan sejarah tidak hanya menuntut pengetahuan yang luas dan mendalam tentang fakta-fakta sejarah tertentu melainkan juga kemampuan untuk menulis suatu karya sejarah secara cukup menarik. Kadang-kadang malah gaya penulisan yang menarik bisa menyembunyikan kenyataan bahwa penulis tidak begitu menguasai pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah yang bersangkutan.

Ada kecenderungan pada ahli sejarah yang menganggap dirinya sebagai orang yang bekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan dan oleh sebab itu berkeinginan untuk dapat memberi sumbangan pada perkembangan pengetahuan dalam bidang

pengetahuan sejarah, untuk menulis karya tulisannya buat sesama ahli sejarah, atau calon ahli sejarah. Dalam tulisan-tulisan demikian fakta-fakta sejarah ditampilkan dengan berhati-hati, dengan penuh kesadaran bahwa pembaca, rekan dalam bidang sejarah, akan mempelajari fakta-fakta yang bersangkutan, secara cermat, siap untuk memperlihatkan kelemahan dalam penampilan fakta-fakta ini, kebenarannya, pilihannya, penafsirannya, siap untuk menggugat penulis sebagai sejarawan yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya; bahkan, mungkin, siap untuk mempermasalahkan kemampuan penulis sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan ilmiah dalam bidang pengetahuan keahlian mulia yang bersangkutan, bidang pengetahuan sejarah. Asal-usul masing-masing fakta penting yang ditampilkan dijelaskan secara terperinci, sering dalam bentuk catatan kaki yang menakjubkan atau, sebaliknya, mengkhawatirkan mahasiswa atau awam pembaca yang menanggapi catatan kaki sebagai tanda keilmiahan suatu karya tulisan. Pasti penulis adalah seorang sarjana yang begitu tinggi mutu pengetahuan ilmiahnya sehingga tidak mungkin dapat dijangkau oleh manusia biasa, seperti mahasiswa yang masih harus belajar banyak untuk menjadi orang terpelajar.

Suatu jenis tulisan sejarah sengaja ditulis untuk dikaji oleh para anak didik, siswa-siswa di sekolah ataupun mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Fakta-fakta sejarah yang ditampilkan dalam tulisan-tulisan sejarah demikian, terutama dalam buku-buku yang ditulis sebagai buku pelajaran, pada umumnya adalah fakta-fakta yang seolah-olah sudah menjadi pengetahuan sejarah yang baku, pengetahuan yang sudah dianggap benar oleh kebanyakan ahli sejarah. Pilihan fakta-fakta sejarah yang ditampilkan dan penafsiran masing-masing fakta ini sudah menjadi kelaziman di kalangan kebanyakan orang. Melalui pengajaran sejarah dengan penggunaan buku-buku pelajaran ini, fakta-fakta yang ditampilkan dalam buku-buku pelajaran yang bersangkutan menjadi lebih baku lagi, karena dijadikan pengetahuan oleh amat banyak peserta didik yang tersebar luas di seluruh

tanah air kita. Fakta-fakta sejarah yang dipilih untuk ditampilkan dalam buku-buku pelajaran sejarah nasional di sekolah-sekolah kita, seperti juga di kebanyakan negara di dunia kita ini, diharapkan membantu pertumbuhan perasaan kebangsaan pada para siswa dan menjadikan mereka warga Negara Republik Indonesia yang bangga bahwa mereka adalah bagian dari kebangsaan Indonesia.

Beberapa karya tulisan sejarah ditulis khusus untuk dibaca, dikaji, oleh para pemimpin bangsa atau negara kita, orang-orang yang menempati kedudukan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang mempengaruhi kepentingan banyak orang. Karya-karya tulisan yang sengaja ditulis untuk para pemimpin diharapkan memberi pengetahuan sejarah yang sama bagi sekalian pemimpin sehingga cara mereka memandang perkembangan masyarakat, bangsa dan negara di masa lampau, yang mengakibatkan keadaan di masa sekarang dan yang akan mempengaruhi perkembangan di masa akan datang, adalah sama. Karya-karya tulisan demikian biasanya dianggap merupakan sejarah resmi, tafsiran sejarah nasional yang dibenarkan oleh pemerintah dan dijadikan pegangan oleh pejabat-pejabat pemerintah, serta pendukung-pendukung utama mereka.

Golongan-golongan tertentu dalam masyarakat kita juga ingin agar peranan mereka sebagai golongan mendapat tempat yang layak dalam sejarah nasional kita. Keinginan untuk merekam riwayat pertumbuhan dan perkembangan golongan yang bersangkutan, dengan, kalau dapat, memperlihatkan perjuangan yang telah dilaksanakan oleh golongan yang bersangkutan dalam rangka perjuangan gerakan kebangsaan Indonesia melawan penjajahan asing, menghasilkan semakin banyak buku yang ditulis sendiri oleh penulis-penulis golongan yang bersangkutan dan biasanya juga diterbitkan sendiri. Berbagai kesatuan sosial, seperti perguruan tertentu, golongan profesi tertentu, perusahaan tertentu, divisi atau komando daerah militer tertentu, dan organisasi politik tertentu, telah mengumpulkan fakta-fakta sejarah

kesatuan sosial yang bersangkutan dan menghasilkan buku riwayat kesatuan mereka.

Akhir-akhir ini semakin banyak terbit karya tulisan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan masyarakat-masyarakat daerah tertentu untuk, terutama, dibaca oleh sesama anggotanya masyarakat daerah yang bersangkutan. Karya-karya tulisan ini menampilkan banyak fakta sejarah yang belum diperhatikan dalam penulisan sejarah Indonesia. Fakta-fakta yang disajikan dalam karya-karya tulisan sejarah masyarakat daerah masih menunggu untuk diperhatikan, dikaji dan dimasukkan dalam karya-karya tulisan sejarah yang ditampilkan sebagai tulisan-tulisan yang menyajikan kisah sejarah Indonesia.

Akhirnya, ada juga karya-karya tulisan sejarah yang sengaja ditulis untuk dibaca oleh rakyat biasa. Tulisan-tulisan demikian biasanya disajikan dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan atas dasar anggapan bahwa pengetahuan umum yang dimiliki oleh pembaca sangat terbatas. Ada karya-karya tulisan demikian yang diterbitkan untuk menaikkan taraf pengetahuan umum rakyat biasa yang merupakan anggota masyarakat yang paling besar jumlahnya tanpa keinginan untuk mempengaruhi perkembangan politik mereka, tetapi ada juga tulisan yang sengaja ditulis untuk dibaca oleh rakyat biasa agar pemikiran, dan diharapkan kemudian juga kecenderungan tindakan mereka di gelanggang politik, berkembang ke arah pemikiran tertentu. Fakta-fakta sejarah yang ditampilkan adalah biasanya fakta-fakta sejarah yang dapat menggerakkan pemikiran para pembaca.

Buat siapa sejarah ditulis ikut menentukan fakta-fakta mana yang dianggap oleh penulis perlu ditampilkan. Pasti banyak sekali kenyataan yang dapat dijadikan sasaran perhatian oleh Prapanca dalam menulis *Negarakertagama*, akan tetapi karena penulis sejarah ini menulis untuk raja, ia menampilkan kenyataan-kenyataan tertentu saja dan mengabaikan banyak kenyataan lain. Gambaran yang diperoleh pembaca tentang Majapahit, oleh sebab itu, adalah gambaran yang menampilkan kemegahan, gambaran yang menyenangkan raja sebagai penguasa ne-

gara. Bilamana Prapanca tidak menulis untuk raja melainkan untuk para tani yang harus bekerja giat agar supaya ekonomi di wilayah Kerajaan Majapahit menghasilkan kelebihan (surplus) dalam hasil produksi, kelebihan yang diperlukan untuk memungkinkan pembangunan istana-istana dan bangunan-bangunan lain yang megah; memungkinkan para bangsawan menikmati seni tari dan musik, seni lukis dan seni pahat, falsafah dan ke-susastraan, hukum dan politik, keamanan dan pertahanan, serta pendidikan dan latihan; memungkinkan perjalanan-perjalanan keliling raja, beserta rombongan para pejabat dan petuas, di wilayah negara, penyajian santapan dan pemberian tempat penginapan yang sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota rombongan, serta pementasan hiburan yang dapat mengakibatkan mereka meninggalkan pedesaan atau kota yang bersangkutan dengan rasa senang; memungkinkan tentara dan armada yang mempunyai kemampuan untuk memperluas wilayah kerajaan dan daerah-daerah taklukannya; dan memungkinkan segala sesuatu yang lain yang mengakibatkan Kerajaan Majapahit menjadi kedatuan yang agung, karya tulisan Prapanca mungkin sekali akan menampilkan fakta-fakta yang lain sekali jika dibanding dengan karya tulisan yang kita kenal sekarang ini sebagai kitab *Negarakertagama*. Bilamana Prapanca menulis sejarah untuk para sesama pendeta, yang perhatian utamanya adalah pemikiran dan kegiatan keagamaan, karya tulisannya pasti juga akan menampilkan fakta-fakta yang lain dari pada yang ditampilkan dalam kitab *Negarakertagama* yang sekarang menjadi sumber keterangan utama yang kita miliki dalam mengkaji kenyataan sejarah di Kerajaan Majapahit.

Bahwa sejarawan-sejarawan tertentu bekerja dan menulis seperti Prapanca tidak berarti bahwa gambaran tidak lengkap dan yang juga merupakan gambaran yang diperindah tidak mempunyai tempat yang layak di antara karya-karya tulisan sejarah karena tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Karya-karya tulisan demikian mempunyai kegunaan yang berarti karena dapat memberikan

kebanggaan pada bangsa yang bersangkutan dan kepercayaan akan kebenaran kebijaksanaan pemerintahan negara yang bersangkutan. Akan tetapi tentu saja karya-karya tulisan demikian juga harus ditanggapi sebagai karya-karya pengagungan dengan sekalian akibatnya.

Penutup

Mudah-mudahan kesadaran yang lebih besar tentang beraneka ragam permasalahan yang berhubungan dengan fakta memungkinkan pengkajian dan penulisan sejarah Indonesia yang lebih dapat dipertanggungjawabkan atas dasar pedoman-pedoman yang lazim digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan. Justru kesadaran akan adanya beraneka ragam permasalahan yang berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai fakta sejarah itulah yang semestinya membedakan ahli sejarah dari awam yang mempunyai minat besar pada sejarah sehingga juga melibatkan diri dalam pengkajian sejarah. Baik ahli sejarah maupun awam yang juga melakukan pengkajian dan penulisan sejarah dapat memberi sumbangan pada perkembangan pengetahuan tentang Sejarah Indonesia. Akan tetapi, ahli sejarah, sebagai orang yang pekerjaan utamanya berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, berkewajiban untuk lebih memperhatikan pedoman-pedoman yang pada umumnya dianggap berlaku bagi orang-orang yang pekerjaan utamanya adalah dalam lapangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ABRAMS, Philip,
Historical Sociology
Somerset, England: Open Books Publishing Ltd., 1982
- BRAUDEL, Fernand,
On History
Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Sarah Matthews
Chicago: The University of Chicago Press, 1980.
- BURKE, Peter,
Sociology and History
London: George Allen & Unwin, 1981.
- CANNON, John, ed.,
The Historian at Work
London: George Allen & Unwin, 1980.
- FERRO, Marc, ed.,
Social Historians in Contemporary France: essays from Annales
Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh staf, Annales,
Paris. New York: Harper Torchbooks, Harper & Row,
1962.
- FISCHER, David Hackett,
FINBERG, H.P.R., ed.,
Approaches to History: a symposium
Toronto: University of Toronto Press, 1962.

- FISCHER, David Hackett,
 'Historians' Fallacies: toward a logic of historical thought
 New York: Harper Colophon Books, Harper & Row,
 1970.
- FORSTER, Robert, dan Orest RANUM, ed.,
 Family and Society: selections from the Annales.
 Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Elborg FORSTER
 dan Patricia M. RANUM.
 Baltimore dan London: The Johns Hopkins Press, 1976.
- FORSTER, Robert, dan Orest RANUM, ed.,
 Rural Society in France: selections from the Annales
 Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Elborg FORSTER
 dan Patricia M. RANUM.
 Baltimore dan London: The Johns Hopkins Press, 1977.
- HENIGE, David,
 Oral Historiography
 London: Longman, 1982.
- LANDES, David S., dan Charles TILLY, ed.,
 History as Social Science
 Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1971.
- MARWICK, Arthur,
 The Nature of History
 London: Macmillan Press, 1971.
- NADEL, George H., ed.,
 Studies in the Philosophy of History: selected essays from
 History and Theory
 New York: Harper Torchbooks, Harper & Row, 1965.
- PARSONS, Talcott,
 The Structure of Social Action: A study in social theory
 with special reference to a group of recent European writers
 Cetakan ke-3. New York: The Free Press of Glencoe, 1964
- Social Systems and the Evolution of Action Theory
 New York: The Free Press; London: Collier Macmillan
 Publishers, 1977.

- PEETERS, Harry: Marcel BIELIS; dan Charles CASPERS,
Literatuurgids Historische Gedragwetenschappen.
Baarn: Ambo, 1985.
- RABB, Thodore K., dan Robert I. ROTBERG, edl,
The New History: the 1980s and beyond. Studies in inter-
disciplinary history
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982.
- SCHNEIDER' Louis, dan Charles BONJEAN, ed.,
The Idea of Culture in the Social Sciences.
Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- SKOOPOL' Theda, ed.,
Vision and Method in Historical Sociology
Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL,
Research in Economic and Social History
London: Heinemann, 1971.
- TAYLOR' A.J.P.,
Essays in English History
Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1976.
- WEBER, Max,
Economy and Society: an outline of interpretive sociology
Disunting oleh Guenther ROTH dan Claus WITTICH. 2
jilid. Berkeley, Cal.: University of California Press, 1978.

**PENGALAMAN YANG BERLAKU, TANTANGAN YANG
MENDATANG: ILMU SEJARAH DI TAHUN
1970-AN dan 1980-AN
(Oleh Taufik Abdullah)**

"Tugas sejarawan ialah menemukan, melukiskan, dan menerangkan aspek sosial dan akibat yang ditimbulkan oleh apa yang telah dilakukan dan diderita manusia", kata Isaiah Berlin.¹⁾ Meskipun dalam mengatakan ini ia berada dalam suasana pemikiran filsafat, tetapi pernyataan ini langsung mengena dari sudut pengerjaan sejarah secara praktis. Memang, demikianlah yang dikerjakan sejarawan-sebagai-sejarawan. Tetapi betapa jauh jarak yang harus ditempuh oleh ketiga proses ini sebelum sampai pada kelegaan, "inilah sejarah". Dan Berlin juga terlalu sadar dalam hal ini, sehingga ia telah menumpahkan perhatian ilmiah dan filsafatnya untuk menerangkan jarak-jarak yang membatasi proses yang panjang tersebut. Dan, siapapun tahu juga bahwa ia tidaklah sendirian, jauh daripada itu.²⁾

Bukankah ketiga proses, "menemukan", "mengisahkan" dan "menerangkan" dapat pula disalin ke bentuk yang dihasilkan, yaitu "kronikel", "kisah sejarah", dan "keterangan-sejarah"³⁾? Dengan begini, maka pada tahap pertama saja sejarawan telah harus melibatkan diri pada usaha penemuan elemen-elemen sejarah, yang menuntut adanya kepastian faktual ten-

tang "apa", "siapa", "bila" dan "di mana". Pada tahap kedua, ketika elemen-elemen sejarah itu harus dirangkaikan ke dalam suatu kisah, dan pertanyaan "bagaimana" harus dijawab, maka bukan saja keutuhan logika harus terjadi, tetapi imajinasi kesejarahan juga ikut memainkan peranan. Bukankah elemen-elemen sejarah tersebut bersifat fragmentaris, serba terpecah-pecah? Siapakah pula yang akan bisa melupakan peranan bahasa dan kata dalam usaha pengisahan ini? Dalam hal ini kita tidak saja berhadapan dengan ketertiban dan langgam bahasa, tetapi juga, dan bahkan lebih penting ialah/ dengan masalah *representation*, sebab tak ada jaminan adanya garis lurus antara realitas dengan bahasa yang dipakai untuk "mewakilinya". Tak ada pula kepastian adanya kesesuaian yang utuh antara teks, yang berusaha mewakili realitas sejarah itu, dengan pembacanya. Para praktisi sejarah tentu sadar benar, apa artinya verifikasi dan klasifikasi dari fakta yang ditemukan serta pengujian dari sifat kisah. Bukankah kisah, yang murni "deskriptif" pada tahap lanjutan bisa bercorak "emplotment" ketika kisah telah ditujukan kepada penjawaban masalah tertentu dan untuk keperluan khlayak tertentu pula?⁴⁾ Adalah benar bahwa kedua corak penelitian ini termasuk corak *narrative*, tetapi kisah hanyalah deskripsi "datar" dan "murni" sedangkan *emplotment* adalah usaha rekonstruksi yang secara implisit telah ingin menyatakan sesuatu tentang "arti" dan makna dari yang dikisahkan. Pada kedua tahap ini saja masalah "kebenaran-sejarah"/telah menghantui. Maka terlibatlah para sejarawan, apalagi para pemikir dan teoretisi sejarah, dalam permasalahan logika dan realitas.

Dalam rekonstruksi sejarah yang mencoba "menghadirkan kembali" kelampauan/pemberian keterangan adalah suatu kemestian yang tak terhindarkan. Bukankah, seperti yang dikatakan seorang sejarawan secara alegoris, "sejarah itu negeri asing, di mana orang melakukan hal-hal yang aneh"? Setelah sampai pada tahap menerangkan ini maka kita kadang-kadang tak hanya behadapan dengan pemahaman empiris terhadap gejala historis, yaitu sebagaimana elemen-elemen sejarah yang

evident menyampaikan, tetapi juga asumsi teoretis dari sang sejarawan.

Kalau telah begini bukan saja persoalan epistemologi menjadi sesuatu yang bukan asing, malah, dan lebih sering, pandangan-dunia, atau bahkan ideologi (dalam pengertian yang diberikan Shils) menampakkan dirinya. Di samping sikap dan pandangan tentang dasar pengetahuan menjadi masalah, corak pemikiran normatif kadang-kadang menyelinap dalam usaha mengerti realitas itu secara "obyektif", "Kronikel", "kisah"/*emplotment* dan "keterangan historis" memang merupakan proses yang berbeda-beda, tetapi dalam penulisan rekonstruksi sejarah ketiganya semestinyalah merupakan keutuhan.

Hal-hal ini semua bukanlah masalah baru, dan, bahkan telah, atau barangkali seharusnya, menjadi bagian dari latihan setiap sejarawan. Hal-hal ini adalah pula merupakan titik tolak sejarawan ketika ia sekali-kali merenungkan sifat dan tujuan aktivitas akademisnya "menemukan, melukiskan dan menerangkan" kelampauan itu. Dalam perenungan, atau tolehan kepada tugas sebagai sejarawan ini dapat menimbulkan berbagai akibat, yang berada di luar proses itu sendiri. Malah, bukan tak jarang, sifat dari masing-masing proses dan jarak yang mengantarai ketiganya dapat menjauhkan ilmu sejarah dari tujuan ideal yang sejak semula melatarbelakangi kehadirannya. Sejarah yang menciptakan integrasi antara "keasingan dengan kelampauan" dengan "keakraban hari kini" serta "ketidakpastian hari nanti", kadang-kadang tampil sebagai penambah unsur disintegratif, ketika "kepalsuan" dan mithologisasi sejarah telah menyelinap dan tatkala kerancuan dimensi-waktu atau anakronisme telah tak lagi terbendung. Jika tidak karena hal-hal ini, tidaklah sejarah kadang-kadang diejek sebagai "sipembelot" dan sejarawan, sebagai ilmuwan, diancam oleh berbagai corak "kengauran"⁶⁾

Tetapi terlepas dari segala kemungkinan "dosa" dan ketergelinciran kepada segala macam *fallacies* itu, rekonstruksi sejarah memang tak jarang dibayangi oleh *nemesis* yang sewaktu-

waktu bisa tercipta. "Kutuk" yang terberat yang bisa menimpa penulisan sejarah ialah ketika apa yang diajukannya unsur disintegratif sosial. Dalam situasi ini kelihatan dengan jelas adanya hubungan yang bercorak dialektis antara sejarah - yang dikisahkan dengan masyarakat yang menjadi khalayak dan sekaligus objek kajian dari studi sejarah itu. Masyarakat, yaitu objek dan khalayak sejarah, memberi reaksi terhadap gambaran yang telah diberikan terhadap masa lalunya. Dari corak hubungan ini pula, tampak bahwa masyarakat/tidak saja bisa terdiri atas berbagai kelas dan status dan sebagainya, tetapi juga atas berbagai komunitas-sejarah-komunitas yang diikat oleh rasa kewajaran-historis yang sama. Sesuatu yang abstrak, dan bahkan, selalu mengalir, komunitas-sejarah bisa dipersatukan oleh ikatan etnis-kultural tetapi lebih sering oleh ideologi dan solidaritas politik. Pluralitas dari komunitas-sejarah pertanda dari masyarakat peralihan-ketika kepastian situasi tradisional telah kehilangan keampunannya dan di saat dasar solidaritas baru masih sedang dipupuk. Makin terjadi peralihan struktural, yang mengancam berbagai ikatan sosial-politik, makin besar kemungkinan komunitas-sejarah mengadakan hubungan yang intens dengan sejarah yang dikisahkan. Dalam suasana inilah kemungkinan sejarah atau elemen sejarah unsur disintegratif makin menaik. Masalah pokok bukanlah semata-mata berkisar pada kemungkinan telah dirusaknya suatu *accepted history*, sejarah yang telah diterima kebenarannya, bahkan tidak pula selalu bertolak dari belum terdapatnya kepastian-historis (*historical certainty*), tetapi terutama ketika kewajaran-historis (*historical fairness*), yang mengikat komunitas-sejarah telah terganggu kelangsungan hidup komunitas-sejarah itu, yang pada gilirannya telah mendukung ikatan solidaritas tertentu, dirasakan sebagai menjadi taruhan.

Kasus-kasus "surat-surat Bung Karno dari Sukamiskin", "perumusan Pancasila", "buku pelajaran sejarah SMP" dan entah apalagi memperlihatkan dengan jelas betapa unsur desintegratif telah berperan. Maka "gangguan komunikasi" pun terjadi.

Dalam suasana ini, sejarawan mau atau tidak telah terlibat. Perdebatan-perdebatan yang mengiringi kasus-kasus ini, memperlihatkan betapa suatu suasana kewajaran historis, yang telah dirasakan sebagai suatu kepastian, tergoncang oleh tantangan baru. Tantangan ini ternyata tidak diterima sebagai pengujian terhadap kewajaran-historis, yang bahkan telah berperan sebagai *mithos* peneguh itu, tetapi sebagai infiltrasi yang bersifat "subversif", dari konsep kewajaran-historis lain, yang antagonistik.

Konflik antar komunitas-sejarah umumnya lebih bersifat *latent* daripada terbuka. Namun, reaksi dari komunitas-sejarah terhadap segala tantangan yang akan mengurangi validitas kewajaran-historis, merupakan peristiwa yang sering terjadi. Pengengkaran validitas ini mungkin bertolak dari dimensi kebenaran (*dimension of truth*), tetapi dapat pula berfungsi sebagai unsur "demithologisasi". Jika ini telah terjadi maka salah satu sendi yang mungkin merupakan "struktur keniscayaan"⁷⁾ telah digoyahkan. Dengan begini pula konfirmasi sosial terhadap realitas yang diyakini sebagai "riil" menjadi problematik. Maka suasana krisis, betapapun enteng, telah diperkenalkan.

Kasus-kasus perdebatan di sekitar diri dan peranan Bung Karno adalah contoh yang paling akhir. Kasus-kasus ini memang memperlihatkan sifat "kelampauan" (*the past*) yang telah menyelimuti Bung Karno sebagai tokoh sejarah.⁸⁾

Terlepas dari apa yang diperdebatkan dan bagaimana pula tingkah intensitas perasaan yang terlibat di dalamnya, pluralitas sejarah, yang menjadi sebab dari perdebatan ini, sama sekali tidaklah unik. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa sejarah sebagai sesuatu yang dikisahkan, tidaklah urusan sejarawan saja. Sejarah-sebagai kisah harus disampaikan. Maka dengan begini sejarah tidak saja harus memakai wacana, *discourse*, tetapi sejarah itu sendiri adalah suatu *discourse*, suatu berita pikiran. Sebagai wacana, sejarah tidak saja mewakili realitas atau bahkan menciptakannya, tetapi juga menentukan bentuk dan sifat realitas itu. Tanpa sejarah, bukankah peris-

tiwa di masa lalu "tak ada" dan "tak berwujud"? Tetapi, penulisan sejarah sekaligus juga menolak untuk mengadakan formulasi yang sama dari *discoursenya*.⁹⁾ Maka di samping kepastian-historis dari rekonstruksi sejarah, yang telah melalui ketiga proses pengerjaan sejarah yang disebut Berlin, selalu merupakan problematik. Elemen-elemen sejarah, yang membentuk "kronikel", dapat menyentuh khalayak dan objek sejarah tersebut. Dengan begini dinamika hubungan sejarah sebagai bentuk *discourse* dengan masyarakat, serta komunitas-komunitas sejarah yang berada di dalamnya telah bermula.

Dalam konteks masyarakat tradisional, di mana *historical fairness* adalah segala-galanya, baik sebagai mithos-peneguh, maupun sebagai dasar legimitasi kekuasaan, sejarawan "seluruhnya" terluluh dalam masyarakatnya, yang juga sering merupakan, komunitas-sejarahnya, apapun suasana ideologi dan corak sosiologis dari komunitas itu. Tetapi dalam masyarakat yang telah menuntut kepastian historis dan yang telah mengenal tahap-tahap prosedural dari "kronikel", "kisah" dan "keterangan", maka sejarawan tidaklah hanya warga dari masyarakat dan komunitas-sejarahnya, tetapi juga anggota dari dunia akademis. Dalam dunia ini bukanlah suasana konsensus norma dan nilai yang dituntut tetapi ketaatan pada konvensi akademis, yang berlandaskan rasionalitas dan integritas intelektual. Bukanlah nilai-nilai *historical fairness* yang berbicara lantang tetapi tuntutan ethis dan teknis dari *the mansion of truth*. Tidakkah keutuhan kosmos yang menjadi perhatian pokok, tetapi pertanggungjawaban akademis terhadap "penemuan, pelukisan, dan pemberian keterangan historis".

Maka suatu suasana dilematis bisa terhampar di hadapan sejarawan. Suasana ini lebih dirasakan dalam masyarakat yang sedang dalam proses perubahan ketika tatanan sosial baru telah dibayangkan tetapi idealisasi dari tatanan lama tetap mencekam. Kasus-kasus perdebatan kesejarahan yang telah dan sedang terjadi di tanah air kita ini mengisyaratkan dengan keras suasana

yang bisa terjadi itu. Tetapi kasus-kasus ini memberi pesan moral yang lain. Di samping menuntut sejarawan untuk sekali-kali merenungkan fungsi dan makna peranannya sebagai cendekiawan, kasus-kasus tersebut juga memperlihatkan betapa mutlak-nya integritas ilmu dan betapa perlunya sejarawan untuk selalu mempertanyakan kemampuan teknis dan methodologisnya sebagai pekerja ilmiah. Kebetulan saja kasus-kasus perdebatan di atas tidak menyumbang apa-apa dalam wawasan teori sejarah, bahkan juga tidak dalam masalah methodologi, kesemuanya hanya bergumul dalam suasana "kronikel", di mana unsur-unsur sejarah faktual dipertengkarkan. Tetapi kasus-kasus ini dengan keras memperlihatkan situasi kultural dalam mana sejarawan harus menjalankan tugasnya dan memainkan peranannya. Dengan begini, maka suasana ini bukan hanya merupakan latar belakang dari berbagai perkembangan historiografi, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi sejarawan. Di samping struktur sosial-ekonomis serta perkembangan dunia akademis, suasana ini semestinya menjadi anjang-ancang pemikiran sejarawan dalam menjadikan peranannya sebagai sejarawan. Anjang-ancang ini pula agar ia tak tergelincir pada kecenderungan antikuriat, yang mengakhiri *significance* problemnya setelah jawab atas pertanyaan didapatkan, atau sengaja ataupun tidak mengalami transformasi diri sebagai ideolog, yang mencari "pembenaran", bukannya "kebenaran".

II

Dengan latar belakang permasalahan yang mungkin dirasakan agak berbau teoretis, maka bagaimanakah corak dan tingkat perkembangan historiografi di tanah air kita dalam sepuluh tahun terakhir ini? Barangkali tak ada salahnya jika pembicaraan ini dimulai dengan mengutip salah satu kesimpulan dari *Seminar Sejarah Nasional I* (1957) yang bersejarah itu. Dalam salah satu kesimpulan ditegaskan bahwa di samping nilai-nilai nasionalisme, maka penulisan sejarah nasional Indonesia "supaya dilaksanakan secara *synthesis* (istilah Prof. Mr. Muh. Yamin)

atau multiple-approach (istilah Soedjatmoko) dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan apabila unsur kebenaran dan objectiviteit yang menjadi syarat mutlak bagi penyusunan Sejarah Nasional tidak diabaikan".¹⁰⁾ Jadi sudah sejak hampir tiga puluh tahun yang lalu para pemikir sejarah telah menekankan pentingnya dimensi-kebenaran atau kepastian-historis dalam pengerjaan sejarah. Dan, tak kurang pentingnya, seminar sejarah ini mengisyaratkan perlunya pendekatan *synthesis*, apa pun mungkin bentuknya secara *methodologis*. Keistimewaan dari kesimpulan ini ialah sifat "keterasingannya" dalam suasana pemikiran sejarah yang dominan. Waktu itu dan, bahkan juga bahkan sampai awal 1960-an, adalah periode ketika dekolonisasi sejarah, yang bercorak moral, bukannya perspektif, lebih menonjol dan di saat dimensi kewajaran-historis, bukannya dimensi-kebenaran, lebih berkuasa. Hal ini mencapai puncaknya di dalam periode Demokrasi Terpimpin ketika "Manipulasi" sejarah bukan saja diharuskan, tetapi juga diturunkan dari "atas". Keamburan Demokrasi Terpimpin secara kronologis diikuti oleh kembalinya pluralitas komunitas sejarah dan fragmentasi dalam konsep kesejarahan secara terbuka, tanpa harus berlandung di belakang jargon politik "demi Revolusi yang multi kompleks". Lebih penting lagi bagi perkembangan ilmu sejarah ialah "keterasingan" kesimpulan Seminar Sejarah Nasional yang pertama itu mulai diakhiri.¹¹⁾ Periode pengerjaan sejarah yang bertolak dari dimensi-kebenaran, yang dilandasi oleh studi sejarah kritik, serta kesadaran *methodologis* akan pentingnya pendekatan multi-dimensional bermula.

Pendekatan *multisimensional*, yang dipelopori Sartono Kartodirdjo¹²⁾ bertolak dan praduga teoritis bahwa sejarah sebagai untaian peristiwa-peristiwa di kelampauan hanyalah mungkin dimengerti dan diterangkan dalam konteks struktural yang merupakan wadah peristiwa itu. Suatu peristiwa tidak ditimbulkan oleh faktor tunggal, tetapi oleh konvergensi berbagai faktor. Perbedaan keakraban dari berbagai faktor itu dengan peristiwa atau *event* hanyalah mungkin diketahui dengan pe-

ngujian yang kritis dan empiris. Karena itulah rekonstruksi sejarah, yang telah menggabungkan secara utuh "kronikel", "kisah" dan "keterangan peristiwa" dianggap sebagai "*a crowning achievement*",¹³⁾ jika istilah Namier boleh dipinjam.

Multi-dimensional bukanlah sebuah teori yang tertutup, tetapi suatu sikap ilmiah yang bertolak dari pengakuan umum tentang sifat sejarah yang berdimensi majemuk dan ber-aspek pluralistik, serta kesadaran sejarah yang bersifat kontekstual. Mungkin tak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa pendekatan ini kerap memperlihatkan sifat *academic mood*, jika bukan *2fads and fashion*". Sebagai sikap ilmiah, maka tidak mengherankan jika historiografi yang dihasilkannya kadang-kadang secara teoretik mempunyai kecenderungan eklektik-teori berfungsi sebagai penolong dalam proses konseptualisasi dan sebagai alat perbandingan dalam pemberian keterangan historis. Studi yang dihasilkan bahkan tak jarang bercorak eksploratif dan eksperimental. Jika kecenderungan ini tak jelas kelihatan pada satu-satu karya dari masing-masing praktisi, maka akan tampak jelas manakala keseluruhan karya kesejarahan dari pendekatan ini diperhatikan. Tidak selalu, memang, sifat eklektik, eksperimental, dan eksploratif ini membawa hasil yang memadai, tetapi kegelisahan mencari adalah ciri yang tak terpisahkan dari sikap ilmiah yang multidimensional. Tak jarang karya dan pemikiran yang bertolak dari sikap-ilmiah ini tergelincir pada asumsi teoretis lama, tetapi kesediaan untuk selalu menguji asumsi tersebut adalah *virtue* yang dibanggakan.

Namun ada dua implikasi teoretis yang keras terpancar dari pendekatan multi-dimensional terhadap sejarah. Penekanan pada pencarian kaitan antara peristiwa dengan konteks struktural yang menjadi wadah peristiwa itu, secara implisit menolak determinisme sejarah. Kedua, masalah objektivitas sejarah "dipindahkan" dari lapangan filsafat ke problem metodologis. Masalahnya bukanlah terletak pada pengakuan kelemahan manusia yang tak bisa terlepas dari segala corak subjektivisme, tetapi pada pendekatan *methodologi*, kemampuan teknis,

kejujuran intelektual dan tentu saja, *historical judgment*/ dari sejarawan. Dan di atas segala-galanya sejarah tergantung dari ada atau tidaknya sumber yang *evident*.

Dari sudut metodologis ini pendekatan multi-dimensional berkaitan erat dengan munculnya gejala lain dalam penelitian dan penulisan sejarah. Pertama, makin intimnya sejarawan dengan cabang-cabang ilmu sosial lain. Sejarawan makin membiasakan dirinya dengan berbagai konsep yang telah lebih dahulu diperkembang oleh disiplin-disiplin ilmu lain. Kecenderungan ini membawa akibat terhadap usaha pemberian keterangan-historis. Sejarawan makin tidak terpaku pada metode *emplotmen*¹⁴⁾ atau *colligation*¹⁵⁾. Peristiwa sejarah tidak lagi diterangkan hanya dengan kisah yang secara bertahap makin memperlihatkan seluruh sifat dan corak peristiwa itu dan juga bukan hanya dengan mencari sebab-sebab pada peristiwa yang mendahuluinya. Argumen yang bertolak dari wawasan teori telah makin kerap mendampingi kisah sejarah. Kedua, sejarah politik, yang berkisar pada dinamika dan sistem kekuasaan, yang secara praktis juga bersifat "elitis", tidak lagi menjadi pemegang monopoli perhatian sebagai "wilayah penelitian". Sejarah sosial, yang sering mewujudkan dirinya dalam "sejarah lokal" dan "sejarah agraris" makin mendapat perhatian. Kegairahan ala Hobsbawm¹⁶⁾ tentang peralihan dari "sejarah sosial" ke "sejarah masyarakat" — dari pendekatan ke sasaran penelitian memang belum begitu bergema, tetapi dengan "sejarah sosial" pada tahap lokal serta dipakaikan pada tema yang dirumuskan dengan jelas (agraris, petani, dan sebagainya) dua hal lain menampilkan dirinya. Di satu pihak kecenderungan ini menyebabkan sejarawan makin mendekati pendukung dinamika sejarah yang sesungguhnya — "orang kecil dalam peristiwa kecil" dan, di pihak lain, sifat komparatif, yang secara implisit telah menjadi bagian dari ilmu sejarah, makin dengan sadar dilakukan. Dengan begini keunikan-sejarah tidaklah harus diterima sebagai patokan filosofis, tetapi sebagai suatu *unit* yang secara kontekstual telah dibentuk. Jadi lebih bersifat metodologis. Kecende-

rungan ketiga ialah, makin banyaknya dikerjakan sejarah-analisis, yang lebih menaruh perhatian pada peristiwa struktural daripada *event*, *l'évenement*, atau letupan-letupan peristiwa yang disebut Braudel "*nouvelle sounant*." 17) Perhatian pada sejarah lokal atau pedesaan adalah contoh yang jelas pada kecenderungan analitis dan struktural ini. Bahkan suatu "letupan seketika", seperti umpamanya berbagai jenis dan corak pembrontakan petani ataupun konflik elite lokal, lebih sering diperlakukan sebagai pantulan dari situasi struktural, bukan sebagai *event* yang penting pada dirinya. Dengan begini masalah kausalitas, sebab-dan-akibat dan "letupan-peristiwa" berada dalam suatu kenyataan struktural, tidak pada untaian proses-ulang dari satu situasi ke situasi lain.

Sering proses barulah menampakkan dirinya ketika struktur-struktur yang serba terpenggal-penggal dilihat dalam suatu *trajectory*. Maka, tanpa disengaja dan bukan pula hasil re-nungan dan rekonstruksi sejarawan sebagai individual, pendekatan multidimensional memperlihatkan historiografi sebagai berita pikiran, suatu *discourse* 18) Meskipun uraian kesejarahan yang diperlihatkan sibuk mencari berbagai kaitan antara berbagai mata rantai sebab-peristiwa-dan-akibat, tetapi rangkaian uraian itu sebagai historiografi memperlihatkan corak yang terputus-putus.

Sebagai *discourse*, wacana atau berita pikiran, sejarah yang hanya bisa "ada" ketika telah dikomunikasikan dengan bahasa ataupun simbol itu, tidaklah berhenti dan habis pada dirinya. Sebagai keseluruhan karya-karya sejarah itu telah menampilkan seakan-akan merupakan bagian dari sejarah intelektual. Meskipun bertolak dari *the mansion of truth*, sebagai *discourse*, historiografi yang dihasilkan oleh pendekatan multi dimensional, secara implisit juga merupakan rancangan awal dari aktivitas sosial. Sebab apa yang dihasilkan tidak saja peristiwa yang memantulkan makna yang simbolik, tetapi juga ke-arifan yang praktis.

Barangkali hal ini hanyalah suatu bentukan teoretis terhadap kemungkinan yang terdapat pada tradisi historiografi yang dirintis oleh pendekatan multisimensional. Tetapi dua hal lain yang langsung ataupun tidak berkaitan *discourse* perlu juga disinggung. Pertama, *mode of explanation*, cara pemberian keterangan, yang tidak semata bertolak dengan kecenderungan *emplotment*, ketika pertanggungjawaban "kronikel" harus diberikan, tetapi juga bercorak argumen teori, menyebabkan rekonstruksi harus selalu diuji dan diperdebatkan. Jadi, terlepas dari karakteristik pribadi para praktisi-nya multidimensional secara implisit bersifat toleran dan "liberal". Bukankah wacana harus selalu diuji dari segala kemungkinan kesuciannya dengan realitas yang diwakilinya, selama ia diperlukan sebagai dirinya? Kedua, kecenderungan ini makin pula menyebabkan sejarawan untuk lebih memperhatikan karya sastra. Perhatian ini bukanlah sekedar menjadikan karya sastra sebagai "dokumen", yang diharapkan memberikan fakta-fakta sejarah berdasarkan kritik intern terhadap karya sastra, tetapi sebagai "teks", yang terlibat adalah harus dialog dengan konteksnya¹⁹⁾ suatu dialog yang makin merupakan problem teoretis.²⁰⁾

Setiap *discourse* berkemungkinan untuk memberi berbagai rangsangan intelektual. Meskipun historiografi, hasil rekonstruksi pendekatan multi-dimensional, dapat memantulkan dirinya sebagai kritik-sosial, atau bahkan pengetahuan teknologis (dalam arti biasa dimanfaatkan), tetapi dasar pengerjaannya berasal dari suasana pertimbangan akademis. Pengerjaan studi sejarah yang dilakukan lebih bercorak *academic enterprise* dari pada *social criticisms* ataupun *technological knowledge*.²¹⁾ Namun, meskipun bertolak dari *the mansion of truth*, pendekatan ini tidak mengancam-sekurangnya tidak dalam pola perilaku, jika mungkin demikian dalam tujuan akhir berbagai komunitas-sejarah. Malah tidak pula menyerang secara frontal tradisi penulisan sejarah modern yang cukup didominasi oleh para amatir dan guru-guru sejarah. Pendekatan multi-dimensional mencari *clientele*-nya di kalangan para sejarawan, yang men-

jadikan sejarah sebagai "karya akademis", bukan sebagai pemupuk komunitas-sejarah. Dengan kata lain pendekatan ini hanyalah menambah kecenderungan baru dalam panorama penulisan sejarah. Tetapi dari *clientele* pendekatan inilah, terlepas dari segala perbedaan mutu dan "keanehan-keanehan" individual masing-masing, perkembangan sejarah sebagai ilmu, sebagai *academic enterprise* bisa dilihat. Dari sini pula segala kemungkinan peralihan kecenderungan teoretis dan metodologis dapat diperhatikan.

Tetapi apakah secara konkrit yang telah dihasilkan pendekatan ini selama sepuluh tahun terakhir (sejak 1975)? Untuk mudahnya lebih baik dilihat saja media yang dipakai. Pertama, buku-buku yang diterbitkan secara komersial, kedua makalah-makalah seminar (yang kadang-kadang diterbitkan) dan artikel di majalah ilmiah dan, ketiga, disertasi, yang belum atau tidak diterbitkan.

Kalau dilihat penerbitan karya sejarah-kritik, artinya yang tidak berupa teks dan bukan pula epos pemujaan, dalam sepuluh tahun terakhir ini, maka kesan akan dominannya sejarah populer dan konvensional tak bisa dihindarkan. Kesan kedua yang sangat menonjol ialah sedikitnya, jikapun ada, karya lengkap yang bertolak dari pendekatan multi-dimensional diterbitkan. Tiga buku Sartono yang diterbitkan adalah kumpulan dari studi-studi pendek, yang menjelajahi beberapa aspek sejarah sosial, pedesaan, stratifikasi sosial, gerakan-sosial, dan gagasan teoretis.²²⁾ Bahkan beberapa disertasi yang telah diterbitkan secara komersial, terlepas dari mutunya, lebih memperlihatkan keterikatan pada pertanyaan akademis lama dengan pendekatan yang konvensional.²³⁾ Jadi dari sudut metodologis tak terjadi peristiwa yang berarti. Dalam hal ini penerbitan karya Savitri Scherer tentang alam pikiran Dr. Tjipto Mangunkusumo dan dr. Soetomo, yang berasal dari Thesis M.A.nya, berharga untuk dikecualikan. Karya yang cukup sensitif ini adalah biografi intelektual dari dua tokoh nasionalis dengan sejauh mungkin menempatkan mereka dalam konteks kultural Ja-

wa, daerah-budaya kelahiran mereka.²⁴⁾ Namun, secara keseluruhan dunia penerbitan komersial tetap dirajai oleh karya-karya populer, yang berkisar pada peristiwa revolusi dan perang kemerdekaan serta pergerakan agama dan sejarah propinsi. Secara umum dapat dikatakan bahwa meskipun populer, tendensi akhir-akhir ini karya-karya sejarah itu memperlihatkan peningkatan mutu. Meskipun sebagian besar berada dalam suasana "kepahlawanan" tetapi ketekunan serta pertanggungjawaban sumber telah makin kelihatan.²⁶⁾ Memoire, otobiografi dan kenang-kenangan terhadap tokoh yang telah mencapai usia 70 tahun, adalah penerbitan yang berharga tetapi sering berada di luar ilmu sejarah (meskipun selalu berguna bagi penelitian sejarah).

Penerbitan komersial adalah wadah, tetapi sekaligus adalah pula kendala. Bagaimana pun penerbitan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang biasanya berada di luar pertimbangan akademis. Sebab itu disertasi yang belum/tidak diterbitkan dan makalah seminar serta artikel ilmiah lebih menunjukkan situasi keilmuan sesungguhnya. Pendekatan multidimensional sebagai sikap ilmiah, yang bertolak dari pengakuan umum tentang sifat sejarah, bukannya teori yang bersifat eksklusif tampak dengan jelas dalam "perdebatan" terselubung dari dua disertasi yang ditulis oleh pengajar sejarah dari Universitas Gadjah Mada - T. Ibrahim Alfian dan Djoko Suryo. Disertasi Ibrahim Alfian²⁷⁾ berkisar pada peristiwa, atau lebih tepat kelompok-peristiwa, *cluster of events*, yang telah cukup umum diketahui, yaitu perang Aceh melawan agresi Belanda di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aspek-aspek ekonomi dan politik dari perang yang terpanjang dan termahal ini telah menjadi sasaran penelitian beberapa studi penting. Maka, pertanyaan pokok yang diajukan oleh Ibrahim Alfian ialah "apakah yang menjadi faktor pendorong dari daya tahan pejuang Aceh melawan agresi Belanda? Bagaimanakah masyarakat Aceh memberi arti terhadap perang tersebut?" Dengan kata lain ia ingin melakukan pendekatan "dari dalam" - suatu kecenderungan ilmiah lain

dari pendekatan multi-dimensional. Maka ia mempersoalkan proses pembentukan "ideologi perang Sabil" serta internalisasinya dalam kesadaran individu dan masyarakat. Perang dan kehadiran kekuatan militer *kaphe* berfungsi sebagai pembenaran dan pendorong proses pembentukan serta internalisasi "ideologi" tersebut. Hubungan dialektis yang berlanjut inilah antara lain merupakan faktor terjadi gejala psikologis *Atjehsch-moor-den* dan dialektik ini pula yang secara struktural merupakan faktor utama dari dominasi peranan ulama, setelah kehancuran kesultanan dan kemerosotan kekuasaan *uluebalang*.

Sebaliknya yang terjadi dengan Djoko Suryo, bukan saja ia tidak bertolak dari "*cluster of events*" yang telah terkenal, ia juga tidak mempersoalkan proses pembentukan "ideologi" - suatu hal yang telah menyebabkan Ibrahim Alfian bergumul dengan interpretasi teks. Ia bahkan hanya melihat peristiwa-peristiwa kecil sebagai ilustrasi, bukan sebagai sasaran perhatian utama, dari kecenderungan struktural daerah pedesaan sekitar Semarang di abad ke-19. Maka bukanlah interpretasi teks dan tidak pula mata-rantai peristiwa, sebagai *willed-event*²⁸⁾ yang diperhatikan tetapi peristiwa sosial-ekonomis. Disertasi ini tidak saja harus memperhatikan statistik, tetapi juga memperlihatkan perubahan grafik. Dengan kata lain langkah ke arah *quanto-history* telah pula dirintis.

Kedua disertasi ini tidak bertolak dari pengingkaran validitas atau kesahihan masing-masing, tetapi menghadapkan diri pada pertanyaan pokok yang berbeda-beda. Tak ada suatu *event* yang akan diterangkan Djoko - ia hanya ingin memperlihatkan perkembangan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dan Ibrahim Alfian tak merasa perlu menerangkan perkembangan sosial ekonomi Aceh, sebab ia telah cukup puas dengan apa yang telah dikerjakan studi lain. Namun perbedaan dalam perhatian ini jika ditarik pada konsekuensi logisnya memperlihatkan asumsi teoretis yang berlainan. Kedua studi ini adalah contoh yang cukup ekstrim yang bisa diharapkan dari sikap ilmiah dan pendekatan ataukah "*academic mood*"? yang telah

makin berpengaruh dalam penulisan sejarah-kritik. Tetapi di antara kedua ufuk ini terdapat tiga studi yang cukup penting, yang masing-masing dihasilkan oleh Kuntowidjojo, Onghokham dan F.A. Soetjipto. Ketiga studi ini seperti kedua studi terdahulu, bukan saja membuka tabir historis yang kurang diketahui dan dipahami, tetapi juga, dan lebih penting, merumuskan permasalahan tematis baru yang menuntut kesadaran metodologis dan kepekaan terhadap sumber yang tinggi. Dalam hal ini memang bisa dibedakan antara Soetjipto di satu pihak dan Onghokham dan Kuntowidjojo di pihak lain. Soetjipto³⁰⁾ memperlihatkan kekayaan sumber, baik sumber asli, maupun asing, yang hampir *exhaustive* dalam usahanya untuk menelusuri dinamika kota-kota pantai utara Jawa di abad-abad yang silam. Onghokham³¹⁾ dan Kuntowidjojo³²⁾ harus bergumul dengan masalah tematis, yang menuntut kecermatan konseptualisasi, di wilayah penelitian masing-masing. Lain daripada Soetjipto, yang memperlihatkan kekuatan filologis, kedua studi ini, yang masing-masing mempersoalkan hubungan petani dengan elite lokal dan penetrasi kekuatan luar dalam masyarakat agraris, memperlihatkan pengenalan yang cukup akrab dengan konsep-konsep sosiologis.

Dari sudut keakraban ilmu sejarah dengan cabang ilmu lain ini maka studi Hamid Abdullah³³⁾ tentang desa pendatang dari Bugis di Negeri Sembilan (Malaysia) menarik juga. Dalam studi, yang mencakup kurun waktu lebih dari seabad ini, Hamid Abdullah tidak hanya menjalankan penelitian arsip dan pustaka, sebagaimana biasa dilakukan para sejarawan, tetapi juga penelitian lapangan. Maka ia juga harus berhadapan tidak hanya dengan "sejarah lisan", yang sangat tergantung pada kemampuan membangkitkan daya ingat pengkisah dan kontrol terhadap kemungkinan terbitnya kisah yang palsu, tetapi juga "tradisi lisan" untaian kesaksian yang disebut Vansina sebagai "*mirage of reality*"³⁴⁾

Keenam studi ini tidak dikerjakan pada universitas yang sama, tetapi memperlihatkan moad akademis yang tak jauh ber-

beda. Meskipun masing-masing lebih memperhatikan aspek-aspek tertentu, tetapi kesemuanya bertolak dari kesadaran akademis tentang realitas sejarah yang beraspek majemuk. Keenam studi ini dengan memperlihatkan *trend* yang sedang "in" dalam studi sejarah-mencoba mendekati sejarah ke tahap yang paling intim, yaitu lokalitas tertentu.

Artikel-artikel ilmiah yang tak terlalu banyak ini (antara lain karena terbatasnya media) ternyata lebih menarik, tetapi cenderung bersifat ambivalen. Menarik, karena artikel-artikel ini bisa bercorak eksploratoris dan eksperimental dan sudut teori juga cenderung eklektik. Bukankah resiko relatif kecil? Sifat ambivalen terlihat dalam penyorotan yang khusus pada aspek tertentu dan menjadikan aspek-aspek lain sebagai sesuatu yang "given" atau, tak jarang terjadi, membuatnya tak berfungsi. Dalam hal inilah artikel, yang berwujud makalah seminar, memperlihatkan kelebihannya. Bukan pada mutu yang intrinsik dari makalah letak dari kelebihan itu tetapi pada kesempatannya untuk dikomunikasikan dan dipertanggungjawabkan secara langsung. Dengan kata lain sifat ambivalen dimungkinkan untuk diatasi dalam suatu komunitas akademis. Maka tidaklah terlalu aneh, jika makalah ini kadang-kadang muncul dengan kerangka konseptual yang segar, bahkan menantang, meskipun masih pada tahap eksperimental. Khusus menyangkut masalah perkembangan teori dan metodologi dalam penulisan sejarah maka meskipun berbagai seminar/konferensi internasional telah disertai oleh sejarawan Indonesia, tetapi dua seminar Sejarah Lokal, yang bertahap nasional, yang diadakan oleh Proyek ID SN, masing-masing di Denpasar (Agustus, 1982) dan Medan (1984) dapat dianggap sebagai indikator utama dari perkembangan ilmu sejarah.

Direncanakan berdasarkan gagasan metodologis yang jelas, kedua seminar ini dimulai dengan diskusi yang bersifat konseptual. Diikuti oleh peserta yang sebagian besar berasal dari perguruan tinggi, kedua seminar ini mengambil tema-tema yang cukup bervariasi, mulai dari dinamika masyarakat pedesaan,

pendidikan, sastra lokal, dan stratifikasi sosial, sampai pada masalah hubungan antar daerah dan pembauran etnis. Tema-tema ini tidak terlalu baru, bahkan di antara para peserta ada yang telah lama berkecimpung dengan tema yang mereka pilih. Tetapi perkembangan dalam wawasan teori dan kesadaran metodologis yang terjadi dalam waktu sekitar dua tahun yang mengantaraikan kedua seminar Sejarah lokal ini ternyata cukup menyolok. Baik dalam makalah dan, terutama dalam diskusi, para sejarawan muda yang berdatangan dari berbagai propinsi, telah melibatkan diri mereka dengan cukup intens dalam peninjauan dan pengujian dari proses yang melatarbelakangi "kronikel", "kisah" dan "keterangan-historis". Ini artinya para peserta (atau, sebagian besar para peserta) mempersoalkan berbagai hal, mulai dari sikap terhadap sumber dan kritik sumber kepada kemampuan teori dalam menangkap realitas. Jadi, betapapun mungkin reputasi yang telah dikenakan kepada seminar, setidaknya forum komunikasi ilmiah ini telah berjasa memperkuat kemampuan teknis dan gagasan teoretis dan metodologis para sejarawan. Seminar telah berfungsi sebagai faktor pembina masyarakat akademis sejarawan.

Dari uraian singkat, yang memang jauh dari lengkap ini beberapa observasi umum bisa diajukan. Pertama, ilmu sejarah sebagai *academic enterprise* telah makin berkembang dengan baik. Tetapi, karena berbagai hal, perkembangan ini masih belum memberikan dampak pada sejarah populer, apalagi terhadap penulisan yang bercorak "*court history*" (artinya, untuk keperluan resmi). Kedua, perkembangan dalam gagasan teori dan metodologi sebenarnya lebih bersifat horizontal daripada vertikal. Bahkan sifat horizontal, yang berarti melibatkan lebih banyak sejarawan ini, juga sangat tidak seimbang sebagian sangat terbesar dari mereka adalah sarjana tamatan Universitas Gadjah Mada atau yang sedang mengembangkan aktivitas ilmiah di universitas ini. Meskipun telah menjelajahi berbagai tema penelitian dan meninjau berbagai lapisan ruang lingkup sejarah-mulai dari desa terpencil sampai studi regional yang me-

lebih batasan nasional suatu "keterlepasan" baru dalam usaha rekonstruksi sejarah dan pemikiran teori dan metodologi masih merupakan impian, yang entah kapan akan tercapai. Malah, baik dari sudut jumlah, apalagi dari sudut mutu, rekonstruksi sejarah yang memperlihatkan keutuhan struktur dan proses dinamika masih sangat langka. Akhirnya, ketiga, dalam proses perkembangan yang bersifat horizontal dan melebar ini, ternyata seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah telah memainkan peranan yang cukup penting. Dan, mungkin tanpa dimaksudkan untuk demikian jadinya, Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen P & K) yang setiap tahun menampilkan tema-tema tertentu, telah pula berperan sebagai komunikator dan penyebar berbagai wawasan metodologis ke daerah-daerah. Hanya saja dampak ini cuma bisa dirasakan oleh pesertanya, tetapi tidak atau kurang oleh dunia akademis (jangankan khalayak ramai) umumnya. Penerbitan pemerintah yang terbatas dan tidak diperjualbelikan, telah berperan sebagai kendala yang cukup memprihatinkan "ada", tetapi di luar jangkauan khalayak.

III

Kalau benar bahwa dalam periode dasawarsa terakhir ini terjadi pelebaran dan perbaikan mutu horizontal dari masyarakat sejarawan, bagaimanakah corak hubungan dan tanggungjawab sejarawan terhadap masyarakat umum dan dunia akademis? Bagaimanakah sejarawan harus menempatkan diri di tengah masyarakat-bangsanya, yang di satu pihak diikat oleh kesadaran akan kewajaran-historis yang sama, tetapi di pihak lain terdiri atas beberapa komunitas-sejarah, yang kadang-kadang berada dalam situasi kompetitif? Karena masyarakat dan komunitas sejarah ini bertolak dari "dimensi makna" dari sejarah, bagaimanakah pula hubungannya dengan dunia akademis, yang berasal dari "dimensi kebenaran" dan ingin kepastian? Barangkali keresahan yang akhir-akhir ini diperhatikan oleh berbagai

komunitas-sejarah-mulai dari kasus-kasus sekitar diri Bung Karno sampai dengan "tempat Islam dalam sejarah nasional" dan, bahkan juga, tempat pahlawan daerah dalam "pantheon nasional" - adalah contoh dari kelemahan sejarawan dalam memahami "dimensi makna" dari "kronikel" dan "kisah". Atau, mungkin juga, hal-hal ini hanyalah pantulan dari *historian's fallacies*, yang tak "berdosa", yang kadang-kadang memunculkan dirinya tanpa terduga. Atau, siapa tahu, hal-hal tersebut lebih merupakan kompetisi dari berbagai komunitas-sejarah, yang akhirnya berhasil mentransformasikan sejarawan sebagai pemberi validitas "keilmuan". Tetapi, kalau kemungkinan yang terakhir ini bisa "dilupakan", karena transformasi peran ini adalah *nemesis* yang senantiasa membayangi sejarawan di mana pun dan kapan pun maka pertanyaan awal kembali mendesak. Karena sekarang sejarawan telah lebih banyak dan lebih terlatih, mestikah mereka lebih menyadari pentingnya "dimensi makna" yang telah berfungsi tidak saja sebagai "mitos peneguh" dan integrasi sosial dan nasional, tetapi juga dasar motivasi dalam pola perilaku politik? Kalau demikian halnya, siapakah yang selanjutnya harus menyelenggarakan berbagai dinamika yang terdapat di dalam "*the mansion of truth*"? Masalahnya ialah sejarah-sebagai-kisah tidaklah hanya memantulkan makna, tetapi juga kearifan. Dan kearifan ini hanyalah mungkin didapat dari pengetahuan yang tepat dan objektif. Pengetahuan lah yang memberi perspektif-sejarah dan pengetahuan pulalah yang memungkinkan didapatkannya pemahaman yang mendalam tentang perilaku, penderitaan, dan usaha manusia mengatasi segala corak kendala. Dengan kata lain, tanggungjawab pada "dunia akademis", yang bertolak dari "dimensi-kebenaran" adalah suatu kemestian. Tetapi mestikah kedua corak dimensi ini harus dilihat sebagai dilema atautkah hanya suatu kontinum dalam pengerjaan keilmuan?

Masalah ini mungkin terasa terlalu *pedantic*, tetapi adalah landasan utama dalam merumuskan tantangan selanjutnya. Permasalahan yang tampaknya seakan-akan dilematis di atas,

barangkali bisa dijawab dari beberapa aspek. Pertama, semuanya tentu saja bermula dari pertanyaan yang dirumuskan. Pertanyaan awal ini adalah unsur yang paling subjektif dari setiap pengerjaan ilmiah. Tetapi pertanyaan yang *relevance*, yang tidak berhenti pada jawab yang ditemukan, adalah pertanyaan yang bertolak dari keprihatinan sejarawan sebagai cendekiawan. Pertanyaan ini berawal dari dialog antar sejarawan dengan lingkungan sosialnya dan hasil interpretasinya dari dialog itu. Tanpa keakraban dengan lingkungan ini, maka tingkat *relevance* dari pertanyaan itu tak dapat diharapkan. Jadi perumusan pertanyaan secara akademis adalah "jembatan" yang mengantarai dunia-sosial dan dunia-akademis si sejarawan. Bukankah tidak semua pertanyaan secara akademis adalah *valid* dan bukankah pula hanya pertanyaan yang telah dirumuskan secara rasional dan sistematis yang mungkin untuk dikerjakan secara ilmiah? Kedua, seran "Jembatan" telah diseberangi, maka adalah tugas akademis dan sekaligus etis, untuk mencapai tingkat ketepatan yang tertinggi. Adalah pula kewajiban dan tanggungjawab akademis, untuk sewaktu-waktu meninjau lagi segala asumsi teoritis yang dianut, kecenderungan metodologis yang biasa dipakai, dan ketepatan serta kemampuan teknis yang biasa diandalkan. Hal-hal ini semua berarti tidak saja keharusan komunitas-akademis untuk selalu berfungsi dengan sehat-antara lain dengan komunikasi dan forum ilmu yang bisa berperan sebagai "penjaga mutu" - tetapi juga keterlibatan diri dan perhatian dalam berbagai permasalahan yang menyangkut teori dan paradigma ilmu. Tak kurang pentingnya ialah peninjauan terhadap validitas dari pola pertanyaan yang biasa dipakai. Bukankah lingkungan dan dunia-sosial itu dinamis dan bergerak? Bukankah perubahan nilai, atau pada tahap yang ekstrim biasa disebut "*transvaluation of values*", tidak pula harus merupakan hal yang mengagetkan? Kalau ini terjadi, maka dialog semestinya pula menghasilkan corak pertanyaan yang *relevance* yang berbeda. Karena itu dapat dikatakan bahwa justru karena tanggungjawab sejarawan terhadap masyarakat-bangsa, dunia-sosialnya, dan kesadarannya atas pentingnya "dimensi makna"

dari sejarah, ia harus sejauh mungkin melibatkan dirinya dalam "dunia akademis". Justru keprihatinan intelektualnya, sebagai anggota masyarakat, ia makin diharuskan menyelenggarakan pengertian sejarah dengan bertolak dari "dimensi kebenaran".

Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka berbagai agenda ilmu sejarah berangkali telah dapat diidentifikasi. Agenda pertama, ialah perluasan wilayah-perhatian dan penentuan fokus-fokus baru dalam penelitian. Demikian banyak hal-hal yang bukan saja belum mendapat perhatian, tetapi juga "terbenam" dalam sejarah. Kisah petani telah makin "dibangkitkan", tetapi kisah tentang berbagai situasi dan perilaku masih terbenam. Bagaimanakah kesengsaraan, kemelaratan, sakit, dan bahkan kematian dihadapi masyarakat, jika dilihat dalam suatu prisma waktu? Bukankah akhirnya lahir, penderitaan, dan kematian adalah pemberi makna dalam hidup manusia? Bagaimanakah pola kemiskinan dari berbagai masyarakat Indonesia? Dengan kata lain, penelitian sejarah tentang suasana dan suara yang "terbenam" serta persepsi yang biasanya berada di luar perhatian sudah waktunya diperhatikan. Dengan begini bukan saja "wilayah" baru dapat dijelajahi dan pemahaman terhadap berbagai gejala sosial-kultural yang tertinggal bisa didapatkan, tetapi penerobosan baru dalam teori juga bukan tak mungkin didapatkan. Dari penelitian ini mungkin pula ditemukan sifat sejarah yang tak selamanya bersifat evolusioner, tetapi lebih merupakan rentetan dari berbagai corak keterputusan, *discontinuity*. Tetapi masalah ini, tentu saja hal lain; yang pasti adalah perluasan wilayah perhatian berarti pelebaran cakrawala pemahaman dan pemikiran. Agenda kedua, bertolak dari salah satu hikmat yang bisa didapatkan dari studi sejarah. Di samping menemukan makna dari pengalaman di hari lampau, sejarah juga memungkinkan orang untuk mendapatkan kearifan dari padanya. Seandainya dugaan teoretis ini dikenakan pada "sejarah nasional Indonesia", yang tentu saja bertolak dari pespektif terbentuknya masyarakat dan negara nasional, maka tampak-

lah betapa berbagai peristiwa lokal telah diberi warna "nasional", tetapi dengan begini makna nasional mungkin didapatkan, namun kearifan historis bisa tertinggal. Dalam buku-buku teks sejarah hal ini sering terjadi dan barangkali wajar juga. Kini timbul pertanyaan, apakah belum waktunya dihadapi masalah "mitos nasional" dan "realitas lokal" ini dengan pikiran dan hati terbuka? Adalah salah satu tugas sejarawan untuk memperhatikan "realitas lokal" ini, justru di saat gagasan Wawasan Nusantara telah makin diisi dan sentralisasi administrasi dan kekuasaan telah makin merupakan kenyataan.

Di samping perluasan "wilayah perhatian" dan kesediaan untuk sekali-kali menyingkap "realitas lokal" yang berada di belakang "mitos nasional" maka percobaan dalam pendekatan baru barangkali telah waktunya juga dirintis. Ada tiga fungsi yang bisa diharapkan dari percobaan ini, yaitu peninjauan kembali terhadap pola rekonstruksi masa lalu, penyingkapan hal-hal yang selama ini terhindar dari perhatian, dan, tak kurang pentingnya, pengkaitan ilmu sejarah dengan perkembangan teori yang sedang terjadi. Memang tak ada keharusan apa-apa bagi ilmu sejarah di tanah air kita untuk ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di luar negeri. Bukankah setiap teori sebenarnya bertolak dari kegelisahan intelektual yang pada awalnya bercorak kontekstual? Tetapi inilah masalahnya, betapapun tingginya harapan terhadap "pemribumian" ilmu "internasionalisasi" lebih merupakan kecenderungan umum. Maka dalam hal ini, tentu timbul juga pertanyaan, tidaklah mungkin keprihatinan yang bertolak dari kerangka kontekstual kita berbicara dalam proses yang riil terjadi dalam dunia akademis ini? Dan, siapa tahu dari sumbangan ini tinjauan terhadap paradigma teori yang berlaku dapat pula terjadi. Apalagi jika diingat pula konteks waktu dan tempat telah makin dinisbikan oleh penetrasi teknologi dan interdependensi ekonomi dan politik yang makin bersifat global.

Tetapi terlepas dari ini semua tinjauan terhadap asumsi lama dan penyingkapan dari hal-hal yang masih tersembunyi,

adalah awal dari "terobosan" (*breakthrough*) yang sangat penting dalam ilmu sejarah. Sebab itu dua corak penelitian yang sampai sekarang jarang, jika pun pernah dilakukan, yaitu sejarah intelektual dan studi perbandingan, yang bercorak sosiologi-sejarah, sudah waktunya dirintis. Dalam sejarah intelektual, yang bertolak dari ada dan berfungsinya *discourse*, kita tidaklah terutama berhadapan dengan evolusi pemikiran, dan bukan pula harus terlarut dalam pengikhtisaran pemikiran para tokoh, tetapi terutama pada dialog antara teks dan konteks. Dengan pendekatan inilah kemungkinan ada atau tidaknya "afinitas" antara-pikiran, atau lebih mungkin, struktur perasaan, dengan pola perilaku. Dengan ini pula corak hubungan kesadaran dengan struktur, yang "objektif", bisa ditinjau secara lebih tajam.

Sejarah, kata Mary Wright kira-kira dua puluh tahun yang lalu, secara implisit bersifat komparatif. Ia benar. Tanpa kesadaran perbandingan tak ada generalisasi yang bisa diadakan dan tanpa generalisasi tiada konsep yang dapat diajukan dan, akhirnya, tanpa konsep, sejarah hanyalah seperti air bah tak berbentuk. Dengan corak komparatif yang implisit inilah sejarawan bisa berkata tentang "perang", "revolusi", "elite", "penguasa", dan entah apa lagi, yang nyaris tak terbatas. Tetapi perbandingan yang bertolak dari unit-unit analisis tertentu dari pengalaman sejarah dari berbagai waktu dan tempat, di samping memperkuat ketepatan hal-hal yang bersifat implisit itu terutama dapat juga berperan dalam tiga hal. Pertama, memperjelas dan mempertinggi tingkat ketepatan struktur dari elemen-elemen sejarah (yang merupakan bagian dari "kronikel") dan bahkan juga rekonstruksi secara keseluruhan. Bukankah "putih" akan lebih jelas kelihatan di samping "hitam" dan, terutama, bukankah identitas diri akan lebih jelas setelah berdialog dengan orang lain? Kedua, dengan studi perbandingan sejarah, yang bercorak sosiologis (*historical-sociology*), berbagai pengertian umum tentang dinamika sejarah akan lebih mungkin didapatkan. Dengan pendekatan ini, corak dinamika hubung

an antara struktur dan proses lebih diperjelas. Akhirnya, ketiga, studi komparatif yang bercorak regional-artinya yang mengam-bil tempat-tempat yang secara teoritis dianggap berada dalam wilayah yang sama (seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, atau Pa-sific, atau bahkan unit wilayah yang lebih kecil) memberi ke-sempatan bagi dilihatnya suatu fokus perhatian dalam perspek-tif regional. Maka makin kelihatan betapa fokus tertentu itu agama, nasionalisme, industrialisasi atau apa saja-memanifestasi-kan diri dalam waktu yang relatif sama tetapi dalam konteks tempat yang berbeda. Perspektif ini bukan saja lebih bisa mem-perkuat ketepatan rekonstruksi, tetapi, bisa pula menyum-bang dalam peninjauan, bahkan/perubahan/orientasi teori. Di-samping pola dari proses bisa diketahui lebih tepat, keterangan (*explanation*) dari berbagai hubungan kausal lebih mungkin pula diperkuat.

Ketiga agenda ini tentu saja tidaklah diarahkan kepada masing-masing sejarawan, tetapi lebih merupakan imbauan pa-da masyarakat sejarawan. Ketiga hal ini tidak pula berarti bah-wa apa yang sedang menjadi perhatian harus ditinggalkan, te-tapi terutama dimaksudkan sebagai seruan akan perlunya per-luasan "pembagian kerja" di kalangan sejarawan. Akhirnya semuanya hanyalah akan menjadi impian saja, jika dua pesya-rat utama tak terpenuhi. Pertama, peningkatan kemampuan tek-nis dalam pengumpulan, seleksi, dan kritik sumber, serta per-cobaan pemakaian teknik baru (seperti analisa teks, statistik, sejarah lisan dan sebagainya). Kedua, dan lebih penting, lancarnya komunikasi ilmiah di dalam masyarakat sejarawan. Prasya-rat lain yang terpenting barangkali tak perlu lagi disebutkan, karena telah ada dalam hati dan pikiran masing-masing, yaitu ter sedianya biaya. Tetapi, dengan ide dan kerangka konseptual yang baik serta didampingi oleh kemampuan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan hal yang terpenting ini relatif mudah di-atasi.

Demikianlah, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ter-nyata tidak menyelesaikan masalah, tetapi mengajukan tuntutan

lain. Penghadapan diri kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum, adalah suatu kewajiban setiap ilmuwan, apalagi sejarawan. Sebab, sejarah adalah "dunia" yang paling mudah dimasuki oleh siapa saja yang berminat. Tetapi keterluluhan sejarawan dengan masyarakatnya, tanpa terikat pada "dunia akademis", hanyalah akan menjadikan sejarawan sebagai *literati*. Tak ada jeleknya, setiap masyarakat memerlukannya, tetapi *literati* berada di luar tradisi ilmiah kritik. Jadi, justru karena tugasnya sebagai ilmuwan, sejarawan tak dapat melepaskan diri dari kedua "dunia" itu. Dan kesediaan menerima tantangan yang bercorak akademis adalah juga pengakuan akan keterikatan kepada masyarakat dan dunia akademis itu.

Yogyakarta, Desember 1985

DAFTAR CATATAN

- (1) Isaiah Berlin. *Vico and Herder : Two Studies in the History of Ideas* New York : The Viking Press, 1976, XIII
- (2) Teori dan filsafat Sejarah analitik, tak lain daripada pengumpulan dengan masalah-masalah ini, meskipun "menemukan" lebih sering merupakan problem pusat dari metodologi dan teknik penelitian sejarah.
- (3) Lihat antara lain, Hayden White – *Metahistory : The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe*. Baltimore/London : The John Hopkins University Press, 1973. "Kronikel" dan "kisah", katanya adalah unsur primitif dalam *uraian sejarah*, tetapi keduanya menunjukkan proses seleksi dan pengaturan data dari *catatan sejarah yang belum dikerjakan* guna penyadikan catatan tersebut bisa lebih dimengerti oleh *khalayak tertentu* – (hal. 5) (penekanan dari teks asli).
- (4) Perbedaan antara "kisah" dan *emplotment* diperkenalkan oleh White. *Metahistory*.
- (5) Lihat, umpamanya George C. Hormans, *The Nature of Social Science*, New York : Harcourt Brace & World, Inc.

- 1967 — dan May Brodbeck — "Explanation, Prediction and Imperfect Knowledge" — dalam May Brodbeck (ed.) *Readings in the Philosophy of the Social Sciences* — New York : The Momillan, Company, 1968.
- (6) Dray *History the Betrayer*, London : Routledge & Kegan D.h. Fischer — *Historian's Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought*, New York : Harper Torch book, 1970.
 - (7) Tentang hal ini lihat umpamanya, Peter L. Berger — *The Theretical Imperative : Contemporary Possibilities of Religions Affirmation* Garden City, N.Y. : Anchor Books, 1979 — 15 — 20
 - (8) Tentang perbedaan "the past" dan "history", lihat J.H. Plumb, *The Death of the Past*, London
 - (9) White — *Metahistory*, p. 429 lihat juga Gordon Leff — *History and Social Theory* — Garden City, New York : Anchov Book/Double Day — 1971, 11 — 14.
 - (10) *Seminar Sedjarah Atjara I dan II : Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia* — Yogyakarta/Djakarta : Universitas Gadjah Mada/Universitas Indonesia, p-92.
 - (11) Tinjauan umum, meskipun jauh daripada lengkap, tentang penulisan Sejarah Indonesia, lihat, H.A.J. Klooster. "Indonesiers schirjven hun geschiedenis : De ontwikkeling van de Indonesische geschiedebeoefening in theorie en praktijk, 1900 — 1980", Disertasi, Rijks universiteit te Leiden, 1905. Dalam disertasi ini Klooster menguraikan jug pandangan para teoriti Sejarah Indonesia, seperti M. Yamin, M. Ali dan Sartono Kartodirdjo serta corak perkembangan penulisan buku teks sejarah. Sebagai perbandingan lihat juga Taufik Abdullah. "The Study of History" dalam Kuntjaraningrat (ed.) *The Social Sciences in Indonesia*". Jakarta : LIPI, 1975, 89 — 166 dan Taufik

- Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo (eds.) *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta : Gramedia, 1985.
- (12) Pemikiran Prof. Sartono Kartodirdjo, tentang masalah ini, lihat kumpulan tulisannya – *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia : Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia, 1982. Rekonstruksi yang paling lengkap; lihat Sartono Kartodirdjo. *The Peasants' Revolt of Banten in 1988. Its Conditions, Course and Sequel*. 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.
 - (13) Sir Lewis Namier – *Personalities and Powers : selected essays*. New York : Harper & Row, 1965.
 - (14) White, *Metahistory*, 7 – 11
 - (15) W.H. Walsh – *An Introduction to the Philosophy of History* – London : Heitchinson University Library – 1951.
 - (16) E.J. Hobsbawn – "From Social History to The History of Society". *Daedalus* (Winter, 1971) 20 – 45.
 - (17) F. Braudel, *On History* – (terjemahan Sarah Matthews) Chicago : The University of Chicago, Press, 1980.
 - (18) Michel Foucault. *The Archaeology of Knowledge* (diterj. A.M. Sheridam Smith), New York : Pantheon Books, 1972 lihat juga Mark Poster – "The Future according to Foucault : *The Archaeology of Knowledge and Intellectual History*" dalam Dominick Lacapra & Steven L. Kaplan (eds.) *Modern European Intellectual History : Reappraisals* – Ithaca/London : Cornell University Press, 1982, 137 – 152.
 - (19) Mengenai masalah "dokumen" dan "teks", lihat Dominick LaCapra, "*Rethinking Intellectual History and Reading Texts*" – dalam LaCapra & Kaplan (eds) – Ibid 47 – 85.
 - (20) Hayden White, "Method and Ideology in Intellectual History : LaCapra & Kaplan (eds) – Ibid 280 – 310.
 - (21) Tentang masalah ini lihat Wawancara Taufik Abdullah dalam *Prisma*, 9, XIII 1984, 55 – 59

- (22) Sartono Kartodirdjo — *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*, Suatu Alternatif — Jakarta : Gramedia, 1982. *Modern Indonesia : tradition & transformation*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984 Ratu Adil — Jakarta : Sinar Harapan.
- (23) Meskipun secara "resmi" studi Ekadjati — dianggap sebagai disertasi Sejarah (U.I., 1979) tetapi, sebagaimana ditandaskan juga oleh penulisnya, karya itu lebih bercorak studi filologi, sebab itu karya ini tak dibicarakan, lihat Edi S. Ekadjati *Dipati Ukur : Karya sastra Sejarah Sunda*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1982.
- (24) Savitry Pratiwi Schere — *Keselaran dan Kejanggalan* — Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1985.
- (25) Contoh dari *genre* populer, tetapi bermutu tinggi ialah, Nasution, A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung : 11 Jilid.
Lihat, umpamanya, Rusli Amran *Sumatra Barat hingga Plekat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan 1980.
- (26) Contoh dari biografi yang baik ialah Sidjabat — *Ahu Si Singamangaradja XII* Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983; Pramoedya Ananta Toer — *Sang Pemula* — Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- (27) T. Ibrahim Alfian — "Perang di Jalan Allah Aceh, 1873 — 1912". Disertasi, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1981.
- (28) Djoko Suryo — "Social and Economic Life in Rural Semarang under Colonial Rule in the Later 19th Century". Ph.D. Thesis, Melbourne : Monash University, 1982.
- (29) H.G. Wood. *Freedom and Necessity in History* — London: Oxford University Press 1957.
- (30) F.A. Soetjipto Tjiptoatmodjo, "Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai medio Abad XIX)" Disertasi, Yogyakarta : University Gadjah Mada, 1983.

- (31) Onghokham. "The Residency of Madiun. Priyayi and Peasant during the Nineteenth Century" – Ph.D. Thesis. New Haven : Yale University, 1975.
- (32) Kuntowidjojo – "Social Change in as Agrarian Society : Madura, 1850 – 1940" – Ph.D. Thesis, New York : Columbia University, 1980.
- (33) Hamid Abdullah – "Perubahan Sosial di kalangan Masyarakat Keturunan Bugis di Linggi dengan rujukan khas kepada masalah kepemimpinan" – Ijazah Doktor Falsafat. Kuala Lumpur. Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1985.

**HUBUNGAN LAMPUNG DENGAN KESULTANAN BANTEN
DAN PALEMBANG DALAM PERSEPTIF SEJARAH
(1500 – 1900)
(Oleh Husin Sayuti)**

Pendahuluan

Membicarakan sejarah daerah Lampung sampai saat ini masih merupakan suatu hal yang sangat riskan, karena belum terdapat suatu kesatuan pendapat darimana dimulainya, daerah mana yang mendapat prioritas untuk dibicarakan atau diteliti dan bagaimana perkembangan selanjutnya. Pada saat ini memang Lampung menjadi terkenal karena daerah ini merupakan daerah transmigrasi yang tertua dan terbesar yang telah dimulai sejak tahun 1905, dengan dibukanya daerah Gedung Tataan sebagai pemukiman transmigran yang pertama, yang dikenal saat itu sebagai kolonisasi.

Pada zaman Hindu daerah Lampung telah mempunyai hubungan dengan luar negeri. Peninggalan dari Dinasti Han berupa kramik telah ditemukan di Lampung, seperti halnya kramik tersebut di Jawa Barat, daerah-daerah Batanghari dan Kalimantan Barat. (N.J. Krom: 1956, halaman 10). Di dalam kitab sejarah Dinasti T'ang disebut utusan dari Mo-lo-yeu datang ke Tiongkok bersama-sama utusan dari Tolang, Phohwang, pada tahun 644—645. (Sartono Kartodirjo, 1977, hal. 51, ef. Paul Pelliot,

"Deux itineraires de Chine en indie, a la fin du Ville siedle", BEFEO IV, hal. 324). Nama Tolang, Phohwang merupakan dua kata, namun nama itu dikenal sebagai Tulangbawang, yang pada masa sekarang nama itu adalah nama sebuah sungai di Kabupaten Lampung Utara yang melintas Kota Menggala.

Kota Menggala merupakan kota pelabuhan tertua di daerah Lampung yang mempunyai hubungan langsung ke luar negeri sampai pada awal abad ke duapuluh. Matinya pelabuhan Menggala yang mempunyai sarana angkutan air Sungai Tulangbawang itu disebabkan dengan dibukanya jalur jalan kereta api antara Palembang dan Lampung yang melintasi Kotabumi dan sejak dibukanya Pelabuhan Panjang sekitar tahun 1910.

Kerajaan Tulangbawang tersebut sampai saat ini belum ditemukan lokasinya, bahkan setelah mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 644/655, nama tersebut telah tidak ada lagi setelah Kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan ke Tiongkok. Sebagaimana kita ketahui Sriwijaya muncul pada abad ketujuh dengan adanya prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 M (608 C). Sejak saat itu peranan daerah Lampung sudah diambil alih Sriwijaya. Ini terbukti bahwa di Lampung Selatan yaitu di Palas Pasemah ditemukan sebuah prasasti (yang disebut prasasti Palas) yang memberikan tambahan keterangan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini isinya sama dengan prasasti Karang Brahi (Jambi) dan sebagian Kotakapur (686 M, Bangka). Di samping itu disebutkan pula tentang didudukinya daerah Lampung Selatan oleh Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 (Sartono Kartodirjo, 199, jilid II, halaman 54). Kerajaan Tulangbawang ini telah mengirimkan utusan ke Tiongkok sekitar tahun 644/645 bersama Kerajaan Melayu (Mo-lo-yu) dan Cheli-fo-che (Sriwijaya).

Kerajaan Po-houang mengirim utusan ke Negeri Cina pada tahun 442, 449, 451, 456, 459, 464, dan 466. Toponim ini bisa dianggap sebagai singkatan dari Toponim Tulang Bawang yang diidentifikasi oleh G. Ferrend dengan Tulang Bawang di muara Sungai Tulang-Bawang di wilayah Lampung Utara. (Prof.

Dr. Slamet Muljana, 1981, halaman. 20). Setelah itu tidak ada utusan lagi ke Negeri Tiongkok. Sedangkan lokasi Kerajaan Tulang Bawang sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Hanya saja beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa Kerajaan itu berada di Lampung Utara sebelah timur, bahkan kampung tua Pagar Dewa mengklaim bahwa pusat Kerajaan Tulang Bawang ada di Pagar Dewa itu (Hi. Assa'ih Akib, 1976, halaman 6).

Berseberangan dengan Lampung melintasi Selat Sunda, di Jawa Barat terdapat Kerajaan Tarumanegara. Berita Cina lainnya yang berasal dari Dinasti Sioui mengatakan, bahwa pada tahun 528 dan 535, datang utusan dari To-lo-mo yang terletak di sebelah selatan. Demikian pula halnya yang terjadi pada tahun 666 dan 669, berita Dinasti T'ang Muda mengatakan datangnya utusan dari negara yang sama. Nama To-lo-mo ini merupakan nama kerajaan di Jawa Barat, Tarumanegara. Daerah Lampung, di samping Bangka merupakan basis utama untuk menaklukkan Tarumanegara sebagaimana dikatakan dalam prasasti Kotakapur "yambhumi Jawa tidak bhakti ka Sriwijaya". Besar sekali kemungkinan yang dimaksud dengan Jawa itu adalah Kerajaan Tarumanegara.

Demikianlah sejak itu di Lampung tidak pernah ada lagi kerajaan yang bebas merdeka dengan ciri mengirimkan utusan ke Tiongkok. Kerajaan itu berdiri dari abad ke-5 sampai abad ke-7. Begitu lamanya nama Kerajaan Tulangbawang lenyap dari muka bumi, tidak ada seorang pun orang Lampung yang mengaku berasal dan berketurunan dari Kerajaan Tulangbawang. (Hilman Bunga rampai Adat Budaya, No. ii tahun II, 1974, hal 4). Dengan ditemukannya prasasti Palas Pasemah, maka daerah Lampung berada di bawah Kerajaan Sriwijaya. Masih adalagi prasasti Narakuning yang juga diduga juga tulisannya dan isinya sesuai dengan prasasti Kotakapur. Namun Casparis menduga prasasti Harakuning yang disebutkan prasasti Bawang berasal dari abad ke-11 (P3KD Lampung, 1977/1978, hal. 7). Menarik

sekali untuk ditelusuri asal-usul perkataan Lampung, namun semua teori yang dikemukakan belum ada kata sepakat baik oleh para ahli maupun oleh orang Lampung sendiri.

Hubungan Lampung dengan Majapahit.

Di daerah Lampung terdapat Desa Jabung yang namanya sama dengan tempat yang bernama Jabung dekat Desa Kraksaan di Jawa Timur. Sebuah patung yang sekarang ini disebut patung putri Badariah menurut bentuknya patung atau arca yang sezaman dengan Majapahit. Ciri-ciri sinkritisme agama Hindu dan Budha mewarnai patung itu. Penemuan arca itu di daerah Pugung Raharjo yang diperkirakan dahulu merupakan pusat kebudayaan megaliticum. Namun kekuasaan Majapahit meluas ke daerah ini, karena nama Lampung sudah kita temukan dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca tahun 1365. Perkampungan orang Lampung yang sekarang menamakan dirinya orang Lampung paling tidak pada awal abad ke-14. Penduduknya disebut orang Tumi (Buay Tumi) yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Sekermong. Mereka menganut kepercayaan dinamisme, ada pengaruh juga dari Jawa Hindu Bairawa, yaitu menyembah sebatang pohon yang dianggap sakti, yaitu pohon lemasa atau pohon melasa kepampang sebaukau (P3KD, Lampung 1977, hal 11).

Setelah abad ke-15 daerah Lampung sudah menganut agama Islam. Menurut versi buku Kuncara Raja Niti nama Poyang orang Lampung adalah Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Belunguh dan Indarwati. Menurut cerita rakyat Belalau keempat umpu (kecuali Indarwati) adalah pembawa agama Islam. Dan memang orang Lampung sekarang mengaku nenek moyang mereka berasal dari daerah Belalau (Lampung Utara) kemudian menyebar ke timur, ke utara, ke selatan. Sampai runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Lampung tidak pernah ada lagi kerajaan besar. Yang ada hanyalah kebudayaan dan merupakan daerah kecil yang kadang-kadang mengakui Palembang sebagai tempat mengadu, untuk Lampung sebelah utara, namun

Lampung bagian selatan berindikasi ke Banten, setelah Kerajaan Banten di bawah Maulana Hasanuddin. Perebutan kekuasaan antara Kesultanan Palembang yang muncul setelah Sriwijaya lenyap sekitar tahun 1500 dengan Kesultanan Banten, dapat dilihat pada saat Maulana Muhammad mengadakan penyerangan ke pada tahun 1605. Sial bagi Banten Maulana Muhammad tewas dalam penyerangan itu, dan mayatnya dibawa ke Banten. Sejak itu Banten tidak pernah lagi menyerang Palembang, namun perebutan atas kekuasaan atas Lampung dan Selebar yang kaya akan lada selalu merupakan awal setiap pertikaian.

Daerah sebelah utara seperti Ranau dan Komerling yang dapat digolongkan berbahasa dan beradat Lampung, sampai saat ini masuk wilayah Palembang. Tetapi bagian selatan Lampung baik yang beradat pepadon dan peminggir atau saibatin atau pesisir, selalu melakukan seba ke Banten. Mereka ke Banten, di samping belajar agama Islam, mereka juga minta pengakuan agar mereka dapat menguasai di Lampung yang tidak seberapa luas yang dikenal sebagai kebudayaan. Pengakuan ini diperlukan untuk penduduk Lampung yang menghasilkan lada dapat diatur oleh orang Lampung sendiri. Tetapi dalam perdagangan kelir, Kerajaan Banten yang mengaturnya. Sebuah prasasti Bojong yang ditemukan di Desa Bojong Lampung Tengah, Kecamatan Jabung, terlihat bahwa pengaturan penjualan lada sudah tertib, tetapi dibawah pengawasan raja Banten. Bahkan dalam prasasti yang terbuat dari lempengan kuningan ini juga, VOC telah mulai melakukan aksinya dalam mengatur penjualan lada, tetapi VOC dalam membeli lada dari Lampung dan selebar selalu berurusan dengan Banten.

Hubungan Lampung dengan Banten.

Penduduk Lampung sampai awal abad ke-20, semuanya beragama Islam. Hanya pendatang yang mulai datang sejak tahun 1905 yang dikenal sebagai kolonisasi, mulai ada yang beragama Kristen, di samping penguasa Belanda yang secara resmi baru tahun 1856 dapat menundukkan Lampung yang dipimpin oleh Raden Intan II. Perang Lampung ini berlangsung tahun

1850 – 1856 yang menyebabkan Lampung di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Antara Lampung dan Banten memang tali ikatan keturunannya sangat kuat. Ini dapat kita lihat dari piagam Kuripan. Ada semacam perjanjian antara Banten dan Lampung dalam piagam itu.

"Lamun ana musuh Banten, Banten pengerowa Lampung tutwuri, Lamun ana musuh Lampung, Lampung pengerowa Banten tutwuri".

Terjemahannya:

Kalau ada musuh Banten, Banten di depan Lampung di belakang. Kalau ada musuh Lampung, Lampung di depan Banten di belakang.

Perjanjian antara Banten dan Lampung ini menurut Husein Jayadiningrat adalah palsu (Hoessein Djajadiningrat, 1983, halaman 131. Tetapi bagi orang Lampung isinya asli, namun lempengan kuningan itu saja yang telah disalin beberapa kali. Dr. Hazeu dalam transkripsinya dan penjelasannya membuat lengkap isinya dan terjemahannya kedalam bahasa Indonesia.

1. Bagian muka

Ratu Darah Putih linggih dateng Lampung, maka dateng Pangeran Sabakingking, maka mupakat maka wiraos sopo kang tuo sopo kang anom kita iki. Maka papatutan angadu wong anyatakaken tuwo kelayan in buri, ngenggong ning ngadu dateng Pugung in Jeru luwang. Maka nyato anom Ratu Darah Putih andika kang tuwo kawulo kang anem, andika in Banten, kawula in Lampung. Maka lami-lami Ratu Darah Putih iku in Banten ambatakul Lampung. Anjenengaken Pangeran Sabakingking ngadekaken Ratu, maka jenengepun susunan Sabakingking. Maka Ratu Darah Putih ngaturaken sawung galing maka mulih in Lampung.

2. Bagian baliknya

Wadon Banten lamun dipaksa denin wong Lampung dereng suka ni salirane Lampung kena upat-upat, Wadon Lampung lamun dipaksa wong Banten dereng suka ni salirane atawa sanake bapana, Banten kena upat-upat, Wong Banten ngakon

Lampung keduk susuk ngatawa mikul, Banten geneng (baca kenang) upat-upat. Lamun ana musuh Banten - Banteng pengarep Lampung tutwuri. Lamun ana musuh Lampung, lamun pengarep Banten tutwuri. Sakwuse ja(n)Ji Lampung ngalahaken pajajaran Dayeh kuningan kandang wesi Kadawung, kang ungaran padon kujang. Kang anulis kang rayi Pangeran Sabakingking wasto ratu mas lan rayi sang ngaji guling wasta Menak Bay-bay baluk, kang den pangan atining kebo. Serat tetelu, in Banten dalung, in Lampung saksi dalung, in Maninting serta ken cana. Tamat.

Terjemahannya:

1. Ratu Darah Putih menetap di Lampung. Pangeran Sabakingking tiba. Mereka seia sekata berkata: siapa yang paling tua dan siapa yang muda kita ini. Mereka bersepakat untuk menyuruh (dua) orang berkelahi supaya dapat terbukti siapa yang tua dan siapa yang muda orang dari Lampung mati terlebih dahulu, dan kemudian matilah si orang Banten sesudah itu; tempat di mana mereka menyuruh keduanya berkelahi adalah di Pugung di sebuah lubang. Ratu Darah Putih ternyata adalah yang termuda, (ia berkata) tuanlah yang tua, saya yang muda, tuan di Banten, saya di Lampung. Setelah beberapa lama kemudian (pergilah) Ratu Darah Putih tersebut ke Banten sambil membawa budak-budak dari Lampung. Untuk merayakan naiknya Pangeran mengangkatnya sebagai raja, gelarnya adalah Sunan Sabakingking, Ratu Darah Putih mempersembahkan sebuah sawung galing dan kembali ke Lampung.
2. Jika seorang perempuan dari Banten diperkosa oleh seorang laki-laki dari Lampung dan perempuan itu sendiri tidak menyukainya, maka (orang dari) Lampung, terkena hukuman. Jika seorang perempuan dari Lampung diperkosa oleh seorang laki-laki dari Banten, dan perempuan itu sendiri atau kaum keluarganya dan bapaknya tidak menyukainya maka (laki-laki dari Banten) dikenakan hukuman. Jika seorang laki-laki Banten memerintahkan (seorang laki-laki) Lampung untuk mengeduk dan meratakan tanah atau membawa beban, maka laki-laki Banten itu dikenakan hukuman. Jika (seorang laki) Banten un-

tuk mengeduk dan meratakan tanah maka (laki-laki) Lampung itu dikenakan hukuman.

Jika ada musuh Banten, maka Banten di depan, dan Lampung berada di belakangnya. Jika ada musuh Lampung, maka Lampung di hadapan dan Banten di belakangnya. Setelah perjanjian itu selesai dibuat, maka Lampung menaklukan Pajajaran - Dayeh - Kuningan, Kandangwesi, Kedawung. Yang menulis (perjanjian ini) adalah istri raja Pangeran Sabakingking, yang disebut Ratu Mas dan insteri raja yang telah meninggal, yang dinamai Nenek Baybay Baluk, apa yang (pada) kesempatan itu dimakan adalah hati kerbau. Tiga lembar (dibuat dan disimpan) di Banten dari kuningan, di Lampung sebagai saksi dari tembaga, di Maningting selemba kepingan emas, Tamat. Demikianlah suatu perjanjian yang telah disepakati antara orang Lampung dan orang Banten, dan bukan sebagai yang satu menjajah yang lain. Mereka sederajat, namun Lampung ternyata yang muda sedangkan Banten yang tua. Sebagai aplikasinya jarang ditemukan laki-laki Lampung mengawini perempuan Banten, barangkali takut kwalat. Tetapi pada saat ini kepercayaan semacam itu sudah berkurang, karena sudah ada laki-laki Lampung yang berani mengawini perempuan Banten tanpa takut resiko kwalat.

Masuknya pengaruh Banten telah dirintis sendiri oleh Fatahillah. Dalam risalah "Sejarah Perjuangan Pahlawan Raden Intan" Pahlawan Raden Intan masih keturunan dari Fatahillah sendiri. Diceritakan bahwa Fatahillah pernah datang sendiri ke Lampung dan kawin dengan Putri Minak Raja Jalan, ratu dari Keratuan Pugung (letaknya sekarang termasuk Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah), bernama Putri Sinar Alam. Dari perkawinan ini lahirlah seorang putra yang bernama Hurairi, yang kelak setelah beliau Ibadah Haji bernama Haji Muhammad Zaka Walliyullah Ratu Darah Putih dan bergelar Minak Gejala Ratu. Beliau inilah pendiri Keratuan Daerah Putih yang berpusat di Kuripan (sekarang termasuk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, menjadi cikal-bakal

dari Raden Intan II, seorang pejuang yang sedang diusulkan sebagai tokoh nasional dari Lampung, yang gugur menentang kekuasaan Belanda pada tanggal 5 Oktober 1856.

Perkawinan Fatahillah dengan Putri Sinar Alam, jelas berbau politik. Mengapa tidak? Lampung yang kaya dengan hasil bumi terutama lada, letaknya tidak jauh dari Banten. Sejak ditemukannya jalan pelayaran baru Eropa ke Asia melalui ujung selatan Benua Afrika, maka semakin banyak kapal-kapal bangsa Eropa yang datang sendiri ke Nusantara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Belanda Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada tahun 1596. Sejak saat itu secara berangsur-angsur Belanda menguasai Nusantara dan dengan politik *divide et impera*, Belanda berhasil menancapkan kukunya selama 350 tahun.

Hubungan Lampung dengan Kesultanan Palembang

Pada abad ke 15 di Utara Lampung muncul suatu kekuasaan baru yaitu Kesultanan Palembang. Seorang priyayi Demak pindah ke Palembang yang bernama Pangeran Sideng Lautan beserta istrinya dan enam orang anaknya. Salah seorang putranya yang bernama Kiai Gedeng Suro Tuo, menjadi cikal bakal sultan-sultan Palembang. Kiai Gedeng Suro Tuo memerintah Palembang pada tahun 1552. Pada saat itu memang di Demak sedang terjadi kekacauan, sedangkan Demak mengklaim Palembang sebagai wilayahnya karena warisan wilayah Majapahit. Baik Palembang maupun Banten ingin menguasai daerah lada di Lampung dan Bengkulu. Daerah Lampung Utara dipengaruhi Kesultanan Palembang seperti Menggala dan daerah Danau Ranau, sedangkan bagian tengah dan selatan Lampung dipengaruhi oleh Banten. Pada masa Maulana Muhammad (1580—1605) yang dikenal sebagai Kanjeng Ratu Banten menyerang Palembang, karena ingin merebut daerah Tulangbawang, yang merupakan pelabuhan dan penghasil lada. Namun dalam serangan itu Kanjeng Ratu Banten gugur pada tahun 1605, sehingga beliau dikenal sebagai Pangeran Seda Ing Palembang.

Sejak itu antara Palembang dan Banten dalam situasi yang statis, tidak saling menyerang lagi, tetapi berusaha mencari pengaruh masing-masing. Dengan adanya kekuasaan Kompeni di Batavia baik Palembang maupun Banten selalu berselisih, Dalam situasi seperti ini pada mulanya Kompeni mengakui Lampung dan daerah selebar (Bengkulu) merupakan wilayah kekuasaan Banten. Pada waktu itu orang Lampung sudah biasa membawa lada ke Banten dan di sinilah membeli dari sultan Banten. Ketika itu VOC sudah berdiri (abad ke-17). Bahkan orang Belanda sudah mengenal pulau-pulau di Selat Sunda. Pada tanggal 23 Agustus 1624 VOC memutuskan untuk menduduki Pulau Besi dan Sebesi serta mendirikan rumah di sana. Tetapi karena kekacauan dan penyakit, ditinggalkannya pulau-pulau tersebut pada tahun 1625 (Dirjen Kebudayaan: 1976, 18). Pada awal tahun 1682 terjadi pergolakan di Banten, timbul perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji. Pada saat yang bersamaan masyarakat di Lampung lebih memihak kepada Sultan Ageng Tirtayasa, namun ikut campurnya Belanda turut mempercepat kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam situasi terjepit Sultan Haji minta bantuan VOC dan menjanjikan akan memberikan daerah pengaruh Banten seperti Lampung dan Selebar. Sultan Haji mengirim surat kepada Mayor Issac de Saint Martin, admiral kapal VOC yang sedang berlabuh di Banten, tertanggal 12 Maret 1682, yang isinya: "Saya minta tolong, nanti daerah Tirtayasa dan negeri-negeri yang menghasilkan lada, seperti Lampung dan Tanah-tanah lainnya sebagaimana yang diinginkan oleh Kapten Moor, akan saya serahkan kepada Kompeni. (KRT AA. Probonegoro, 1940: 74).

Pada tahun 1734 orang Lampung sudah merasa bebas dari kontrol kekuasaan Banten. Bahkan daerah Tulangbawang sudah jatuh lagi ke tangan Palembang. Untuk mengembalikan Tulangbawang ini, Sultan Zainul Arifin minta bantuan VOC, tentu saja dengan perjanjian yang menguntungkan Belanda. Pasukan dikirim VOC dikirim ke Tulangbawang dan berhasil mengemba-

likan daerah ini ke bawah kekuasaan sultan Banten. Untuk mengawasi perdagangan lada yang mereka peroleh itu, maka VOC mendirikan benteng di Menggala pada tahun 1738 yang diberi nama Benteng Albertus. (Dirjen Kebudayaan, 1976 : 20). Dengan demikian hubungan Lampung, Palembang dan Banten, yang setiap persengketaan selalu berurusan mengenai lada, sejak abad ke-17 mulai diusik oleh Kompeni. Memang maksud kedatangan Belanda ke Nusantara ini tidak lain adalah untuk memperoleh langsung rempah-rempah dari Nusantara.

Di daerah Lampung ada lima keratuan yaitu :

1. Ratu di Puncak
2. Ratu di Pugung
3. Ratu di Pemanggilan
4. Ratu di Balau
5. Ratu di Keratuan Daerah Putih

Lima keratuan itu selalu mengadakan seba ke Banten, dengan maksud mengukuhkan kekuasaan mereka atas sesuatu daerah di Lampung dan mendapat restu dari Banten. Namun seperti disebutkan di atas bahwa antara Banten dan Lampung tidak ada perasaan bahwa yang satu menjajah yang lain. Sama-sama berdiri tegak, hanya kekuasaan Banten lebih besar karena menguasai daerah yang luas, sedangkan Lampung selalu terpecah-pecah dan menguasai daerah yang relatif sangat kecil. Perubahan dari VOC kepada kekuasaan Kompeni Belanda, dapat dikatakan bagi Lampung seperti tidak ada perubahan. Kesultanan Banten yang mulai rapuh karena perpecahan dari dalam, menyebabkan Lampung mencoba menjual lada ke mana dan kepada siapa saja yang mau membelinya. Bahkan dengan EIC (Inggris), orang Lampung menjual langsung dan ada pula yang ditukar dengan senjata untuk menandingi kekuasaan Kompeni sejak tahun 1800.

Sebenarnya sejak tahun 1751 Arie Adi Santiko menerima Kesultanan Banten sebagai pinjaman dari VOC. Dalam hubungan ini daerah Lampung telah diserahkan kepada VOC, tetapi VOC

tidak sempat mengurus Lampung sehingga Lampung mengurus dirinya sendiri. Nasib buruk bagi Kerajaan Banten dengan pengepungan Istana Surosoan oleh pasukan Daendels, Patih War-gadiraja di tembak mati, sedangkan Sultan Abunazar Muhammad Ishak Zainul Muttaqin dibuang dan diasingkan ke Ambon. Kesultanan Banten dibubarkan. Daerah Lampung yang sudah sejak lama mempunyai hubungan sejarah dan perpautan dengan Kesultanan Banten dengan surat keputusan tanggal 22 Nopember 1808 dijadikan tanah gubernemen dan ditangani langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini tentu saja ditentang rakyat Lampung. Dikabarkan terjadi perlawanan di sana-sini antara lain di daerah Abung (Kotabumi) di bawah Pangeran Indra Kesuma. Perlawanan ini dapat dipadamkan, Pangeran Indra Kesuma ditangkap dan dibawa ke Banten. Para pengikutnya menyusul mencari ke Banten tetapi tidak bertemu karena malu untuk kembali ke Lampung. Para pengikut ini menetap di Sikoneng dekat Kota Labuhan sekarang. Penguasa di Lampung yang dapat dikatakan mempunyai kekuasaan nyata ialah Raden Intan I, malahan oleh Daendels Raden Intan I diakui kepemimpinannya terhadap rakyatnya dan diakui pangkatnya sebagai ratu dan kornel. Kemungkinan, karena pada waktu itu Belanda sedang bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari pasukan Inggris.

Keadaan berubah ketika kemudian pada tahun 1811 Pulau Jawa diserang pasukan Inggris dan kemudian Nusantara menjadi jajahan Inggris. Daerah Lampung dengan sendirinya dipandang daerah jajahan Inggris pula. Melalui residen yang berkedudukan di Banten sebagaimana disebutkan dalam ketetapan dari Letnan Gubernur Jendral Thomas Stanforrd Raffles tanggal 26 Februari 1812 yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin rakyat Lampung. Hal yang sama berlaku pula terhadap Raden Intan I. Surat dari Daendels tidak diakui bahkan ditahan oleh Raffles tanpa diganti.

Raden Intan I wafat pada tahun 1828, dan diganti oleh putranya, Raden Intan II gelar Kesuma Ratu yang memerintah tahun 1828 — 1834. Beliau mengadakan perlawanan terhadap

Gubernur Belanda, namun malang dapat ditawan sehingga diasingkan ke Pulau Timur. Penggantinya, Raden Intan II, yang diperkirakan lahir pada saat ayahnya ditawan Belanda pada tahun 1834, mengadakan perlawanan selama lebih kurang 5 tahun yaitu dari tahun 1851 – 1856, pada saat beliau gugur sebagai pahlawan kesuma bangsa pada tanggal 5 Oktober 1856. Dengan gugurnya Raden Intan II maka lenyaplah segala perlawanan di daerah Lampung. Perlawanan Batin Mangunang di sekitar tahun 1831/1832 tidak menghasilkan buah yang menggembirakan rakyat Lampung. Demikianlah lintasan sejarah daerah Lampung secara singkat yang merupakan hubungannya dengan Palembang dan Banten. Palembang merupakan warisan Kerajaan Sriwijaya yang sejak 1377 masuk wilayah Majapahit dan kemudian diwarisi oleh Demak.

Pangeran Sideng Lautan yang mempunyai putra Gedeng Suro mendirikan Kerajaan Palembang yang berakhir pada tahun 1825, sedangkan Banten adalah juga perluasan Kerajaan Demak dengan Fatahillah sebagai cikal-bakal Kerajaan Banten. Dalam persaingan di lintasan sejarah ini maka VOC dan Gubernur Belanda dan bahkan Inggris (1811–1816), mengambil kesempatan mengambil keuntungan dalam berdagang lada di Lampung. Jadi sebenarnya Lampung dikepung oleh Kesultanan Palembang, Kesultanan Banten dan VOC serta Gubernur Belanda dan Inggris. Dalam perkembangan selanjutnya semangat Raden Intan II yang diwarisi oleh rakyat Lampung terus berkoobar. Ini nanti terbukti pada masa evaluasi kemerdekaan tahun 1945 – 1949, wilayah Lampung merupakan wilayah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Walaupun pada awal bulan Januari 1949, Belanda menyerang Lampung secara serentak dari utara dan dari selatan.

Kesimpulan

1. Daerah Lampung telah mempunyai kerajaan yang bernama Tulangbawang yang telah mengirimkan utusan ke Tiongkok, sampai Kerajaan Sriwijaya menguasai daerah ini sekitar tahun 686.

2. Kerajaan Sriwijaya lenyap dan dikuasai Majapahit pada tahun 1377, namun wilayah Lampung telah dimasukkan oleh Prapanca tahun 1365 sampai wilayah Majapahit.
3. Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke-15/16, selalu mengarahkan perhatiannya ke Lampung dan Selebar sebagai daerah penghasil lada.
4. Demikian juga Kerajaan Palembang, yang berdiri sejak 1552, berusaha menaklukkan Lampung, terutama Lampung Utara, daerah Tulangbawang Menggala dan selalu bersaing dengan Banten. Penyerangan Sultan Muhammad Kanjeng Ratu Banten yang tewas di Palembang, menyebabkan Banten dan Palembang sama-sama menunggu dan tidak saling menyerap lagi.
5. Kedatangan VOC dan Gubernemen Belanda serta kekuasaan Inggris, sempat mengganggu ketentraman Lampung sebagai penghasil lada. Namun kemudian yang kuat adalah yang menang, maka Lampung sejak tahun 1856 berada di bawah kekuasaan Gubernemen Belanda. Sejak saat itu tidak ada lagi pembrontakan di Lampung.
6. Pembrontakan di Banten dan lenyapnya Kesultanan Banten banyak yang bergabung dengan pasukan Raden Intan II seperti Haji Wakhya, Wak Maas dan Luru Satu yang semuanya berasal dari Banten, bahu membahu dalam menentang kekuasaan Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adatrechbundels XXXII: Zuid Sumatra, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930.
- Broesma, R. De Lampongsche Districten, Javasche Boekhandel en Dukkerij, Batavia, 1916.
- Bukri cs, Monografi Daerah Lampung, Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Lampung, Tanjungkarang, 1975.
- Hariri Manaf, Sejarah Daerah Kalianda, Skripsi Minor, Fkg. Unila, Tanjungkarang, 1971.
- Hilman Hadikusuma, SH, Adat Istiadat Daerah Lampung, Proyek P3KD Jakarta, 1977/1978. K
- HOESEIN DJAJADININGRAT, Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten, Penerbit Djambatan, Kononklik Institut Voor Taal, Land, en Volkenkunde, tanpa tahun. Penerbitan pertama tahun 1913.
- Husin Sayuti, cs. Sejarah Daerah Lampung, P3KD, Jakarta.
- Husin Sayuti, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Daerah Lampung Proyek IDKD Jakarta 1983/1984.
- Husin Sayuti, Sejarah Palembang, Thesis IKIP Bandung, 1966

Kantor Wilayah Dirjen Kebudayaan, Propinsi Lampung, PERJUANGAN PAHLAWAN RADEN INTAN, Pemda Kabupaten Lampung Selatan.

Krom, H.J. Zaman Hindu, Cetakan Kedua, terjemahan Arief Effendi, PT Pembangunan Jakarta, 1956.

Probonegoro, KRTAA⁴ Lampung, Tanah lan Tiangipun, Balai Pustaka, Batavia C., 1940.

Sartono Kartodirdjo, et. al. Sejarah Nasional Indonesia jilid I sampai IV, Depdikbud, Balai Pustaka, 1977.

Tjandrasasmita Uka, Musuh Besar Kompeni Belanda Sultan Ageng Tirtayasa, Penerbit Nusabarang, Jakarta, 1970

**MAKNA HUBUNGAN BALI DAN JAWA
DALAM REVOLUSI FISIK DI BALI (1945–1950)
(Oleh Ida Bagus Rama)**

Pendahuluan

Pada tahun 1597 kunjungan pertama pedagang-pedagang Belanda ke Bali di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. Mereka berlabuh di Pantai Kuta, Badung. Dua orang utusan segera dikirim untuk menghadap raja di Keraton Gelgel, Kelungkung. Pada waktu itu yang menjadi raja di Bali adalah Dalem Sagening. Kunjungan berikutnya dilakukan pada tahun 1601 di bawah pimpinan Cornelis van Heemskerck. Kedua kunjungan ini dengan maksud untuk menjalin persahabatan dan kemungkinan adanya hubungan dagang antara raja Bali dengan pedagang-pedagang Belanda. Untuk selanjutnya hubungan antara raja-raja di Bali dengan pedagang-pedagang Belanda (VOC) terus berlanjut terutama dalam hubungan dagang.¹

Kekhawatiran akan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Inggris di Lombok, maka pada tahun 1817 Pemerintah Belanda di Batavia kembali mengirim utusan ke Bali dengan maksud untuk menanamkan pengaruhnya di Bali. Setelah mengadakan pendekatan yang cukup lama, akhirnya dengan bantuan seorang pedagang asing M.J. Lange (berkebangsaan Denmark), para raja di Bali bersedia mengadakan

perjanjian dengan pihak Belanda pada tahun 1841. Perjanjian tersebut isinya bahwa para raja di Bali mengakui kedaulatan Belanda atas wilayahnya. Kemudian disusul dengan perjanjian tahun 1842 untuk menghapuskan hukum tawan karang di Bali, yang menurut pendapat Pemerintah Belanda sangat merugikan perdagangannya.

Dalam perkembangan selanjutnya rupanya Pemerintah Belanda belum puas dengan hasil diplomasi yang dicapainya, tanpa mematahkan secara militer kekuatan raja-raja di Bali. Dengan dalih melanggar perjanjian tawan karang, Belanda memerangi raja-raja di Bali, yang mengakibatkan terjadinya Perang Buleleng (1846), Perang Jagaraga (1849), Perang Kusamba (1849), Perang Banjar (1868), Puputan Badang (1906), dan Puputan Klungkung (1908). Dengan jatuhnya Klungkung, seluruh Bali dikuasai oleh Belanda. Pulau Bali dalam struktur Pemerintahan Belanda dibagi menjadi dua afdeling yaitu Bali Utara dan Bali Selatan, dan masing-masing afdeling membawahi beberapa onderafdeling.

Untuk melancarkan administrasi pemerintahannya, pada tahun 1875 Pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya membuka sekolah rakyat (*Volkschool*) di Kota Singaraja. Setelah politik etis dilaksanakan (1901), sekolah-sekolah rakyat makin banyak didirikan di Bali, malahan pada tahun 1913 di Kota Singaraja sudah didirikan *Holland Inlandsche School* (HIS).² Dengan adanya kemajuan di bidang pendidikan, di Bali lahir bermacam-macam organisasi sosial seperti Surya Kanta, Bali Adnyana, Putri Bali Sedar, Bali Darma Laksana, yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Di samping itu lahir pula organisasi-organisasi politik seperti Budi Utomo cabang Denpasar (1920) dan Parindra Komisariat Bali (1935).³

Pada tanggal 9 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Pantai Sanur tanpa perlawanan dari tentara Belanda. Tentara Belanda berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara mengundurkan diri ke Pegunungan Tabanan, sambil merusakkan segala

sarana yang dibawanya seperti truk dan senjata. Semua tangsi Belanda di Bali diduduki oleh tentara Jepang. Kegiatan tentara Jepang selanjutnya adalah untuk mengajak masyarakat meningkatkan produksi seperti padi, kapas, jarak, nenas, ternak, untuk logistik tentara Jepang di garis depan, di samping itu dibentuk pula pasukan para militer seperti *seinendan*, *keibodan*, *heiho*, *kaigun*, peta, untuk ikut membantu menjaga keadaan wilayah (teritorial). Untuk membantu tentara Jepang di garis depan, di Bali dibentuk pula Barisan Pekerja Sukarela Bali (BPSB). Mereka pada umumnya dikirim ke pedalaman Sulawesi untuk menebas hutan, dan dengan maksud membuat jalan raya, untuk memudahkan operasi tentara Jepang. Akibat kejayaan tentara Jepang, maka di Bali timbul gerakan di bawah tanah yang dikordinasi oleh Rai, dengan sel-sel gerakannya di *daidan* Negara, Klungkung dan Kediri. Mereka merencanakan untuk berontak, akan tetapi karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945, akhirnya rencana ini pun gagal.⁴

Menyambut Proklamasi

Berita Proklamasi Kemerdekaan baru diketahui di Bali pada tanggal 23 Agustus 1945, setelah kedatangan Mr. I Gusti Ketut Puja dari Jakarta untuk memangku jabatan sebagai gubernur Sunda Kecil. Sebelum menuju posnya yang baru di Singaraja, Mr. I Gusti Ketut Puja terlebih dulu singgah di Kota Negara, Jembrana, untuk menyampaikan berita Proklamasi kepada para pemuda, yang kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih untuk pertama kalinya di Bali berkibar di Kota Negara, Jembrana. Berita Proklamasi ini kemudian makin tersebar luas di kalangan rakyat, khususnya para pemudanya. Para pemuda yang ada di Kota Denpasar dan Singaraja pada akhir bulan Agustus 1945 mengambil inisiatif untuk mendirikan organisasi pemuda dengan nama Angkatan Muda Indonesia (AMI).⁵ Aksi-aksi yang dilakukan oleh AMI adalah pemasangan bendera Merah Putih kecil-kecil di tembok-tembok, pengibaran bendera Merah

Putih, membuat dan membagikan lencana Merah Putih kepada penduduk. Dalam perkembangan selanjutnya AMI Denpasar diubah namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) sedangkan AMI Singaraja diubah namanya menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

Situasi menyambut Proklamasi di Bali lebih semarak lagi dengan datangnya para pelajar Bali yang belajar di kota-kota besar di Jawa seperti Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta. Sesuai dengan instruksi yang mereka terima dari badan-badan perjuangan yang ada di Jawa bahwa para pelajar yang berasal dari seberang atau luar Jawa diminta untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan. Mereka boleh memilih tempat berjuang yaitu di Jawa atau di tempat kelahirannya. Para pelajar yang berasal dari Bali sebagian besar memilih berjuang di tempat kelahirannya. Pada bulan Oktober 1945 setelah ikut di dalam aksi-aksi perjuangan pemuda pelajar di Jawa akhirnya mereka kembali ke Bali dan menggabungkan diri dengan badan-badan perjuangan yang telah ada di Bali seperti PRI, Pesindo dan BKR.⁶

Pada bulan Oktober 1945 datang pula rombongan penerangan dari Banyuwangi yang dipimpin oleh Maryono selaku ketua KNID Banyuwangi dengan anggota-anggotanya yaitu Ida Bagus Mahadewa, Supomo, Suwardi dan sejumlah pemuda Bali lainnya. Mereka berkeliling memberikan penerangan di Bali dan kota-kota yang dikunjungi ialah Singaraja, Bangli, Karangasem, Denpasar, Tabanan, dan Negara.⁷

Rombongan yang kemudian menyusul datang ke Bali adalah dari mahasiswa *Ika Daigaku* Jakarta, yang diutus oleh menteri penerangan untuk memberikan penerangan tentang berita Proklamasi dan supaya berita nasidonal ini sampai kepada lapisan masyarakat terbawah. Mereka juga ditugaskan untuk mendorong terbentuknya Pemerintah RI di daerah-daerah dan menggerakkan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan. Setibanya di Bali mereka mengadakan pertemuan dengan para

pemuda yang ada di Kota Denpasar dan Singaraja. Mereka menyampaikan bahwa para pemuda di Bali jangan ketinggalan memerah putihkan Indonesia dari kota sampai ke desa-desa.⁸

Hampir bersamaan dengan rombongan mahasiswa *Ika Daigaku* Jakarta, Penyelidik Militer Khusus, yang dibentuk beberapa saat setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR), mengirim utusan ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Kecil. Tugas mereka adalah untuk mendesak pembentukan TKR di daerah-daerah. Utusan dari PMC yang datang ke Bali adalah Surbroto Aryo Mataram, Marsudi, dan I Gusti Putu Raka. Setibanya di Bali para utusan mengadakan kontak dengan pucuk pimpinan TKR Sunda Kecil I Gusti Ngurah Rai. Mereka kemudian ikut bergabung dengan TKR Sunda Kecil, untuk melakukan perjuangan di Bali.⁹

Karena persenjataan sangat kurang, maka ketua PRI Denpasar menugaskan beberapa orang anggotanya yaitu Rama, Mega, Regig, Herman, bergabung dengan rombongan Singaraja yang dipimpin oleh Gede Muka Pandan, untuk pergi ke Jawa meminta bantuan senjata. Markas-markas yang dihubungi adalah markas Bung Tomo di Tembok Dukuh, Jalan Tidar 91 Surabaya. Oleh Bung Tomo mereka diberi petunjuk-petunjuk dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan bantuan senjata tidak dapat diberikan karena senjata yang dimiliki oleh Barisan Pembontak Rakyat Indonesia (BPRI) juga sangat terbatas. Dari Surabaya rombongan kemudian menuju Malang untuk bertemu dengan komandan TRI Divisi VIII Malang. Bantuan senjata juga tidak dapat diberikan karena senjata yang dimiliki juga sangat terbatas dan para utusan masing-masing hanya diberikan topi baja. Sekembalinya di Banyuwangi atas bantuan badan-badan perjuangan yang ada di Banyuwangi mereka diberi satu truk meim (periuk api), yang kemudian diangkut dengan truk ke Bali.¹⁰

Semangat pemuda lebih meluap lagi di Bali, karena dibakar oleh pidato Bung Tomo lewat radio BPRI Surabaya. Pa-

ra pemuda dapat mengikuti pidato Bung Tomo lewat radio-radio umum dan radio-radio yang ada di kantor-kantor pemerintah yang ditinggalkan oleh Jepang.¹¹

sah Pendaratan Markas Komando Ngurah Rai,” dalam Bali Post, 27 Desember 1980. hal. V.

Di samping terbentuk organisasi pemuda seperti PRI dan Pesindo, di Bali dibentuk pula badan resmi seperti Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sunda Kecil dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Sunda Kecil sebagai kelengkapan dari Pemerintah Propinsi Sunda Kecil. TKR dibentuk pada tanggal 1 November 1945 dengan bertempat di Puri Raja Badung. Dalam pertemuan ini hadir gubernur Sunda Kecil, ketua KNID Sunda Kecil, dan para raja di Bali kecuali raja Gianyar. Rapat secara aklamasi menyetujui terbentuknya TKR Sunda Kecil, demikian pula menyetujui pimpinan TKR Sunda Kecil adalah I Gusti Ngurah Rai, pimpinan ketentaraan I Gusti Putu Wisnu, dan sebagai kepala staf I Wayan Ledang. Kekuatan TKR Sunda Kecil adaah 13½ kompi yang kedudukannya tersebar di seluruh Bali.¹² Markas TKR Sunda Kecil di sebelah selatan Alun-alun Puputan Badung sekarang. Persenjataan TKR Sunda Kecil sangat terbatas yaitu senjata-senjata bekas *prayoda* yang berhasil dikumpulkan dan jumlahnya tidak banyak. Untuk melengkapi persenjataan TKR, maka oleh pihak gubernur, ketua KNID Sunda Kecil, dan pimpinan TKR Sunda Kecil telah mengadakan perundingan dengan pimpinan tentara pendudukan Jepang di Bali, dengan bertempat di Sekolah Dasar Sempidi, pada bulan Oktober 1945. Dalam perundingan pihak Jepang tidak bersedia menyerahkan senjatanya karena terikat kepada Sekutu. Pihak pemuda membalasnya dengan cara mengadakan penyerbuan terhadap semua tangsi Jepang yang ada di Bali pada tanggal 31 Desember 1945. Serbuan ini mengalami kegagalan karena tentara Jepang telah mempersiapkan diri sebelumnya, malahan di Kota Denpasar tentara Jepang membuat pertahanan di lapangan Puputan Bandung sekarang. Tengah malam mereka mengadakan tembakan ke segala arah, yang mengakibatkan para pemuda

mengurungkan niatnya untuk menyerbu. Keesokan harinya tentara Jepang keluar dari dalam tangsinya, dan kemudian melakukan pengejaran terhadap pemuda yang menyerbunya, sambil melakukan tembakan kepada setiap pemuda yang diketemukannya. Para pemuda mengundurkan diri ke luar kota untuk menghindari kepungan dari tentara Jepang. Banyak pemuda yang berhasil ditangkapnya, akan tetapi tidak lama ditahan kemudian dilepaskan lagi. Kemungkinan mereka merasa takut menghadapi gempuran dari pihak pemuda yang lebih hebat lagi.

Setelah penyerbuan mengalami kegagalan, pucuk pimpinan TKR Sunda Kecil, pimpinan PRI Denpasar mundur ke Puri Kesiman, Badung, dan dari sini mengundurkan diri menuju Desa Bongkasa, Kabupaten Badung. Di sini diadakan pertemuan di antara pucuk pimpinan perjuangan di Bali di antaranya Rai, Wisnu, Sugianyar, Cokorda Ngurah, Ledang, Wijayakusuma dan Poleng. Dalam pertemuan ini telah diputuskan untuk melanjutkan perjuangan. Untuk melaksanakan keputusan ini sebagian di antara mereka yaitu Rai, Wisnu, Cokorda Ngurah dan Ledang diutus ke Jawa untuk melaporkan situasi perjuangan di Bali dan meminta bantuan senjata.¹³ Sedangkan pucuk pimpinan lainnya yaitu Wijayakusuma, Poleng, Mantik, Debes, Wijana, ditugaskan untuk mengadakan konsolidasi perjuangan di Bali sambil menunggu kedatangan utusan dari Jawa.

Mengadakan Hubungan ke Jawa

Setelah gagal merebut senjata Jepang tanggal 13 Desember 1945, rombongan Rai berangkat dari Desa Mungsian, Badung, pada tanggal 19 Desember 1945 menuju Munduk Malang, dan dari sini menuju Desa Emped, Gesing, Celukan Bawang. Pada tanggal 1 Januari 1946 rombongan Rai baru tiba di Wongso-rejo, kira-kira 20 km di sebelah utara Banyuwangi. Biasanya orang-orang yang datang dari Bali ke Banyuwangi mendarat di Muncar, Banyuwangi atau Ketapang. Rombongan diterima oleh Ida Bagus Mahadewa yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil kepala Kepolisian Banyuwangi. Untuk sementara

rombongan Rai bertempat tinggal di rumah Ida Bagus Mahadewa di Jalan Mojoroto 13 Banyuwangi. Sementara itu datang pula menyusul Subroto Aryo Mataram, yang kemudian bergabung dengan rombongan Rai.¹⁴

Keesokan harinya dengan diantar oleh Mahadewa rombongan Rai bertemu dengan komandan batalyon TKR Banyuwangi Yon ALRI Banyuwangi, dan bupati Banyuwangi untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke Jawa yaitu untuk meminta bantuan senjata. Karena persenjataan yang ada di Banyuwangi jug sangat terbatas, maka disarankan kepada Rai untuk bertemu dengan komandan TKR Divisi VIII Malang dan komandan TKR Resimen Laut Jember.

Sebelum melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, untuk mengkoordinasi segala bantuan dari Jawa, demikian pula untuk mengadakan hubungan ke Bali, maka di Banyuwangi dibentuk suatu badan yang bernama Badan Penghubung Jawa Bali, dengan susunan pengurusnya sebagai berikut: pimpinan, Ida Bagus Mahadewa dan perwira penghubung, Subroto Aryo Mataram, dengan markasnya bertempat di rumah Ida Bagus Mahadewa.

Rombongan Rai kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jember dan dari sini menuju Malang untuk menemui komandan TKR Divisi VIII Malang yaitu Mayor Jenderal Imam Sudjai, dengan maksud untuk meminta bantuan senjata. Sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, sempat pula bertemu dengan Bung Tomo, di mana pada waktu itu Bung Tomo banyak memberikan penjelasan tentang situasi revolusi di Jawa. Pada akhir bulan Januari 1946 rombongan Rai tiba di Yogyakarta dan berturut-turut yang mereka hubungi adalah: Kepala Staf Umum Tentara Jenderal Mayor Urip Sumohardjo, Presiden Sukarno, Panglima Besar Sudirman, dan Menteri Pertahanan Amir Syarifudin. Dalam kesempatan ini Rai melaporkan tentang situasi di Bali dan meminta bantuan senjata. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut oleh kepala staf umum tentara telah disampaikan kepada Rai beberapa keputusan yaitu: TRI

Sunda Kecil akan berbentuk resimen yang taktis di bawah Divisi VIII Malang, tetapi administrasi langsung di bawah Markas Besar Tentara (MBT), bantuan senjata akan diusahakan, TRI Laut akan memberikan bantuan senjata dan personal dan akan dibentuk sebuah Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil (DPRISK) yang mengkoordinasi TRI Sunda Kecil, PRI dan Pesindo.¹⁵

Bantuan TRI Laut disiapkan oleh Munaji dan Markadi. Persiapan dipusatkan di Malang, sehingga mudah untuk diberangkatkan sewaktu-waktu ke Bali. Di samping pasukan Markadi, di Yogyakarta telah pula disiapkan bantuan untuk membantu perjuangan di Sunda Kecil yang dikoordinasi oleh Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil (MGGSK).

Sesuai dengan Surat Keputusan MBT No. 9/SC/46, Rai telah dilantik sebagai komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat letnan kolonel. Di samping itu di Yogyakarta Rai telah pula mengumumkan terbentuknya DPRI Sunda Kecil, yang taktis di bawah TRI Sunda Kecil.¹⁶

Setelah mendapat petunjuk dari pemerintah pusat, Rai kembali ke Banyuwangi. Dalam perjalanannya menuju Banyuwangi Rai mampir juga di Malang melaporkan hasil-hasil yang diperoleh di Yogyakarta, terutama status TRI Sunda Kecil yang taktis di bawah Divisi VIII Malang. Sementara melanjutkan usaha-usaha untuk mendapatkan bantuan senjata di Jawa, TRI Sunda Kecil tetap bermarkas di Banyuwangi. Hal ini telah pula mendapat izin dari Markas Divisi VIII Malang, sesuai dengan suratnya tanggal 9 Maret 1946.

Pada tanggal 2 Maret 1946 pasukan Gajah Merah dari Brigade X dan XI mendarat di Pantai Sanur, dan selanjutnya menduduki Kota Denpasar. Dari Denpasar pasukan Gajah Merah di sebar luaskan ke seluruh Bali. Pasukan Gajah Merah dibagi menjadi tiga komando yaitu Gianyar di bawah komando Kapten Cassa; Klungkung, Karangasem, Bangli di bawah komando Letnan Groet; Tabanan, Negara dan Singaraja di bawah komando Kapten Ter Wilde. Semua tangsi Jepang ditempati oleh tentara

Gajah Merah dan ditambah lagi dengan pos-posnya yang baru seperti Pempatand, Perean, Kitamani, Pulukan, dan lain-lainnya. Kedatangan tentara Gajah Merah mengakibatkan rakyat merasa ketakutan dan segera menyingkir meninggalkan kampung halamannya untuk mengungsi ke luar desanya. NICA dengan kaki tangannya segera melancarkan aksi-aksinya yaitu menangkap orang-orang yang dicurigainya membantu perjuangan pihak pemuda. Dari pihak pemuda terus mengadakan konsolidasi perjuangan dengan cara mengadakan latihan-latihan, membuat senjata dengan nama *bedil bali*, yang dibuat oleh para *pande besi*. Di samping itu telah pula dibuat staf-staf perjuangan di seluruh Bali, baik pada tingkat swapraja, distrik, desa dan banjar.¹⁷

Setelah Rai merampungkan tugasnya di Jawa, maka disiapkan rombongan untuk berangkat ke Bali. Demikian pula rombongan Markadi telah siap pula untuk berangkat ke Bali melalui Banyuwangi, sedangkan Rai melalui Pelabuhan Muncar. Dipilihnya Muncar oleh Rai karena dekat dengan tempat pendaratan yang direncanakan yaitu pantai Yeh Kuning. Rombongan Markadi terdiri atas para pelajar SPMA, STN, taruna AU, dan beberapa mahasiswa yang ada di Malang, yang jumlahnya sebanyak 160 orang. Sedangkan rombongan Rai terdiri atas 45 orang yaitu pimpinan TRI Sunda Kecil, 15 orang anggota polisi dari Bondowoso dan Surabaya dan yang lainnya adalah bekas-bekas romusa yang sebelumnya di tempatkan di Su lawesi oleh Jepang. Di samping kedua rombongan tersebut, ada lagi rombongan yang akan berangkat ke Bali yaitu rombongan Waroka sebanyak 160 orang terdiri atas TRI Laut Banyuwangi dan bagian perkapalan. Ketiga rombongan berangkat dihari yang sama yaitu tanggal 3 April 1946 ke Bali, akan tetapi waktunya berbeda-beda, demikian pula tempat pendaratannya.

Pertempuran Selat Bali

Rombongan yang pertama berangkat dari Banyuwangi adalah pasukan Waroka. Mereka mendarat dengan selamat di

pantai Celukan Bawang, Buleleng, dan kemudian bersama pemuda setempat melakukan gerakan ke timur menuju Seririt dengan maksud mengadakan persiapan untuk melakukan cegatan terhadap patroli tentara NICA. Setelah mengalami pertempuran di Desa Ringdikit dan Seririt, pasukan Waroka segera kembali ke Jawa, setelah meninggalkan banyak korban.¹⁸

Pasukan yang kedua menuju Bali adalah pasukan Rai. Pasukan Rai berangkat dari Pelabuhan Muncar pada tanggal 3 April 1946, pukul 20.00 dengan 15 jukung. Pada mulanya pelayaran mereka menyenangkan, karena bantuan angin malam. Akan tetapi pada pukul 24.00 angin mulai mereda dan akibatnya perahu mereka satu sama lain berjauhan.¹⁹

Tiada lama antaranya, lebih kurang pukul 03.00, dekat pantai antara Cupel dan Candikusuma, dari arah utara pada jarak jauh bergerak benda-benda hitam, yang makin lama makin besar. Benda hitam itu sebenarnya adalah motor boat Belanda, yang ingin mendekati perahu yang ditumpangi oleh Cokorda Sudarsana dan kawan-kawannya. Setelah dekat, pihak tentara NICA ingin mengetahui identitas orang-orang yang berada di dalam perahu. Mereka bertanya dan kemudian dijawab oleh pihak Cokorda bahwa mereka adalah penangkap ikan. Pihak Cokorda ingin menyembunyikan identitasnya, supaya tidak diketahui oleh NICA dengan maksud bisa selamat sampai di Bali. Akan tetapi pihak NICA tidak percaya dengan jawaban yang diberikan oleh pihak Cokorda. NICA lebih mendekatkan lagi boatnya dengan perahu Cokorda. Setelah mengamati dari dekat, mereka berkesimpulan bahwa tidak benar yang ada di dalam perahu itu adalah tukang tangkap ikan dan akhirnya memberondongnya dengan tembakan senjata otomatisnya. Pihak Cokorda segera membalasnya dengan lemparan granat ke arah boat NICA untuk menghindari tembakan yang sangat gencar dari pihak NICA. Dalam pertempuran ini pihak pemuda gugur Cokorda Gambir dan Cokorda Darma Putra dan seorang nelayan yang berasal dari Negara. Seorang lagi yaitu Cokorda Sudarsana ditangkap oleh NICA, setelah disiksa kemudian ditahan di tangsi NICA di kota Negara.²⁰

Kelompok lain sebanyak 7 jukung lagi berada di belakang perahu Cokorda, lebih kurang jaraknya 1 km. Mendengar adanya tembakan tersebut, tukang perahu bertekad untuk lebih cepat mendayung perahunya supaya tiba di pantai. Akan tetapi pimpinan rombongan memaksa ke tengah untuk menyelamatkan diri, mencari tempat yang lebih aman. Tengah hari rombongan ini baru mendarat di Yeh Kuning. Setelah lama menunggu di Yeh Kuning rombongan Rai belum juga datang, maka rombongan ini melanjutkan perjalanannya ke Pulukan.

Rombongan Rai berada lebih jauh lagi dari rombongan yang telah mendarat tadi. Setelah mendengar tembakan, rombongan Rai kembali ke Muncar. Keesokan harinya kira-kira pukul 23.00 rombongan Rai berlayar kembali ke Bali, dengan tujuan Pantai Yeh Kuning. Kali ini rombongan dengan selamat tiba di Yeh Kuning. Rombongan Rai kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pulukan dan di sini bergabung dengan rombongan Bayupati yang telah lebih dulu tiba di Pulukan. Kedua rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Munduk Malang dan dengan selamat pada tanggal 8 April 1946 tiba di Munduk Malang.

Pada tanggal 4 April 1946, pukul 20.00 rombongan Markadi juga berangkat dari Banyuwangi sebanyak 16 perahu, dengan jumlah pasukan 160 orang. Perahu-perahu itu pada mulanya ditarik dengan motor boat sampai di tengah lautan dan kemudian dilepas untuk berlayar sendiri. Dengan bantuan arus laut dan angin perahu-perahu itu menuju pantai Bali. Tujuan pendaratan adalah di pantai Cupel dan Candi Kusuma, dan diharapkan mendarat menjelang pagi pukul 05.00.

Pagi-pagi salah sebuah perahu dari rombongan Markadi yaitu perahu yang ditumpangi oleh Muhaji dengan anggota sebanyak 30 orang mendarat di Pantai Pembuahan, sedangkan perahu yang ditumpang oleh Markadi terpisah dari perahu-perahu lainnya. Tiba-tiba dari arah Cupel ada dua motorboat Belanda bergerak menuju perahu Markadi. Mengetahui hal tersebut perahu Marjadi mempercepat gerakannya menuju ke pantai,

sedangkan boat NICA lebih cepat pula mengejarnya. Untuk tidak diketahui identitasnya oleh NICA, anak buah Markadi segera menyembunyikan senjatanya, dengan maksud supaya NICA tidak mengetahui bahwa mereka adalah tentara. Akhirnya perahu Markadi terkejar pula oleh NICA. Oleh NICA perahu Markadi diminta untuk berhenti dan meminta tali. Mereka meminta tali dengan maksud supaya perahu Markadi bisa ditarik dan mendekat dengan boat NICA. Dengan demikian NICA dapat mengetahui dengan jelas, siapakah yang sebenarnya berada dalam perahu Markadi. Atas saran Sumeh Darsono, Markadi dengan berdiri memberikan tali kepada NICA. Begitu tali dipegang oleh NICA, segera pula Markadi menariknya kembali perlahan-lahan. Demikianlah dalam permainan tali ini, NICA mengetahui bahwa yang ada dalam perahu Markadi adalah tentara. Markadi pun menyadari dirinya, bahwa identitasnya diketahui oleh NICA, akhirnya sambil melemparkan tali, Markadi memberikan komando menembak kepada anak buahnya. NICA membalas dengan senjata otomatisnya dan di samping itu boat NICA membentur perahu Markadi, yang mengakibatkan Markadi dan beberapa anak buahnya jatuh ke laut. Atas bantuan anak buahnya Markadi dapat ditolong dan kembali naik ke dalam perahunya.

Pertempuran berlangsung lebih kurang 15 menit. Di pihak Markadi gugur Sumeh Darsono dan Sawaliluha, sedangkan di pihak NICA juru mudi kapal boatnya tertembak mati. Boat NICA kemudian mundur dan lari dengan mengepulkan asap dan kemudian tenggelam. Sedangkan boat NICA yang satu lagi jaraknya lebih kurang 1 km dari tempat pertempuran tadi, sambil menembak juga lari.

Markadi beserta anak buahnya kembali ke Banyuwangi dan pada tanggal 8 April 1946 oleh Kolonel Munaji, maka Markadi diperintahkan kembali ke Bali. Kali ini perjalanan tidak mengalami rintangan di dalam pelayaran, dan setelah fajar menyingsing perahu Markadi tiba dan mendarat di pantai Penginuman, Klatakan, Melaya, dan Candikusuma.²¹

Pasukan terakhir bantuan dari Jawa adalah pasukan Suryadi. Pasukan ini jumlahnya sebanyak 360 orang. Pasukan ini berangkat dari Banyuwangi menuju Bali pada tanggal 2 Juli 1946, dan dengan selamat mendarat di pantai Klatakan, Batu-kaang dan Penginuman. Dalam rangka bergerak ke timur meliwati jalan raya Negara Gilimanuk, tentara NICA menghadangnya sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran besar-besaran di Hutan Klatakan yang mengakibatkan pasukan Suryadi banyak yang gugur. Demikian pula pasukan Suryadi yang mendarat berikutnya kena gempur oleh tentara NICA sehingga banyak pula yang gugur. Pasukan Suryadi yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran tentara NICA, dalam keadaan cerai-berai menghindarkan diri, akan tetapi kemudian banyak pula yang berhasil ditangkap oleh pihak NICA dan ditahan oleh NICA di tangsi NICA di Kota Negara.²²

Akhir Perjuangan

Setelah Rai tiba di Munduk Malang, Tabanan, semua pimpinan badan perjuangan yang ada di Bali beserta pasukannya dipanggil oleh Rai untuk berkumpul di Munduk Malang. Semua pimpinan beserta pasukannya memenuhi panggilan Rai. Pada tanggal 14 April 1946 diadakan pertempuran di Munduk Malang dan telah disepakati untuk membentuk satu badan perjuangan dengan nama Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil (DPRI) di bawah pimpinan Rai.

Sementara menunggu kedatangan pasukan Markadi, pasukan Rai melakukan gempuran terhadap pos NICA di Penebel 15 April 1946 dan sebaliknya pada tanggal 11 Mei 1946 kedudukan MBU di Munduk Malang kena gempur dari tentara NICA dengan mempergunakan pesawat terbang. Akibat gempuran ini, kedudukan MBU dipindahkan ke Bengkel Anyar, suatu desa di kaki Gunung Batukaru.

Setelah pasukan Markadi mendarat di Pantai Melaya pada tanggal 8 April 1946, dengan diantar oleh pasukan pengawal, pasukan Markadi menuju Markas Perjuangan Negara di Desa Peh.

Di sini pasukan Markadi mengaso sejenak untuk melepaskan segala kelelahan dalam perjalanan. Pada tanggal 14 April 1946 pasukan Markadi bersama pemuda setempat telah melakukan penyerangan terhadap tentara NICA yang berada di bekas daidan Jepang di Kota Negara. Seusai mengadakan serangan, markas dipindahkan ke Gelar. Di sini pasukan Markadi menggempur pos NICA di Pulukan. Karena adanya panggilan dari Rai, pasukan Markadi bergerak ke timur dan kemudian bergabung dengan MBU di Bengkel Anyar.

Untuk menggelorakan semangat perjuangan rakyat di seluruh Bali, maka MBU mengadakan gerakan *long march* ke timur untuk menuju daerah Karangasem. Dalam gerakan ke timur ini terjadilah pertempuran-pertempuran di Sekumpul, Lampu, Bon, Peasgi, dan terakhir dengan puncak pertempuran Tanah Aron pada tanggal 9 Juli 1946. Dalam pertempuran ini di pihak NICA korban sebanyak 82 orang, sedangkan pasukan MBU tidak ada yang korban.²³ Untuk menghindari serangan udara dari pihak NICA, pasukan MBU naik ke puncak Gunung Agung dan dari sini bergerak ke barat dengan melalui hutan-hutan lebat tanpa makan, dan malahan sebaliknya kena gempur oleh pesawat terbang NICA. Setibanya di Munduk Pangorengan (Buleleng Barat), maka diadakan rapat yang dihadiri oleh semua pimpinan MBU. Dalam pertemuan ini telah diputuskan bahwa pasukan dikembalikan ke daerahnya masing-masing, sedangkan pasukan Markadi kembali ke Jawa.

Rai sendiri dengan beberapa pimpinan MBU lainnya bermarkas di Marga. Dengan bantuan Wagimin dan Ni Made Lasti, Rai berhasil membobolkan tangsi polisi NICA di Tabanan pada tanggal 18 November 1946, dan berhasil mendapatkan banyak senjata. Akan tetapi sebaliknya kedudukan Rai terkepung di Marga yang mengakibatkan terjadinya Puputan Marga pada tanggal 20 Nopember 1946, di mana semua pasukan Rai (pasukan Ciung Wanara) sebanyak 95 orang gugur.

Peristiwa Puputan Marga sangat mengejutkan pihak pemuda, karena gugurnya Rai beserta pucuk pimpinan lainnya.

Baru pada tanggal 6 April 1947 konsolidasi di dalam tubuh MBU DPRI Sunda Kecil dapat dilaksanakan di bawah pimpinan I Made Wijakusuma. Untuk menolong perjuangan di Bali, beberapa orang utusan telah dikirim ke Jawa untuk meminta bantuan senjata. Di Banyuwangi utusan telah berhasil mengumpulkan senjata sebanyak 6 jukung, yang direncanakan dikirim ke Bali pada tanggal 21 Juli 1947. Karena tepat pada tanggal tersebut terjadi aksi militer Belanda, maka rencana pengiriman senjata ke Bali juga gagal. Para pemuda Bali ikut berjuang di Banyuwangi dengan kesatuan-kesatuan lainnya dengan cara membentuk front kebangsaan.²⁴ Setelah gencatan senjata para utusan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dan di sini kemudian mereka bergabung dalam Resimen Ngruh Rai.

Setelah Persetujuan Renville ditandatangani oleh pihak RI dan Belanda, maka pada tanggal 22 Januari 1948 Pemerintah RI mengakui negara NIT. Akibat dari adanya pengakuan tersebut pihak MBU DPRI Sunda Kecil pada tanggal 25 Mei 1948 mengeluarkan "Instruktie Istimewa" yang memerintahkan kepada segenap anggotanya untuk mengadakan penyerahan umum kepada Dewan Raja-raja di Bali. Akan tetapi tidak semua pemuda mentaati instruksi tersebut dan meneruskan perjuangan dengan nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sunda Kecil. Mereka ini kemudian diturunkan oleh Komisi Militer NIT pada tanggal 15 Januari 1950, dan kemudian disalurkan menjadi tentara dalam kesatuan TNI Depo Arjuna.

Penutup

Dari uraian di atas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Bali Jawa mempunyai arti yang sangat strategis, karena Jawa merupakan segala harapan bagi para pejuang di Bali untuk mendapatkan senjata, guna mengimbangi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak NICA yang makin hari makin mengganas.

2. Untuk tidak menyalakan harapan di atas, Pemerintah Pusat RI dan badan-badan perjuangan di Jawa telah mengirimkan bantuan pasukan ke Bali. Bantuan tersebut telah berhasil membangkitkan semangat perjuangan di Bali, yang sebelumnya sempat turun akibat gempuran dari tentara NICA.
3. Untuk memudahkan pengiriman bantuan dari Jawa dan untuk mengurangi tekanan daerah Bali Barat dari pengawasan tentara NICA, maka telah dilaksanakan taktik *long march*, dengan harapan supaya perhatian tentara NICA diarahkan ke Bali Timur. Akan tetapi usaha itu tidak berhasil karena Bali Barat tetap dijaga ketat oleh tentara NICA.
4. Adanya pengakuan RI terhadap NIT mengakibatkan MBU DPRI Sunda Kecil memerintahkan anak buahnya untuk turun, sedangkan yang tidak menyetujui melanjutkan perjuangan sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949.

CATATAN

- 1 E. Utrecht, *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok* (Bandung : Sumur Bandung, 1962), hal. 139.
- 2 Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah *Sejarah Daerah Bali*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hal. 115.
- 3 Nyoman S. Pendit, *Bali Berjuang* (Jakarta : Gunung Agung, 1979), hal. 6 – 10.
- 4 *Ibid*, hal. 47 – 52.
- 5 *Ibid*, hal. 70 – 71.
- 6 I Gst. Ngr. Pt. Adnyana, "mengenang Long March ke Pulukan," dalam *Bali Post*, 6 November 1980. hal. 1.
- 7 Team Penulisan Pusat Sejarah ABRI, *Operasi Lintas Laut dari Banyuwangi ke Bali tahun 1946*, naskah ketikan, Koleksi Disjarah dan EVI Udayana, Denpasar, hal. 4.
- 8 Hasil wawancara dengan I Gusti Putu Raka, Denpasar, 29 Oktober 1980.
- 9 Hasil wawancara dengan I Gusti Putu Raka, Denpasar.
- 10 Hasil wawancara dengan I Wayan Rana, Denpasar, 27 Oktober 1980.

- 11 H. Soegeng Warsono, "Kisah Pendaratan Markas Komando Ngurah Rai," dalam *Bali Post*, 27 Desember 1980, hal. V.
- 12 Nyoman S. Pendit, *Album Bali Berjuang* (Denpasar : Yayasan Kebaktian Pejuang Daerah Bali, 1954), hal. 20.
- 13 Hasil wawancara dengan Ida Bagus Tantra, Denpasar, 25 November 1979.
- 14 Team Penulisan Pusat Sejarah ABRI, *op. cit.*, hal. 38 – 39.
- 15 *Ibid.*, hal. 50 – 52.
- 16 Hasil wawancara dengan I Gusti Putu Raka, Denpasar, tanggal 15 Desember 1980.
- 17 Nyoman S. Pendit, *Bali Berjuang, op. cit.*, hal. 116.
- 18 Team Penulisan Pusat Sejarah ABRI, *op. cit.*, hal. 106 – 107.
- 19 *Ibid*, hal. 118.
- 20 Hasil wawancara dengan Cokorda Oka Sudarsana, Denpasar, tanggal 7 Agustus 1980.
- 21 Team Penulisan Sejarah ABRI, *op. cit.*, hal. 108 – 114.
- 22 *Ibid*, hal. 127 – 130.
- 23 Kapten I Gusti Ngurah Pindha, B.A., *Pertempuran Besar Tanah Aron*, (Denpasar : Yayasan Universitas Marhaen, 1964).
- 24 Lihat surat Mantik tanggal 27 Oktober 1949 kepada Poleng cs. koleksi Cilik.

**MASALAH PENDIDIKAN SEJARAH
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS JEPANG
(Oleh: I Ketut SURAJAYA)**

Pendahuluan

Dinamika pendidikan sejarah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jepang tidak dapat dipisahkan dengan proses sejarah, sistem pendidikan – termasuk kurikulum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi, yang mewarnai masing-masing semangat zaman (*zeitgeist*) sejarah Jepang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sistem pendidikan – termasuk kurikulum pendidikan sejarah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas – kerap kali berubah. Perubahan dapat berbentuk revisi, peningkatan, bahkan secara mendasar dan radikal. Tuntutan akan perubahan tersebut, memang, sesuai dengan tuntutan serta dinamika masyarakat Jepang maupun masyarakat internasional, untuk menjawab masalah-masalah yang lahir sebagai akibat penerapan suatu sistem pendidikan tertentu. Hanya saja, setiap perubahan tidak selalu dapat menjawab setiap masalah, sebab masalah-masalah lain lahir, sebagai akibat perubahan tersebut.

Dinamika inilah yang terjadi di dalam masyarakat Jepang, sehingga masalah pendidikan sejarah menduduki proporsi tinggi

dan mendapat perhatian besar baik di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Masalah yang disinggung di atas amat luas dan tidak mungkin diuraikan secara mendalam dalam makalah ini. Oleh karena itu, permasalahan akan dipersempit hanya mengutamakan masalah pendidikan sejarah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jepang, dikaitkan dengan kontradiksi buku teks sejarah akan digunakan dalam menguraikan masalah-masalah yang bersangkutan dengan pokok bahasan antara lain, pendidikan sejarah dalam sistem pendidikan Jepang sejak zaman Meiji sampai dewasa ini. Suatu kasus penting, yaitu pengadilan yang menyangkut buku teks sejarah Jepang yang ditulis oleh ahli sejarah terkenal Prof. Ienaga Saburo, ditampilkan untuk menggambarkan dinamika menyangkut kesadaran sejarah masyarakat Jepang. Proses penyusunan, serta penyensoran buku teks sejarah di sekolah menengah Jepang juga akan diuraikan. Kontradiksi buku teks sejarah Jepang – yang berkembang sebagai masalah domestik dan masalah internasional pada tahun 1982 – juga diuraikan.

Akhirnya suatu kesimpulan dan beberapa saran akan dikemukakan tentang relevansi mengemukakan topik ini dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi dalam rangka mengembangkan pendidikan sejarah di sekolah menengah kita.

1. Pendidikan Sejarah dalam Sistem Pendidikan Jepang

1.1 Sejak Zaman Meiji sampai 1945

Empat tahun setelah Restorasi Meiji (1868), Jepang memulai sistem sekolah modern dengan diumumkannya dekrit sistem sekolah oleh Kaisar Meiji pada tahun 1872. Setahun sebelumnya, Kementerian Pendidikan didirikan dengan tugas utama merencanakan sistem sekolah dan pendidikan di Jepang. Bentuk dan model sistem sekolah di Prancis dijadikan contoh, sedangkan kurikulum pendidikan mencontoh model Amerika. Pendidikan dasar dan wajib belajar selama empat tahun menjadi perhatian utama pemerintah.

Buku-buku wajib yang digunakan di sekolah dasar pada umumnya merupakan adaptasi atau terjemahan buku-buku wajib yang digunakan di Amerika Serikat. Tujuan pendidikan jelas, adalah untuk mengejar ketinggalan Jepang khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara Barat sebagai akibat psikologis rasa takut Jepang terhadap ancaman dan dominasi Barat.

Di dalam menyusun kebijaksanaan pendidikan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimasukkan dari Barat dijadikan kurikulum utama, sedangkan pendidikan moral yang berorientasi kepada menegakkan institusi kekaisaran dijadikan pegangan utama. Dalam silabus pendidikan untuk sekolah dasar yang ditetapkan oleh menteri pendidikan pada 4 Mei 1881 dengan jelas dinyatakan bahwa pendidikan hendaknya berorientasi kepada penanaman kesadaran cinta tanah air, pengembangan pribadi yang luhur, yakni pribadi yang merupakan contoh warga negara yang baik dalam pengertian pengikut kaisar (Tenno) yang setia.¹

Buku teks sejarah, pada umumnya berorientasi kepada uraian serta telaah tentang peranan Kaisar sebagai pusat kharisma dan pusat kekuasaan politik, peranan kaum bangsawan dalam pengelolaan negara, serta perang yang membangkitkan semangat patriotisme.

Sejak dikeluarkannya *Kyoiku-rei* (Peraturan Pendidikan) pada tahun 1879, yang merupakan pengganti Sistem Sekolah (*Gakusei*) yang telah ditetapkan pada tahun 1872, maka ditetapkan bahwa campur tangan negara dalam bidang pendidikan dibatasi, dalam rangka melaksanakan sistem pendidikan yang lebih demokratis seperti yang diterapkan di Barat. Pada masa itu buku-buku pendidikan sejarah berada di luar pengawasan pemerintah, dan banyak di antaranya ditulis oleh kalangan swasta. Oleh karena itulah uraian-uraian sejarah sedikit berubah dari hanya menitikberatkan peranan kaisar, kepada peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Namun, dengan kebijaksanaan "pendemokrasian" ini pemerintah mulai menya-

dari, bahwa isi pendidikan yang terlalu berorientasi Barat khususnya dalam bidang studi sosial dan kemanusiaan bertentangan dengan esensi Restorasi Meiji yang mengutamakan sentralisasi baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun mobilisasi ideologi yang berpusat kepada kharisma kaisar.

Maka, Menteri Pendidikan Mori Arinori - yang merupakan menteri pendidikan pertama di Jepang - mengeluarkan *Gakko-rei* (Peraturan Sekolah) pada tahun 1886, yang mengatur sistem sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah guru dan Universitas Kekaisaran Tokyo². Sejak itu, orientasi pendidikan mengutamakan pemupukan semangat nasionalisme. Silabus Sekolah Dasar tahun 1881, jelas merupakan kritik serta pembalikan arah kebijaksanaan pendidikan setelah dikeluarkannya Peraturan Pendidikan tahun 1879.

Kecemasan terhadap sistem sekolah dan pendidikan yang terlalu berorientasi Barat pada mulanya dicetuskan oleh Motoda Eifu, seorang yang mempunyai pengaruh besar dalam kekaisaran. Dalam tahun 1882, Motoda menyusun buku pegangan pendidikan anak dengan judul *Yogaku Koyo*. Dalam buku ini dia menekankan pendidikan anak-anak yang harus didasarkan atas rasa kasih sayang berdasarkan ajaran-ajaran moral konfusianisme. Ide pendidikan yang dikeluarkan oleh Motoda akhirnya disusul dengan Dekrit Pendidikan oleh kaisar pada 30 Oktober 1890. Orientasi ideologi amat dominan dalam dekrit pendidikan tersebut. Dalam silabus sejarah yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan pada masa itu dinyatakan antara lain: "Dalam sejarah Jepang, yang harus diajarkan adalah makna dariapda *kokutai* (*national entity*), dan makna untuk menjadi orang Jepang"³ Sejak itu, buku-buku teks sejarah diteliti secara lebih cermat yang merupakan pegangan daripada silabus. Para pengarang sejarahpun mulai mengurangi analisis sejarah yang didasarkan atas fakta-fakta sejarah, dan kebanyakan sejarah ditulis dalam bentuk normatif, yakni menonjolkan segi moral (*shushin*), dalam rangka pembentukan "entitas nasional".⁴

Pada tahun 1903 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang buku-buku teks menyangkut: penyusunan, penerbitan dan

pendistribusian buku teks Sekolah Dasar yang harus berada di bawah pengawasan negara. Dalam peraturan tersebut dinyatakan antara lain: "Semua siswa Sekolah Dasar harus mempelajari sejarah Jepang dan menggunakan satu buku sejarah yang seragam"⁵ Sampai tahun 1907, mata pelajaran sejarah tidak menjadi mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar, pada saat mana masa wajib sekolah diperpanjang dari empat tahun menjadi enam tahun. Sistem sekolah sebelumnya 4-5-3, yakni empat tahun Sekolah Dasar, lima tahun Sekolah Menengah dan tiga tahun Sekolah tinggi.

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, sejarah diajarkan mulai dari kelas satu sampai kelas enam Sekolah Dasar, pada hal sebelumnya hanya diajarkan setelah siswa duduk di kelas empat. Pendidikan sejarah di Sekolah Menengah dan Sekolah Tinggi juga dilaksanakan berdasarkan pedoman dari pemerintah. Sejak tahun 1904 sampai tahun 1945, walaupun terjadi berkali-kali perubahan buku teks sejarah dalam bermacam-macam variasi, seperti modifikasi-modifikasi dalam penekanan dan analisis, namun esensi ideologik serta pengawasan pemerintah didalam penyusunan, penerbitan dan pendistribusian buku teks sejarah tersebut tidak berubah. Dengan lain kata, keseragaman, sentralisasi dan ideologi *Tennoisme* merupakan semangat dasar dari pendidikan dan buku teks sejarah sejak zaman Meiji sampai tahun 1945. Pendidikan yang dirancang untuk modernisasi dan 'menantang' ancaman kekuatan imperialisme Barat, akhirnya membuahkan pendidikan yang berhasil membawa Jepang sederajat dengan negara-negara Barat yang pada mulanya merupakan "guru"nya.

1.2. Sesudah tahun 1945

Sejak Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945 selama tujuh tahun negeri itu berada di bawah pendudukan tentara sekutu, khususnya Amerika Serikat. Perubahan radikal dan mendasar dalam bidang pendidikan baru dilaksanakan pada masa pendudukan tersebut. Ide pembaharuan pendidikan dilaksanakan secara paksa oleh penguasa pendudukan, berdasar-

kan laporan Misi Pendidikan Amerika Serikat yang mengunjungi Jepang dalam bulan Maret 1946. Walaupun misi ini hanya mengunjungi Jepang dalam tiga minggu, namun berdasarkan laporan mereka penguasa pendudukan berhasil menetapkan sistem pendidikan baru yang dikenal dengan sistem 6-3-3-4, yakni enam tahun pendidikan Sekolah Dasar, tiga tahun Sekolah Menengah Pertama, tiga tahun Sekolah Menengah Atas dan empat tahun "college" (universitas setingkat Program S₁ di Indonesia). Tujuan utama yang menjadi sasaran pembaharuan sistem pendidikan adalah "pendemokrasian" di bidang pendidikan. Pembaharuan tersebut berjalan dengan amat cepat walaupun beberapa anggota Komite Pembaharuan Pendidikan tidak seluruhnya setuju dengan sistem baru tersebut. Komite Pembaharuan Pendidikan terdiri atas orang-orang Jepang, dibentuk pada bulan Agustus 1946, dan berada di bawah pengawasan penguasa pendudukan. Jelaslah, ide pembaharuan pendidikan berdasarkan konsep penguasa pendudukan.

Sebagai realisasi pembaharuan pendidikan tersebut, maka pada bulan Maret 1947 pemerintah menetapkan Undang-undang Pokok Pendidikan dan Undang-undang Pokok Sekolah. Pada tahun 1952 bertepatan dengan berakhirnya masa pendudukan Amerika seluruh pembaharuan pendidikan telah selesai dilaksanakan dan secara seragam dilaksanakan di seluruh negeri.

Sejak bulan Oktober 1945 penguasa pendudukan telah ikut merencanakan untuk mengganti buku teks sejarah Jepang yang digunakan sampai saat itu. Buku teks sejarah yang berorientasi kepada sistem kekaisaran yang telah membawa Jepang ke jalan ekspansionis militeristik dilarang, sementara buku teks baru yang berorientasi perdamaian dan demokrasi ditulis sebagai penggantinya.

Buku teks sejarah - sejak itu - ditulis oleh pihak swasta, dengan rekomendasi dan surat keterangan pemerintah. Hal ini ditempuh agar ideologi *Tennoisme*, serta indoktrinasi-indoktrinasi nasionalisme dan militerisme dapat dicegah. Kebijakan ini dilanjutkan terus oleh menteri pendidikan walaupun masa pendudukan telah berakhir.

Mekanisme penyusunan buku teks adalah sebagai berikut.⁶ Menteri pendidikan menyiapkan buku penuntun bidang-bidang studi atau mata-mata pelajaran yang harus diberikan di setiap tingkatan, sesuai dengan umur masing-masing tingkatan siswa Materi serta pokok-pokok bahasan yang harus dirangkum juga dijelaskan secara rinci dalam buku tuntunan tersebut. Kemudian para sejarawan - baik perorangan maupun kelompok - guru-guru sejarah, maupun ahli-ahli ilmu sosial dan humaniora menulis naskah kemudian mengajukannya ke suatu penerbit. Keterlibatan para ahli ilmu sosial dalam penyusunan buku teks sejarah ini, karena mata pelajaran sejarah berada di bawah sub judul ilmu-ilmu sosial.

Setiap akhir tahun, biasanya dalam bulan Nopember dan Desember, para penerbit mengajukan naskahnya kepada menteri pendidikan, dan menteri melimpahkannya kepada lima orang pembaca yang dipilih dari para ahli sejarah dan pendidikan. Orang-orang ini bertanggung jawab terhadap kurikulum dan menentukan segala persyaratan yang harus dipenuhi di dalam kurikulum. Mereka kemudian memberikan penilaian terhadap naskah-naskah yang telah diteliti, apakah condong atau memberikan bias terhadap suatu ideologi, agama, maupun politik; atau apakah sesuai dengan jiwa Undang-undang Pokok Pendidikan. Pendeknya naskah harus menonjolkan internasionalisme, perdamaian dan demokrasi. Pembaca tidak mengetahui naskah siapa yang dibacanya, dan keputusannya dilaporkan secara anonim.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh sebuah komite yang beranggotakan 16 orang. Komite ini pun ditunjuk oleh menteri pendidikan. Merekalah yang memutuskan apakah suatu naskah diterima atau ditolak. Mereka merupakan pemutus akhir, apabila terjadi perbedaan dan ketidaksepakatan yang tajam di antara para pembaca atau penilai sebelumnya.

Apabila naskah diterima, maka penerbit dapat mendaf-tarkan naskahnya sebagai buku teks yang akan diterbitkan.

Sebelum dicetak penerbit harus membuat seribu buah kopi untuk contoh yang akan dipamerkan di seluruh Jepang, yang biasanya dilaksanakan dalam akhir bulan Juni dan bulan Juli, bertepatan dengan liburan panjang musim panas. Utusan-utusan atau dewan pengurus masing-masing sekolah mengunjunginya pameran tersebut, kemudian memilih buku-buku teks yang dianggap cocok, dan memesan kepada penerbit. Barulah kemudian penerbit mencetak buku tersebut disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Kondisi ini akhirnya menunjang suatu gairah penulisan naskah sejarah di satu pihak dan menempatkan buku teks sebagai suatu bisnis yang mendatangkan keuntungan secara pasti. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1955 saja sebanyak 72 buah penerbit buku teks mencetak lebih dari 230 juta eksemplar buku teks ilmu-ilmu sosial.⁷ Sejarah, geografi dan ilmu ketatanegaraan merupakan bagian dari bidang ilmu-ilmu sosial di dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Mekanisme penyusunan buku teks macam ini ternyata menimbulkan masalah yang cukup pelik di dalam masyarakat Jepang. Sasaran utama *Kyokayo Toshō Kentei Chōsa Shingikai* (Badan Sensor Buku Teks) adalah untuk mencegah pemikiran-pemikiran nasionalisme radikal, tennoisme, militerisme dan fasisme yang menjadi bahasan utama dalam buku teks sejarah sebelum perang. Badan sensor yang beranggotakan 16 orang dan dibantu oleh sekitar 600 orang guru-guru sekolah menengah termasuk di dalamnya para guru besar dan kaum intelektual, ternyata merupakan awal kontradiksi. Badan Sensor Buku Teks yang didirikan pada tahun 1950 tersebut, disinyalir, bahwa para anggotanya maupun guru-guru yang ikut di dalamnya telah "menyebarkan" pemikiran-pemikiran dan ideologi 'Marxisme' tambahan pula badan tersebut telah didominasi oleh *Nikyōshō Nihon Kyōshokumin Kumiai* atau Perserikatan Guru-guru Jepang, selanjutnya PGJ). PGJ adalah perserikatan guru-guru seluruh Jepang yang didirikan pada tahun 1952, dan dikenal beraliran "Marxis".

Sekelompok politikus dari partai konservatif LDP (*Liberal Democratic Party*), yang merasa prihatin terhadap isi buku teks tersebut mulai menyerang cara penyusunan, penyensoran dan isi buku teks, yang mereka katakan telah "meracuni" mental para siswa dan "mengurus" uang saku orang tua murid. Kritik ini muncul dalam bulan Agustus 1955 dalam sebuah pamflet berjudul: "*Urcubeki Kyokasho no Mondai*" ("Masalah Buku Teks yang Menakutkan"). Pamflet ini dirancang oleh suatu komisi dalam partai kemudian diajukan ke parlemen (*diet*), dan akhirnya menjadi pokok perdebatan yang sengit di dalam masyarakat. Sasaran lain dari pamflet ini adalah menyerang PGJ yang telah amat berperan dalam penyusunan buku teks tersebut.

Kelompok dalam LDP tersebut akhirnya mengajukan suatu rancangan undang-undang yang isinya menghendaki perubahan atau amandemen terhadap peraturan Badan Sensor Buku Teks. Namun, rancangan ini tidak diterima sebagai undang-undang, akibat penolakan anggota-anggota *diet* dari Partai Sosialis Jepang yang mendominasi parlemen pada tahun 1956. Menteri pendidikan yang lebih memihak dengan rancangan undang-undang tersebut, akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah yang menetapkan perubahan badan sensor Buku Teks, dengan cara memperbanyak anggota Badan Sensor dari 16 orang menjadi 80 orang (90 orang pada tahun 1970), di mana anggota-anggota baru tersebut kebanyakan berasal dari kelompok birokrat. Para penyensor yang baru adalah para pegawai Kementerian Pendidikan dengan jumlah 15 orang pada tahun 1956 dan 40 orang pada tahun 1970.⁸

Mekanisme penyensoran buku teks sejak pertengahan 1970 adalah sebagai berikut: Setiap naskah dinilai oleh dua orang pejabat Kementerian Pendidikan dan tiga orang penilai tidak tetap yang terdiri atas dua orang guru dan seorang ahli dari setiap bidang. Kemudian naskah dikirimkan kepada ketiga penilai tidak tetap tersebut, tanpa menyebutkan pengarang atau calon penerbit naskah tersebut. Pendapat mereka secara tertulis diperlukan oleh kementerian dalam rangka memper-

siapkan rekomendasi yang akan dikirimkan kepada Badan Sensor Buku Teks. Badan Sensor inilah kemudian menetapkan apakah suatu naskah diterima atau ditolak, beserta kondisi-kondisi atau alasan-alasan suatu naskah ditolak atau diterima sebagai buku teks.

Standar yang harus dipenuhi dalam buku teks adalah, pertama isi keseluruhan naskah tidak menyimpang dari Undang-Undang Pokok Pendidikan (*Kyoiku Kihonho*) dan Undang-Undang Pendidikan Sekolah (*Gakko Kyoikuho*)⁹. Syarat-syarat lainnya antara lain, kecermatan dan ketetapan, ketetapan pemilihan isi, penyesuaian dengan sekolah dari berbagai wilayah, proporsi dan keseimbangan isi dan bahasan, keorisinalan naskah, dan mutu pencetakan dan penjilitan. Setiap naskah ditetapkan mempunyai jumlah angka penilaian 1000. Apabila 800 nilai dapat dikumpulkan, maka naskah akan lulus sensor, sehingga dapat dicetak sebagai buku teks.

Biasanya sebagian besar naskah lulus sensor, dengan syarat ada perbaikan redaksional, atau revisi isi. Naskah yang tidak lulus, dikembalikan kepada penulisnya dengan komentar-komentar tertentu dan contoh-contoh "cacat" yang ditemui oleh team penilai. Banyak di antara naskah yang tidak lulus sensor ini hanya cocok digunakan sebagai buku referensi. Pengarang yang menerima saran-saran team penilai biasanya memperbaiki naskahnya, sehingga lulus sensor. Di tingkat proses ini biasanya terjadi tawar menawar atau negosiasi antara pengarang, penerbit dan kementerian. Penerbit, berkepentingan sekali agar naskah dapat diterbitkan sebagai buku teks, sebab menerbitkan buku teks berarti menjalankan suatu bisnis dngn keuntungan yang telah pasti.

Berdasarkan mekanisme sensor inilah kemudian muncul masalah besar, yang bermula dari penolakan Prof. Ienaga Saburo terhadap keputusan Badan Sensor Buku Teks, yang menyarankan agar merevisi buku teks yang ditulisnya. Prof. Ienaga adalah seorang ahli sejarah terkemuka Jepang dari Universitas Pendidikan Tokyo, yang telah menulis buku teks sejarah

Jepang *Shin Nihonshi* (Sejarah Jepang Baru) untuk siswa Sekolah Menengah Atas. Buku tersebut terbit pertama kali pada tahun 1953, dan merupakan buku laris dan digunakan secara luas di Sekolah Menengah Atas seluruh Jepang. Pada tahun 1970 saja buku tersebut dibaca oleh lebih dari 100.000 orang siswa Sekolah Lanjutan Atas pada 580 buah sekolah, dan menduduki rangking ketiga dalam hal jumlah penjualan.¹⁰

Sistem sensor sesungguhnya melahirkan kondisi persaingan yang amat ketat di kalangan akademik dan penerbit, sebab persyaratan mutu yang amat ketat dari kementerian dan lembaga-lembaga dari mana para pengarangnya berasal juga mempertahankan mutu akademik yang amat tinggi. Namun demikian, dalam hal masalah buku teks sejarah Jepang, masalah-masalah politik dan ideologi – di samping mutu keilmiah – nampaknya merupakan masalah yang lebih dominan.

Pengadilan Buku Teks Sejarah, Kasus Prof. Ienaga Saburo¹¹

Pada tahun 1963, yakni sepuluh tahun setelah buku teks sejarah yang ditulis oleh Ienaga diterbitkan, merupakan tingkatan lain dari pada masalah buku teks sejarah. Buku teks yang direvisi oleh Ienaga, tidak lulus sensor di kementerian karena adanya keraguan terhadap "keakuratan" isi sebanyak 323 butir di beberapa bagian dan halaman bukunya. Ketidakakuratan ini diakibatkan karena tidak sesuai dengan Buku Penuntun Dasar Penyusunan Buku Teks untuk Sekolah Menengah Atas yang mulai diterapkan secara lebih ketat pada tahun 1960.

Revisi buku teks Ienaga dilakukan dalam rangka pelaksanaan peraturan baru tersebut. Penerbitnya, Sanseido, mengajukan hasil revisi tersebut pada 15 Agustus 1962 kepada kementerian, untuk memperoleh pengesahan. Penolakan pengesahan disampaikan pada 12 April 1963, berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh hanya 784, pada hal jumlah nilai minimal yang mesti diperoleh adalah 800 dari 1000 nilai yang telah ditentukan oleh Badan Sensor Buku Teks. Setelah diadakan revisi lagi, Senseido mengajukannya lagi kepada Badan Sensor Buku Teks

pada 30 September 1963, dan Badan Sensor menerima revisi tersebut dengan beberapa syarat "perbaikan" Badan Sensor memberi nilai 846 untuk buku teks yang telah direvisi tersebut, suatu angka yang cukup melebihi dari ketentuan minimal 800 sebagai syarat lulus sensor, namun masih diajukan saran untuk memperbaiki atau mengubah sekitar 290 butir di beberapa halaman-halaman tertentu. Pada perbaikan pertama Ienaga hanya memperbaiki sekitar 17 butir dari 323 butir yang disarankan oleh Badan Sensor Buku Teks.

Pada 12 Juni 1965, Ienaga mengadakan masalah sensor ini ke Pengadilan Distrik Tokyo dan menuntut kepada Kementerian Pendidikan ganti rugi sebanyak 1.000.000,- atau kira-kira AS\$ 2.777,- sebagai ganti rugi terhadap tekanan mental, dan 875,758 (AS \$ 2.500) sebagai ganti rugi (royalti) akibat penundaan pencetakan buku tersebut. Dengan sistem sensor tersebut, Ienaga menuduh kementerian telah melanggar Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 19 menyangkut kebebasan berpikir pasal 21 menyangkut kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik (pasal 23), dan hak anak-anak untuk menuntut pendidikan (pasal 26). Pengadilan Distrik Tokyo tidak memberikan keputusannya sampai pertengahan 1974.

Yang dipersoalkan di dalam buku teks tersebut antara lain : Setiap zaman dilengkapi dengan ilustrasi dengan judulnya¹². Setiap judul berbunyi, "Rakyat Yang Mendukung Sejarah"¹³ atau istilah-istilah yang sukar diterjemahkan, seperti : "Rakyat yang merupakan tulang punggung, dimana sejarah bu-ruh dibangun". Sebagai contoh, ilustrasi pada Zaman Tokugawa dengan gambar para petani menyerahkan padi kepada penguas tanah yang terdiri dari atas samurai, dengan judul ilustrasi sebagai berikut : "Ini adalah tenaga kerja produktif petani yang mendukung masyarakat feodal"¹⁴ Yang menjadi keberatan Badan Sensor adalah istilah "mendukung" yang amat sukar dipahami oleh para siswa. Keberatan yang lainnya adalah ilustrasi yang hampir sama jensinya, seperti : Kaum buruh di pabrik

besi, pada zaman Meiji,¹⁵ dan ilustrasi sejenisnya. Oleh badan sensor ilustrasi maupun judul-judulnya dipandang berat sebelah, hanya menonjolkan segolongan masyarakat yang merupakan tulang punggung sejarah, dan mempunyai kecenderungan tertentu. Atau dengan kata lain, pernyataan Ienaga tidak obyektif, karena hanya menonjolkan kaum tani dan kaum buruh yang merupakan "pembentuk" sejarah.

Masalah lain yang dipersoalkan oleh badan sensor adalah alinia yang menyangkut asal-usul kaisar Jepang yang berbunyi: "*Subete, Koshitsu ga Nihon o tochi suru iware o seitoka suru tame ni koso sareta monogatari de aru*" (Semua mitologi Jepang yang ditulis pada zaman dulu disusun hanya dengan tujuan untuk memperkuat legitimasi kaisar Jepang setelah keturunan kaisar berhasil mempersatukan Jepang, terjemahan bebas, pen)¹⁶. Seperti diketahui, menurut mitologi kaisar Jepang berasal dari keturunan Dewa Matahari. Ienaga, dalam pembelaannya menyatakan bahwa ia tidak mau memasukkan "dongeng" dalam penulisan sejarah modern.

Alinia yang juga dipermasalahkan dalam buku Ienaga adalah menyangkut "Perjanjian Non Agresi Rusia-Jepang" yang ditandatangani pada tahun 1941. Alinia tersebut berbunyi: "*1945 shigatsu Nanshin Taisei o kyoka suru tamo, Nihon wa Nisso Churitsu Joyaku o musunda*" ("Untuk memperkuat posisi Jepang maju ke selatan, dalam bulan April 1941 Jepang menanda tangani Perjanjian Non Agresi dengan Rusia").¹⁷ Badan sensor menginginkan penambahan kalimat, "atas usul Uni Soviet". Ienaga, menolak dan menginginkan kalimatnya tidak diubah.¹⁸

Selama masa pengadilan, para ahli diikutsertakan sebagai saksi ahli. Pendapat para ahli yang diumumkan pada tanggal 24 September 1969, berpihak kepada Ienaga, dengan 17 suara mendukung Ienaga dan 14 suara mendukung Kementerian Pendidikan, dari para saksi ahli. Akhirnya dalam keputusan pengadilan pada bulan Juli 1970 Pengadilan Distrik Tokyo membenarkan tuduhan Ienaga menyangkut masalah pasal-pasal Un-

dang-Undang Dasar, dan menentukan batas-batas cara pelaksanaan penyensoran buku teks. (Keputusan Sugimoto).

Beberapa tuduhan Ienaga terhadap Kementerian Pendidikan antara lain, "Ahli, kata Ienaga, harus bebas secara penuh untuk menulis dan mempublikasikan buku teks, dan guru-guru Sekolah Menengah Pertama atau guru-guru Sekolah Menengah Atas harus bebas memilih buku teks yang mereka perlukan dan menetapkan kurikulum sekolah secara rinci".¹⁹

Pengadilan Distrik Tokyo, dengan hakim Sugimoto Ryo-kichi sebagai ketua, menetapkan, bahwa hak konstitusional dalam pendidikan pada negara sebagai alat, dan bahwa sistem penilaian buku teks seharusnya tidak melanggar kebebasan akademik dan kebebasan menyatakan pendapat. Sistem penyensoran buku teks itu sendiri tidak melanggar hukum, tetapi menjadi tidak sah secara hukum di dalam pelaksanaannya, apabila seperti keadaan akhir-akhir ini, di mana Kementerian melibatkan dirinya dengan isi substantif buku, dan mencampuri kebebasan pengarang dan penerbit.²⁰ Keterlibatan kementerian dalam penyusunan buku teks harus dibatasi hanya pada kesalahan-kesalahan teknis seperti salah tulis atau cetak, bentuk buku, keseimbangan halaman dan penjilidan. Penilaian yang melebihi skrining atau sensor ide, adalah tidak sah dan tidak konstitusional.²¹ Dengan demikian, keputusan Sugimoto telah memihak kepada Prof. Ienaga Saburo, dan kementerian tidak puas dan menyatakan bahwa tidak akan diadakan perubahan dalam sistem, penilaian buku teks, dan selanjutnya kementerian naik banding ke Pengadilan Tinggi Tokyo.

Akan tetapi, pada tanggal 16 Juli 1974, hakim Takatsu Tamaki mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan keputusan Sugimoto, dan menyatakan bahwa di bawah negara demokrasi parlementer negara adalah merupakan wadah untuk mendidik.²² Inti pernyataan hakim Takatsu dapat diringkas sebagai berikut:

"Selama negara dipercaya oleh rakyat yang mengutamakan kesejahteraannya, dengan tanggung jawab untuk mema-

jukan administrasi pendidikan, batas kekuasaannya tidak berakhir secara singkat dengan pembentukan dan pengawasan kondisi eksternal daripada pendidikan itu tetapi juga dapat diperluas ke dalam isi pendidikan.”²³

Dengan demikian, sistem penilaian atau pengawasan buku teks tidak melanggar pasal 26 Undang-Undang Dasar. Kebebasan akademik menurut pasal 23 Undang-Undang Dasar tidak meliputi kebebasan pendidikan di sekolah:

”Di universitas atau di lembaga pendidikan tinggi lain dan di lembaga penelitian, kebebasan guru besar dan kebebasan pendidikan termasuk di dalam kebebasan akademik; (tetapi kebebasan pendidikan di tingkat pra universitas mempunyai batas-batas tertentu) Sebaliknya ’kesatuan penelitian dan guru besar’ amat diperlukan di pendidikan tinggi seperti universitas, di lembaga pendidikan ditingkat lebih rendah, tujuan pendidikan adalah pendidikan biasa untuk anak-anak yang sesungguhnya belum terbentuk secara cukup, baik di dalam pikiran dan daya ingat maupun dalam raganya, dan oleh karena itu standarisasi amat diperlukan, dalam batas-batas yang cocok, dalam rangka menjaga dan mempertinggi standar pendidikand, kesamaan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, dan sebagainya.....”²⁴

Oleh karena itu, ”Adalah tidak mungkin” untuk menilai buku teks ”secara cukup” tanpa menilai isinya. Memang pengadilan juga mengakui bahwa kebebasan menyatakan pendapat adalah amat dasar dalam sistem demokrasi, dan bahwa sistem penyusunan buku teks sebelum perang tidak dapat disangkal adalah merupakan bagian dari sistem pengawasan berpikir yang digunakan untuk menyeragamkan pendidikan demi tujuan-tujuan politik, dan bahwa konflik-konflik ideologi menyangkut teori-teori sejarah didasarkan atas penilaian-penilaian kontroversil teks.

Keputusan hakim Takatsu tidak memuaskan Ienaga, dan oleh karena itu Ienaga naik banding ke Pengadilan Tinggi Tokyo. Perdebatan tentang buku teks akhirnya semakin besar

dan terpola ke dalam kutub-kutub yang memihak Prof. Ienaga Saburo dan Kementerian Pendidikan, baik di masyarakat umum atau akademik.

Tanggal 20 Desember 1975 Pengadilan Tinggi Tokyo dengan hakim Azegami Eiji sebagai ketua membatalkan tuntutan naik banding Kementerian Pendidikan melawan keputusan Sugimoto. Hakim mendukung keputusan Sugimoto.

Dalam keputusan pada tanggal 8 April 1982, hakim Nakamura mengeluarkan keputusannya yang membenarkan Ienaga sebagai pengarang buku untuk melawan kementerian yang telah tidak menyetujui alinia-alinia kontroversil di dalam buku Ienaga. Pengadilan juga menyarankan agar pengadilan buku teks Ienaga dianggap sebagai suatu kekecualian. Keputusan pengadilan yang pasti menyangkut perkara pengadilan buku teks Ienaga belum membuahkan suatu keputusan hukum yang pasti. Sejarah dengan masalah pengadilan buku teks sejarah, maka dalam bulan Juli 1982 masalah buku teks sejarah Jepang, bukan hanya menjadi masalah nasional, namun meluas ke negara-negara lain, khususnya ke Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, Korea Utara, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Masalah Buku Teks Sejarah pada tahun 1982²⁵

Kontroversi buku teks sejarah Jepang pada tahun 1982, telah bermula pada tahun 1981, ketika Partai Liberal Demokrat (LDP) mengadakan kampanye untuk merevisi sekitar 100 buah buku teks yang diterbitkan oleh lima buah penerbit. Kampanye ini segera disambut dengan bermacam-macam tanggapan, diantaranya, sejumlah 40 orang penulis, pelukis dan penyunting buku teks anak-anak yang bernaung di bawah organisasi Asosiasi Sastra dan Seni untuk Anak-anak, mengadakan protes keras terhadap itikad 'politik' LDP. Akhirnya puncak kontradiksi meletus dalam bulan Juli 1982.

Dalam bulan Juli 1981 menteri pendidikan – dalam rangka mempersiapkan buku teks tiga tahunan periode 1983-1986

telah memberitahu bahwa para pengarang buku teks untuk Sekolah Menengah Atas dan para penerbit agar "mengendorkan" pendekatan serta uraian mereka menyangkut akibat-akibat Perang Dunia II bencana mengerikan bom atom, gangguan-gangguan serius menyangkut kesehatan dan lingkungan akibat pencemaran industri, korupsi-korupsi politik dan lain-lain. Penekanan diharapkan pada patriotisme, pengakuan secara konsitusional Pasukan Bela Diri Jepang, perlakuan yang seimbang antara kapitalisme dan sosialisme Marxis, dan pentingnya pembangunan kekuatan nuklir secara aman.²⁶

Dalam bulan Juni 1982 menteri pendidikan mengumumkan di depan konferensi pers contoh buku teks yang akan digunakan dalam periode 1983-1986. Beberapa contoh revisi, kemudian dimuat oleh surat kabar *Asahi* dalam penerbitannya tanggal 26 Juni 1982. Terminologi-terminologi sejarah yang dianggap terlalu keras, antara lain: "ketika Angkatan Perang Jepang mengadakan agresi (invasi) ke Cina Utara", diganti menjadi "Ketika Angkatan Perang Jepang maju (masuk) ke Cina Utara. Dengan kata lain istilah *shinryaku* (agresi atau invasi) diganti dengan istilah *shinshutsu* (maju atau masuk).

Di dalam buku referensi sejarah Jepang amat banyak dijumpai terminologi-terminologi yang berbeda menyangkut masalah yang sama. Seperti terminologi untuk kolonisasi (*shokuminchika*) terhadap Korea dan Cina, digunakan terminologi *gappei* (penggabungan), atau *godo* (asimilasi). Istilah-istilah yang "menghaluskan" atau "melemahkan" terminologi-terminologi sejarah Jepang kebanyakan ditulis oleh para sejarawan yang berorientasi Jepang atau sejarawan nasionalis ekstrim.

Terminologi-terminologi penghalusan inilah yang membangkitkan amarah di Republik Rakyat Cina, Korea maupun negara-negara Asia Tenggara, dan rakyat di negara-negara tersebut merasa cemas dan curiga terhadap kebangkitan kembali militerisme Jepang yang telah membawa korban dan bencana di negara mereka sebelum dan semasa Perang Dunia II. Cina bahkan mengritik cara Jepang di dalam proporsi penulisan

agresi Jepang yang terkenal dengan Peristiwa Manchuria pada 18 September 1931, dan pembantaian Nanking pada tahun 1937 yang menelan korban 190.000 orang rakyat Cina. Di Korea juga muncul kritik yang sejenis dan menyatakan Jepang menghina Gerakan Kemerdekaan Korea pada 1 Maret 1919, sebagai pemberontakan rakyat Korea.

Di Jepang sendiri, muncul pendapat yang menyatakan bahwa penulisan buku teks sejarah Jepang adalah masalah dalam Negeri Jepang, dan kritik-kritik dari luar dianggap sebagai mencampuri urusan pendidikan di dalam Negeri Jepang sendiri. Pendapat ini sedikitnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.

Untuk meredakan ketegangan yang tidak menguntungkan ini maka Pemerintah Jepang secara resmi mengeluarkan pernyataan menyangkut kontradiksi buku teks, pada tanggal 26 Agustus 1982. Salah satu pernyataan tersebut berbunyi antara lain:

"Pemerintah dan rakyat Jepang secara mendalam menyadari bahwa tindakan-tindakan Jepang di masa lalu telah mengakibatkan malapetaka dan telah melukai rakyat-rakyat di Korea, Cina dan rakyat di negara-negara Asia lainnya, dan kami telah memulai dan membuka jalan perdamaian dan sebagai penyesalan dan ketetapan bahwa kejadian-kejadian macam itu tidak akan terulang lagi" ²⁷

Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah kontradiksi buku teks di Jepang bukan semata-mata masalah pendidikan, tetapi lebih dari itu adalah masalah politik dan ideologi, yang muncul ke permukaan dan tenggelam lagi, sejalan dengan perkembangan-perkembangan dunia di sekeliling Jepang. Dan, sesungguhnya esensi masalah buku teks tersebut masih mempunyai warna sejenis dengan masalah buku teks Jepang sebelum perang.

Kesimpulan

Relevansi mengemukakan topik ini adalah, masalah pendidikan dan buku teks — khususnya sejarah Jepang — merupa-

kan masalah yang amat pelik. Menangani masalah pendidikan yang pada hakekatnya menangani pertumbuhan manusia dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dengan suatu pertanyaan yang amat dasar yakni, "Sejauh mana perencanaan dan sasaran pendidikan dapat menjawab masalah-masalah yang tumbuh di dalam masyarakat, atau masalah-masalah apa yang lahir akibat kebijaksanaan suatu sistem pendidikan yang diterapkan dalam suatu kurun waktu tertentu?" Kurikulum – yang diwujudkan dalam buku teks kiranya akan merupakan penjabaran-penjabaran yang lebih terperinci di dalam menerapkan sistem pendidikan tersebut.

Pendidikan yang dirancang dalam rangka pemikiran di atas akan mempunyai dinamika tersendiri sebagai akibat perkembangan serta dinamika masyarakat. Masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang mempunyai dinamika. Semakin sering suatu kurikulum pendidikan diubah, direvisi, bahkan dirombak secara radikal, menandakan semakin pelik masalah-masalah yang lahir dalam masyarakat. Uraian di atas menunjukkan bagaimana peliknya masalah pendidikan tidak henti-hentinya merancang, mengoreksi, bahkan merombak kurikulum pendidikan walaupun melalui perdebatan-perdebatan yang amat sengit.

Esensi pendidikan Jepang yang dijabarkan dalam kurikulumnya, adalah senantiasa dikaitkan dengan pembangunan bangsanya. Pendidikan sejarah dalam konteks pembangunan bangsa mempunyai peranan yang teramat penting, karena sejarah merupakan cermin suatu generasi di dalam menanggapi dan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itulah, suatu generasi mewariskan suatu nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tertentu itu ada yang masih cocok dan berguna untuk menangani masalah-masalah baru yang timbul, atau masalah-masalah lama dalam esensi yang baru. Oleh karena itulah pendidikan sejarah teramat penting untuk mengungkapkan nilai-nilai yang pernah ada atau yang masih hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai itu ada kalanya harus dikembangkan dan di-

pupuk terus karena telah teruji di dalam memecahkan atau mengatasi masalah-masalah pelik suatu bangsa. Nilai-nilai itu ada yang lahir akibat suatu mobilisasi ideologik, atau pandangan pemikiran dan politik tertentu.

Isi dasar pendidikan sejarah di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Jepang sejak zaman Meiji sampai dengan tahun 1945, memiliki dua esensi yang amat menentukan perkembangan bangsa tersebut. Pertama, esensi filosofis ideologik yang berpusat pada ideologi Tennoisme, dan kedua esensi praktis yang berpusat pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang bertujuan mengembangkan semangat patriotisme, nasionalisme, pendidikan moral yang bersumber kepada Tennoisme, dan kurikulum yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu alam, fisika dan lain-lain, merupakan inti-inti utama isi kurikulum. Pendidikan sejarah, terutama diberikan dalam rangka mengembangkan esensi pertama isi dasar pendidikan Jepang.

Esensi pendidikan seperti disebutkan itulah yang menyebabkan Jepang dapat mengejar kemajuan yang telah diperoleh negara Barat, bahkan menyamainya. Kemajuan ilmu dan teknologi yang dibarengi dengan pendidikan ideologi, membawa Jepang ke dalam perkembangan negara fasis militeristik yang berpusat kepada ideologi Tennoisme, dan mengalami kehancurannya pada tahun 1945. Walaupun sebagai struktur negara ideologi Tennoisme telah dihancurkan, namun sebagai ideologi dan pemikiran sosial ideologi tersebut masih belum lenyap dari masyarakat Jepang. Oleh karena itulah pendidikan sejarah di dalam sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tetap diwarisi oleh pengembangan bias-bias ideologi, terutama ideologi demokrasi di satu pihak dan kepentingan akan ideologi "lama" di pihak lain. Kontradiksi menyangkut buku teks pelajaran sejarah Jepang menjadi semakin ruwet, karena "politik" ikut campur tangan dalam merencanakan kurikulum pendidikan tersebut. Memang pendidikan di Jepang dirancang untuk pernah netral dari bias-bias politik dan ideologi.

Untuk mengembangkan pendidikan sejarah di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui sejarah pengembangan pendidikan sejarah di negeri lain – termasuk Jepang – karena secara tidak langsung kita akan dapat memetik pelajaran yang bermanfaat daripadanya. Yang teramat penting diperhatikan adalah kondisi masyarakat Indonesia dan perkembangan-perkembangan internasional yang amat pesat. Indonesia harus mampu menciptakan sistem pendidikan – yang didukung oleh kurikulumnya – yang mampu mengikuti perkembangan ilmu teknologi dan yang semakin kompleks dan canggih. Di samping itu, pendidikan yang mempunyai esensi pengembangan identitas nasional yang ber-sumber pada ideologi Pancasila, harus dikembangkan, dengan proporsi yang sesuai dengan umur, perkembangan daya tangkap, penalaran dan perkembangan raga anak didik. Oleh karena itu "kebebasan akademik" – seperti yang menjadi polemik di Jepang – belum saatnya diberikan di Sekolah Dasar, terutama di Sekolah Menengah, karena kondisi masyarakat Indonesia belum siap ke arah itu.

Masalah-masalah praktis yang ingin direkomendasikan di sini berdasarkan masukan seperti diuraikan dalam makalah ini antara lain:

1. Sudah saatnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan secara konsepsional isi pengajaran sejarah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, di mana keseragaman terhadap pengertian identitas nasional dan ideologi nasional harus menjadi inti dasarnya.
2. Mekanisme penyusunan buku teks sejarah secara terpadu artinya melibatkan para ahli dalam bidangnya masing-masing, para pendidik dan departemen yang menangani pendidikan – merupakan kebutuhan yang mendesak. Sudah saatnya penyusunan buku teks tidak dilaksanakan secara "pesanan".

3. Petunjuk dan pedoman terperinci menyangkut peristiwa-peristiwa dan episode-episode sejarah yang boleh dimasukkan ke dalam buku teks, merupakan kebutuhan mutlak. Petunjuk dan pedoman inipun harus disusun secara terpadu oleh pihak-pihak seperti disebutkan dalam butir dua di atas.
4. Suatu Dewan atau Badan Penilai Buku Teks yang beranggotakan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu dibentuk, dan tugas badan ini adalah disamping merencanakan kurikulum pendidikan sejarah adalah mengadakan penilaian terhadap buku teks sejarah yang akan digunakan.
5. Untuk menggalakkan penelitian dan penulisan sejarah, maka para ahli, intelektual dan pendidik, baik secara perorangan maupun kelompok dapat menulis buku teks sejarah. Layak atau tidaknya naskah mereka sebagai buku teks, harus mendapat persetujuan dari Badan Penilai Buku Teks dan disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi naskah yang tidak lulus dalam penilaian, dapat dipertimbangkan untuk dicetak sebagai buku referensi. Kondisi macam ini akan melahirkan dan mendorong semangat kompetisi untuk menghasilkan karya terbaik, dan penerbit dapat berpartisipasi untuk menerbitkan buku-buku terbaik. Buku referensi amat perlu, untuk mengimbangi kejenuhan guru sejarah, dan memperluas wawasan dan pengetahuan sejarahnya.
6. Terakhir, perlu dipikirkan suatu Undang-undang Pendidikan yang di dalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur kurikulum dan buku teks.

Mudah-mudahan makalah singkat dan rekomendasi ini ada manfaatnya bagi pengembangan pendidikan sejarah di Indonesia.

DAFTAR CATATAN

1. Mengenai sistem dan isi pendidikan di Jepang baca antara lain:
John Caiger, "The Aims and Content of School Courses in Japanese History, 1872-1945", *Monumenta Nipponica*, Meiji Centenary Issue, 1968, h. 51-81.
Tamura Eiichiro, "A sosio-historical approach to educational system in Japan; 1872-1964" dalam: *Bulletin of Tokyo Gakugei University*, vol. 23, 1971.
Robert H. Gehard, "Some observation on the Japanese education system", dalam: *The Literary and Economic Association Review*, Tohoku Gakuin University, No. 24, h. 1-16, 1956 Makoto Aso dan Ikuo Amano, *Education and Japan's Modernization*, (Tokyo; The Japan Times, Ltd., 1983).
2. Akio Yasuoka, *The Modern History of Japan*, (Tokyo: The International Society for Educational Information, Inc., 1978), h. 18-28.
3. Lawrence Ward Beer, *Freedom of Expression in Japan, A Study in comparative law, politics, and society*, (Tokyo: Kodansha International, Ltd., 1984), hl. 256.
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*

6. Marius B. Jansen, "Education, Values, and Politics in Japan" dalam: Jon Livingston, dkk., (ed.), *Postwar Japan, 1945 to the Present*, (New York: Pantheon Books, 1973), h. 532-537.
7. *Ibid.*, h. 536.
8. Lawrence Ward Beer, *op cit.*, h. 261.
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*, h. 264.
11. Karangan mengenai Ienaga Saburo, lihat: Robert N. Bellah, "Ienaga Saburo and the Search for Meaning in Modern Japan" dalam: *Changing Japanese Attitudes toward Modernization*, Marius B. Jansen, (ed.), (Princeton: Princeton University Press, 1965), h. 369-423.
Ienaga Saburo, "The Historical Significance of the Japanese Textbook Lawsuit", dalam: Jon Livingston, *op. cit.*, h. 546-551.
12. Jon Livingston, *op. cit.*, h. 541.
13. Teks dalam bahasa Jepang: "*Rekishi O sasaeru hito bito*" (1), h. 1, (2), h. 9, (3), h. 61, (4), h. 183. Lihat buku teks sejarah yang dipermasalahkan, karangan Ienaga Saburo, *Kentei Fugokaku Nihonshi* (Sejarah Jepang yang tidak Lulus Sensor), (Tokyo: San Ichi-shobo, 1974).
14. *Ibid.*, (3), h. 61.
15. (4), h. 183, dengan judul: *Shihon-shugi keizai ni oite kisotekina yakuwari o onjiru seiko kojo do hataraku radosha no sugata* (Sosok kaum buruh yang bekerja di pabrik besi yang memegang peranan utama dalam ekonomi kapitalis). *Kentei Fugokaku Nihonshi*.
16. Lawrence Ward Beer, *op. cit.*, h. 278.
17. *Ibid.*, h. 279. Dalam uraian-uraian yang lain, Ienaga dengan gigih memperjuangkan cara penulisan sejarah secara ilmiah. "Kalau saya melihat ke belakang pendidikan sejarah yang tidak demokratis, militeristik dan tidak ilmiah, saya secara serius menginginkan untuk membekali generasi muda dengan pendidikan sejarah yang ilmiah yang

cocok dengan Jepang baru. Sejalan dengan rencana saya inilah kemudian saya menulis buku teks sejarah untuk Sekolah Menengah Atas yang telah digunakan secara luas selama dua puluh tahun sejak disetujui oleh Kementerian Pendidikan" Lihat: Ienaga *op. cit.*, h. 550.

18. Lawrence Ward Beer, *op. cit.*, h. 266.
 19. Lawrence Ward Beer, *op. cit.*, h. 267.
 20. *Ibid.*
 21. *Ibid.*
 22. *Ibid.*
 23. *Ibid.*, h. 268.
 24. *Ibid.*
 25. Masalah ini pernah dimuat secara ringkas di majalah OPTIMIS, Mei 1983, h. 44-45, dengan judul: "Buku Pelajaran Resmi Sejarah Jepang: Kemelut Pertentangan Ideologi".
 26. Lawrence Ward Beer, *op. cit.*, h. 271.
 27. *Ibid.*, h. 273.
-

PEREKONOMIAN MASA KADIRI: BANDINGAN DATA DAN TEORI

(Oleh Edi Sedyawati)

Teori-teori ekonomi seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi dewasa ini mulai dikembangkan sejak Adam Smith menerbitkan bukunya yang menjadi pangkal perkembangan ilmu ekonomi, yaitu *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* pada tahun 1776. Sejak waktu itulah masalah-masalah ekonomi mulai dijelaskan dengan membentuk teori-teori. Kebutuhan mencari penjelasan teoretis itu kiranya tak dapat dilepaskan dari desakan gejala-gejala ekonomi yang terdapat di waktu dan di tempat Adam Smith hidup. Gejala yang dapat dianggap sebagai pendorong itu adalah paham Merkantilisme serta penerapannya yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi, yaitu berupa pengaturan perdagangan luar negeri sedemikian rupa sehingga negara sendiri menjadi kaya dan kemudian mampu membiayai angkatan perang yang kuat (Soelistyo, 1984/85, 1:3,3 dan Widayat 1984/85, 5:3).

Sesudah ilmu ekonomi berkembang dan dipelajari secara luas, maka tumbuhlah suatu kebutuhan untuk *menggunakan* ilmu itu dalam melaksanakan tindakan-tindakan ekonomi. Terutama pada sektor pemerintah, tindakan ekonomi di negara-

negara modern pada umumnya dilandaskan pada teori-teori tertentu, dan dengan wawasan mondial pula. Tidaklah demikian halnya dengan masa-masa sebelum Adam Smith, termasuk masa Kadiri di Indonesia. Walaupun pasti sejumlah tindakan ekonomi dilakukan dengan suatu landasan pemikiran tertentu, katakan teori-teori tertentu, namun landasan pemikiran tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dan tidak menjadi bahan pembahasan dalam masyarakat yang khusus mempelajari masalah-masalah perekonomian itu sebagai ilmu dalam pengertian modern.

Dalam makalah ini sejumlah pemikiran teoritis dari ilmu ekonomi yang terdapat di masa sekarang ini hendak dibandingkan dengan data yang dapat diketahui dari masa Kadiri. Perbandingan ini terutama dilakukan dalam bidang ekonomi makro, yaitu menyangkut peranan "negara" dalam perikehidupan perekonomian, karena terutama data yang menyangkut bidang permasalahan tersebutlah yang sedikit banyak diketahui dari masa Kadiri. Perbandingan ini dimaksudkan untuk melihat apakah sejumlah pemikiran teoretis ekonomi itu dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala masa Kadiri.

Sebelum terjun ke pembahasan data, beberapa pengertian perlu lebih dahulu diberi perhatian. Ada dibedakan dua macam pembahasan ekonomi, yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif membahas kenyataan-kenyataan kehidupan perekonomian sebagaimana adanya di dalam masyarakat, sedangkan ekonomi normatif dengan berlandaskan penilaian-penilaian tertentu membahas hal-hal yang seharusnya dijalankan dalam suatu perekonomian (John Neville Keynes, dalam kutipan Resurreccion 1975:9). Perbedaan ini tidak terlalu mudah untuk diterapkan kepada data Kadiri. Data mengenai perekonomian masa Kadiri ini sebagian terbesar didapatkan dari prasasti. Apa yang terekam dalam prasasti di satu pihak dapat ditafsirkan sebagai gambaran kejadian yang telah dan sedang berlangsung, tetapi di lain pihak juga dapat ditafsirkan sebagai pernyataan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, yang dalam kenyataan mungkin tidak sepenuhnya terjadi sebagaimana termaktub dalam prasasti. Namun demikian dalam pembahasan

kali ini penulis menggandaikan bahwa apa yang dinyatakan dalam prasasti dan sumber tertulis lain adalah hal-hal yang positif terjadi dalam masyarakat.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengertian ekonomi itu sendiri. Definisi ilmu ekonomi yang klasik dari Robbins (1935:16) kiranya perlu diperluas apabila hendak digunakan untuk membahas perekonomian dalam masyarakat-masyarakat non-modern. Robbins memberi batasan bahwa ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia sebagai perkaitan tujuan-tujuan dengan alat-alat pemenuhannya yang langka dan memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Seorang yang bertindak ekonomis adalah ia yang mengalokasikan sumber-sumbernya secara strategis agar dapat mencapai tujuan-tujuannya secara maksimal. Tujuan-tujuan ini ternyata tidak hanya untuk memperoleh benda-benda, melainkan juga jasa, dan bahkan prestise ataupun jaminan perlindungan dari nenek moyang maupun kekuatan alam. Dengan memperhitungkan itu semua maka kiranya Keesing & Keesing (1971:246-8) menyatakan bahwa telaah ekonomi pada pertamanya berpusat pada *sistem pertukaran*, namun di samping itu juga harus memperhatikan bagaimana benda-benda dihasilkan, didistribusikan dan digunakan. Di samping itu para ahli ekonomi modern menunjukkan pula bahwa bukan hanya produksi benda-benda, melainkan juga pewujudan kesejahteraan hidup yang menyangkut batin itu sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara (Ahuja 1979:7).

Tinjauan ekonomi tak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai budaya dan pranata yang berlaku dalam suatu masyarakat (Esmara 1985:8 dan Resurreccion 1975:10). Pendirian seperti ini khususnya dianut oleh para "institusionalis", yang beranggapan bahwa tindakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, tradisi dan proses teknologi, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia ditentukan oleh kebudayaannya.

Demikianlah kini data masa Kadiri hendak ditinjau dari sudut sistem pertukaran, di mana yang dipertukarkan bukan

hanya benda-benda melainkan juga jasa, termasuk ke dalamnya yang bersifat pemenuhan kebutuhan batin.

Model Ekonomi Tiga Sektor

Model ekonomi dua sektor menjelaskan tentang adanya dua pihak yang mengambil peranan dalam kegiatan perekonomian suatu masyarakat. Pihak pertama adalah rumah tangga perusahaan yang merupakan produsen barang-barang dan jasa, sedangkan pihak kedua adalah rumah tangga individu yang berfungsi sebagai konsumen barang-barang dan jasa tersebut. Untuk masa Kadiri, hubungan antara kedua sektor ini kurang diketahui dengan jelas. Bahkan masih perlu dipertanyakan: adakah pemisahan yang tegas antara rumah tangga individu sebagai konsumen dengan rumah tangga perusahaan sebagai penghasil barang (dan jasa)? Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga individu yang secara normal berfungsi sebagai konsumen, pada waktu yang bersamaan berfungsi pula sebagai produsen, dalam arti rumah tangga itu menghasilkan barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, misalnya tanam-tanaman makanan. Sebaliknya terdapat pula bukti mengenai adanya usaha-usaha khusus, jadi berupa rumah tangga perusahaan, yang khususnya berproduksi di bidang peternakan dan berbagai jenis pertukangan.

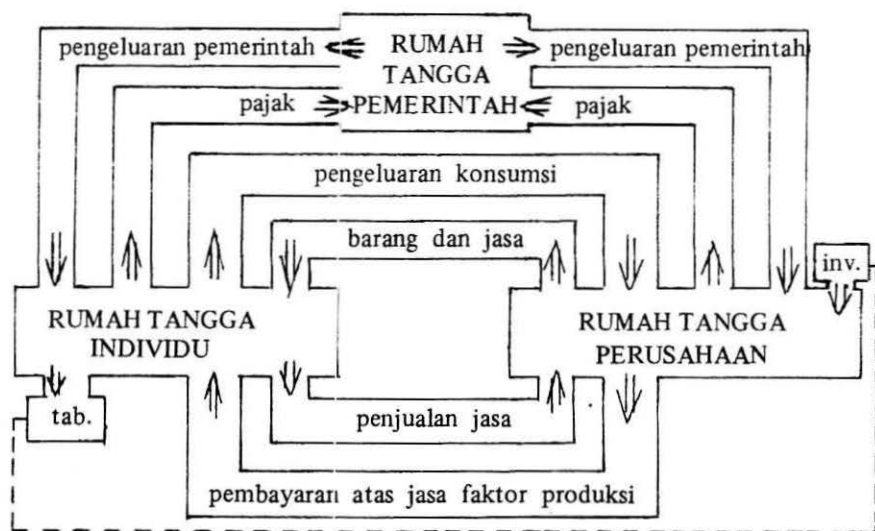
Meskipun kurang jelas batas-batas kegiatan masing-masing, namun jelas dapat diketahui adanya dua pihak itu dalam masyarakat Kadiri, yaitu pihak produsen dan pihak konsumen. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa ada pula peranan penting yang dipegang oleh suatu pihak ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah, yang dalam beberapa hal mengatur kedua pihak yang lain. Rumah tangga ketiga ini mempunyai pemasukan dan pengeluarannya tersendiri. Pemerintah ini memungut pajak atas usaha-usaha peternakan dan pertukangan, dan juga atas penjual jasa seperti para pedagang dan para seniman. Terhadap usaha bercocok tanam dan pengolahan sumber alam rupanya dikenakan peraturan tersendiri. Pengolahan sumber alam ini, misalnya untuk menghasilkan kapur, garam, dan lain-lain, serta juga

pengolahan atas tanam-tanaman seperti beras, gula, arang, minyak (kelapa?), kapas, kesumba, dan lain-lain, rupa-rupanya hanya dipungut pajaknya oleh pemerintah apabila hasil olahan tersebut diperdagangkan. Atas usaha bercocok tanam yang hasilnya langsung bisa dipungut, seperti sayur, buah-buahan dan umbi-umbian, rupanya dipungut semacam bagi hasil oleh keluarga raja dan oknum-oknum pusat terhadap penduduk desa (data dalam Sedyawati 1985:324). Hal terakhir ini perlu mendapat sorotan tersendiri untuk menentukan adakah fungsinya dalam rumah tangga pemerintah. Lepas dari itu dapat dipastikan bahwa masa Kadiri mengenal rumah tangga pemerintah, yang dalam hal ini dikelola oleh raja beserta pejabat-pejabatnya di pusat kerajaan. Dengan demikian maka perekonomian masa Kadiri lebih tepat untuk diamati dengan model ekonomi tiga sektor.

Dalam perekonomian modern, arus perputaran pendapatan nasional adalah seperti yang tergambar pada diagram 1 berikut ini. Diagram tersebut menggambarkan arus perputaran pendapatan dalam model ekonomi tiga sektor. Model tersebut dapat dihadapkan kepada data masa Kadiri. Rumah tangga pemerintah dikelola oleh raja beserta seluruh aparat pemerintahannya, baik yang berkedudukan di pusat kerajaan maupun di 'daerah'. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa di masa Kadiri itu tidak seluruh pamong pengelola daerah tersebut, yaitu yang mengelola *thani* (desa), adalah bagian dari aparatur raja. Para pengelola *thani* itu menjalankan tugasnya dengan suatu otonomi tertentu (data dalam Sedyawati 1985: 358-9), dengan ditunjang oleh suatu kemandirian hukum tertentu. Pimpinan daerah berhadapan dengan pimpinan pusat dalam suatu hubungan berbagai wewenang. Selanjutnya rumah tangga individu adalah rumah tangga setiap warga Kerajaan Kadiri, terutama mereka yang tinggal di luar keraton. Mengenai mereka yang tinggal di dalam keraton (*watek i jro*), yang termasuk ke dalam golongan *manilala drewya haji*, dapat diduga bahwa mereka mendapat 'upah' dari raja (rumah tangga peme-

rintah), tetapi belum jelas adakah mereka juga membayar pajak. Demikian pula halnya dengan rumah tangga perusahaan pada masa Kadiri, yang juga terutama terdiri atas 'perusahaan-perusahaan' di luar keraton. Mengenai para seniman/tukang/pengrajin yang tergolong orang-dalam keraton tidak jelas pula, adakah mereka itu *menjual* hasil karya mereka dan *membayar* pajak pula.

Diagram 1 ARUS PERPUTARAN PENDAPATAN NASIONAL
(Soelistyo 1984/1985, 4:4)



Andaipun mereka yang tergolong orang dalam keraton tersebut dikenai aturan yang berbeda dengan warga masyarakat Kadiri selebihnya dalam sistem perekonomian masa itu, model arus perputaran pendapatan dalam ekonomi tiga sektor tersebut di atas tetap dapat digunakan untuk menjelaskan data masa Kadiri. Hanya saja dalam hal itu perlu diadakan modifikasi peristilahan. Istilah "penjualan", "pembayaran" dan "pajak"

tidak perlu diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan uang. Peranan uang itu untuk masa Kadiri dapat digantikan dengan "pengabdian", "prestise", dan "pengakuan".

Mekanisme Campuran

Masalah perekonomian timbul karena untuk kebutuhan manusia yang relatif tak terbatas tersedia sumberdaya yang relatif terbatas. Di samping itu, perkembangan masyarakat manusia pada umumnya telah sampai pada tahap tumbuhnya kebutuhan-kebutuhan yang telah berkembang sehingga seseorang tidak lagi mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya seorang diri. Masing-masing orang memerlukan hasil karya orang-orang lain yang memiliki keahlian-keahlian yang berbeda dari yang dimilikinya sendiri. Adanya spesialisasi ini kemudian mengharuskan tumbuhnya perdagangan (Chacholiades 1978:6). Gejala spesialisasi dan perdagangan ini pun tampak pada data masa Kadiri (Sedyawati 1985:319-59).

Salah satu batasan ilmu ekonomi yang berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah yang dikemukakan Henry Smith dari bidang kajian ekonomi politik, yaitu bahwa ilmu ekonomi mempelajari bagaimana dalam suatu masyarakat yang beradab seseorang mendapat bagian dari apa yang dihasilkan oleh orang lain, dan bagaimana produk total dari suatu masyarakat berubah dan ditentukan (Ahuja 1979: 17). Gerak perekonomian dalam suatu masyarakat itu dapat dipisahkan ke dalam tiga tipe mekanisme, yaitu mekanisme pasar, mekanisme perencanaan pusat dan mekanisme campuran (Soelistyo 1984/1985, 1:24-9).

Dalam mekanisme pasar yang menjadi pengatur jalannya roda perekonomian adalah sistem harga, yang menurut Adam Smith merupakan tangan gaib yang dapat mewujudkan jalannya perekonomian yang teratur. Pemerintah dalam hal ini sangat dibatasi campur tangannya, yaitu hanya mengurus pertahanan negara, pelaksanaan hukum, dan pembangunan pekerjaan umum

dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat tetapi tidak membawa laba. Sebaliknya daripada itu, mekanisme perencanaan pusat menentukan bahwa seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan dikelola oleh pemerintah pusat atau suatu badan pusat yang dibentuk khusus untuk itu. Tipe mekanisme yang ketiga adalah tipe-antara yang disebut mekanisme campuran. Mekanisme ini ditandai oleh perencanaan pusat yang berfungsi sebagai penentu arah dan kendali perekonomian sedangkan pelaksanaan di tingkat operasional dilaksanakan melalui mekanisme pasar. Perekonomian dengan mekanisme campuran ini disebut juga sebagai ekonomi terpimpin (Resurreccion 1975:3).

Pertanyaan yang kini dapat diajukan adalah, mekanisme tipe manakah yang kiranya terdapat dalam perekonomian masa Kadir? Data prasasti menyatakan bahwa pemerintah kerajaan mengambil tindakan-tindakan yang bersifat mencampuri kegiatan perekonomian dalam masyarakat dengan beberapa cara, yaitu:

- a. memungut pajak atas usaha-usaha produksi dan perdagangan;
- b. mengenakan denda terhadap pelanggaran-pelanggaran atas peraturan atau keputusan pemerintah pusat;
- c. mengatur koordinasi jalan perdagangan.

Tindakan a dan b berakibat terpupuknya kekayaan negara di pusat kerajaan. Dengan kekayaan tersebut pusat kerajaan dapat mengembangkan teknologi dan kecanggihan cara hidup, serta dapat pula membina organisasi angkatan perang. Tindakan c di masa Kadir terutama berupa pengaturan pelayanan jasa angkutan air (Sedyawati 1985:350). Hal itu kiranya dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol lalu lintas perdagangan, demi pemerataan kesempatan berjual-beli bagi penduduk seluruh kerajaan, dan agar pemerintah mengetahui bentangan kegiatan perdagangan sehingga kemungkinan pemasukan pajak tidak ada atau tidak banyak yang lolos.

Kesan yang diberikan data prasasti adalah bahwa pemerintah Kerajaan Kadiri mencampuri roda perekonomian dengan mengatur apa yang sudah hidup dalam masyarakat. Tidak terungkap dengan jelas adanya upaya merencanakan. Satu-satunya kemungkinan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Kadiri adalah pengembangan armada pelayaran (perdagangan). Jadi dalam hal ini mekanisme perencanaan pusat yang murni tidak terdapat di Kerajaan Kadiri. Namun jelas pula bahwa pemerintah memberikan campur tangannya dalam kehidupan perekonomian di negaranya. Jadi, mekanisme pasar yang murni pun tidak terdapat di Kerajaan Kadiri ini. Maka dengan demikian tipe mekanisme perekonomian masa Kadiri dapat digolongkan sebagai mekanisme campuran. Dalam hal ini pemerintah pusat mengendalikan dan mengarahkan jalannya perekonomian, namun dalam tingkat pelaksanaan operasional berlaku mekanisme pasar. Hanya saja, mekanisme pasar ini harus dipahami dengan pengertian tertentu, yaitu bahwa penduduk melakukan usaha dan jual-beli secara bebas. Apakah ada suatu sistem harga di Kerajaan Kadiri tersebut masih merupakan pertanyaan yang tak berjawab.

Cara Pertukaran

Kalau di atas telah dikemukakan bahwa inti perekonomian adalah sistem pertukaran, maka kini perlu diperhatikan adanya berbagai cara pertukaran. Karl Polanyi mengemukakan adanya tiga cara, yaitu pemberian timbal balik (*reciprocity*), pembagian kembali (*redistribution*), dan pertukaran pasar (*market exchange*). Pertukaran pasar adalah pertukaran barang-barang dengan harga yang berdasarkan pada penawaran dan permintaan. Pembagian kembali adalah arus barang-barang naik ke suatu pusat administrasi, serta pembagiannya kembali ke bawah kepada para konsumen. Adapun pemberian timbal-balik adalah pertukaran barang-barang tanpa melalui pasar maupun hierarki administrasi. Pemberian timbal balik ini dapat bersifat simetris, yaitu kedua pihak memberi sama banyak, ataupun asimetris,

yaitu salah satu pihak memberi lebih banyak daripada yang lain (Keesing & Keesing 1971:254-5). Dengan batasan yang lebih luas, maka dapat dipahamkan bahwa yang dipertukarkan itu bukan hanya barang-barang, melainkan juga jasa dengan segala variasinya.

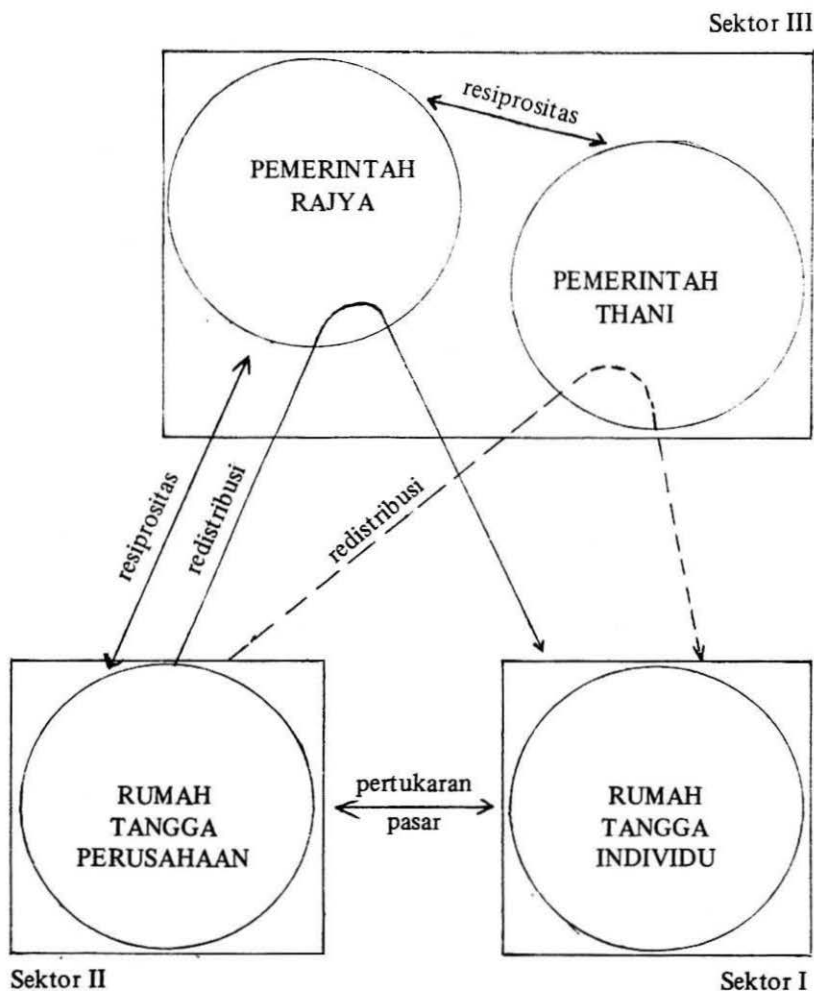
Ilmu ekonomi, untuk memperoleh ketepatan analisis yang maksimal menggunakan faktor uang sebagai satuan pengukur. Ini terutama dapat dilakukan dengan leluasa atas masyarakat modern yang memang menggunakan uang sebagai pengukur pertumbuhan perekonomian. Hal itu tak mudah diterapkan untuk membahas masa Kadiri, karena sistim keuangan serta teba penggunaan uang di masa tersebut belum diketahui dengan jelas. Yang diketahui adalah satuan-satuan harga uang yang terbuat dari emas, perak, dan mungkin besi. Tetapi bagaimana nilai tukar satuan-satuan uang tersebut terhadap barang-barang tertentu tidaklah diketahui.

Pemerintah *rajya* (keraton), dan mungkin juga pemerintah di tingkat *thani* (desa); melakukan redistribusi atas hasil produksi oleh penduduk Kadiri. Hal ini tersirat dari data mengenai padi, di mana dikatakan bahwa lumbung padi di ibukota besar-besar, dapat memuat sampai sepuluh ribu pikul padi. Dalam hal ini pertanyaan yang timbul adalah: bagaimana cara padi itu terhimpun ke lumbung-lumbung besar di ibukota, dengan dibeli ataukah dengan pungutan bagi hasil? Pertanyaan lain adalah: ke manakah didistribusikan padi itu, yang jelas tak akan habis dimakan setahun oleh sebuah keluarga? (Periksa data pada Sedyawati 1985:351).

Antara pemerintah *rajya* dan pemerintah *thani* terdapat hubungan resiprositas. Prasasti-prasasti masa Kadiri banyak sekali memberitakan mengenai pemberian anugerah-anugerah raja kepada pemimpin-pemimpin daerah, berupa hak-hak istimewa. Hak-hak itu kiranya menyangkut imbalan dari pihak yang diberi anugerah, berupa keterikatan yang lebih besar. Keterikatan itu mungkin berupa penyeteroran sebagian tertentu hasil daerah ke pusat (Sedyawati 1985:358).

Sebagai penutup kini diajukan diagram 2 yang menggambarkan jenis-jenis pertukaran di Kerajaan Kadiri.

Diagram 2 ARUS DAN JENSI PERTUKARAN DI KERAJAAN KADIRI



DAFTAR PUSTAKA

Ahuja, H.L.

- 1979 *A Text-Book of Modern Economics. Analysis of Micro, Macro and Development Economics.* Ram Nagar, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

Chacholiades, Miltiades

- 1978 *International Trade Theory and Policy.* International Student Edition. Tokyo dll.: Mc GrawHill Kogakusha, Ltd.

Esmara, Hendra

- 1985 *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan-sanaan dan Prospek.* Pidto Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Andalas, Padang.

Keesing, Roger M. dan Felix M. Keesing

- 1971 *New Perspectives in Cultural Anthropology.* New York dll.: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Resurreccion, Celedonio O.

- 1975 *Basic Econcmic Concept in Philippine Context.* Quezon City: Phoenix Publishing House, Inc.

Sedyawati, Edi

- 1985 "Pengarcaan Ganesa Masa Kadiri dan Sinhasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian". Disertasi Universitas Indonesia.

Soelistyo

- 1984/ *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Buku Materi Pokok*
1985 1 – 4. Universitas Terbuka.

Stutterheim, W.F.

- 1934 "Een Vrij Overzetveer te Wanagiri (M.N.) in 903 A.D... dalam TBG, LYKIV. afl. 2. Hal. 269-295.

Widayat, Wahyu

- 1984/ *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Buku Materi Pokok*
1985 5. Universitas Terbuka.
-

PROSES MODERNISASI ABAD SEMBILAN DAN ABAD DUAPULUH

(Oleh Noerhadi Magetsari)

Pengantar

Pada saat sekarang ini, kita sedang berada dalam proses modernisasi. Apa yang dimaksudkan dengan proses ini adalah suatu usaha ke arah pengembangan kebudayaan Indonesia untuk menjadi setingkat dengan kebudayaan dunia maju. Mungkin akan menarik, apabila kita bandingkan apa yang sedang kita alami sekarang dengan apa yang telah dialami oleh sebagian bangsa kita pada abad sembilan. Di sini disebutkan sebagian bangsa kita, karena peninggalan mereka yang sampai kepada kita hanya diketemukan di Pulau Jawa dan mungkin Sumatera. Perbandingan kedua pengalaman ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi kita tentang kemampuan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan kebudayaannya terhadap perubahan kebudayaan dunia, di masa lampau dan masa kini.

Agar pembicaraan dapat dilaksanakan dengan mudah, maka pengkajian akan dibatasi pada beberapa unsur kebudayaan universal saja, yaitu religi, bahas, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Proses Modernisasi Abad Sembilan

Pada abad sembilan dapat diketahui, bahwa kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan yang didasarkan atas agama Hindu dan agama Buddha. Keadaan ini umumnya berlaku di Benua Asia. Ditinjau dari sudut ini, maka salah satu negara super power pada masa itu ialah India. Istilah *super power* hendaknya diartikan sebagai pusat kekuatan di bidang keagamaan, khususnya agama Buddha.

Dari sumber-sumber Cina misalnya, dapat diketahui bahwa sejak abad empat India telah banyak dikunjungi oleh pendeta Cina. Mereka tidak hanya berziarah, melainkan juga mempelajari berbagai naskah keagamaan. Di samping itu mereka juga kemudian menerjemahkan naskah-naskah itu. Pada masa yang lebih kemudian, pendeta dari Tibet juga melakukan hal yang sama. Sejak kira-kira abad ke-tujuh, telah dapat diketahui adanya beberapa pusat pengkajian agama Buddha. Pusat semacam ini dalam penelitian arkeologi seringkali dibandingkan dengan lembaga pendidikan tinggi atau universitas pada masa sekarang. Ke pusat-pusat semacam inilah datang para pendeta untuk mempelajari agama.

Unsur Kebudayaan: Religi

Di atas telah disebutkan, bahwa di Indonesia terdapat beberapa pusat pengkajian agama Buddha. Salah sebuah pusat itu yang dikenal sampai sekarang, ialah Nalanda. Pusat ini, selain terkenal, juga mempunyai hubungan yang erat dengan Indonesia.

Di Nalanda diketemukan dua jenis peninggalan arkeologi yang menunjukkan adanya hubungan yang erat tadi. Peninggalan yang pertama berupa prasasti, sedangkan yang kedua berupa patung-patung perunggu. Dari prasasti dapat kita ketahui, bahwa seorang raja dari Suvarnavarman yaitu Balaputra, meminta izin untuk memperoleh sebidang tanah di Nalanda di mana ia dapat mendirikan vihara (asrama khusus bagi para pendeta, lengkap dengan tempat peribadatannya) untuk para

pendeta yang datang dari Suvarnavipa. Pendirian vihara khusus ini dirasakan perlu, mengingat bahwa jumlah pendeta Suvarnavipa yang berada di Nalanda telah mencapai seribu orang. Rupa-rupanya permintaan ini dipenuhi, karena sumber arkeologi menunjukkan, bahwa di Nalanda diketemukan patung-patung perunggu, yang dari gaya seninya menunjukkan gaya seni Jawa Kuna, khususnya Jawa Tengah.

Dari berita-berita di atas, kita dapat dengan mudah mengetahui beberapa hal. Yang pertama ialah bahwa pada masa itu Suvarnavipa cukup mampu untuk mendirikan sendiri vihara bagi para pendetanya yang sedang menuntut ilmu di Universitas Nalanda. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa mereka membawa sendiri peralatan untuk peribadatannya, seperti yang ditunjukkan oleh peninggalan arkeologi. Kenyataan yang demikian ini dapat dilihat sebagai usaha para pendeta Suvarnavipa untuk mempertahankan kesuvarnavipaan mereka. Walaupun mereka berada di tengah pusat pengkajian dunia, di sebuah negara *super power*, mereka tetap mempertahankan suasana kebudayaan mereka sendiri. Hal kedua yang dapat pula diketahui sehubungan dengan hal pertama, ialah bahwa Suvarnavipa mampu mengirimkan pendetanya atas biaya sendiri.

Perlu kiranya ditambahkan di sini, bahwa Nalanda berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pusat ini terbakar pada waktu Agama Islam memasuki India. Bekas-bekas Nalanda kemudian diteliti oleh para ahli arkeologi yang antara lain menemukan peninggalan-peninggalan di atas. Di antara berbagai peninggalan itu Bernet Kempers dapat mengenal, bahwa beberapa area perunggu itu menunjukkan gaya yang lain dari patung-patung di sekitarnya. Atas penelitiannya yang lebih terperinci, ia kemudian dapat memastikan, bahwa dari segi gaya seninya, patung-patung itu berasal dari Jawa. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa para pendeta Indonesia atau Suvarnavipa ini, memang mampu untuk menunjukkan kepribadiannya, sekalipun berada di tengah pusat kebudayaan dunia, sampai kehadiran mereka di sana pun dapat diketahui oleh seorang ahli

arkeologi modern. Seandainya mereka meniru saja pembuatan patung sebagaimana orang India membuatnya, maka kehadiran mereka di Nalanda tidak akan banyak diketahui, lebih-lebih apabila mereka hanya mempergunakan saja area penunggu buatan India.

Unsur Kebudayaan: Bahasa

Bahasa yang dipergunakan pada waktu itu ialah bahasa Sansekerta. Bahasa ini merupakan bahasa agama maupun bahasa ilmu pengetahuan. Dengan sendirinya para pendeta yang ke India itu diharapkan dapat mempergunakan bahasa ini dengan baik. Di Indonesia sendiri, bahasa Sansekerta telah dikenal sejak abad empat atau lima Masehi. Hal ini dapat diketahui dari prasasti yang diketemukan di Jawa Barat dan di Kalimantan Timur. Tentu saja dengan diketemukannya prasasti-prasasti ini belum membuktikan, bahwa bahasa Sansekerta telah dikenal secara luas oleh bangsa Indonesia pada abad itu. Namun demikian, bahwa Indonesia pada abad-abad tujuh, yang pada waktu itu bernama Suvarnadvipa, merupakan negara yang, paling tidak pendetanya, telah menguasai bahasa Sansekerta dengan baik, sebagai yang ditunjukkan oleh berita-berita Cina, khususnya oleh pendeta I-tsing. Pendeta ini, dalam perjalanannya ke India, terlebih dahulu tinggal di Suvarnadvipa khusus untuk menyempurnakan kemahirannya berbahasa Sansekerta. Kemudian, dalam perjalanannya pula ke negaranya, ia juga tinggal di Suvarnadvipa. Kali ini ia tinggal untuk menerjemahkan beberapa naskah berbahasa Sansekerta yang dibawanya dari India ke dalam bahasa Cina. Karena ia merasa tidak mampu menerjemahkannya sendiri, ia pulang ke negaranya, untuk mencari pendeta yang dapat membantunya dalam penerjemahan itu, serta kemudian membawanya kembali ke Suvarnadvipa.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Suvarnadvipa setidak-tidaknya merupakan pusat studi Bahasa Sansekerta, khususnya bagi pendeta bukan India. Mungkin, kedudukan sebagai pusat ini mencakup dua kegiatan. Kegiatan pertama,

ialah penyempurnaan kemahiran berbahasa. Sebagaimana dianjurkan oleh I-tsing sendiri kepada para pendeta Cina, agar sebelum mereka ke India, sebaiknya mereka belajar terlebih dahulu di Suvarnadvipa. Kedua adalah kegiatan penerjemahan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan, bahwa I-tsing justru menerjemahkan naskah keagamaan itu di Suvarnadvipa. Bahkan ia khusus datang kembali ke sana bersama pembantunya untuk menerjemahkan naskah pada waktu ia tidak mampu mengerjakannya sendiri.

Dari segi bahasa itu sendiri, bahasa Sansekerta yang dipergunakan dalam kalangan pendeta Buddha adalah bahasa khusus. Bahasa ini oleh para peneliti modern dikenal sebagai "bahasa Sansekerta hibrid". Dari istilah itu sendiri dapat diketahui bahwa bahasa itu merupakan bahasa campuran, yaitu perpaduan antara bahasa Sansekerta dan Pali. Pengertian campuran di sini mengandung arti pensansekertaan bahasa Pali. "bahasa Sansekerta hibrid" ini rupa-rupanya dikenal pula di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh naskah Sang Hyang Karmahayanikan. Mengenai hal ini sesungguhnya telah saya bicarakan dalam disertasi. Sebagaimana diketahui, oleh beberapa peneliti naskah ini dimasukkan ke dalam kelompok naskah yang berasal dari abad sepuluh atau sebelas. Namun demikian, ajaran yang diuraikan di dalamnya sejalan dengan apa yang dipaparkan sebagai Candi Borobudur. Atas dasar ini dapat diperkirakan, bahwa paling tidak ajaran yang diuraikan dalam naskah sezaman dengan Candi Borobudur. Kalau kita ingat, bahwa walaupun dari segi arkeologi diketahui bahwa candi ini mengalami beberapa tahap pembangunan, namun dalam bentuknya sebagaimana yang kita lihat sekarang berasal dari kira-kira abad sembilan. Dengan demikian, maka kita dapat pula memperkirakan, bahwa naskah SHK, paling tidak ajarannya, telah pula dikenal pada abad sembilan. Jadi bahasa Sansekerta hibrid, sebagai bahasa yang khusus dipergunakan oleh para pendeta Buddha, paling lambat pada abad sembilan telah pula dipergunakan di Indonesia. Dari uraian di atas, penggunaan Bahasa

Sansekerta dapat dilacak sampai abad keempat. Selanjutnya memasuki abad tujuh, Suvernadvipa berkembang menjadi tempat yang mampu menyediakan sarana pendidikan kebahasaan, baik berupa sarana pendidikan, maupun penerjemahan.

Unsur Kebudayaan: Teknologi

Di atas telah disinggung dua hal. Yang pertama, bahwa orang Indonesia telah mengembangkan sendiri gaya seni mereka dalam menciptakan sarana peribadatan mereka, dalam hal ini patung-patung pemujaannya. Gaya seni yang demikian ini tidak hanya terlihat pada patung perunggu, melainkan juga pada patung yang dibuat dari batu. Gaya yang demikian ini dengan mudah dapat dikenali perbedaannya dari patung tentang dewa yang sama dari India. Walaupun hal ini dilakukan, namun ketentuan pembuatannya menurut agama Buddha atau Hindu tidaklah dilanggar.

Apa yang dikemukakan di atas itu juga diikuti dalam mewujudkan ajaran agama ke dalam bentuk bangunan atau yang biasa dikenal sebagai candi. Dari bentuknya, telah dapat dilihat dengan mudah, bahwa candi-candi di Indonesia berbeda dari bentuk kuil di India. Sebagaimana halnya dengan pembuatan area, perbedaan bentuk ini juga tidak dengan sendirinya menunjukkan penyimpangan dari peraturan atau ketentuan yang digariskan agama dalam mendirikan bangunan suci.

Ditinjau dari sudut teknik pembuatan candi, orang Indonesia telah mampu untuk menguasainya, serta mengerjakannya sendiri. Dengan demikian mereka tidak saja menguasai teknik pendirian bangunan suci, teknik pemahatan arca batu serta pengecoran patung perunggu, tetapi juga mengayati ajaran agama yang mendasari semuanya itu.

Sebagai gambaran dapat disampaikan latar belakang pendirian Candi Borobudur. Dari segi teknologi pendirian bangunan, Borobudur yang merupakan salah sebuah bangunan agama Buddha yang terbesar, dapat disejajarkan dengan pendirian bangunan suci di India, dari kurun waktu yang sama. Dengan

demikian, apabila Indonesia dilihat sebagai bangsa yang belajar dari sebuah negara *super power*, atau dalam istilah sekarang melakukan "alih teknologi", maka bangsa Indonesia telah mampu melaksanakannya. Bahkan, apabila dilihat candi sebagai hasil alih teknologi itu sendiri sudah sama dengan kuil sebagai hasil teknologi negara *super power*-nya, maka apa yang dicapai pada dasarnya telah sederajat. Namun demikian, kita masih dapat mempermasalahkannya lebih lanjut dengan mempertanyakan kembali, apakah betul bangsa Indonesia yang mendirikan candi yang demikian besar itu. Apakah bukan bangsa India, misalnya.

Keragu-raguan semacam ini dapat diatasi apabila kita tinjau latar belakang ajaran agama yang dipahatkan sebagai Candi Borobudur. Sebagaimana diketahui, di Borobudur dipahatkan urutan cerita Mahakarmavibhanga, Jataka dalam beberapa versi, Lalitavistara, serta Bhadracarī dari Gandavyuha. Urutan yang demikian ini belum pernah diketemukan di mana pun di dunia ini. Menurut para peneliti agama Buddha modern, sistem ini merupakan kemungkinan penyusunan sistem yang terbaik. Dengan lain perkataan, arsitek yang melakukan pemilihan cerita, serta kemudian menyusun urutannya sehingga tercapai satu kesatuan yang utuh, dapat dianggap sebagai ahli. Anggapan ini tetap berlaku walaupun diukur dengan tolok ukur peneliti modern agama Buddha.

Urutan cerita tadi, yang menggambarkan tingkat penghayatan tertentu, masih disambung dengan tingkat penghayatan yang lain, yaitu tingkat Anuttarayogatantra. Penelitian modern menunjukkan, bahwa tingkat yang kedua ini pun baru dikembangkan sejak abad ketujuh, khususnya di Nalanda. Di India sendiri, perwujudan tingkat penghayatan yang kedua sebagai yang diketemukan di Borobudur, tidak pula diketemukan. Yang diketemukan hanyalah perwujudannya dalam bentuk naskah, yaitu yang berjudul Guhyasamaja tantra. Dalam istilah sekarang, dengan demikian orang Indonesia pada abad itu tidak saja menguasai perangkat kerasnya, melainkan juga perangkat lunak.

Dalam bentuk tulisan, "perangkat lunak" ini, yaitu urutan berupa penghayatan tingkat pertama yang pada dasarnya merupakan tingkat paramita serta tingkat kelanjutannya, yaitu tingkat Anuttarayogatantra, diuraikan dalam naskah Sang Hyang Kamahayanika. Naskah yang demikian ini pun belum diketemukan duanya di luar Indonesia.

Unsur Kebudayaan: Ilmu Pengetahuan

Pada dasarnya, antara ilmu pengetahuan dengan agama pada masa-masa ini agak sukar dipisah-pisahkan. Kedua unsur ini menyatu menjadi satu kesatuan yang terpadu. Hal ini dapat terjadi karena pada hakekatnya agama Hindu maupun Buddha mengajarkan, bahwa manusia menderita sejak ia dilahirkan. Selanjutnya diterangkan, bahwa penyebab penderitaan itu adalah ketidaktahuan manusia atas hakekat dirinya. Dengan demikian, maka untuk mengatasi penderitaan itu, manusia harus menghilangkan ketidaktahuannya. Lambang dari terhentinya penderitaan itu digambarkan secara positif sebagai pencapaian kebudayaan atau pencapaian moksa.

Ilmu pengetahuan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan manusia itu tidaklah dapat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan pada masa sekarang. Agama-agama Buddha misalnya, mengenal berbagai tingkat ilmu pengetahuan ini. Adapun ilmu pengetahuan yang dapat menghilangkan penderitaan itu ialah ilmu pengetahuan absolut. Ilmu pengetahuan yang demikian ini tidak dapat dipelajari saja, melainkan juga harus disertai dengan penghayatannya melalui yoga. Namun demikian, ada pula tingkat ilmu pengetahuan yang dapat disejajarkan dengan ilmu pengetahuan modern yang juga dikembangkan pada masa itu, yaitu logika. Sebelum orang melaksanakan yoga untuk mencapai ilmu pengetahuan yang absolut, maka apa yang harus terlebih dahulu dihilangkan adalah keraguraguan. Logika ini dikembangkan terutama untuk menghilangkan keraguraguan ini. Apabila kedua jenis ilmu pengetahuan ini dikembalikan pada tingkat penghayatan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penguasaan ilmu pengetahuan absolut itu dapat di-

capai melalui pelaksanaan yoga menurut Guhyasamaja tantra, atau tingkat Anuttara yoga tantra. Sebaliknya ilmu logika, yang fungsinya adalah menghilangkan keraguraguan, harus terlebih dahulu keraguraguan terhadap ajaran agamanya, dan barulah kemudian ketidaktahuan atas hakekat kebenarannya di dunia. Kedua tingkat ilmu pengetahuan ini juga dikenal di Indonesia, baik dalam bentuk naskah, maupun dalam bentuk bangunan candi.

Suatu aspek lain dalam permasalahan ilmu pengetahuan, adalah sarana penunjangnya. Salah satu sarana yang paling penting adalah perpustakaan. Rupa-rupanya di abad sembilan ini perpustakaan semacam ini telah ada. Seorang ahli arkeologi, khususnya yang berkenaan dengan masalah agama Buddha, yaitu Dr. Jan Fontain, memperkirakan adanya sebuah perpustakaan yang besar serta lengkap di sekitar Candi Borobudur. Perkiraan ini didasarkan atas kenyataan, bahwa agar orang dapat memilih cerita yang hendak dipahatkan di Candi Borobudur, yaitu Mahakarmavibhanga, Jataka, Lalitavistara serta Gandavyuha, serta kemudian memadukannya menjadi suatu kesatuan yang halus urut-urutannya, serta menjadi suatu ajaran yang utuh namun berjenjang, haruslah ditunjang oleh sarana perpustakaan yang luas serta lengkap koleksinya. Di samping itu dengan sendirinya, orang juga harus mengetahui secara mendalam ajaran agamanya. Perlu diingat, bahwa apa yang dikemukakan di atas barulah untuk tingkat penghayatan yang pertama. Atas dasar semua itu, dapat diperkirakan, bahwa di samping adanya perpustakaan yang baik, tentu terdapat pula lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, serta dikenal oleh dunia "internasional" pada masa itu. Hal yang kedua itu dapat diketahui dari berita atau sejarah Tibet.

Rangkuman

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada abad sembilan itu rupa-rupanya proses modernisasi berjalan dengan lancar. Hal ini dapat diukur dari keberhasilan mereka mencapai tingkat yang sama dengan negara *super power*. Lebih dari itu,

mereka bahkan mampu mengembangkan sendiri ilmu pengetahuan yang di India sendiri tidak dilakukan. Hasil yang dicapai ini juga menunjukkan bahwa dalam proses modernisasi ini, kebudayaan Indonesia mampu mempertahankan "kepribadiannya" tanpa harus terlebur ke dalam kebudayaan dunia. Hal lain yang juga menonjol, adalah kemampuan mereka mengirimkan serta mengatur sendiri program "tugas belajar" pendeta mereka di "negara maju". Bahkan mereka mampu menciptakan sendiri suasana kebudayaannya, dengan membawa atau membuat sendiri patung-patung yang mereka perlukan. Pada masa itu, sedikit-tidaknya secara normatif, mutu patung sangat ditentukan oleh mutu pengalaman keagamaan penciptanya. Dengan demikian, melalui kenyataan bahwa mereka membuat sendiri patung-patung itu, dapat dinilai bahwa pengalaman keagamaan mereka juga tinggi, sehingga tidak puas dengan apa yang tersedia di Nalanda.

Proses modernisasi abad duapuluh

Pengantar

Apabila kita perhatikan, maka masalah tentang proses modernisasi yang ada pada abad sembilan masih berlaku sampai sekarang. Masalah-masalah seperti bagaimana menyerap kebudayaan dunia dengan teknologi industrinya yang bersifat universal tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan sendiri, atau proses peningkatan pencapaian ke tingkat kebudayaan maju. Sebagaimana yang telah dilakukan di atas, maka pembicaraan juga akan diperinci ke dalam unsur-unsur kebudayaan universal: religi, bahasa, teknologi, ilmu pengetahuan.

Unsur kebudayaan: religi

Dalam abad duapuluh ini, unsur religi tidak lagi mempunyai kedudukan sepenting abad sembilan. Hal ini tidak dengan sendirinya berarti bahwa agama tidak mempunyai peranan dalam masyarakat. Agama justru ditempatkan pada kedudukan strategis, yaitu dalam antara lain sebagai penyaring terhadap

masuknya paham-paham yang dapat membahayakan kebudayaan Indonesia, seperti misalnya komunisme. Atas dasar itulah Indonesia termasuk sedikit negara yang mengelola masalah keagamaan di tingkat departemen. Di dalam bangsa Indonesia menghadapi proses modernisasi sekarang, peranan agama masih menunjukkan tingkat yang tinggi dalam kedudukannya sebagai penyaring terhadap pengaruh kebudayaan dunia. Sebagaimana diketahui tidak semua unsur kebudayaan dunia itu sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian diperlukan penyaringan atas unsur-unsurnya, menyerap yang baik serta menolak yang tidak sesuai. Pada abad sembilan peranan agama mencakup ke seluruh unsur kebudayaan yang lain, sedangkan sekarang peran yang demikian ini tidak lagi terjadi. Unsur teknologi industri misalnya, tidak lagi terlalu berkaitan dengan masalah keagamaan. Mungkin di sinilah letak masalah yang dihadapi berkenaan dengan proses modernisasi bagi bangsa Indonesia pada abad duapuluh ini. Sebagai akibat dari terjadinya pemisahan antara unsur yang masuk dengan unsur yang menerima, maka timbul ketidakintegrasian antara kedua unsur tadi. Masalahnya menjadi lebih sukar, karena perkembangan proses unsur yang masuk dari luar, lebih cepat dari perkembangan unsur yang ada di dalam kebudayaan Indonesia sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kebudayaan Indonesia sendiri sedang terjadi proses pengintegrasian antara kebudayaan daerah atau suku bangsa menjadi kebudayaan nasional. Di dalam masyarakat pun sedang terjadi perubahan, dari masyarakat tradisional dan kolonial, menjadi masyarakat modern yang tunduk pada hukum modern tidak lagi pada hukum agama atau adat, misalnya. Demikian institusi-institusi kenegaraan yang lain. Peran religi yang lain mungkin adalah dalam mempertahankan kepribadian kebudayaan Indonesia, terhadap kebudayaan dunia itu. Peran ini dapat dimainkannya, karena religi telah lama berakar dalam kebudayaan Indonesia. Dengan demikian ia telah memberi warna pada kebudayaan Indonesia. Warna inilah yang dapat berperan dalam menghadapi berbagai pengaruh yang bersifat universal tadi, apakah itu berupa sistem

pemerintahan, teknologi industri dalam segala bentuk dan ka-
itannya, dan lain-lain.

Unsur Kebudayaan: Teknologi

Seperti yang sudah disinggung di atas, salah satu unsur yang dominan dalam proses modernisasi abad duapuluh ialah teknologi industri. Unsur ini merupakan unsur yang bersifat universal, karena teknologi yang demikian ini merupakan ciri da pelaksanaan yang sama di seluruh dunia. Dengan demikian teknologi ini sama, baik di Amerika, Eropa Barat atau Timur. Jepang atau Korea, tidak membedakan dunia maju atau negara berkembang. Apa yang memperbedakannya ialah apa yang disebut "latar belakang kebudayaan" negara itu masing-masing Latar belakang itu kadang-kadang disebut sebagai "*cosmos of knowledge*". Sebaliknya, masalah yang timbul justru terjadi karena adanya perbedaan antara teknologi yang datang sesungguhnya disertai oleh *cosmos of knowledge* sendiri. Tentunya teknologi yang datang ini tidak selalu datang ke kebudayaan dengan *cosmos of knowledge* yang sama dengannya. Masalah itu timbul pada kebudayaan yang didatangi, tentu saja, seperti Indonesia misalnya.

Unsur Kebudayaan: Bahasa

Pada saat ini, salah satu cara yang dilaksanakan untuk mencapai tingkat yang sama dengan kebudayaan dunia adalah melalui pengiriman sarjana atau tenaga ahli. Seperti yang telah pula diuraikan di atas, cara semaca ini telah pula dilakukan pada abad sembilan. Pada waktu sekarang, masalah yang dihadapi adalah masalah bahasa, khususnya bahasa Inggris. Bahasa ini makin lama makin menjadi penghalang bagi mereka yang hendak belajar di luar negeri. Rupa-rupanya hal yang demikian ini tidaklah terjadi di abad sembilan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Indonesia justru menunjukkan peranan yang penting di bidang pengajaran bahasa ilmu pengetahuan, atau sekaligus juga bahasa "internasional" pada waktu itu, yaitu bahasa Sansekerta. Peran yang demikian ini jelas tidak dimiliki bangsa Indonesia sekarang.

Unsur Kebudayaan: Ilmu Pengetahuan

Di atas telah dikemukakan, bahwa usaha modernisasi dilakukan melalui pengiriman tenaga ahli ke luar Indonesia. Masalah yang dihadapi dalam hal ini ialah masalah bahasa. Masalah lain yang ada pada saat ini adalah masalah biaya. Para ahli dan sarjana yang hendak belajar di luar Indonesia, yaitu mereka yang belajar menurut program modernisasi ini, mendasarkan pembiayaannya atas bantuan negara "sahabat", atau melalui dana pinjaman dengan bunga lunak. Rupa-rupanya masalah ini pun tidak ada di abad sembilan. Sebagai akibat dari "ketergantungan" dana ini, maka penguasaan bahasa Inggris, misalnya menjadi syarat yang tidak bisa ditawar-wawar lagi. Hal ini dapat kita mengerti, karena negara pemberi dana misalnya, tentunya tidak mau menanggung resiko kegagalan, hanya karena calon yang mereka bantu kurang mampu mengikuti studinya, sebagai akibat kemahiran berbahasanya kurang memadai. Sebaliknya, juga karena masalah bahasa ini, beasiswa yang tersedia tidak terserap habis, sehingga disalurkan ke negara berkembang lainnya. Dari sudut ini pun kita sesungguhnya telah mengalami kerugian. Mungkin, seandainya kita bisa membiayai sendiri tenaga ahli kita, kita akan dapat mengatur sendiri program studi, maupun program pengajaran bahasanya, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di abad sembilan. Hal lain yang juga belum mampu kita miliki, adalah penguasaan yang setingkat dengan negara *super power* dalam hal perangkat lunak. Sebagai akibatnya, dalam alih teknologi, kita akan tetap tergantung pada negara-negara itu. Mungkin jenis teknologi yang kita ambil alih baru perangkat kerasnya. Akhirnya, sarana penunjang. Sarana penunjang berupa perpustakaan juga masih merupakan masalah, khususnya perpustakaan yang mampu mengikuti kemajuan penelitian atau perkembangan ilmu.

Kesimpulan

Demikianlah, secara sangat sederhana telah dilakukan perbandingan tentang proses modernisasi antara apa yang terjadi

pada abad sembilan dengan apa yang kita alami pada abad dua-puluh ini. Dari perbandingan itu dapat kita amati, bahwa rupanya bangsa kita lebih mampu menangani proses modernisasinya. Kemampuan ini dapat kita lihat dari hasil yang dicapainya, khususnya mereka tidak hanya mampu mengambil alih perangkat keras, tetapi juga perangkat lunaknya. Bahkan dalam pencapaiannya, mereka melampaui hasil yang dicapai oleh negara *super power* itu sendiri.

HISTORIOGRAFI DAERAH: SEBUAH KAJIAN BANDINGAN

(Oleh: Ayatrohaedi)

1. Pengantar.

Tradisi mencatat peristiwa sejarah di kalangan orang Indonesia ternyata sudah lama berlangsung. Hasan Jafar (1985) memberikan *embaran* (= informasi) kepada kita bahwa prasasti-prasasti Mulawarman di Bakulapura (Kalimantan Timur), Purnawarman di Tarumanagara (Jawa Barat), Mantyasih (Jawa Tengah), dan Wanua Tengah III (Jawa Tengah), misalnya, pada dasarnya merupakan rekaman peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Hanya anehnya, para ahli sejarah kita hingga saat ini nampaknya masih belum berkenan menganggap prasasti sebagai bukti tradisi historiografi. Suatu hal yang dapat dimengerti, mengingat para ahli sejarah itu pada umumnya berpegang kepada anggapan bahwa historiografi "bermula dari pertanyaan dan berkembang dari peningkatan kematangan pertanyaan historis yang diajukan" (Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo 1985:xx).

Historiografi dalam artian demikian tentulah sebenarnya dimaksudkan jika pembicaraan menyangkut historiografi moderna. Historiografi yang sudah berkembang pada masa sebelumnya, yang biasanya disebut *historiografi tradisional*, "pada mu-

lanya lebih merupakan ekspresi kultural daripada usaha untuk merekam hari lampau", dan yang menjadi tujuan utamanya bukan kebenaran sejarah, "tetapi pedoman dan peneguhan nilai yang perlu didapatkan ..." sehingga dalam historiografi tradisional "terjalinlah dengan erat unsur-unsur sastra, sebagai karya imajinatif, dan mitologi, sebagai pandangan hidup yang dikisahkan, serta "sejarah", sebagai uraian peristiwa pada masa lalu" (kys: xxi).

Menurut para ahli, penulisan sejarah Indonesia (di luar prasasti) dimulai oleh Pu Prapanca yang pada tahun 1365 menyusun *Desawarnana* yang lebih kita kenal sebagai *Nagarakertagama*. Untuk menyusun karyanya itu, Prapanca melakukan "kerja lapangan", mengunjungi berbagai tempat yang disucikan, dan di tempat-tempat itu ia mewawancarai para orang tua dan mereka yang dianggap tahu tentang siapa-siapa yang dimakamkan di tempat suci itu. Selain itu ia pun meminjam dan membaca sendiri prasasti di tempat suci itu, dan hanya mempergunakan embaran yang menurutnya dapat dipercaya dari prasasti-prasasti itu. Dengan demikian, pada dasarnya Prapanca telah melakukan kegiatan yang memang harus dilakukan oleh seorang *widyakalawan* (=ahli sejarah). Hal itulah yang menyebabkan Prapanca dianggap sebagai "bapak" historiografi Indonesia (Sutjipto Surjosuparto 1963).

Selain di Jawa, tradisi penulisan sejarah juga berlangsung di sejumlah daerah lain, terutama di Sunda, Bali, Bugis, dan Melayu. Di daerah-daerah itu antara lain pernah dihasilkan naskah *Praraton*, *Carita Parahyangan*, *Sejarah Melayu*, dan *tambo* dari Kerajaan Wajo abad ke-18.

2. Tiga Karya Historiografi Daerah Sejaman

Dari naskah-naskah sejarah itu, ada tiga buah naskah yang berasal dari tiga daerah yang berasal dari masa yang hampir bersamaan. Ketiga naskah itu ialah *Carita Parahyanagan* dari Sunda yang disusun sekitar tahun 1580 (Aca 1967), *Sejarah Melayu* dari Melayu yang diperkirakan berasal dari tahun 1612 (TD.

Situmorang dan A Teeuw 1952), dan *Pararaton* dari Bali yang berasal dari abad ke-16 (R Pitono Hardjowardojo 1965). Dengan harapan ketiga naskah itu sedikit-banyak "mewakili" tradisi penulisan sejarah di daerahnya masing-masing pada masa yang muasir, tulisan ini dengan sengaja membatasi diri pada pembicaraan atas ketiga naskah itu saja.

Bertolak dari pendapat Taufik Abdullah sebagaimana dikutipkan pada bagian awal tulisan ini, akan kita lihat seberapa jauh keterjalinan ketiga unsur yang disebutkan itu (unsur sastra, mitologi, dan "sejarah"). Dalam hal ini, barangkali ada baiknya jika terlebih dulu diingatkan bahwa pada umumnya yang dianggap sebagai unsur sejarah ialah antara lain *peristiwa*, *pelaku* atau *tokoh*, *tempat* atau *ruang*, dan *waktu* semuanya itu terjadi. Itu berarti bahwa suatu gejala sejarah yang lengkap tentulah harus mengandung unsur-unsur tersebut.

2.1 Pararaton

Pararaton memuat peristiwa sejarah Jawa yang berlangsung selama tiga abad (awal abad ke-13 hingga menjelang akhir abad ke-15). Tokoh-tokoh yang muncul di dalam naskah itu pada umumnya tokoh sejarah, mengingat kesaksian naskah itu juga ditemukan dalam berbagai sumber sejarah yang lain. Pararaton ditulis pada tahun 1612, sekitar 130 tahun setelah peristiwa terakhir yang dikisahkannya.

Selain tokoh sejarah yang benar-benar pernah berperan, naskah Pararaton juga mengandung hal-hal yang barangkali harus ditafsirkan lain agar kita dapat memahami mengapa hal yang demikian itu terjadi. Hal-hal "mustahil" itu ialah antara lain usaha menghubungkan Ken Arok, tokoh utama naskah itu, dengan ketiga dewa besar agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. "Kemustahilan" lainnya ialah alat vital Ken Dedes yang mengeluarkan cahaya, Ken Arok yang dapat terbang mengendarai *baralak*, dan kepala Ken Arok yang mengeluarkan ribuan kelelawar. Hal-hal itulah yang nampaknya termasuk mitos, dan merupakan salah satu alat pengedsahan mengenai tokoh Ken Arok.

Bukankah seseorang yang tanpa keistimewaan, seseorang yang bukan pilihan dewa, tak akan mungkin menjadi penguasa di sebuah negara? Menurut Pitono Hardjowardojo (1965:6), *Pararaton* sesungguhnya mempunyai nilai dalam dua hal, yaitu (a) sumber embaran mengenai latar sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari peristiwa sejarah dalam abad ke-13 - 15, dan (b) sebagai sumber banding bagi penelitian sejarah Kerajaan Singhasari dan Majapahit.

Ditilik dari segi sastra, nampaknya arti penting *Pararaton* yang terutama adalah sebagai salah satu bukti langka yang sampai kepada kita mengenai masa awal munculnya apa yang kemudian dikenal sebagai "bahasa Jawa Madya". Dari segi nilai sastra sendiri, naskah *Pararaton* tidak begitu menonjol, mungkin karena maksud penulisannya memang bukan untuk bersastra, melainkan untuk "bersejarah".

2.2 Carita Parahyanagan

Carita Parahyanagan memberikan embaran mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah Jawa Barat (dan sebagian Jawa Tengah) selama sekitar sepuluh abad (abad ke-6 - 16). Naskah itu ditulis tidak lama setelah Kerajaan Sunda dikalahkan oleh Banten pada tahun 1579; karenanya barangkali dapat diterima anggapan yang menentukan tahun 1580 sebagai tahun penyusunannya.

Tokoh-tokoh yang muncul dalam naskah itu pada masa lampau dianggap banyak yang bukan tokoh sejarah; tetapi peneemuan sejumlah naskah dalam waktu lima tahun terakhir memberikan embaran bahwa tokoh-tokoh itu pada umumnya tokoh sejarah. Waktu yang tercantum dalam naskah bukanlah tahun yang pasti semuanya hanya dikaitkan kepada tokoh yang dikisahkan. Berarti bahwa tahun-tahun itu baru berbicara setelah kita berhasil melakukan penyesuaian tokoh-tokoh itu dengan sumber sejarah yang lain.

Nama fiktif yang dulu dianggap terlalu banyak menghiasi naskah itu, sekarang jadi berkurang, setidak-tidaknya perlu dipi-

kirkan kembali, mengingat sumber lain memastikan kesejarahan tokoh-tokoh tersebut. Itu tidak berarti bahwa hal-hal yang mustahil samasekali tidak mendapat tempat dalam *Carita Parahyangan*. Kisah Sanjaya yang mengalahkan berbagai raja di daratan Asia Tenggara, misalnya, nampaknya lebih banyak kemustahilannya daripada kenyataan.

Seperti halnya Pararaton, makna penting *Carita Parahyangan* ditinjau dari segi bahasa dan sastra adalah kedudukannya sebagai bukti yang langka mengenai pemakaian bahasa Sunda. Dibandingkan dengan tradisi sastra tulis Jawa yang bermula dari abad ke-8, tradisi sastra tulis dalam bahasa Sunda baru dimulai pada tahun 1435, yaitu dengan ditemukannya naskah *Serat Siwabuda* atau *Sewakadarma*.

2.3. Sejarah Melayu

Naskah *Sejarah Melayu* memuat kisah dan peristiwa sejarah yang terjadi di daerah Melayu dan bahkan di Rumawi, meliputi masa yang sangat lama, sekitar 20 abad (abad ke-3 sM sampai abad ke-17). Tokoh-tokoh yang berperan di dalam naskah itu sebagian sama dengan yang ditemukan dalam sumber sejarah yang lain, sebagian lagi harus ditafsirkan dulu untuk sampai kepada penyesuaian yang memuaskan.

Naskah *Sejarah Melayu* yang sekarang beredar pada umumnya naskah hasil suntingan Abdullah bin Abdulkadir Mussyi dari abad ke-19, namun para ahli beranggapan bahwa naskah aslinya berasal dari sekitar tahun 1612 sesuai dengan titimangsa yang tercantum di dalamnya. Titimangsa naskah itu diketahui, namun peristiwa yang terjadi boleh dikatakan tak satu pun disertai titimangsa. Akibatnya, semuanya harus terlebih dulu dicarikan kesesuaiannya dengan sumber lain, baru dapat diperkirakan seberapa jauh peristiwa dan tokoh itu "benar" menurut sejarah.

Unsur mitos yang jelas nampak dalam naskah itu ialah usaha menghubungkan tokoh-tokoh sejarah Melayu itu dengan Iskandar Zulkarnain yang berkuasa di Makedonia tiga abad se-

belum tarikh Masehi. Dalam naskah itu juga terjadi kekacauan pewaktuan, yaitu ketika mengisahkan para laksamana Melayu bertemu dengan Gajahmada dari Majapahit Menurut sejarah, antara tokoh-tokoh Melayu dengan Majapahit itu terbentang jarak waktu sekitar dua abad.

Ditilik dari segi nilai sastra, barangkali dari ketiga naskah, *Sejarah Melayu* lah yang paling memenuhi persyaratan sastra. Uraian mengenai suatu peristiwa tidak jarang dilakukan demikian rupa, berbunga-bunga, kadang-kadang diseling atau disisipi puisi (pantun, syair).

3. Sekedar Bandingan

Dari uraian singkat mengenai ketiga naskah itu, barangkali dapatlah disajikan bandingan sebagai berikut:

U n s u r \ Naskah	Pararaton	Carita Parahyangan	Sejarah Melayu
mitos	++	+	++
peristiwa sejarah	++	++	++
tokoh sejarah	++	++	+
anakronisma	—	—	++
titimangsa	++	+	—
nilai sastra	+	+	++
nilai sejarah	++	++	+
kemustahilan	++	+	++

Unsur mitos paling sedikit ditemukan dalam naskah *Carita Parahyangan*, karena ternyata sejumlah nama yang sebelumnya dianggap hanya sekedar nama tokoh mitos, dicatatkan dalam sumber lain sebagai tokoh sejarah yang pernah berperan dalam sejarah Sunda. Naskah banding itu ialah kumpulan karya Pangeran Wangsakerta dan kawan-kawan dari Cirebon, sebanyak 37 jilid dan ditulis antara tahun 1677 dan 1720.

Mitos yang terdapat dalam *Pararaton* berbeda sifatnya dengan mitos yang terdapat dalam *Sejarah Melayu*. Tokoh mitos dalam *Pararaton* adalah para dewa besar agama Hindu, sedangkan tokoh mitos *Sejarah Melayu* adalah pelaku sejarah yang pernah hidup ratusan tahun sebelumnya di Makedonia (Iskandar Zulkarnain). Adanya perbedaan tokoh mitologis itu mungkin dapat diterangkan melalui penelitian mengenai sikap dan kecenderungan masyarakat Jawa dan Melayu tentang tokoh pemimpin ideal mereka.

Ketiga naskah memberikan embaran kesejarahan yang cukup mengenai daerahnya masing-masing. Peristiwa kesejarahan itu pada umumnya dapat dipastikan kebenarannya, mengingat kesaksian berbagai sumber sejarah yang lain mengenai peristiwa yang sama.

Walaupun *Sejarah Melayu* menyajikan nama yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan dengan kedua naskah yang lain, dari segi sejarah mungkin justru patut dipertimbangkan lebih seksama. Tokoh-tokoh itu hanya sebagian yang kemudian dapat disesuaikan dengan kesaksian sumber sejarah yang lain; nama-nama lain sedemikian jauh tetap merupakan tanda-tanya mengenai kemungkinannya pernah benar-benar berperan dalam sejarah.

Unsur anakronisma hanya terdapat dalam *Sejarah Melayu*, antara lain dalam kisah pertemuan para laksamana Melayu dengan Mapatih Gajahmada dari Majapahit. Dalam kedua naskah yang lain, tidak terdapat anakronisma, apalagi jika dikaitkan dengan ketepatan naskah itu dalam hal titimangsa. Titimangsa mutlak, dalam artian waktu yang disebutkan itu merupakan sesuatu yang sudah pasti, terdapat dalam *Pararaton*. Penyebutan titimangsa dalam naskah itu dilakukan dengan *candra-sangkala*, yaitu pengalirnatian titimangsa menjadi suatu kalimat yang bermakna. Dalam *Carita Parahyangan* titimangsa yang diberikan bukanlah titimangsa mutlak, tetapi sesuatu yang

terkait kepada tokoh tertentu. Untuk mengetahui kapan tokoh itu pernah berperan dalam sejarah, diperlukan sumber bandingan, misalnya saja prasasti atau naskah lain. Banyak tokoh yang diketahui titimangsanya melalui sumber lain, misalnya Sanjaya para prasasti Gunung Wukir, Prabu Maharaja melalui peristiwa Bubat, dan serbuan Islam ke pusat Kerajaan Sunda melalui *Sejarah Banten*. Dalam kaitan itu dapatlah dimengerti jika naskah *Carita Parahyanagan* dianggap sebagai salah sebuah karya yang penting (L Ch Damais 1965:27, 35).

Titimangsa itu justru tidak ditemukan dalam naskah yang bernama *Sejarah Melayu*. Dalam seluruh naskah itu tidak ditemukan satu tanggal pun (TD. Simorangkir dan A Teeuw 1952: vii). Barangkali hal itu dapat dimaklumi, jika saja kita memahami bahwa pada dasarnya naskah *Sejarah Melayu* bukan karangan sejarah menurut artian moderna. Walaupun masih tetap dapat dipertanyakan, mengingat karya sezaman yang berasal dari Bali dan Sunda ternyata nilai sejarahnya jauh lebih tinggi daripada naskah "sejarah" itu.

Namun, sebaliknya naskah *Sejarah Melayu* lebih memperlihatkan dirinya sebagai karya sastra, dan karenanya kadar sastranya lebih tinggi dari kedua naskah yang lain itu. Dalam pada itu patut dicatat pula, unsur kemustahilan yang dalam karya sejarah merupakan "gangguan" dan karenanya dapat menurunkan kadar sejarah karya tersebut, dalam karya sastra hal demikian justru lebih dapat dipahami. Dengan demikian, unsur kemustahilan itu haruslah diungkapkan melalui penafsiran khusus, dan jika hal itu dilakukan, kita akan dapat memahami mengapa semuanya itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Aca (=Atja)

1968 *Tjarita Parahijangan: Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*. Bandung: Yayasan Kebudayaan Nusalarang.

Damais, L Ch

1965 "Preseventeenth-Century Indonesian History: Sources and Directions", dalam Soedjatmoko dkk (penyunting), *An Introduction to Indonesian Historiography*: 24 - 35.

Pitono Hardjowardojo, R

1965 *Pararaton*. Jakarta: Bhkratara

Situmorang, T D dan A Teeuw

1952 *Sedjarah Melaju menurut Terbitan Abdullah (ibn Abdulkadir Munsji)*. Diselenggarakan kembali dan diberi anotasi oleh dengan bantuan Amal Hamzah. Jakarta: Jambatan.

Sujatmoko (=Soedjatmoko) dkk. (penyunting)

1965 *An Introduction to Indonesian Historiography*. Ithaca: Cornell University Press.

Sutjipto Wirjosuparto

1963 "Prapantja sebagai Penulis Sedjarah", dalam
Penelitian Sejarah.

Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (redaksi)

1985 *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif.* Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial – Lek-
nas Lipi – Gramedia.

GERAKAN ANDI ABDUL AZIZ DAN ABDUL KAHAR MUZAKAR: NUANSA PEMBRONTAKAN TERHADAP NEGARA.

(Oleh: Mukhlis P.)

Pada tanggal 30 Maret 1950 Letnan Satu KNIL Andi Abd. Aziz meninggalkan Kesatuan KNIL dan menyatakan keseti-aannya pada Negara Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur (NIT). Atas keseti-aannya yang didasari oleh kemauan dan kesadaran sendiri sebagai putra Indonesia ia diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pemerintah RIS menaikkan pangkatnya menjadi kapten APRIS.

Empatbelas hari kemudian, tepatnya tanggal 13 April 1950, presiden Republik Indonesia Serikat, Panglima Tertinggi APRIS menyatakan bahwa Kapten Andi Abd. Aziz adalah "pembrontak". Ia kemudian ditangkap di Jakarta pada tanggal 14 April 1950. Tiga tahun kemudian (1953), selaku "pembrontak" ia diajukan ke depan Pengadilan Militer di Yogyakarta, dan atas kesalahannya selaku pembrontak ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.

Empat bulan kemudian, sesudah pembrontakan Andi Abd Aziz, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1950, Letnan Kolonel Abd. Kahar Muzakar atas kemauan sendiri mencopot tanda pangkat

letnan kolonel di pundaknya, melepaskan semua simbol-simbol ketentaraan yang dimilikinya dan menyerahkannya "dengan hormat" kepada Kolonel Kawilarang, panglima teritorium Indonesia Timur. Sejak itu ia pun menyatakan diri keluar dari tentara dan bergabung bersama Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) di hutan-hutan pedalaman Sulawesi Selatan & Tenggara. Tanggal 7 Agustus 1953 ia menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur adalah bagian Negara Islam Indonesia di bawah imam besar Kartosuwiryo. Duabelas tahun kemudian tepatnya tanggal 1 Februari 1965 tentara menemukan sebuah gubuk di tepi Sungai Lasolo yang diduga sebagai tempat persembunyiannya. 3 Agustus 65 tentara menyerangnya, ia ditembak dan tewas sebelum sempat melangkah sejauh lima meter dari gubuk persembunyiannya.

Kesalahan apa gerangan yang dilakukan kedua tokoh Bugis itu. Orang-orang desa di pedalaman Sulawesi tidak akan tahu apa yang dimaksud gerakan subversi, makar atau pembontakan, sekalipun ia menjadi sangat menderita karenanya. Mereka menjadi tambah tidak mengerti atas perang yang terjadi; karena yang berperang bukan lagi antara orang Bugis melawan Belanda, tetapi antara sesama Bugis - Makassar. Orang-orang desa di pedalaman hanya dapat mengerti keadaan yang terjadi di sekitarnya jika semua itu diterangkan menurut konsep dan pemahaman budaya yang dimilikinya. Ia hanya dapat menangkap makna dari berbagai peristiwa yang mengitarinya jika semua itu dijelaskan melalui simbol-simbol yang ada dalam hazanah budayanya. Dalam konsep tradisional Bugis Andi Abd. Aziz melakukan pelanggaran yang disebut dalam bahasa Bugis "*geopaso*". Dengan istilah itu seorang Bugis dengan mudah dapat menempatkan dirinya secara sadar, bagaimana ia seharusnya menanggapi suatu perbuatan yang disebut *geopaso*, karena perbuatan *geopaso* berarti usaha merebut kekuasaan, baik ditujukan kepada "raja" maupun terhadap aparat "adat" lainnya. Kejahatan ini dalam delik hukum diancam hukuman *rinno* (pidana mati).

Abd. Kahar Muzakkar melakukan 2 (dua) pelanggaran menurut adat Bugis-Makassar. Pelanggaran yang pertama disebut *mapparibokoang arung* (Bhs. Bugis) artinya: kejahatan terhadap negara karena melakukan pekerjaan yang melampaui garis kompetensi yang diserahkan kepadanya, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran kedua disebut oleh orang Bugis dengan istilah *mpelo weloie arajang* atau *mpelo weloie arung*, kejahatan terhadap negara dengan maksud menggulingkan raja dari tahtanya tanpa melalui jalan sah. Untuk mengangkat dirinya sendiri atau orang lain menjadi raja atau penguasa tanpa persetujuan adat. Keduanya diancam hukuman *rinno* (ditindak dengan pidana mati).

Gerakan Andi Abdul Aziz

Sulawesi, atau tepatnya Sulawesi Selatan Selatan merupakan pusat Militer dan pemerintahan Indonesia Timur. Negara ini (NIT) sejak dibentuk pada tanggal 24 Desember 1946, perkembangannya "cukup baik", sampai memasuki tahun 1950. Akan tetapi di tahun 1950 situasi politik dan militer di Sulawesi mulai menghangat karena persoalan "selerah" dari para tokoh (NIT) dalam Kabinet Parlemen NIT. Sebagian besar tokoh menganggap bahwa bentuk Republik Indonesia Federal adalah bentuk terbaik, sedang sebagian kecil anggota kabinet bersikeras bahwa sebaiknya bentuk Republik Indonesia Kesatuan yang lebih ideal.

Sementara pertentangan antara kedua golongan bertambah hangat. Pagi-pagi buta di tanggal 5 April 1950 Kapten Abd Aziz mengerahkan sepasukan tentara yang berada di bawah komandonya, menyerang tangsi TNI (APRIS) di Klapperlan dan di Coenenlaan, serta menguasai Kota Makassar. Puncak gerakannya ialah penahanan Letnan Kolonel Mokoginto, panglima Teritorium Indonesia Timur.

"*Het Spijt me, oversie maar ik moet het doen*". "Saya menyesal overste, tetapi harus bertindak demikian"

Pada Pengadilan Militer yang mengadilinya di Yogya tahun 1953, Andi Abd. Aziz menyebutnya bahwa hal itu dila-

kukan semata-mata karena harus menjaga keutuhan NIT, negara dan pemerintahan yang harus dilindunginya. Ia harus mengambil alih kekuasaan militer di NIT karena alasan keamanan. Ketika itu seribu orang tentara (TNI) di bawah Mayor H.V. Worang siap untuk berlabuh di Pelabuhan Makassar. Kedatangan batalyon Worang ini sebenarnya atas prakarsa anggota-anggota parlemen NIT golongan Kesatuan atau Republik. Tetapi bagi Andi Abd. Aziz sebenarnya tidak ada alasan mendatangkan tentara dari Jawa ke NIT, karena selama ini masalah keamanan masih sanggup dijaga oleh aparat KNIL yang sementara dalam proses pengadilan ke APRIS ditambah dengan polisi militer dari APRIS. Pada Pengadilan Militer di Yogya ia menyatakan merasa sangat tersinggung karena seolah-olah ia tidak mampu menjalankan tugasnya menjaga NIT. Karena itulah ia mengambil alih kekuasaan militer NIT dan memperingatkan dengan keras agar batalyon ekspedisi HV. Worang yang didatangkan dari Jawa mengurungkan niatnya untuk merapat di dermaga Pelabuhan Makassar, demi menjaga terjadinya pertumpahan darah.

Menghadapi peristiwa ini Pemerintah RIS memberi ultimatum kepada Kapten Andi Abd. Aziz agar segera menghadap ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam jangka waktu 4 x 24 jam, terhitung mulai tanggal 8 April 1950, tetapi sebelum itu ia terlebih dahulu harus 1) mengkonsinyir pasukannya, 2) mengembalikan senjata yang dirampasnya dan 3) melepaskan semua tawanan. Semua permintaan Pemerintah RIS dipenuhinya kecuali sampai batas 4 x 24 jam ia tetap tidak datang menghadap ke Jakarta dengan alasan situasi di Makassar tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Atas jaminan Presiden NIT Soekowati, Pemerintah RIS mengulur batas waktu sampai dengan tanggal 13 April 1950. Tanggal 13 April 1950, Andi Abd. Aziz tetap tidak datang ke Jakarta, kecuali presiden NIT dan Panglima Teritorium Indonesia Timur Letkol A.J. Mokoginto. Kepada Presiden NIT dan Letkol A.J. Mokoginto, Presiden RIS dan Menteri Pertahanan RIS Hamengku Buwono IX

keduanya diminta untuk segera kembali ke Makassar dan berusaha meminta kesediaan Andi Abd. Aziz untuk terakhir kalinya sebelum pukul 20.00 tanggal 13 April 1950. Karena jika Andi Abd. Aziz tetap tidak bersedia sampai dengan pukul 20.00 maka tepat pukul 20.00, Presiden RIS akan mengucapkan pidato radio yang isinya menyatakan bahwa Andi Abd. Aziz adalah pembontak. Limabelas menit sebelum pukul 20.00 Presiden NIT Soekowati dan Panglima TT Indonesia Timur A.J. Moko-ginta, bertemu dan menerima kesediaan terakhir Andi Abd. Aziz untuk datang ke Jakarta tanggal 14.3.50 melalui telpon langsung kepada menteri pertahanan; bahwa Andi Abd. Aziz sudah bersedia datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai seorang patriot dan prajurit. Akan tetapi, apa yang terjadi, sekalipun janji terakhir sudah disampaikan ke Jakarta 10 menit sebelum pukul 20.00 namun ternyata presiden RI tetap juga membacakan pidato radionya. "Saudara harus ingat hal yang berikut: Dalam KNIL saudara-saudara tidak pernah turut politik, anti ini atau pro itu . . . Dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) maka di situ pun saudara-saudara tidak boleh berpolitik, tidak boleh pro aliran politik ini atau anti aliran politik itu . . . Tempo itu telah lampau dan sekarang, sebagai presiden RIS dan sebagai panglima tertinggi dari Angkatan Perang RIS, saya menyatakan bahwa dia (A. Abd. Aziz) adalah *pembontak* terhadap kekuasaan Pemerintah RIS".

Sekalipun diputuskan sebagai "pembontak", tetapi karena ia telah berjanji untuk terakhir kalinya, tanggal 14.3.50 ia tetap berangkat ke Jakarta. Sebelum meninggalkan Makassar menteri pertahanan NIT Mr. Dr. R.S. Soumokil memperingatkan padanya "jangan ke Jakarta nanti kamu ditangkap." Peringatan Soumokil tidak didengarnya, ia yakin bahwa ia tidak ditangkap. Keyakinan A. Abd. Aziz berdasarkan atas surat kawat dari Menteri Pertahanan RIS, yang berbunyi bahwa : "Apabila A. Abd. Aziz mau memenuhi panggilan ke Jakarta ia akan diberi ampun". Karena itu kedatangan di Jakarta me-

nimbulkan perselisihan pendapat di antara Pemerintah RIS dan NIT. Menurut Pemerintah RIS Andi Abd. Aziz datang ke Jakarta sebagai tawanan. Karena itu harus ditahan dan satu saat akan dihadapkan ke depan pengadilan Militer, sedang Pemerintah NIT berpendapat A. Abd. Aziz bukan sebagai "Tawanan", tapi orang bebas berdasarkan pesan Menteri Pertahanan RIS, dan yang terjadi ia ditangkap dan ditahan selaku pemberontak. Pada pembelaan yang diajukan di depan pengadilan Militer yang mengadilinya di Yogya ia menyatakan :

"Overste; salahkan saya kalau saya buta politik, sebab saya tidak pernah mencampuri politik, saya terlalu lama terpisah dari tanah air saya Indonesia. Saya dididik di tengah-tengah orang-orang Belanda, hidup dan bergaul dengan mereka, sehingga cara berpikir dan hidup saya, mau tidak mau dipengaruhi oleh masyarakat sekeliling dan alamnya. Overste, tentu dapat mengetahui bahwa tempat saya tinggal di tanah Belanda itu tidak di Amsterdams, Leiden, Utrecht atau kota-kota lainnya, di mana terdapat banyak pemuda-pemudi kita yang datang ke Negeri Belanda untuk melanjutkan pelajarannya di salah satu sekolah tinggi di negeri ini, sehingga pun di Negeri Belanda saya tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang sebangsaku. Pula harus diingat, bahwa sewaktu saya meninggalkan Tanah Air saya, nama Indonesia pun saya belum mengenalnya. Waktu itu saya masih berumur 9 tahun. Overste. Dalam pada itu saya pun belum pernah melihat atau mengetahui tentang kekejaman yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945, pekik kemerdekaan gemblengan Bung Karno dan sebagainya belum pernah saya dengarkan, sehingga apa yang terjadi di Indonesia itu betul-betul saya pandang sepi saja. Overste; salahkan saya, bahwa pada waktu saya hanya dapat mencintai kepada Pemerintah RIS dan Pemerintah NIT dan tidak membenci kepada Pemerintah R.I. Yogyakarta. Overste; salahkan saya, sebab tidak menjadi seorang Chairul Saleh atau menjadi seorang Warouw yang telah dikenal akan kejujuran dan jiwa patriot mereka tetapi overste, hal ini hanya

soal *waktu* dan *keadaan* serta pandangan tambahan pula saya tidak punya moment politik sehingga tidak dapat menghitung dengan tepat. Saya juga yakin dengan tindakan saya itu, maka saya mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa”.

Pada hari Rabu tanggal 8 April 1953 Pengadilan Tentara menjatuhkan putusan atas diri Andi Abd. Aziz 14 tahun (empat belas) tahun penjara atas perbuatan kesalahannya yang mengakibatkan gugurnya beberapa orang anggota tentara APRIS. Ketika ia tanya oleh ketua pengadilan apakah ia menerima dengan baik putusan pengadilan tentara itu, dengan tegas ia menjawab: ”siapa overste, saya menerima baik.”

Abdul Kahar Muzakkar

Tidak lama sesudah Proklamasi Kemerdekaan, muncul keresahan dan kegelisahan baru di antara para bekas pejuang. Mereka merasa tidak puas atas cara penanganan Pemerintah RI dalam menyalurkan mereka secara resmi ke dalam kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia. Cara penanganan yang dianggap sebagai ”demobilisasi sepotong-sepotong”.

Untuk menjinakkan kebrandalan para gerilya eks pejuang di Sulawesi Selatan itu, diangkatlah Letnan Kolonel Abd. Kahar Muzakkar sebagai komandan grup seberang (1949) yang tugas utamanya mengkoordinasi satuan-satuan gerilya di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, di samping itu ia pun ditugaskan untuk membina kader-kader militer di daerah-daerah tersebut. Sasaran utama Kahar Muzakkar ialah daerah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, karena di daerah ini ”lebih kurang 1200 orang anggota gerilya adalah anak buah Abd. Kahar Muzakkar yang sebelumnya merupakan ”pejuang-pejuang di berbagai tempat di Jawa yang diselundupkan ke Sulawesi Selatan untuk menghadapi KNIL”. Sebelum kedatangannya di Sulawesi Selatan, terlebih dahulu ia telah mengirim dua orang perwira stafnya Saleh Syahban dan Bahar Mattaliu ke Sulawesi untuk membentuk KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, 1949). KGSS bertugas untuk mempersatukan sekian banyak kesatuan

kelasykaran yang terpencar dan dalam banyak hal seringkali melakukan kegiatan bersenjata di daerah terpencil.

Tanggal 22 Juni 1950 Abd. Kahar Muzakkar tiba di Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugasnya. Ia berkeliling dan mendatangi kesatuan-kesatuan gerilya untuk menyatukan mereka agar mau menerima syarat yang diajukan oleh pemerintah". Mereka diakui sebagai prajurit dulu, dan rasionalisasi. Barulah dijalankan kemudian sesudah itu". Sekembali dari perjalanannya menjumpai kesatuan-kesatuan gerilya di pedalaman Abd. Kahar Muzakkar mengajukan usul kepada Kolonel A.J. Kawilarang, panglima teritorium Indonesia Timur agar gerilya yang diterima sebagai tentara sedikit-dikitnya berkekuatan satu brigade dan diresmikan dalam satu brigade tersendiri dengan nama "Brigade Hasanuddin, yang tidak terpencar-pencar dalam sejumlah satuan-satuan yang berbeda-beda, sedang yang tidak dapat diterima akan dimasukkan dalam satu "depot" khusus, sambil menunggu untuk dikembalikan ke masyarakat.

Usul KGSS lewat Letkol Abd. Kahar Muzakkar tidak dapat diterima oleh Kolonel Kawilarang, panglima TT Indonesia Timur dan bahkan mengeluarkan pengumuman untuk membubarkan KGSS. Alasannya dapat mengerti karena persyaratan resmi untuk menjadi (diresmikan menjadi) tentara, seseorang harus melalui persyaratan:

- a. **Badan** : pemeriksaan atas berat/tinggi badan, lebar dada, mata, telinga, gigi, penyakit kadas dll. melalui tim dokter tentara.
- b. **Jiwa** : kecerdasan berpikir, kelancaran berbicara (Bhs. Indonesia) pengetahuan umum, pemeriksaan dilakukan oleh sebuah tim panitia.

Setelah melalui pemeriksaan yang ketat ternyata hanya sejumlah kecil anggota KGSS yang memenuhi syarat untuk dapat diterima menjadi tentara, kegagalan sejumlah besar anggota KGSS untuk dapat diterima menjadi tentara secara resmi, merupakan kekecewaan yang sangat dalam, sementara hampir semua anggota KNIL dapat dengan mudah diadaptasikan ke

dalam anggota Tentara Republik Indonesia, yang justru di masa revolusi mempertahankan proklamasi RI menjadi musuh utama KGSS. Kemudahan anggota KNIL untuk dapat diterima menjadi anggota Tentara RI tidak karena semata-mata disebabkan pengaruh perjanjian KMB, tetapi karena persyaratan menjadi anggota KNIL sebelumnya, sudah melalui seleksi jauh lebih ketat dibanding menjadi anggota angkatan perang RI. Tidak diterimanya sebahagian besar anggota kelasykaran ex pejuang dalam angkatan perang RI menyebabkan Abd. Kahar Muzakkar selaku komandan Grup Seberang dan sebagai orang yang merasa paling bertanggungjawab atas nasib gerilya yang kebanyakan di antara mereka adalah bekas anak buah Abd. Kahar Muzakkar dalam perjuangan di Pulau Jawa menyebabkan ia meletakkan jabatannya dan mengundurkan diri dari ketentaraan dan bergabung bersama KGSS di hutan-hutan pedalaman Sulawesi Selatan, yang pada akhirnya memproklamasikan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah Imam Besar NII, Kartosuwiryo.

Pembrontakan Kapten Andi Abd. Aziz diawali dengan penyerangan Tangsi APRIS di Klaparland dan Penguasaan Kota Makassar, dengan alasan mempertahankan NIT dan menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak, serta pengunduran diri Letnan Kolonel Abd. Kahar Muzakkar dari tentara karena mobilisasi sepotong-sepotong atas KGSS, dapat dianggap sebagai peristiwa politik yang wajar terjadi ketika itu. Peristiwa-peristiwa seperti itu, adalah suatu hal yang lumrah bagi sebuah negara yang baru berdiri sementara, pengalaman bernegara belum ada dan persiapar untuk menerima tatanan pemerintahan dari sebuah negara merdeka belum dimiliki. "Pembrontak" Andi Abd. Aziz dan Abd. Kahar Muzakkar yang muncul ke permukaan sejarah dengan peristiwa yang berbeda, sebenarnya hanyalah katup dari kegelisahan masyarakat yang sudah sekian lama menghadapi ketidakpuasan. Baik Andi Abd. Aziz maupun Abd. Kahar Muzakkar keduanya, merupakan produk dari tingkah laku masyarakatnya, produk dan situasi dan kejadian di

sekitar dan juga produk dari kepribadiannya. Ketiga faktor ini menunjukkan sifat multi dimensional dalam dirinya sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pemimpin, sosial psikologis, sosiologis, antropologis dan sosial historis. Ketiganya merupakan dimensi yang menarik untuk memahami mengapa Andi Abd. Aziz dan Abd. Kahar Muzakkar memberontak.

Patron-Klien (Ponggawa-Sawi) dalam Konsep Budaya Bugis

Sejak usia 9 tahun $\pm$ kelas 4 sekolah dasar Andi Abd. Aziz telah dikirim oleh orang tuanya untuk bersekolah di Negeri Belanda dan dititipkan pada seorang teman ayahnya, bekas asisten residen. Usia 9 tahun dalam perkembangan psikologi anak adalah usia yang sudah melampaui batas dasar penanaman sosialisasi 5 s.d. 6 tahun. Dengan demikian ketika Andi Abd. Aziz meninggalkan Sulawesi Selatan, dalam jiwanya sudah tertanam benih kultural Bugis dalam arti yang mendasar, bahwa satu tahap proses sosialisasi, budaya, sudah mewarnai dirinya siapa dia sebenarnya. Selama $\pm$ 20 tahun kemudian ia menghadapi proses sosialisasi dalam rangka adaptasi dengan lingkungannya di Negeri Belanda. Proses yang berlangsung selama $\pm$ 20 tahun ini besar artinya bagi pembentukan kepribadian seseorang, apalagi proses sosialisasi tahap awal baru saja berlangsung ketika ia meninggalkan kampung halamannya, Sulawesi. Dengan demikian sosialisasi yang berlangsung di dunia yang baru (di Negeri Belanda) lebih mudah diterima dan secara sederhana proses adaptasi dilalui tanpa guncangan kejiwaan.

Ketika Andi Abd. Aziz kembali ke Sulawesi, memori sosialisasi masa kanak-kanak menuntut, ia ingin kembali menjadi orang Bugis. Situasi lingkungan, keluarga, masyarakat dan budaya, mendukung proses kegelisahan itu dan yang terjadi adalah perang dalam dirinya sendiri. Saat itulah ia mengalami revolusi kepribadian dan revolusi itu berakhir ketika ia menyatakan diri keluar dari kesatuan KNIL dan masuk bergabung dalam kesatuan APRIS. Dari sudut politik perbuatan Andi Abd. Aziz dapat dianggap sebagai perwujudan penyelesaian masalah KNIL, dan sebagai bagian dari pelaksanaan KMB. Tetapi sebenarnya

dari dimensi sosio psikologi apa yang dilakukan Andi Abd. Aziz ini adalah langkah awal untuk kembali menjadi orang Bugis. Ketika ia merasa dirinya menjadi orang Bugis, ia menemukan realitas yang tidak dimengerti, karena ternyata ia tetap berbeda dengan ponggawa (komandan) Bugis lainnya. Ia merasa sangat berbeda dengan Andi Mattalatta, Saleh Lahade, Andi Sapada, La Nakka, Panjonga Dg. Ngalle, Ranggong Dg. Romo, Kahar Muzakkar dan lain-lain. Sebagai seorang komandan, ia tidak mempunyai pengikut (sawi) yang terdiri atas orang-orang Bugis yang setiap saat memberinya sejumlah kesetiaan sebagai orang Bugis. Ia hanya memiliki sejumlah anak buah, bukan pengikut. Mereka terdiri atas orang Minahasa, Jawa, Ambon, Sangir dan lain-lain. Kesemuanya berada di bawah komando vertikalnya sebagai seorang militer. Berbeda dengan ponggawa-ponggawa Bugis lainnya seperti Andi Mattalatta atau Saleh Lahade misalnya. Ia seorang ponggawa dan juga komandan. Karena hubungan ponggawa dengan pengikutnya terkait secara horizontal seorang komandan terhadap anak buah dalam hubungan vertikal. Karena itu mudah dimengerti mengapa KNIL yang terkenal sangat disiplin, tetapi dalam banyak hal sangat tidak patuh dan seringkali sulit diatasi oleh komandannya. Hal ini hampir tidak terjadi pada anggota APRIS yang secara moral terikat sebagai pengikut dari seorang ponggawa yang juga komandannya. Jalinan ikatan antara ponggawa-sawi, tidak hanya dihubungkan oleh perintah dan komando, tetapi ada komunikasi dan dialog yang menggunakan simbol-simbol Etika Bugis di dalamnya. Bagi seorang ponggawa terutama di masa-masa awal revolusi di Sulawesi Selatan pengikut adalah alat/perwujudan legitimasi atas kepongawaannya; karena dalam situasi kacau legitimasi tidak hanya bersumber dari situasi kharismatis, tetapi juga dari situasi yang lebih bersifat realitas, antara lain pengakuan dan kesetiaan sejumlah besar pengikut dan harapan yang mengikatnya untuk tetap setia, karena "hanya ada tiga hal yang mengikat kesetiaan seorang sawi kepada ponggawa", yaitu:

Pertama : Siri (harga diri) yang terjaga

Kedua : perut yang terisi

Ketiga : harapan tentang masa depan yang lebih baik

Selama ketiganya terpenuhi atau sekurang-kurangnya ada janji yang dapat dipegang sementara proses pemenuhan janji masih berjalan, kesetiaan *sawi* tidak akan bergeser. Kesetiaan semacam itu oleh seorang *sawi* seringkali dibayar dengan nyawanya sendiri, jika hal itu diperlukan, kesetiaan semacam ini tidak diperoleh Andi Abd. Aziz dari anak buahnya, karena di antara mereka tidak ada dialog, tidak ada sambung rasa yang mengkomunikasikannya. Secara psikologis Andi Abd. Aziz adalah pribadi yang kecewa menjadi orang Bugis. Karena itu kalau pun Pengadilan Tentara mencapnya sebagai "pembrontak" terhadap negara, tetapi mungkin lebih bijaksana menyebutnya sebagai seseorang pembrontak terhadap jalannya sejarah.

Ketika Abdul Kahar Muzakkar meninggalkan kampungnya Lanipa di Pantai Barat Teluk Bone (th. 1938) ia sudah berusia 17 tahun. Ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda Bugis yang berkepribadian tangguh. ketika itu ia masih bernama La Domeng. Di Kota Surakarta, ia belajar di sebuah Perguruan Islam, Muhammadiyah dan sempat menjadi salah seorang pemimpin lokal Hizbul Wathan, gerakan kepanduan Muhammadiyah. Sekembalinya ke kampung halamannya ia banyak mengeritik sistem feodal yang dipraktekkan raja-raja setempat dan bahkan berusaha untuk menghapuskannya. Karena itu Dewan Adat Kerajaan Luwu menjatuhkan hukum baginya *ripaoppangi tana*, artinya diasingkan seumur hidup, dan dinyatakan putus hubungannya dengan kampung halaman dan dinyatakan sebagai seseorang yang sudah mati. Dengan hukum itu pula, seseorang dinyatakan kehilangan identitas sebagai orang Bugis. Tahun 1942 ia kembali lagi ke Surakarta, melanjutkan hidupnya sebagai seorang pedagang, dan mengambil bagian secara aktif mengangkat senjata sejak awal revolusi, selama $\pm$ 10 tahun. Di awal kemerdekaan ia menjadi salah seorang pendukung dari organisasi, Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPIS), sesudah GEPIS melebur diri bersama Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi APIS lahirlah KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia

Sulawesi) di mana Abd. Kahar Muzakkar diangkat sebagai sekretarisnya. Di akhir tahun 1945 ia meninggalkan KRIS, dan membentuk Batalyon Kesatuan Indonesia, anggotanya diambil dari semua orang-orang tahanan di Nusakambangan yang berasal dari luar Jawa. Pasukan inilah yang menjadi inti TRIPES (TRIPS) Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi), yang oleh Abd. Kahar Muzakkar telah dikirim ke Sulawesi s/d 1948, sebanyak 1200 orang. Sesudah perjanjian Linggarjati (Nop. 1946) TRIPS berganti nama menjadi *Lasykar Sulawesi*, kemudian diintegrasikan ke dalam Biro Perjuangan Kemerdekaan Pertahanan dengan nama Resimen Hasanuddin. Ketika TRI (Tentara Republik Indonesia) bertukar nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Resimen Hasanuddin menjadi Brigade II.X. di bawah bagian KRU.X (Kesatuan Reserve Umum), satu wadah bagi semua kelasykaran seberang yang bergerak di Jawa. Karena itu KRU.X kemudian menjelma menjadi Brigade XVI, Letnan Kolonel J.F. Warouw menjadi komandan brigadenya, sedang Letkol Abd. Kahar Muzakkar, sebagai orang kedua. Pengangkatan Letkol J.F. Warouw, sebagai komandan Brigade XVI, merupakan awal kekecewaan Abd. Kahar Muzakkar, yang merasa lebih berhak atas jabatan itu. Sesudah Aksi Militer Belanda II, ia bertentangan dengan Letkol J.F. Warouw dan (1949), memisahkan diri dari Brigade XVI. Ia meninggalkan Jawa Timur dan membawa anak buahnya ke Yogyakarta. Di tempat yang baru itu ia bertentangan lagi dengan Letkol Soeharto. Letkol Abd. Kahar Muzakkar mendapat teguran keras dari Kementerian Pertahanan dan kepala staf Operasi Tentara Indonesia. Pangkatnya diturunkan dan anak buahnya dilarang memasuki Kota Yogyakarta. Untuk meredam ketegangan Abd. Kahar Muzakkar dan para anak buahnya yang setia, Oktober 1949 pangkatnya dinaikkan kembali menjadi letkol dan kepadanya diberi jabatan selaku komandan Komando Grup Seberang.

Ketika "pembrontakan" Andi Abd. Aziz meletus di Makassar "5 April 1950", Pemerintah mengirim Batalyon H.F.

Warouw untuk menghadapinya, Abd. Kahar Muzakkar sangat kecewa, karena sebagai komandan Komando Grup Seberang, seharusnya dialah yang ikut menentukan ekspedisi ke seberang. Namun demikian Pemerintah, memerintahkan padanya untuk segera ke Sulawesi. pemerintah tahu betapa besar pengaruh Abd. Kahar Muzakkar di kalangan lasykar-lasykar perjuangan di Sulawesi Selatan. Pengaruh Abd. Kahar Muzakkar di kalangan KGSS sangat besar, dan itu terbukti ketika terjadi peristiwa Abd. Aziz. KNIL yang berada di belakangnya tidak dapat berbuat banyak karena kekompakan KGSS, bahkan berkali-kali pasukan-pasukan gerilya (kelasykaran) ikut membantu APRIS dalam berbagai pertempuran melawan KNIL. Setelah Andi Abd. Aziz "menyerah" Abd. Kahar Muzakkar dipanggil kembali ke Jakarta. Ia menjadi sangat kecewa dan sakit hati ketika pemerintah mengirim "Ekspedisi Militer" besar-besaran ke Sulawesi Selatan tanpa mengikutsertakannya, dengan Kolonel Kawilarang sebagai pemimpinnya. Abd. Kahar Muzakkar tidak mungkin diikutsertakan sebagai bagian ekspedisi Militer, apalagi sebagai pimpinannya. Karena dalam ekspedisi itu ada dua orang perwira inti yang sangat dibencinya, Letkol Warous dan Letkol Soeharto.

Sementara itu terjadi peristiwa penting dalam lembaran sejarah Republik Indonesia, ialah penyerahan kedaulatan RI atau pengakuan resmi kemerdekaan RI oleh Belanda, dengan demikian berakhir pula jabatan Abd. Kahar muzakkar selaku komandan Komando Grup Seberang, sejak saat itulah ia menyebut dirinya dengan "perwira pengangguran yang dicurigai dalam tentara".

Pada tanggal 22 Juni 1950 Abd. Kahar Muzakkar tiba di Sulawesi (Makassar) ia mendapat tugas baru dari pimpinan tentara pusat untuk menyelesaikan masalah gerilya di Sulawesi Selatan (KGSS). Penyelesaian KGSS bagi Letkol Abd. Kahar Muzakkar adalah tugas terakhir baginya sebagai seorang militer, karena sesudah itu akan dikembalikan ke masyarakat dalam kehidupan sipil. Apa yang dikehendaki untuk terakhir kali ialah

memenuhi janjinya kepada para bekas pejuang, dalam KGSS agar mereka diresmikan menjadi tentara dan tergabung dalam satu brigade dengan nama Brigade Hasanuddin. Ia sendiri dalam hal ini tidak menuntut agar ia diangkat menjadi komandan brigade, tetapi ia menuntut agar semua gerilya dalam KGSS yang diresmikan uth dalam Brigade Hasanuddin, tidak dipecah-pecah atau dilebur ke dalam berbagai brigade yang ada, Penolakan atas usul Abd. Kahar Muzakkar oleh pimpinan tentara, menyebabkan ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dan bergabung dengan KGSS, sampai pada akhirnya ia menyatakan . . . Indonesia Timur adalah bahagian dari NII (Negara Islam Indonesia) dan ia sendiri diangkat pada tanggal 20 - 1 - 52 menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia, yang juga disebutnya Divisi Hasanuddin. Keterlibatannya menjadi lebih dalam pada Negara Islam Indonesia ialah ketika ia diangkat menjadi menteri pertahanan NII yang meliputi wilayah Republik Indonesia. Selama masa 15 tahun itulah, daerah yang sangat menderita adalah kampung halamannya sendiri, Luwu. Apa sebenarnya yang diinginkan Abd. Kahar Muzakkar tercermin dalam sebuah piagam, yang disebutnya dengan Piagam *Makalua*. Piagam ini adalah upaya mengembalikan harga dirinya di mata orang sekampungnya terutama di mata para bangsawan Luwu yang pernah menjatuhkan hukuman buang atas dirinya, karena itu dalam Piagam Makalua dengan jelas dinyatakan bahwa "Semua penggunaan gelar kebangsaan atau sebutan kehormatan dihapuskan dan menyatakan perang terhadap semua keturunan bangsawan atau aristokrat yang tidak mau membuang gelarnya".

Beban psikologis yang terkandung dalam gerakan Abd. Kahar Muzakkar, secara sederhana dapat dikatakan bahwa gerakan Abd. Kahar Muzakkar adalah upaya seorang lelaki Bugis menegakkan harkat kemanusiaannya, *siri* (harga diri). Jika Andi Abd. Aziz berontak karena kecewa menjadi orang Bugis, maka Abd. Kahar Muzakkar membrontak, sebagai orang Bugis yang dikecewakan, itulah nuansa sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Errington, S.: 1982 'Siri', darah dan kekuasaan politik di dalam kerajaan Luwu zaman dulu', *Bingkisan* 1 – 2.
- Mettulada; 1971, 'Kebudayaan Bugis – Makassar' dalam Koen-tjaraningrat (pen) *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Jambatan.
- Mettulada; 1977, 'Kahar Muzakkar – Profil Patriot Pemberontak' *Prisma* 8 hal. 77 – 86.
- Mattulada; 1977, 'Kepemimpinan pada orang Makassar'; *Berita Antropologi* Th. IX, 32 – 3, hal. 58 – 66.
- Pelras, C.; 1981, 'Hubungan Patron-Klien dalam Masyarakat Bugis dan Makassar', paper to Conference on South Sulawesi, Melbourne.
- Mukhlis; 1979, *Bathara Gowa : Suatu Messianisme dalam Pergerakan Sosial Tanah Makassar*, Unung Pandang, Laporan Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Mukhlis; 1984, 'Kerusuhan di Pedalaman Makassar 1777–1912: Suatu studi Permulaan tentang Sejarah Sosial di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, PLPIIS, Universitas Hasanuddin, 1984.

- Van Dijk, C.C.; 1983, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Barbara S. Harvey; 1984, *Permesta, Pemberontakan Setengah Hati*, Grafiti Pers,
- Badroso; 1955, *Peristiwa Sulawesi Selatan, 1950*, Jajasan Jajasan Pustaka Militer.
- Haruun Kadir, dkk.: 1977 – 1978, *Zaman Kebangkitan Nasional di Sulawesi Selatan (1900–1942)*. Proyek Penelitian & Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Mattata, H.M. Sanusi; 1962, *Luwu dalam Revolusi*, Makassar.
- Nigel Armistead; *Reconstructing: Social Psychology*. 1974.
- Gustav, Jahoda; *The Psychology of Superstition*. 1969
- S. Slatsted Sargent; *Social Psychology*. 1950.

DAFTAR PEMBAWA MAKALAH

No.	Nama	Judul Makalah
1	2	3
Subtema Umum		
1.	Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo	Sebuah Biografi dari Historiografi Indonesia
2.	Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar	Fakta dalam Penulisan Sejarah Indonesia
3.	Dr. Taufik Abdullah	Pengalaman yang Berlaku, Tantangan yang Mendatang: Ilmu Sejarah di Tahun 1970-an dan 1980-an
Subtema Dinamika Perkembangan Politik Bangsa Indonesia		
1.	Drs. Anhar Gonggong	Tema Sentral Persatuan dan Alur Pemikiran Soekarno, 1926 – 1966
2.	Hanoch Luhukay	Front Penentang "Republik Maluku Selatan" di Makassar, Terbentuk pada Tanggal 26 April 1950
3.	Drs. P.J. Suwarno	Rekonstruksi Historis Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974
4.	Drs. R. Nalenan	Konsepsi Presiden 21-2-1957 dan Dampak Sejarahnya
5.	Sudjarwo	Digul Sebuah Filter Radikalisme: Potret Dinamika Pertumbuhan Bangsa
6.	Sudarini, SS	Komisi Tiga Negara

1		3
7.	Drs. Moch Hudan	Kelas Menengah dan Pergerakan Nasional di Indonesia
8.	Drs. Harlem Siahaan	Gerak Revivalitas-Nativistis Perang Batak, 1978 – 1907
9.	Drs. M. Isa Sulaiman	Islam, Etnisitas, dan Propaganda Anti Belanda : Suatu Tinjauan Terhadap Semangat Aceh 1945
10.	Dra. Erwiza Erman	Peranan Kelompok Nasionalis (PNI) dalam KNIP
11.	Drs. Riyadi Gunawan	Dinamika Wajah Antar Golongan Politik di Indonesia Periode Revolusi: Sebuah Pengantar Diskusi
12.	Drs. Muhammad Ibrahim	Pemerintahan Adat dan Pergerakan Nasional di Aceh
13.	Dra. Chusnul Hayati	Aktivitas Aisyiah dalam Meningkatkan Peranan Sosial Wanita di Indonesia
14.	Dra. Tiurma Tobing	Punguan Kristen Batak: Gereja Batak Pertama yang Merdeka
15.	Drs. Husain Haikal	Ustadh Abdullah Hinduan dan Ma'had Islam Pekalongan
16.	Drs. JA. Pattikayhatu	Guru Midras dan Peranannya dalam Masyarakat Pedesaan di Ambon Uliase

1	2	3
17.	Drs. I Ktut Ardhana	Perkembangan Muhamaddiyah di Bali, 1934 – 1968
18.	Drs. Mohammad Iskandar	Pembrontakan Kaum Priyayi Tahun 1893 di Kabupaten Bandung
19.	Drs. FEW. Parengkuan	Intervensi Asing Terhadap Sistem Pemerintahan Tradisional Minahasa Sampai Akhir Abad Ke-19
20.	Dra Marleily R. Asmuni	Sejarah Pertumbuhan Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Sistem Pemerintahannya
21.	Sagimun MD.	Aru Palaka: Pengkianat atau Pahlawankah Dia?
22.	FS. Watuseke	Perang Tondano, 1808 – 1809
23.	Dr. Hasan M. Ambary	Dinamika Perkembangan Sejarah Islam di Indonesia Abad Ke-13 – 18
24.	Dr. Hamid Abdullah	Peranan Elit Pedesaan dalam Gerakan Sosial
25.	Drs. A. Gazali Usman	Pengaruh Pengajian Tassawuf dan Dzikir Terhadap Rakyat Banjar dalam Usaha Menghadapi Kolonialisme Belanda
26.	Drs. Helius Syamsuddin	Perubahan Politik dan Sosial di Pulau Sumbawa : Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa, 1815 – 1950
Subtema Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia		
1.	Drs. AA. Bagus Wirawan	Pengaruh Ekonomi Penjajahan (<i>landrente</i>) Terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia

1	2	3
2.	Drs. Rusdi Sufi	Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh
3.	Dra. Cokorda Istri Suryawati	Singaraja : Kota Perdagangan pada Belahan Kedua Abad Ke-19
4.	Drs. Muhammad Gade Ismail	Truman dan Barus : Dua Pusat Perdagangan di Pantai Barat Sumatra pada awal Abad Ke-19
5.	Daud Limbu Gau	Perekonomian Makassar, 1874 – 1849
6.	Dra. Tri Wahyuning M. Irsyam	Golongan Etnis Cina Sebagai Pedagang Perantara di Indonesia, 1870 – 1930
7.	Drs. Azhar Djohan	Beberapa Faktor Kesejarahan Sebagai Penyebab Mobilitas Ekonomi Masyarakat Cina dan Pengaruhnya bagi Orang Melayu
8.	Drs. I Putu Gde Suwitha	Peranan Orang-orang Perantara dalam Kehidupan Perekonomian di Bali Abad Ke-19
9.	Drs. Anwar Thosibo	Peranan Suku Bugis-Makassar dalam Aktivitas Perekonomian di Kerajaan Gowa-Tallo Abad Ke-17
10.	Drs. Edhie Wuryantoro	Masyarakat Jawa Kuna dan Masalah Tanah
11.	Drs. Bambang Purwanto	Krisis di Awal Kebangkitan Pengguntingan Uang pada Masa RIS, 1950
12.	Drs. Wisnuadji	Dinamika Perekonomian Bangsa Indonesia

1	2	3
Subtema Dinamika Perkembangan Sosial-Budaya Bangsa Indonesia		
1.	Drs. Kusen	Dinamika Kreativitas Kesenirupaan di Jawa Abad Ke-9 16
2.	Drs. M. Alimansyur	Ratu Sinuhun dalam Perkembangan Sosial-Budaya di Wilayah Sumatra Selatan
3.	Dra. Mona Lohanda	Budaya "Indisch" dalam Konteks Budaya Betawi
4.	Dr. Usman Pelly, MA.	Dampak Teknologi Maritim : Pasang-surut Perahu Bugis Pinisi
5.	Drs. Suripan Sadi Hutomo	Tukang Kentrung Sebagai Penutur Sejarah
Subtema Historiografi		
1.	Drs. Edward Pulinggomang, MA.	Beberapa Catatan Tentang Historiografi Sulawesi Selatan
2.	Drs. I Made Suastika	Konsepsi Kepemimpinan Hindu di Bali: Telaah Teks Bahasa Jawa Kuna serta Penerapannya Zaman Gelgel
3.	Drs. Djoko Dwiyanto	Penemuan Beberapa Prasasti Baru Sebagai Sumbangan bagi Historiografi Indonesia
4.	Drs. Sudarmono	Setiap Generasi Menulis Sejarahnya Kembali
5.	Drs. A. Adaby Darban	Pendekatan Sejarah Struktur dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional

1	2	3
6.	Drs. Dirman Surachmat	Prasasti Cisaga
7.	Dr. Hasan Djafar	Prasasti Sebagai Historiografi
Subtema Studi Bandingan		
1.	Drs. Husin Sayuti	Hubungan Lampung dengan Kesultanan Banten dan Palembang dalam Perspektif Sejarah, 1500—1900
2.	Drs. Ida Bagus Rama	Makna Hubungan Bali dan Jawa dalam Revolusi Fisik di Bali, 1945—1950
3.	Dr. I Ktut Surajaya	Masalah Pendidikan Sejarah di Sekolah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jepang
4.	Dr. Edi Sedyawati	Perekonomian Masa Kadiri: Bandingan Data dan Teori
5.	Dr. Nurhadi Magetsari	Perbandingan Sejarah dan Agama
6.	Dr. Ayatrohaedi	Historiografi Daerah: Sebuah Kajian Bandingan Kerajaan Kamboja dan Kerajaan Mataram—Jawa Tengah: Suatu Studi Bandingan Tentang Kedudukan dan Martabat Raja dalam Masyarakat Asia Tenggara
7.	Drs. Suwadi Sjafei	
8.	Drs. Buchari	Sriwijaya dan Mataram: Kajian Bandingan Mengenai Struktur Kerajaan dan Struktur Birokrasi

1	2	3
9.	Dr. Mukhlis P.	Studi Bandingan Gerakan Ibnu Hajar dan Kahar Muzakar
Subtema Pendidikan Sejarah		
1.	Drs. G. Mudjanto, MA.	Pengembangan Konsep Diri Lewat Pengakaran Sejarah
2.	Dr. S. Hamid Hassan	Pengajaran Sejarah di Sekolah: Antara Keinginan dan Realita
3.	Drs. Sarita Pawiloy	Pemilihan dan Pengungkapan Fakta Sejarah untuk Tujuan Pendidikan
4.	Drs. Suwardi MS.	Prestasi Hasil Belajar Siswa SMA dalam Bidang Studi Sejarah di Propinsi Riau
5.	Drs. Sanusi	Penyajian Sejarah dan Pemahaman Ilmu Sejarah
6.	Drs. E.J. Manuhutu	Relevansi Pendidikan Sejarah dalam Pendidikan Nasional
7.	Dr. Diohan Makmur	Pendidikan Sejarah
8.	Dr. Suyatno	Suatu Konseptualisasi Sejarah Perkotaan
9.	Dr. Edi S. Ekadjati	Unsur Pendidikan dalam Pendidikan Sejarah
10.	Dr. Djoko Suryo	Pendidikan Sejarah
11.	Drs. RZ. Leirissa, MA.	Pengembangan Kurikulum Sastra Satu Jurusan Ilmu Sejarah
12.	Drs. M. Habib Mustopo	Wajah Pendidikan Sejarah Nasional pada Jenjang Pendidikan Menengah: Suatu Pengamatan Kanc

Lampiran 1

RUMUSAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV**A PENGANTAR**

Dari tanggal 16 s.d. 19 Desember 1985 di Yogyakarta diadakan Seminar Sejarah Nasional IV bertema "Sumbangan Penelitian dan Penulisan Sejarah Terhadap Pembangunan Nasional" dan bertujuan :

1. Memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penelitian dan penulisan sejarah selama empat tahun terakhir (1981-1985);
2. Memperoleh data kesejarahan yang baru baik dalam artian fisik maupun tafsirannya, dan menjangkau para peneliti dan penulis sejarah untuk selalu melibatkan diri dalam setiap kegiatan kesejarahan;
3. Memperluas cakrawala pemikiran mengenai sejarah; dan
4. Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengajaran sejarah.

Seminar dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan, yang memberikan pengarahan bertolak dari pantulan filsafat tentang sejarah.

Seminar dibagi dalam sidang-sidang umum dan kelompok. Dalam sidang umum disajikan tiga ceramah umum, masing-masing yakni :

1. Ceramah umum Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo berjudul "Sebuah Biografi dari Historiografi Indonesia";
2. Ceramah umum Prof. Dr. Harsya W. Bachtar, berjudul "Fakta dan Penulisan Sejarah";

3. Ceramah umum dr. Taufik Abdullah berjudul "Pengalaman yang berlalu, Tantangan yang Mendatang : Ilmu Sejarah di Tahun 1970-an dan 1980-an".

B. PESERTA

Peserta Seminar terdiri atas tiga unsur, yakni peserta pembawa makalah, peserta undangan, dan peninjau. Berdasarkan daerahnya, peserta pembawa makalah berasal dari Jakarta (24 orang), Yogyakarta (14 orang), Ujungpandang (6 orang), Banda Aceh (5 orang), Bandung (3 orang), Manado (3 orang), Medan (2 orang), Surakarta (2 orang), Semarang (2 orang), Pekanbaru (2 orang) dan dari Malang, Palembang, Ambon, Lampung, Banjarmasin, serta Surabaya, masing-masing seorang.

Para pembuat makalah terdiri atas mereka yang (a) pernah mengikuti studi tambahan, (b) pernah aktif dalam pusat-pusat studi wilayah, (c) sudah terbiasa mengikuti berbagai seminar dan (d) pertama kali tampil. Keberagaman latar belakang itu mempengaruhi baik isi makalah maupun pendekatan yang dipergunakan penulisnya. Selain itu juga terlibat adanya gabungan antara usaha penelitian dengan pengalaman penulis, terutama pada Subtema Pendidikan Sejarah dan Dinamika Politik.

Para peserta berasal dari berbagai lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, baik negeri maupun swasta.

C. MASALAH POKOK

Ada enam masalah pokok yang dibahas dalam Seminar Sejarah Nasional IV ini : 1) Dinamika Politik, 2) Dinamika Ekonomi, 3) Dinamika Sosial Budaya, 4) Historiografi, 5) Kajian Bandingan, dan 6) Pendidikan Sejarah.

1. Dinamika Politik

Makalah yang membicarakan masalah politik yang berjumlah 15 buah pada umumnya memilih periode Pergerakan Nasional dan Revolusi Fisik. Sebagai bahasan mencakup daerah

yang cukup luas (Aceh, Sumatera Timur, Lampung, Banten, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara); delapan di-antaranya berskala nasional.

Pokok-pokok yang dibicarakan mencakup masalah hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara daerah dan daerah, hubungan antar golongan politik, hubungan internasional, kepemimpinan dan hubungan antar golongan sosial. Selain itu ditonjolkan pula sejarah tematis seperti sejarah parlementer, sejarah pemikiran, sejarah hubungan internasional, dan sejarah perundang-undangan.

2. Dinamika Ekonomi

Berbicara mengenai dinamika ekonomi, berarti akan mengaitkan demikian banyak masalah. Dalam perbincangan selama seminar yang membicarakan 16 makalah ini ada sembilan aspek dinamika pertumbuhan ekonomi yang muncul sebagai topik diskusi, yakni :

- a. Aspek perubahan sosial sebagai akibat sistem perekonomian baru (ekonomi uang, sistem pajak, penanaman modal swasta dan lain-lain)
- b. Aspek perubahan kehidupan perekonomian daerah sebagai akibat masuknya pembaharuan dari luar, termasuk sejarah perusahaan (*business history*)
- c. Aspek perdagangan antar pulau dan munculnya kota-kota dagang dengan kegiatan perdagangannya
- d. Aspek mobilitas sosial
- e. Peranan pedagang perantau dari golongan Cina dan pribumi
- f. Krisis perekonomian
- g. Aspek perbandingan perekonomian zaman kolonial dan zaman kemerdekaan.

Sekalipun lingkup ruang masih terbatas pada Aceh, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa, lingkup waktunya mencakup zaman kuna, zaman kolonial dan zaman revolusi sampai masa kontemporer.

3. **Dinamika Sosial Budaya**

Ada 16 makalah yang membahas aspek sosial budaya, namun yang menjadi perhatian utama tampaknya belum bervariasi. Aspek-aspek yang hangat mencakup masalah, yakni :

- a. Perubahan kebudayaan
- b. Sejarah institusi yang di dalamnya mencakup banyak bahasan tentang pranata sosial
- c. Pengaruh Tokoh-tokoh Sejarah terhadap perubahan sosial
- d. Peranan kelompok masyarakat tertentu terhadap perubahan sosial.

4. **Historiografi**

Tujuh makalah membahas historiografi tradisional dan dua yang membicarakan historiografi modern. Ada 3 masalah yang dianggap menonjol pada kelompok ini, yakni :

- a. Bahasan tentang struktur historiografi tradisional,
- b. Kepemimpinan kharismatik dalam historiografi tradisional, dan
- c. Bentuk-bentuk penuturan sejarah di berbagai daerah.

Sekalipun tidak ada pendekatan baru yang dimunculkan dalam berbagai makalah, patut diakui bahwa usaha ke arah penelitian "sejarah tradisional" seperti kentrung, mulai nampak.

5. **Kajian Bandingan**

Meskipun hanya ada tiga makalah yang secara khusus membahas masalah bandingan, tetapi aspek pokok yang dibicarakan berbeda-beda. Makalah pertama mencoba membandingkan tiga naskah sejarah yang berasal dari 3 daerah yang berbeda-beda. Makalah kedua membandingkan pribadi dua tokoh yang sama-sama melakukan "pemberontakan" terhadap Pemerintah RI. Keduanya berbeda dalam tindakan, keduanya berbeda dalam proses sosialisasi yang menyebabkan pula sentuhannya dalam sejarah berbeda. Makalah ketiga membanding-

kan unsur-unsur kebudayaan dalam proses modernisasi di Indonesia pada abad ke 9 dan 10. Ketiganya pun bervariasi dalam tiga skop temporal abad ke 9 16 dan 20.

6. Pendidikan Sejarah

Tiga belas makalh mencoba mengamati masalah pendidikan sejarah dalam seminar ini. Tampaknya cara mengajar dan sistem evaluasi menjadi tofik yang menarik. Di samping itu tema yang tak kalah pentingnya antara lain : 1) pemilihan materi pengajaran dan bahan bacaan, 2) guru sejarah dan ahli sejarah profesional, 3) kurikulum, 4) subyektifitas penulis dan pengajar, dan 5) evaluasi silabus.

D. SIDANG-SIDANG

Seminar terdiri atas sidang umum dan sidang kelompok. Di dalam sidang-sidang umum dibicarakan masalah-masalah yang termasuk tema umum sedangkan di dalam sidang kelompok dibicarakan masalah yang sesuai dengan tema-tema khusus yang telah ditentukan.

Baik sidang umum maupun sidang kelompok memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan berdialog secara bebas sesuai dengan tata tertib persidangan.

Penyelenggaraan sidang-sidang diwarnai oleh suasana yang akrab, di antara para peserta, baik yang sudah saling kenal maupun yang baru bertemu di dalam seminar ini.

Secara khusus perlu dicatat bahwa dalam sidang-sidang kelompok dilaksanakan dialog secara terbuka dan akrab. Mutu diskusi pada umumnya cukup baik. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta sidang memperlihatkan pemahaman terhadap masalah yang dibahas, sedang pembawa makalah dapat memberikan jawaban-jawaban yang menunjukkan penguasaan terhadap masalah yang ditanyakan.

E. TINJAUAN UMUM

Makalah seminar terdiri dari dua kelompok, yakni :

- (a) makalah berasal dari peserta berdasarkan undangan panitia pengarah, dan
- (b) makalah yang diajukan peserta setelah melalui penyaringan panitia pengarah.

Makalah yang diajukan pada umumnya belum seluruhnya memperlihatkan perluasan wilayah perhatian dan pendalaman dalam wawasan teori dan metodologi sejarah.

Meskipun diskusi kadang-kadang telah menyentuh masalah kritik sumber dan interpretasi fakta, tetapi pada umumnya lebih banyak berkisar pada ketepatan historis dari peristiwa yang dibicarakan. Namun perlu juga dicatat kesadaran akan pentingnya kecermatan dan kematangan dalam konseptualisasi peristiwa dan gejala kesejarahan makin kelihatan.

F. IMBAUAN DAN SARAN

Dari ceramah umum dan makalah-makalah yang diajukan serta diskusi yang menyusul, maka seyogyanya seminar mengimbau para sejarawan atas beberapa hal :

1. Peneguhan integrasi keilmuan dan social concern merupakan unsur terpenting dari proses profesionalisasi kesejarahan; dan
2. Peningkatan kemampuan teknis kesejarahan dan perluasan wawasan teori dan metodologi adalah landasan bagi kemajuan ilmu sejarah.

Dengan kedua hal ini ilmu sejarah akan lebih memungkinkan untuk memberi sumbangan yang berharga bagi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya seminar menganggap perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam seminar-seminar sejarah yang akan datang patut dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan sumber-sumber sejarah dan metodologi sejarah. Di samping itu sudah tiba waktunya seminar yang akan datang juga memberi tempat bagi dinamika sejarah Asia Tenggara dan wilayah lainnya;
2. Seminar Sejarah Nasional diusulkan agar diselenggarakan setiap empat tahun sekali, diselingi dua kali seminar sejarah lokal;
3. Untuk meningkatkan kemampuan profesional para sejarawan perlu diusahakan penyelenggaraan penataran sejarah secara rutin, khususnya yang berhubungan dengan teori dan metodologi;
4. Guna menjamin komunikasi antara sesama sejarawan atau antara sejarawan dengan masyarakat, perlu diusahakan wadah penerbitan, baik berupa jurnal maupun terbitan lain yang berhubungan dengan kesejarahan; dan
5. Sehubungan dengan kegunaan sejarah sebagai alat pendidikan, perlu diusahakan pertemuan berkala antara para sejarawan profesional dengan para guru sejarah sehingga karya kesejarahan yang dihasilkan para sejarawan dapat digunakan secara tepat oleh guru sejarah.

Yogyakarta, 19 Desember 1985
 Tim Perumus Seminar Sejarah Nasional IV

Ketua : Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian

Sekret : Dr. Ayatrohaedi

Anggota : Drs. A.B. Lopian

Dr. Djoko Suryo

Dr. Edi Sedyawati

Drs. R.Z. Leirissa, MA

Drs. Budhari

Dr. Nurhadi Magetsari

Dr. Taufik Abdullah

Dr. Muchlis

Drs. Anhar Gonggong

Drs. J.R. Chaniago

Dr. Edi S. Ekajati

**SAMBUTAN PEMIMPIN PROYEK INVENTARISASI
DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SEMINAR
SEJARAH NASIONAL IV**

Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Yth. Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Wilayah Daerah, Bapak Drs. Soemidjan

Yth. Para undangan dan peserta Seminar Sejarah Nasional IV

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali setelah Seminar Sejarah Nasional III di Hotel Wisata Jakarta pada tahun 1981. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan undangan Seminar Sejarah Nasional IV.

Untuk ketiga kalinya Kota Yogyakarta mendapat kehormatan menjadi tempat penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yaitu pada tahun 1957, 1970, dan kini menjelang hari bersejarah 19 Desember 1985, yaitu hari-hari awal agresi Belanda ke-2.

Hadirin yang saya hormati, Seminar Sejarah Nasional IV ini diselenggarakan sejalan dengan perintah Garis-Garis Besar

Haluan Negara yang antara lain menyatakan bahwa di bidang pendidikan,

"Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa"

Sedang di bidang kebudayaan GBHN menyatakan,

"Nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, dan mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan".

Untuk melaksanakan perintah wakil-wakil rakyat dalam rangka usaha pembinaan kesadaran sejarah bagi masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang mendukungnya. Demikian pula sejarah yang akan menambah pengetahuan dan memperkuat kesadaran sejarah bagi masyarakat perlu ditunjang dengan berbagai sarana, prasarana, dan usaha. Dalam kaitan usaha inilah Seminar Sejarah Nasional IV diselenggarakan. Seminar Sejarah kali ini diharapkan dapat mewujudkan forum yang akan memacu kegiatan penelitian, pengungkapan dan penulisan sejarah, serta menjadi forum tempat bertukar pikiran, menyampaikan hasil penelitian dan pengalaman di lapangan pengajaran sejarah. Seminar juga diharapkan akan mampu merangsang penyempurnaan dan pengembangan penulisan sejarah yang amat diperlukan dalam rangka memperluas dan memperdalam cakrawala sejarah masyarakat Indonesia.

Dari tahun ke tahun melalui Seminar Sejarah Nasional maupun Seminar Sejarah Lokal terlihat adanya kecenderungan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat. Hal itu harus ditun-

jang dengan penelitian, penulisan dan metode pengajaran yang memadai. Sedangkan dari pihak peneliti dan penulis sejarah, masih terasa perlunya peningkatan melalui berbagai cara dan rangsangan.

Seminar Sejarah ini diharapkan dapat memacu dan meningkatkan mutu penelitian dan penulisan sejarah Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah yang hasilnya amat diperlukan guna menunjang perintah Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. Atas dasar kenyataan itu Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional secara lebih terarah dan berkesinambungan mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan forum komunikasi antara sesama anggota masyarakat sejarawan dan masyarakat luas untuk senantiasa meningkatkan kesadaran sejarah masyarakat dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hadirin yang saya hormati,

Seminar Sejarah Nasional IV kali ini mengambil tema "Sumbangan Penelitian dan Penulisan Sejarah Terhadap Pembangunan Nasional". Untuk mencapai sasaran sesuai dengan tema tersebut, maka rangkaian acara seminar akan membahas materi kesejarahan:

- a. Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia;
- b. Dinamika pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia;
- c. Dinamika perkembangan sosial budaya bangsa Indonesia;
- d. Historiografi;
- e. Studi bandingan; dan
- f. Pendidikan sejarah

Selanjutnya perkenalkan kami melaporkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa peserta Seminar Sejarah Nasional IV terdiri atas:

1. Tokoh-tokoh sejarawan dan masyarakat peminat sejarah;

2. Peserta pembawa makalah dan peninjau dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian swasta dan pemerintah; dan
3. Undangan

Sebanyak $\pm$ 350 orang telah hadir di Hotel Garuda Yogyakarta sejak tanggal 15 Desember 1985 dalam keadaan sehat walafiat. Seminar akan membahas 75 makalah yang mencakup ke-6 bidang permasalahan.

Akhirnya kami mohon pengarahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sekaligus membuka seminar ini secara resmi. Semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa memberikan hikmah dan memberkati usaha kita.
Terimakasih.

Yogyakarta, 16 Desember 1985

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional selaku penanggungjawab Seminar

Drs. M. Soenjata Kartadarmadja
NIP. 130 054 919

**SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PEMBUKAAN SEMINAR
SEJARAH NASIONAL IV OLEH MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, TANGGAL 16 DESEMBER 1985**

Assalamu'alaikum wr. wb,
Yth. Bapak Menteri,
Yth. Para tamu, segenap peserta Seminar,
dan hadirin sekalian,

Kami berbahagia atas penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang ke-4 di kota Yogyakarta. Kita menginsyafi bahwa kegiatan ini sangat penting dan sedang menjadi sorotan tajam dari masyarakat yang nampaknya sangat haus akan data kebenaran sejarah. Tentu saja kita bersyukur atas keinginan masyarakat yang demikian itu. Tepat sekali bila GBHN menyebutkan bahwa murid-murid sekolah dari semua jenis dan jenjang pendidikan, perlu diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bahwa dengan belajar sejarah, bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar.

Sekarang ini P-4 telah sedemikian jauh disebarluaskan. Tentu saja kita semua berkewajiban untuk lebih banyak lagi mendalami nilai-nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa kita itu. Sementara ini generasi muda terus di-

hantui oleh berbagai macam kekuatan yang merusak, antara lain nilai-nilai budaya yang tidak selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia, ataupun perbuatan yang memang bertentangan dengan etika umum.

Oleh karena itulah, pendidikan Moral Pancasila dan pendidikan sejarah sangat dirasakan kemanfaatannya. Namun kita pun memaklumi bahwa menulis sejarah tidak mudah. Justru penulisan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, yang pelaku-pelakunya masih ada, kadang-kadang dijumpai kesulitan tersebut. Namun kami yakin bahwa para ahli senantiasa akan mencatat sejarah itu menurut kebenarannya dan menyajikannya segala yang patut untuk kepentingan pembangunan bangsa.

Semoga Seminar ini berjalan dengan lancar.

Kepada saudara-saudara, kami ucapkan selamat bermusyawarah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Desember 1985

WAKIL GUBERNUR



~~DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA~~

SAKU ALAM VIII.-

Perpus
Jende